

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

VI

**Republik Indonesia :
dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993**

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

VI

Republik Indonesia : dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin

Tim Revisi :
Anhar Gonggong
R.Z. Leirissa
Saleh As'ad Djamhari
Susanto Zuhdi
Zulfikar Ghazali
Sri Sutjiatiningsih

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993

SEJARAH NASIONAL INDONESIA JILID VI

Republik Indonesia : dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin

Tim Revisi : Anhar Gonggong
R.Z. Leirissa
Saleh As'ad Djamhari
Susanto Zuhdi
Zulfikar Ghazali
Sri Sutjiatiningsih

Penyunting : R.Z. Leirissa
Saleh As'ad Djamhari

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Kredit Foto : Reproduksi Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945 -- 1949,
1950 -- 1964.

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Jakarta 1993

Edisi 1993

Dicetak oleh : CV. Tumaritis - Jakarta - Indonesia

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Salah satu Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1991 ialah bahwa perlu diadakan penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia mengingat makin bertambahnya data dan fakta sejarah yang terkumpul. Oleh karena itu revisi terhadap buku Sejarah Nasional Indonesia perlu dilakukan bukan sekedar menanggapi pendapat umum di kalangan masyarakat pembaca, melainkan juga karena tersedianya bahan-bahan penulisan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sejarah.

Sesuai dengan kebijaksanaan di atas, maka Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional telah melaksanakan pekerjaan penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia tersebut.

Perlu dikemukakan bahwa pekerjaan menyempurnakan buku itu jauh lebih sulit dan rumit apabila dibandingkan dengan penulisan baru. Oleh karena itu, untuk memelihara keutuhan wawasan, penyempurnaan dilakukan dengan berpangkal tolak pada naskah lama.

Setelah melalui proses yang cukup memakan waktu maka akhirnya tim penulis penyempurna buku Sejarah Nasional Indonesia berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah buku Sejarah Nasional

Indonesia yang telah mengalami revisi, terutama yang menyangkut sistematika, susunan bab dan sub-bab, serta uraian permasalahan masing-masing bagian, sehingga berbeda dengan edisi edisi sebelumnya.

Walaupun penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia ini dilakukan secara sungguh-sungguh oleh satu tim revisi yang memahami bidangnya, namun bukan berarti bebas dari kesalahan dan mempunyai kelemahan-kelemahan. Tetapi, saya yakin kelemahan, kekeliruan dan bahkan kesalahan itu tidaklah akan mengurangi arti pentingnya buku ini dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai sumber informasi sejarah bangsanya yang *ditulis oleh bangsanya sendiri*, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk penyelesaian buku ini, atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih.

Demikianlah sambutan kami dan selamat membaca !!!

Jakarta, Februari 1993

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Poeger', with a stylized, flowing script.

Poeger

PENGANTAR TERBITAN REVISI TAHUN 1993

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta pada tahun 1970 ditulis Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI). Buku yang terdiri atas enam jilid dan mencakup rentang waktu periode Pra-Sejarah sampai periode Sejarah Kontemporer itu kemudian diterbitkan pada tahun 1975.

Sejak awal penerbitannya, Sejarah Nasional Indonesia telah mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas maupun peminat sejarah. Sebagaimana biasa, ada pihak yang kurang puas dengan isi-uraian buku, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu, sebaliknya tidak sedikit yang menghargainya sebagai awal usaha penulisan sejarah bangsa.

Terlepas dari pendapat yang kurang setuju maupun yang mendukungnya, buku Sejarah Nasional Indonesia telah diterima sebagai Buku (Sejarah) Induk yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan gambaran perjalanan sejarah bangsanya secara lebih menyeluruh dan tidak terpotong-potong. Sejarah Nasional Indonesia nampaknya terbit pada waktunya dan karenanya dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai pengisi kekosongan akan buku sejarah pada waktu itu, bahkan boleh dikatakan hingga kini. Bukti menunjukkan bahwa permintaan akan buku Sejarah Nasional Indonesia tetap tinggi, walaupun telah dicetak ulang beberapa kali.

Namun demikian, sejak semula pihak proyek menyadari akan perlunya persebaran dan penyempurnaan buku tersebut. Boleh dikatakan bahwa setiap tahun proyek senantiasa melakukan evaluasi dan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi fakta sejarah dan meluruskan interpretasi yang menyertainya. Kegiatan itu dilakukan karena memang sejarah sebagai catatan peristiwa di masa lampau itu disusun berdasarkan dokumen tertulis yang selain langka juga tidak mudah didapat. Sementara itu pendekatan Sejarah Lisan yang mengandalkan pada ingatan para pelaku sejarah yang pada umumnya telah lanjut usia dan terlibat dalam berbagai pekerjaan, seringkali informasinya harus dikaji kebenarannya. Oleh karena itulah Proyek IDSN sudah melakukan kegiatan yang mendukung upaya penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia sejak tahun 1980; jadi revisi yang telah dilakukan tahun 1993 ini bukanlah yang pertama kali. Revisi pada tahun 1980 itu kemudian diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 1982/1983. Buku revisi terbitan Proyek IDSN tahun 1982/1983 itu setelah diperbaiki oleh masing-masing tim penulisnya kemudian diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pustaka. Dengan demikian, buku Sejarah Nasional Indonesia edisi revisi tahun 1993 ini sebenarnya merupakan edisi revisi yang ketiga kalinya, tanpa kecuali buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI ini.

Menurut prakata yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto pada buku Sejarah Nasional Indonesia cetakan keempat (1984), sesungguhnya Sejarah Nasional Indonesia jilid VI telah mengalami perubahan-perubahan tertentu yang membedakannya dengan catatan-catatan edisi terdahulu. Perubahan itu meliputi pembagian bab (dari tiga bab menjadi lima bab) dan segi uraian isinya. Tambahan bab baru dalam edisi keempat (1984) ini ialah uraian yang menyangkut beberapa peristiwa penting pada masa Orde Baru sampai masa Pembangunan Nasional.

Sampai saat ini minat berbagai pihak khususnya para pemerhati dan pengguna sejarah, masih tetap besar. Perhatian

mereka nampaknya dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperluas serta memperdalam isi buku ini, sedangkan perhatian khusus ditujukan terhadap uraian isi jilid VI memang sejak awal penerbitannya telah memancing banyak pendapat. Hal ini dapat dimengerti karena isi uraian jilid VI justru menyangkut masa kini atau dikenal sebagai sejarah kontemporer. Sebagian besar pelakunya sempat membaca dan terdorong ingin mengungkapkan catatan mereka. Demikian juga masih banyak orang yang mengalami atau mendengar langsung perjalanan peristiwa yang belum lama terjadi. Pembicaraan sejarah kontemporer selalu mendapat sambutan yang luar biasa.

Tanggapan masyarakat terhadap buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI telah mendapat perhatian khusus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pejabat-pejabat teras Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perhatian itu menunjukkan betapa pentingnya menyempurnakan dan memperluas penulisan sejarah kontemporer. Oleh karena itu Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992 telah menetapkan perlunya penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI disertai pengumpulan bahan untuk penulisan Sejarah Nasional Indonesia jilid VII, sebagai jilid baru (tambahan) khusus mengenai masa Orde Baru.

Keputusan Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1992 menunjuk Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mengambil langkah dan menyusun program guna mewujudkan keputusan Rakernas tersebut.

Untuk maksud melaksanakan keputusan Rakernas 1992, pemimpin Proyek IDSN telah membentuk suatu tim yang bertugas merevisi buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI sebagaimana yang diputuskan oleh Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Tim penyempurna telah sepakat bahwa revisi itu harus dilakukan secara mendasar, agar dapat diwujudkan hasil seperti yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992.

Sehubungan dengan itu telah disusun kembali periodisasi dalam uraian isi mencakup rentang waktu 1945–1965; dengan demikian peristiwa yang akan digarap ialah sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai akhir masa Demokrasi Terpimpin, yaitu sampai pecahnya Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kesepakatan ini didasari oleh pemikiran bahwa dewasa ini telah dilakukan pula revisi jilid V yang mencakup periode penjajahan dalam era pergerakan nasional dan juga penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia yang baru yaitu jilid VII. Dengan adanya langkah yang demikian, bab-bab tertentu yang berisikan peristiwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan yang semula ada pada jilid VI akan dipindahkan ke jilid V yang sedang mengalami revisi, dan peristiwa sesudah Gerakan 30 September masuk ke jilid VII yang sedang ditulis.

Untuk maksud itu, Bab I dari jilid VI yang menyangkut uraian tentang Periode Zaman Jepang dipindahkan ke dalam jilid V, sedangkan Bab V yang menyangkut uraian tentang Orde Baru dipindahkan ke jilid VII yang merupakan buku baru dari Sejarah Nasional Indonesia. Pemindahan bab-bab tersebut dilakukan berdasarkan relevansi isi dari masing-masing jilid Sejarah Nasional Indonesia. Dipindahkannya Bab I Zaman Jepang ke jilid V karena isi jilid V ini akan menjadi "utuh" yaitu yang hanya menyangkut periode Pergerakan Nasional. Sebagaimana kita ketahui, zaman Jepang merupakan bagian akhir dari periode Pergerakan Nasional. Adapun pemindahan Bab V dari jilid VI yang menyangkut uraian tentang Orde Baru ke jilid VII yang sedang ditulis, karena memang penulisan dan penambahan satu jilid baru dari buku-buku Sejarah Nasional Indonesia itu dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah buku yang sepenuhnya mencakup periode Orde Baru, dari awal sampai tahun 1988.

Revisi Sejarah Nasional Indonesia jilid VI tahun 1993 ini juga menyentuh pada hampir semua bab yang lain, antara lain dengan menambah fakta-fakta baru yang dapat diperoleh tim berdasarkan kajian mereka masing-masing, tidak terkecuali penyempurnaan bidang bahasa dan sistematika penyajian.

Apa yang disajikan dalam buku revisi ini merupakan hasil maksimal yang dapat diperoleh sampai saat ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, hasil ini hendaknya dapat menjadi landasan perbaikan, apalagi kalau fakta baru dapat diungkapkan.

Oleh karena itu kami mengundang para pembaca untuk mengungkapkan pemikiran, kelengkapan fakta dan uraian serta koreksi sejujurnya untuk kepentingan kebenaran sejarah bangsa kita dan untuk kepentingan pendidikan sejarah, baik bagi generasi kini maupun untuk generasi hari esok.

Buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI, yang berada di tangan pembaca sebagai edisi revisi, terwujud karena kerja keras dari penulis-penulis terdahulu. Sehubungan dengan itu, tim revisi ingin mengenang jasa besar Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang menjadi editor dan perintis penulisan Sejarah Nasional Indonesia. Tanpa kerja keras dan keteguhan pendiriannya, buku Sejarah Nasional Indonesia tidak pernah akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini.

Jakarta, Februari 1993

Tim Revisi

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	v
PENGANTAR TERBITAN REVISI 1993	vii
DAFTAR ISI.	xiii
 BAB I PERANG KEMERDEKAAN	1
A. MENJELANG PROKLAMASI	1
1. Janji Perdana Menteri Koiso	1
2. Rumusan Dasar Negara, UUD'45	3
3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indo- nesia (PPKI) dan Golongan Pemuda ..	10
4. Peristiwa Rengasdengklok	12
5. Rumusan Teks Proklamasi	17
B. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA	21
1. Proklamasi Kemerdekaan	21
2. Pembentukan Lembaga-lembaga Ne- gara	29

3. Menegakkan Kedaulatan Negara	35
4. Menyusun Kekuatan Bersenjata	44
C. PERTEMPURAN — PERTEMPURAN AWAL	48
1. Kedatangan Pasukan Sekutu dan Belanda	48
2. Pertempuran Surabaya	51
3. Pertempuran Ambarawa	57
4. Pertempuran Medan Area	60
D. STRATEGI DIPLOMASI	63
1. Diplomasi Sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian	63
2. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi	67
E. MENGHADAPI AKSI MILITER BELANDA I	77
1. Aksi Militer I	77
2. Diplomasi yang Gagal	79
F. MENUMPAS PEMBERONTAKAN KOMUNIS	84
1. Biro Perjuangan, TNI Bagian Masyarakat, Sayap Kiri	84
2. Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang (TNI)	89
3. Pemberontakan dan Penumpasan	92
G. MENGHADAPI AKSI MILITER BELANDA II	94
1. Campur tangan PBB.	94
2. Persiapan-persiapan dari Bidang Pertahanan	97
3. Gerilya	100
H. AKHIR PERANG KEMERDEKAAN	103
1. Pendekatan-pendekatan RI dengan Negara-negara Federal	103

2. Pengakuan Kedaulatan	110
BAB II DEMOKRASI LIBERAL	113
A. DARI KONSTITUSIONAL RIS KE UNDANG-UNDANG DASAR SEMEN- TARA	113
1. Republik Indonesia Serikat (RIS)	113
2. Kembali ke Negara Kesatuan	117
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950	119
B. SISTEM LIBERAL DAN PEMILU 1955 .	121
1. Ketidakstabilan Politik	121
2. Pemilihan Umum 1955	129
3. Krisis Sesudah Pemilu 1955	133
C. POLITIK BEBAS AKTIF	135
1. Politik Luar Negeri Indonesia	135
2. Di Antara Dua Blok	137
3. Konferensi Asia-Afrika	140
D. MASALAH-MASALAH ANGKATAN PERANG	145
1. Peristiwa 17 Oktober 1952	145
2. Masalah Pimpinan Angkatan Darat	147
3. Peristiwa Halim	149
E. MENANGGULANGI GANGGUAN KE- AMANAN DALAM NEGERI	151
1. Peristiwa APRA	151
2. Peristiwa Makasar dan Kerusuhan KNIL	152
3. Pemberontakan RMS	156
4. Pemberontakan DI/TII	161
F. PERGOLAKAN DAERAH	166
1. Latar	166
2. PRRI dan Permesta	174

BAB III DEMOKRASI TERPIMPIN	176
A. SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN.....	176
1. Menegakkan Demokrasi Terpimpin ..	176
2. Integrasi Tiga Kekuatan	182
B. PEMBEBASAN IRIAN BARAT	186
1. Bidang Diplomasi	186
2. Rencana di Bidang Militer	189
3. Operasi-operasi Militer Pembebasan Irian Barat	193
C. POLITIK LUAR NEGERI	196
1. Landasan Politik Luar Negeri	196
2. Indonesia dalam Gerakan non-Blok ..	199
3. Konfrontasi Terhadap Federasi Malaysia	202
D. OFENSIF PKI	207
1. Menguasai Buruh dan Tani	207
2. Menguasai Partai Politik dan Organisasi Massa	209
3. Mencampuri Bidang Pertahanan Keamanan	212
 BAB IV KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG EKONOMI	 217
A. MASA PERANG KEMERDEKAAN.....	217
1. Masalah Moneter	217
2. Perdagangan Internasional	220
3. Penataan Sektor-sektor Lain	222
B. MASA DEMOKRASI LIBERAL	228
1. Keadaan Ekonomi	228
2. Upaya Membangun Pengusaha Nasional	231
C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN	232

BAB V KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, SOSIAL DAN BUDAYA.....	238
A. MASA PERANG KEMERDEKAAN.....	238
1. Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia	238
2. Realisasi Sistem Pendidikan	242
3. Perkembangan Perguruan Tinggi	245
4. Sastra dan Budaya	247
B. MASA DEMOKRASI LIBERAL	257
1. Sistem Pendidikan	257
2. Perkembangan Sastra dan Budaya ...	262
3. Perkembangan Seni	270
4. Perkembangan Media Massa	272
C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN	284
1. Sistem Pendidikan	284
2. Perkembangan Sastra dan Budaya ...	287
3. Perkembangan Media Massa	292
DAFTAR PUSTAKA	295
LAMPIRAN	311
FOTO	354

BAB I

PERANG KEMERDEKAAN

A. MENJELANG PROKLAMASI

1. Janji Perdana Menteri Koiso

Pada 7 September 1944 di dalam sidang istimewa ke-85 *Teikoku Ginkai* (Parlemen Jepang) di Tokyo, Perdana Menteri Koiso (pengganti Perdana Menteri Tojo) mengumumkan, bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka "kelak di kemudian hari".¹ Pernyataan tersebut dikeluarkannya, karena semakin terjepitnya angkatan perang Jepang dalam Perang Pasifik. Kepulauan Saipan yang letaknya sangat dekat dengan Kepulauan Jepang, telah jatuh ke tangan Amerika pada bulan Juli 1944. Keadaan ini menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang.²

Situasi dalam negeri Jepang semakin buruk sejak pertengahan tahun 1944. Moral masyarakat mulai merosot. Produksi mesin-mesin perang merosot, yang mengakibatkan berkurangnya persediaan senjata dan amunisi, ditambah dengan terganggunya jalur logistik karena hilangnya sejumlah besar kapal angkut dan kapal perang.

¹*Pandji Poestaka*, 15 September 1944, hal. 561.

²Prof. Dr. I.J. Brugmans, et al., *Nederlandsh-Indie onder Japanse Bezetting : Gegevens en Documenten over de Jaren 1942-1945*, Franeker, 1969, hal. 65.

Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada 17 Juli 1944 dan diangkatnya Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Salah satu langkah yang diambil Koiso dalam mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya ialah dengan cara mengeluarkan pernyataan "Janji Kemerdekaan terhadap Indonesia di Kelak Kemudian Hari". Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bahwa serbuan pasukan-pasukan Sekutu akan disambut oleh penduduk tidak sebagai pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu ke "negara merdeka".³

Dengan jatuhnya Saipan pada pertengahan tahun 1944 itu, dan dipukul mundurnya angkatan perang Jepang oleh angkatan perang Sekutu dari Papua (Nugini), Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall, seluruh garis pertahanan di Pasifik mulai bobol yang berarti kekalahan Jepang sudah terbayang. Kemudian kedudukan di kota-kota Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya mengalami serangan udara Sekutu, bahkan tentara Sekutu telah pula mendarat di kota-kota minyak seperti Tarakan dan Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis itu, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada pada 1 Maret 1945 mengumumkan tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritu Junbi Cosakai*) disingkat Badan Penyelidik. Tindakan ini merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso tentang "Kemerdekaan Indonesia di Kelak Kemudian Hari". Maksud dan tujuannya ialah "untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia Merdeka". Susunan organisasi ini dirancang terdiri atas "Badan Perundingan" (Persidangan) dan kantor Tata Usaha (sekretariat). Badan Perundingan terdiri atas seorang *kaico* (ketua), dua orang *fuku kaico* (ketua muda), dan 60 orang *iin* (anggota).

³*Ibid.*, hal. 68.

Dari jumlah 60 anggota itu termasuk empat orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda, di samping terdapat pula tujuh orang anggota berbangsa Jepang. Mereka berstatus "pengurus istimewa" yang hadir pada setiap persidangan, tetapi tidak mempunyai hak suara.⁴ Pengangkatan para anggota badan ini diumumkan pada 29 April 1945, dan yang diangkat menjadi *kaico* adalah dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat. *Fuku kaico* pertama dijabat oleh seorang Jepang yakni *shucokan* Cirebon bernama Ichibangase dan RP. Suroso *fuku shucokan* Magelang diangkat sebagai *fuku kaico* II, serta kepala sekretariat dijabat oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo.⁵

2. Rumusan Dasar Negara, UUD 1945

Pada 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian dan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan bertempat di gedung *Cuo Sangi In*, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung BP7). Jenderal Itagaki (panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang bermarkas di Singapura yang membawahi Tentara Keduapuluhlima dan Tentara Keenambelas dan Letnan Jenderal Nagano (panglima Tentara Keenambelas di Jawa yang baru) menghadiri upacara pertama ini. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera *Hinomaru* oleh Mr. AG. Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohito Masuda.

Dalam sidang pertama *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik dimulai dengan membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar, yang dimulai dengan persoalan "dasar" bagi Negara Indonesia Merdeka. Dalam kata pembukaannya, Ketua dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar Negara Indonesia Merdeka yang akan

⁴Pengumuman *Saiko Shikikan* pada hari perayaan Jawa baru yang ketiga, Ken Po, No. 62, (10 Maret 1945).

⁵Ken Po, No. 67, 25 Mei 1945; dan Asia Raya, 5 Juni 1945.

dibentuk itu. Ternyata ada tiga anggota yang memenuhi permintaan tersebut, yakni yang secara khusus membicarakan dasar negara. Mereka itu secara berturut-turut adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Yang dianggap pertama kali mengetengahkan rumusan dasar Negara Indonesia Merdeka ialah Mr. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945, yakni hari pertama dari persidangan pertama Badan Penyelidik, Muhammad Yamin memulai pidatonya antara lain dengan kata-kata sebagai berikut :

” kewadjiban jang terpikul di atas kepala dan kedua bahu kita, ialah suatu kewadjiban jang sangat teristimewa. Kewadjiban untuk ikut menjelidiki bahan-bahan jang akan mendjadi dasar dan susunan negara jang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan ”⁶

Jadi jelas bahwa pidatonya itu semata-mata mengenai dasar negara dan yang bersangkutan dengan dasar negara. Di dalam pidatonya, selanjutnya Muhammad Yamin mengemukakan lima ”Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut :

- (1) Peri Kebangsaan
- (2) Peri Kemanusiaan
- (3) Peri Ke-Tuhanan
- (4) Peri Kerakyatan
- (5) Kesejahteraan Rakyat ⁷

Dua hari kemudian, pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo memulai pidatonya dengan kalimat, ”Paduka Tuan Ketua, hadirin jang terhormat! Soal jang kita bitjarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnja Negara Indo-

⁶ Kutipan tersebut berdasarkan naskah yang pernah ditulis oleh Muhammad Yamin ketika itu, kemudian diselipkan dalam bukunya yang berjudul *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 1959, hal. 88; Cetakan pertama, disertai kata pengantar oleh Presiden Soekarno yang ditulis tangan.

⁷ Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal 83-107; Lihat pula Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*, Cetakan ke-2, Jakarta, 1976, hal. 16.

nesia Merdeka”⁸, Sedangkan kata-kata penutupnya antara lain, “. Sekian sadja Paduka Tuan Ketua, tentang dasar-dasar jang hendaknja mendirikan Indonesia Merdeka”.⁹ Dengan demikian kiranya juga jelas, bahwa Prof. Soepomo pun memusatkan pembicaraannya kepada dasar negara Indonesia Merdeka. Dasar-dasar yang diajukannya untuk Indonesia Merdeka adalah ”persatuan”, ”kekeluargaan”, ”keseimbangan lahir batin”, ”musyawarah”, dan ”keadilan rakyat”.¹⁰

Keesokan harinya, pada 1 Juni 1945, berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itu Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan nama ”Lahirnya Pancasila”. Keistimewaan pidatonya kecuali berisi pandangan atau usul mengenai dasar Negara Indonesia Merdeka juga berisi usul mengenai nama bagi dasar negara, yakni Pancasila, Trisila atau Ekasila. ”Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pantja Sila”¹¹ Setelah mengetengahkan kemungkinan diperasnya Pancasila menjadi hanya tiga azas, Soekarno mengatakan, ”Pantja Sila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih: Tri Sila, Eka atau Pantja Sila”¹² Jadi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila (di samping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih).

Pada kesempatan itu Ir. Soekarno mengemukakan rumusan lima dasar Negara Indonesia Merdeka sebagai berikut :

⁸Nugroho Notokusanto, ”Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, *op. cit.*, hal. 10; Lihat pula Prof. Dr. Mr. H. Muhammad Yamin, *ibid.*, hal. 120.

⁹Nugroho Notokusanto, *ibid.*, Lihat pula Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *ibid.*

¹⁰Nugroho Notokusanto, *ibid.*, hal. 17; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *ibid.*, hal. 109-121.

¹¹Nugroho Notokusanto, *ibid.*, hal. 10; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *ibid.*, hal. 78.

¹²Nugroho Notokusanto, ”Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, *op. cit.*, hal. 10; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 79.

- (1) Bangsa Indonesia
- (2) Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan
- (3) Mufakat atau Demokrasi
- (4) Kesejahteraan Sosial
- (5) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹³

Dengan berakhirnya rapat 1 Juni itu selesailah pula seluruh persidangan pertama *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Selama itu tidak menghasilkan sesuatu kesimpulan atau rumusan. Selama persidangan berlangsung, anggota hanya mendengarkan pandangan umum dari pembicara-pembicara yang mengemukakan usul-usul rumusan dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Setelah persidangan pertama itu selesai, diadakanlah "reses" selama satu bulan lebih.

Sebelum memasuki reses itu, Badan Penyelidik membentuk suatu Panitia Kecil di bawah pimpinan Ir. Soekarno dengan anggotanya Drs. Moh. Hatta, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Oto Iskandar di Nata, Mr. Muhammad Yamin dan Mr. A.A. Maramis. Mereka bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota yang oleh ketua telah diminta untuk diserahkan melalui sekretariat. Pada rapat pertama persidangan kedua Badan Penyelidik 10 Juli 1945, Panitia Kecil itu dimintai laporan oleh Ketua Radjiman yang telah pula dipenuhi oleh ketuanya, Ir. Soekarno.¹⁴

Ir. Soekarno melaporkan bahwa Panitia Kecil itu pada 22 Juni mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik, yang sebagian di antaranya sedang menghadiri sidang *Cuo Sangi In*. Pertemuan itu oleh Ir. Soekarno ditegaskan merupakan "rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan

¹³Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, hal. 17.

¹⁴Nugroho Notosusanto, "Mengamankan Pancasila Dasar Negara", *op. cit.*, hal. 11; Lihat pula Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *ibid.*, hal. 147

anggota-anggota *Dokuritsu Junbi Cosakai*". Hasil dari pertemuan itu ialah telah ditampungnya suara-suara dan usul-usul lisan dari pihak anggota Badan Penyelidik.¹⁵

Dengan hasil rapat pertemuan-pertemuan itu terbentuklah sebuah panitia kecil lain yang anggotanya berjumlah sembilan orang. Kesembilan anggota itu berkumpul untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota dan kemudian terkenal dengan sebutan Panitia Sembilan yang terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA. Maramis, Abdulkahar Muzakkir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso. Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka.

Oleh Mr. Muhammad Yamin rumusan hasil Panitia Sembilan itu kemudian diberi nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta. Rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- (2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- (5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁶

Rumusan terakhir naskah dasar negara dilakukan pada persidangan kedua yang dimulai 10 Juli 1945. Pada kesempatan itu dibahas rencana Undang-Undang Dasar, termasuk soal pembukaan atau preambunya oleh sebuah Panitia Perancang

¹⁵Nugroho Notokusanto, "Mengamankan Pancasila Dasar Negara", *op. cit.*, hal 11; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 148.

¹⁶Mr. Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djakarta-Amsterdam, 1954, hal. 12; Nugroho Notokusanto, *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, hal. 14.

Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota-anggota lainnya AA. Maramis, Oto Iskandar di Nata, Poeroebojo, Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasjim, Parada Harahap, Mr. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr. Sartono, Mr. Wongsonegoro, Wurjaningrat, Mr. RP. Singgih, Tan Eng Hoat, Prof. Dr. PA. Husein Djajadiningrat dan dr. Sukiman.¹⁷

Dalam rapatnya 11 Juli, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi *preamble* yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia tersebut kemudian membentuk sebuah "Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar" yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo dengan anggota-anggota lain Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA. Maramis, Mr. RP. Singgih, H. Agus Salim dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah "Panitia penghalus bahasa" yang terdiri atas Husein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Soepomo. Panitia itu bertugas pula menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah dibahas itu.¹⁸

Persidangan kedua *Dokuritsu Junbi Cosakai* dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945 untuk menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno selaku ketua melaporkan tiga hasil panitia, yakni :

- (1) Pernyataan Indonesia Merdeka
- (2) Pembukaan Undang-Undang Dasar
- (3) Undang-Undang Dasarnya sendiri (batang tubuhnya).

Adapun konsep pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang sekali, terutama di antara alinea pertama

¹⁷Nugroho Notokusanto, "Mengamankan Pancasila Dasar Negara", *op. cit.*, hal. 12; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 250-251.

¹⁸Nugroho Notokusanto, *ibid*, hal. 12-13; Prof. Mr. Muhammad Yamin, *ibid*, hal. 261.

dan alinea kedua, sedangkan konsep pembukaan Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat (dan terakhir) (Piagam) Jakarta.¹⁹ Kedua konsep itu diterima oleh sidang setelah berlangsung diskusi kurang lebih satu jam lamanya.²⁰

Pembukaan beserta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),²¹ yakni suatu badan yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Badan ini sebagai ganti *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Dalam perkembangan kemudian yang relatif singkat, anggota-anggotanya ditambah sendiri oleh pihak Indonesia terlepas dari pengendalian Jepang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan adalah konsep yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang kemudian diambilalih oleh Panitia Kecil.²² Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Drs. Moh. Hatta, setelah menerima pesan dari tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia Bagian Timur, sila pertama dasar negara yang tercantum di dalam Pembukaan itu, yang semula berbunyi, "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan itu diajukannya setelah berkonsultasi dengan empat pemuka Islam yakni Ki Bagus Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan.²³ Rumusan yang otentik itu berbunyi sebagai berikut :

¹⁹Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hal. 13; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *ibid.*, hal. 273-276.

²⁰Nugroho Notosusanto, *ibid.*, Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *ibid.*, hal. 284. ²¹Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, hal. 19.

²¹Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, hal. 19.

²²Nugroho Notosusanto, "Mengamankan Pancasila Dasar Negara", *op. cit.*, hal. 14.

²³Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Djakarta, 1970, hal. 59.

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa orang telah ikut serta di dalam usaha rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan individual berasal dari Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno, sedangkan rumusan bersama dilakukan oleh para anggota Panitia Sembilan.

3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Golongan Pemuda

Memuncaknya perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia didorong oleh aktivitas dan golongan-golongan dalam masyarakat. Golongan tua maupun golongan muda sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan, perbedaan terletak pada cara melaksanakan keinginan itu. Golongan tua sesuai pandangan politiknya berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah. Mereka menggantungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Junbi Inkai*).²⁴

Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi mereka diwajibkan memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut :

Pertama, untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia harus ikut dalam perang, karena itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk

²⁴ *Ken Po*, No. 70 (10 Juli 1949), hal. 19.

memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.²⁵

Kedua, Negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, sesuai dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat *Hakko—Ichiu*.

Dengan dibentuknya PPKI pada 7 Agustus 1945, pada saat yang sama *Dokuritsu Junbi Cosakai* dianggap bubar. Kepada para anggota PPKI, *Gunseikan* Mayor Jenderal Yamamoto mengucapkan terimakasihnya dan menegaskan kepada mereka bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak dipilih oleh pejabat dilingkungan Tentara Keenambelas, tetapi oleh Jenderal Besar Terauci sendiri yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara.

Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang dipilih dan tidak hanya wakil-wakil dari Jawa yang ada di bawah pemerintahan Tentara Keenambelas, tetapi juga dari berbagai pulau. Komposisi keanggotaan badan tersebut adalah 12 dari Jawa, tiga dari Sumatera, dua dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil (Nusatenggara), seorang dari Maluku, dan seorang dari golongan Cina.²⁶ Ketua ialah Ir. Soekarno, dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo. Atas inisiatif Ir. Soekarno sebagai ketua, anggota PPKI tanpa seizin Jepang²⁷ ditambah enam orang lagi.

Setelah pembentukan badan itu Jenderal Besar Terauci memanggil tiga tokoh Nasional, yakni Ir. Soekarno, Drs. Moh.

²⁵ Pengumuman *Gunseikan* Mayor Jenderal Moiciro Yamamoto, lihat *Ken Po*, No. 72 (10 Agustus 1945), hal. 12.

²⁶ Anggota PPKI dari Jawa : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dr. Radjiman Wediodiningrat, Oto Iskandar di Nata, Wachid Hsjim, Ki Bagus Hadikusumo, Surjo-hadimidjojo, Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso, Prof. Mr. Dr. Soepomo, Abdul Kadir, Purubojo; dari *Sumatera* : dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan, Mr. Abdul Abas; dari *Sulawesi* : Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Andi Pangeran; dari *Kalimantan* : A.A. Hamidhan, dari *Sunda Kecil* (Nusatenggara) : Mr. I. Gusti Ketut Pudja; dari *Maluku* : Mr. J. Latuharhary; golongan *Cina* : Drs. Yap Tjwan Bing, lihat Prof. Mr. Hadji Muid. Yamin, *op. cit.*, hal. 399.

²⁷ Anggota-anggota itu adalah : Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Ahmad Subardjo.

Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Pada 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju ke markas besar Terauci di Dalat (Vietnam). Dalam pertemuan di Dalat, Jenderal Besar Terauci menyampaikan kepada ketiga tokoh tersebut bahwa pemerintah kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia melainkan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat.²⁸

Dalam perjalanan mereka kembali menuju Jakarta, pada 14 Agustus 1945, Kota Hiroshima mengalami pemboman oleh Sekutu yang disusul dengan hancurnya Nagasaki. Setibanya di Jakarta, 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta didatangi Sutan Syahrir dan mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Namun demikian Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masih ingin mendapat kepastian tentang kebenaran berita kapitulasi Jepang dari pihak resmi dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.²⁹

4. Peristiwa Rengasdengklok

Pada 16 Mei 1945 diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa di Bandung, yang penyelenggaraannya disponsori oleh Angkatan Moeda Indonesia. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan 1944, kemudian berkembang menjadi suatu pergerakan pemuda yang anti Jepang.³⁰ Kongres ini dihadiri lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh

²⁸ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 18-19; lihat juga Brugmans, *op. cit.*, hal. 594-595.

²⁹ Kishi, Nishijima, et. al., *op. cit.*, hal. 457; Muhammad Hatta, *op. cit.*, hal. 26-27.

³⁰ Sidik, Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Cetakan III*, 1964, hal. 76-77.

Jawa, antara lain Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, serta sejumlah mahasiswa *Ika Daigaku* Jakarta. Dalam Kongres Pemuda tersebut para pemimpin Angkatan Muda Indonesia menganjurkan agar para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan yang bukan hadiah Jepang. Pertemuan berlangsung dalam suasana militan dan nasionalistis. Ketika itu hanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa lagu *Kimigayo* dan hanya dikibarkan bendera Merah Putih, tanpa didampingi oleh bendera *Hinomaru*.³¹

Setelah kongres berlangsung selama tiga hari, berhasil mengeluarkan dua resolusi yaitu: pertama, semua golongan Indonesia terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional saja. Kedua, dipercepatnya pelaksanaan resolusi Kemerdekaan Indonesia,³² tetapi, yang diberitakan pers resmi dan pers Jepang, resolusi itu diputarbalikkan dengan mengatakan bahwa kongres itu menyatakan dukungan sepenuhnya dan kerjasama erat dengan Jepang dalam usaha mencapai kemenangan akhir.

Pemutarbalikan isi resolusi Kongres Pemuda oleh pers resmi Jepang ini menimbulkan amarah beberapa tokoh pemuda yang hadir, terutama utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Sukarni, Harsono Tjokroaminoto, dan Chairul Saleh. Mereka bertekad untuk mengambil bagian dalam gerakan Angkatan Moeda Indonesia dan bermaksud untuk menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal.

Dalam perkembangan selanjutnya pada 3 Juni 1945 mereka mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta yang dihadiri sekitar 100 pemuda dengan membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh BM. Diah dengan para anggotanya, yakni Sukarni, Sudiro, Sjarif Thajeb, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Chairul Saleh, F. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi. Pertemuan rahasia itu belum berhasil merumuskan langkah-langkah untuk mereali-

³¹ Wawancara dengan Djamal Ali di Jakarta, 14 April 1972.

³² *Asia Raya*, 24 Mei 1945.

sasikan tekad mereka, karena itu mereka memandang perlu untuk mengadakan pertemuan rahasia lagi pada 15 Juni 1945. Pertemuan itu berhasil membentuk organisasi Gerakan Angkatan Baroe Indonesia.³³

Tujuan gerakan tersebut, pertama, mencapai persatuan di antara seluruh golongan masyarakat Indonesia; kedua, menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat; dan ketiga, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan keempat, mempersatukan Indonesia bahu-membahu dengan Jepang tetapi jika perlu gerakan itu bermaksud untuk "mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri".³⁴

Dalam menghadapi aktivitas kelompok pemuda radikal yang telah membentuk organisasi Angkatan Baru Indonesia, *Saiko Sikikan* yang baru, Letjen J. Nagano, meminta kepada *Cuo Sangi In* untuk bersidang dan mencari alternatif pemecahannya. Permintaan *saiko sikikan* itu dipenuhi dan *Cuo Sangi In* mengadakan sidangnya yang ke-8 pada 2 Juli 1945. Di dalam sidang itu *saiko sikikan* menyampaikan kemungkinan pembentukan organisasi baru bertujuan untuk lebih mengobarkan semangat dan perang. Pernyataannya tentang kemungkinan pembentukan organisasi baru itu mendapat tanggapan dari *Cuo Sangi in*, dengan menyarankan pembentukan Gerakan Rakyat Baru yang dimaksudkan untuk menampung kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat, saran itu segera direalisasikan. Susunan pengurus gerakan itu terdiri atas 80 orang termasuk kelompok pemuda radikal seperti Chairul Saleh, Sukarni, BM. Diah, Asmara Hadi, Harsono Tjokroaminoto, Sudiro, Supeno, Adam Malik, S.K. Trimurti, Sutomo, dan Pandu Kartawiguna. Anggotanya terdiri atas penduduk asli Indonesia dan bangsa Jepang, golongan Cina, golongan Arab, dan peranakan Eropa.

³³ Sudiro, *Pengalaman saja di sekitar Proklamasi 17 Agustus 45*, Jakarta, hal. 11-16.

³⁴ *Ibid.*, hal. 9-15.

Pengangkatan wakil-wakil golongan pemuda radikal di dalamnya dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mereka. *Somubu* Mayor Jenderal Nishimura menegaskan bahwa setiap pemuda yang tergabung di dalamnya harus tunduk sepenuhnya kepada *Gunseikanbu* (pemerintah militer Jepang) dan mereka harus pula bekerja di bawah pengawasan pejabat-pejabat Pemerintah Jepang. Gerakan Rakjat Baroe diresmikan pada 28 Juli 1945. Dua organisasi besar, yaitu *Jawa Hokokai* dan *Masjumi* dilebur menjadi satu, tetapi tidak seorang pun tokoh kelompok pemuda radikal yang bersedia menduduki kursi yang telah disediakan untuk mereka; dengan demikian semakin tajam pergeseran paham antara golongan tua dan golongan muda dalam cara melaksanakan pembentukan negara Indonesia Merdeka.³⁵

Adanya perbedaan paham itu telah mendorong para pemimpin pemuda untuk membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota. Niat itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan oleh para pemuda pada pukul 00.30 waktu Jawa Zaman Jepang (atau pukul 24.00 WIB) menjelang 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi Cikini No. 71, Jakarta.³⁶ Rapat ini dihadiri oleh pimpinan kelompok pemuda yaitu Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan *Shodanco* Singgih dari *Daidan Peta Jakarta Syu*. Bersama Chairul Saleh mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat itu, antara lain "menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang". Guna menghindari kecurigaan dan tindakan Jepang, *Shodanco* Singgih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

³⁵ *Ken Po*, No. 70 (10 Juli 1949) hal. 19. 36.

³⁶ Merupakan asrama pemuda yang juga menjadi markas Baperpi (Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia); lihat Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*, Djakarta, 1970, hal. 38; berdasarkan buku catatan Djohar Nur Tentang Proklamasi 17-8-1945 yang dibuat di Jakarta pada tahun 1952 dan hasil wawancara dengan yang bersangkutan pada tanggal 16 Juli 1975 di Jakarta.

Pelaksanaannya berjalan lancar setelah mereka memperoleh bantuan berupa perlengkapan tentara (Peta) dari *Cudanco* Latief Hendraningrat yang pada saat itu mewakili *Daidanco* Kasman Singodimedjo yang sedang bertugas ke Bandung.³⁷ Pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 04.00 WIB) Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dijemput dari rumah mereka oleh sekelompok pemuda dibawa ke luar kota menuju ke Rengasdengklok, sebuah kota kewedanaan di Kabupaten Karawang.

Rengasdengklok dipilih menjadi tempat mengamankan Soekarno-Hatta karena pertimbangan keamanan. Di sini ada satu *cudan* (kompi) tentara Peta *Daidan Jakarta*. Rengasdengklok letaknya terpencil yakni sekitar 15 kilometer ke arah utara dari pertigaan Kedunggede. Di Kedunggede terdapat pos penjualan tentara PETA, dengan demikian setiap ada gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok dapat diketahui.³⁸

Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Para pemuda bermaksud menekan mereka supaya segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan tanpa ada kaitan dengan Jepang. Karena kedua pemimpin bangsa itu mempunyai wibawa yang cukup besar, maka para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok tidak berani memaksakan kehendaknya.³⁹

Sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Hal ini didukung oleh kesediaan Laksamana Muda Tadashi Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan dan menjamin keselamatan mereka. Berdasarkan kesepakatan

³⁷ Wawancara Pusat Sejarah ABRI dengan Drs. Singgih, di Jakarta, pada 7 Juli 1975, transkripsi.

³⁸ Wawancara simultan Pusat Sejarah ABRI, Rengasdengklok, 8 Agustus 1974, transkripsi.

³⁹ Mr. Ahmad Subardjo, *Lahirnya Republik Indonesia*, Djakarta, 1972, hal. 94; Wawancara Rengasdengklok, idem.

itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda pada hari itu juga mengantarkan Mr. Ahmad Subardjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro (mbah) ke Rengasdengklok untuk menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Rombongan tiba pada pukul 18.00 waktu Jawa Zaman Jepang (pukul 17.30 WIB). Di Rengasdengklok Ahmad Subardjo berhasil meyakinkan para pemuda dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan tersebut komandan kompi Peta setempat *Cudanco* Subeno bersedia melepaskan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.⁴⁰

5. Rumusan Teks Proklamasi

Sesampainya di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa Zaman Jepang (pukul 23.30 WIB) rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 (sekarang Museum Proklamasi instansi di bawah Depdikbud) setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dahulu.

Dari rumah Maeda, Soekarno dan Hatta pergi menemui *Somubuco* Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajagi sikapnya tentang Proklamasi Kemerdekaan. Mereka ditemani Laksamana Tadashi Maeda bersama *Shigetada* Nishijima dan *Tomigoro* Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah.⁴¹

Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno—Hatta di satu pihak dengan Nishimura di lain pihak. Soekarno—Hatta menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauci telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak Nishimura menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara Keenambelas di Jawa, yakni dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah *status quo*, karena sejak tengah hari sebelumnya

⁴⁰ Nugroho Notosusanto, *The Japanese Occupation and Indonesia Independence*, Jakarta, 1945, hal. 25.

⁴¹ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, hal. 53.

tentara Jepang semata-mata harus tunduk kepada perintah Sekutu.

Berdasarkan garis kebijaksanaan itu Nishimura melarang Soekarno—Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan,⁴² karena itu Soekarno—Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya mengharap pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan Proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri.⁴³

Setelah pertemuan itu Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda yang dianggap aman dari tindakan campur-tangan Angkatan Darat. Sesuai dengan kode etik yang berlaku, kedudukan Maeda sebagai kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkannya berhubungan dengan Mr. Ahmad Subardjo dan sejumlah pemuda Indonesia yang bekerja di kantornya. Berdasarkan hubungan baik itu rumah Maeda sering dijadikan tempat pertemuan antara pelbagai golongan Pergerakan Nasional baik golongan tua maupun golongan pemuda.⁴⁴

Dalam perkembangan selanjutnya berdatanganlah anggota-anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda ke kediaman Maeda. Selanjutnya Soekarno—Hatta bersama Subardjo menuju ruang makan untuk merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah meninggalkan pertemuan menuju ke lantai dua. Miyoshi yang semula mengantarkan Soekarno—Hatta ke kediaman Maeda masih tetap berada di situ tatkala naskah Proklamasi dirumuskan; demikian pula sejumlah tokoh pemuda antara lain Sukarni, (mbah) Soediro, BM. Diah, Wikana, Chairul Saleh dan Sajuti Melik. Tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun muda menunggu di serambi muka. Ir. Soekarno menulis konsep Proklamasi pada se-

⁴² *Ibid.*, hal. 53-54.

⁴³ Moh. Hatta. *op. cit.*, hal. 55.

⁴⁴ Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*, hal. 10-11.

carik kertas, Drs. Moh. Hatta bersama Mr. Ahmad Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan.⁴⁵ Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga diperoleh rumusan tulisan tangan Ir. Soekarno yang berbunyi sebagai berikut :

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-2 jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8- 05

Wakil-2 bangsa Indonesia,⁴⁶

Kalimat pertama merupakan saran Mr. Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan *Dokuritsu Junbi Cosakai*, sedangkan kalimat terakhir sumbangan pikiran Drs. Moh. Hatta. Ia menganggap kalimat pertama hanya merupakan pernyataan dari kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut pendapatnya, perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Pendapat itu tertera dalam rumusan kalimat terakhir dari naskah Proklamasi tersebut.⁴⁷

Setelah kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan naskah Proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang telah berkumpul. Saat itu menunjukkan pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 04.00 WIB).⁴⁸ Ir. Soekarno mulai membuka pertemuan menjelang subuh dengan membacakan rumusan naskah Proklamasi yang masih merupakan konsep. Kepada mereka yang hadir Ir. Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indone-

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 11.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 11-12.

⁴⁷ Moh. Hatta, *op. cit.*, hal. 57-58; Mr. A. Subardjo, *op. cit.*, hal. 109.

⁴⁸ Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 11.

sia.⁴⁹ Saran itu diperkuat oleh Drs. Moh. Hatta dengan mengambil contoh kepada naskah *Declaration of Independence* Amerika Serikat.⁵⁰ Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju ikutsertanya tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya sebagai "budak-budak Jepang"⁵¹ turut menandatangani naskah Proklamasi.⁵² Namun demikian kemudian salah seorang tokoh pemuda, Sukarni, mengusulkan agar yang menandatangani naskah Proklamasi cukup dua orang saja, yaitu Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.⁵³ Dengan disetujuinya usul Sukarni itu oleh hadirin, Ir. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan konsep tulisan tangan Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui sebelumnya.⁵⁴

Sayuti Melik segera mengetik naskah rumusan Proklamasi itu. Ada tiga perubahan yang terdapat dalam naskah tersebut, yakni kata-kata "tempoh" diganti menjadi "tempo" "wakil-wakil bangsa Indonesia" pada bagian akhir diganti dengan "Atas nama Bangsa Indonesia"; demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal, yaitu "Djakarta, 17-8-05" menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05". Dengan perubahan tersebut, naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di rumah itu juga.⁵⁵

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 11-12.

⁵⁰ Moh. Hatta, *op. cit.*, hal. 59.

⁵¹ Brog Anderson, *Revolusi Pemuda* terjemahan oleh, Jakarta, Sinar Harapan,

⁵² Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hal. 11-12.

⁵³ *Ibid.*, hal. 12-13; Moh. Hatta, *op. cit.*, hal. 60.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hal. 12-13.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l. diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen'05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

(tandatangan Soekarno)

(tandatangan Hatta)

Demikianlah pertemuan yang menghasilkan naskah Proklamasi Kemerdekaan itu berlangsung pada 17 Agustus 1945 dini hari. Timbul persoalan tentang bagaimana caranya naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan bahwa Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) di sudut tenggara lapangan Monumen Nasional) telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah Proklamasi. Ir. Soekarno menganggap Lapangan Ikada adalah salah satu lapangan umum yang bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang, karena itu ia mengusulkan supaya upacara Proklamasi dilakukan di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur No. 56.

Usul itu disetujui dan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung di tempat itu pada Jum'at 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 10.00 WIB) di tengah-tengah bulan Puasa.

B. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

1. Proklamasi Kemerdekaan

Pada pukul 05.00 (waktu Jawa pada Zaman Jepang), fajar pagi 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia ke luar dari kediaman Laksamana Maeda. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan naskah Proklamasi Kemer-

dekaan Indonesia. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 (sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan), pada pukul 10.30 (waktu Jawa pada zaman Jepang) atau pukul 10.00 WIB sekarang. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama BM. Diah, agar memperbanyak naskah Proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.⁵⁶

Para pemuda tidak langsung menuju ke rumah masing-masing, tetapi mereka membagi tugas dalam kelompok-kelompok untuk menyelenggarakan pembacaan naskah Proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan segera diumumkan. Salah satu kelompok adalah para pemuda yang bermarkas di Jalan Bogor Lama (sekarang jalan Dr. Sahardjo, SH) yang dipimpin Sukarni. Pagi itu mereka juga melakukan rapat rahasia di Kepu (Kemayoran), kemudian pindah ke *Defensielin van den Bosch* (sekarang Jalan Bungur Besar) untuk mengatur pelaksanaan dan cara penyiaran berita Proklamasi. Semua alat komunikasi yang ada akan dipergunakan untuk maksud itu. Selebaran, pengeras suara, dan mobil-mobil akan dikerahkan ke segenap penjuru kota.⁵⁷ Diusahakan juga pengerahan massa untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi di Pegangsaan Timur No. 56.

Ribuan selebaran berhasil dicetak dengan mesin stensil pada pagi itu juga dan segera disebarkan ke pelbagai penjuru kota. Di dalam situasi yang menegangkan itu para pemuda memasang selebaran ditempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Berita itu juga secara beranting disampaikan ke luar Kota Jakarta.

⁵⁶ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Djakarta, 1969, hal. 53; Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, *Kesadaran Nasional: Otobiografi*, Jakarta, 1978, hal. 339-340.

⁵⁷ Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, Djakarta, 1962, hal. 59.

Tanpa diduga oleh siapa pun pada pagi hari itu, 17 Agustus 1945, para pemuda datang berbondong-bondong menuju ke Lapangan Ikada, namun pihak Jepang telah mengetahui kegiatan para pemuda itu, karena itu mereka berusaha menghalang-halangnya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan-pasukan Jepang yang bersenjata lengkap.⁵⁸ Karena informasi dari kawan-kawannya yang disampaikan secara beranting dari mulut ke mulut bahwa Proklamasi akan diucapkan di tempat itu. Ternyata Proklamasi tidak jadi diadakan di Lapangan Ikada, melainkan di Pegangsaan Timur No. 56.⁵⁹ Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro juga tiba di Lapangan Ikada dan melihat pasukan-pasukan Jepang menjaga lapangan itu. Ia segera kembali dan melaporkan hal itu kepada dr. Muwardi, kepala keamanan Ir. Soekarno pada waktu itu. Sudiro mendapat penjelasan bahwa Proklamasi tidak diadakan di Ikada melainkan di Pegangsaan Timur No. 56. Sudiro segera kembali ke Ikada untuk memberitahukan hal itu kepada anak buahnya.

Pada pagi hari itu juga rumah Ir. Soekarno dipadati oleh sejumlah massa pemuda yang berbaris secara teratur dan tertib. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan naskah Proklamasi, dr. Muwardi meminta kepada *Cudanco* Latief Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Ir. Soekarno. Permintaan ini dipenuhi oleh *Cudanco* Latief, dan beberapa orang prajurit peta berjaga-jaga di sudut gedung-gedung Jalan Pegangsaan di sekitar jalan kereta api yang membujur ke belakang rumah itu.⁶⁰ Di samping itu di ksatrian mereka di Jaga Monyet telah disiagakan pasukan yang dipimpin *Syodanco* Arifin Abdurrahman.

⁵⁸ Sudiro, *Pengalaman saja di sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta, 1974, hal. 20.

⁵⁹ Mengenai tempat pembacaan Proklamasi ini ada perbedaan pendapat. Ia menyatakan kepada Sukarni bahwa ia telah memberitahukan para pemuda untuk berkumpul di Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Sukarni sesungguhnya menginginkan di Lapangan Ikada. Bung Karno berpendapat bahwa pembacaan naskah Proklamasi di Ikada akan mengandung risiko yang besar ditinjau dari sudut keamanan dan politik, Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, *op. cit.*, hal. 340.

⁶⁰ Keterangan S.K. Trimurti, *Merdeka*, 17 Agustus 1972; wawancara dengan Prof. DR. Arifin Abdurrahman, Jakarta, 7 Mei 1975; Sudiro, *op. cit.*, hal. 22.

Persiapan di Pegangsaan Timur No. 56 sendiri cukup sibuk. Walikota Suwiryo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, yaitu mikrofon dan beberapa pengeras suara. Mr. Wilopo dan Nyonoprawoto pergi ke rumah Gunawan pemilik toko radio Satria di Salemba Tengah No. 24, untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Gunawan mengizinkan dan mengirimkan seorang pemuda kepercayaan untuk melayani penggunaannya.⁶¹

Sudiro, yang pada waktu itu merangkap sebagai sekretaris Ir. Soekarno, memerintahkan kepada S. Suhud, komandan pengawal rumah Ir. Soekarno, yang memangku jabatan Pemimpin Besar Barisan Pelopor), menyiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, maka Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah masih ada dua tiang bendera dari pipa besi yang tidak digunakan.⁶² Ia tidak ingat sama sekali untuk memindahkan salah satu tiang itu. Ia malahan mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras. Bendera yang dijahit dengan tangan yang akan dikibarkan sudah disiapkan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak sesuai dengan ukuran resmi.

Karena ukuran kainnya tidak sempurna, maka sebenarnya kain itu tidak disiapkan untuk bendera, tetapi untuk keperluan lain.⁶³ Sebagaimana yang telah disepakati semula, para pemimpin bangsa Indonesia menjelang pukul 10.30 telah berdatangan ke Pegangsaan Timur No. 56. Di antara mereka adalah dr. Buntaran Martoatmodjo, Mr. AA. Maramis, Mr. J. Latuharhary, Abikusno Tjorokusjoso, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, Oto Iskandar di Nata, Ki Hadjar Dewantara, Sajuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, dr. Muwardi, Mr. AG. Pringgodigdo, dan lain-lain.

⁶¹ *Tempo*, 16 Agustus 1975, hal. 13; Panitia Peringatan 70 tahun Wilopo, *Wilopo 70 Tahun*, Jakarta, 1979, hal. 41.

⁶² Sesudah 'Janji Kemerdekaan' atau 'Janji Koiso' bulan September 1944, di setiap kantor, kediaman resmi pejabat Indonesia dikibarkan dua bendera secara berdampingan. Disebelah kanan Hinomaru dan disebelah kiri Sang Merah Putih, dilihat dari depan.

⁶³ Wawancara dengan S. Suhud, Jakarta, 7 Mei 1972, Keterangan Ibu Fatmawati dalam *Merdeka*, 16 Agustus 1972; Sudiro, *op. cit.*, hal. 21.

Acara yang ditentukan dalam upacara itu diatur sebagai berikut :

Pertama, pembacaan Proklamasi

Kedua, pengibaran bendera Merah Putih

Ketiga, sambutan Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi

Para pemuda yang berdiri menunggu sejak pagi hari sudah mulai tidak sabar lagi. Mereka diliputi suasana tegang, berkeinginan keras agar pembacaan Proklamasi segera dilakukan. Mereka mendesak dr. Muwardi agar segera mengingatkan Ir. Soekarno bahwa hari telah siang. Karena desakan mereka, maka dr. Muwardi memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Ir. Soekarno. Setelah dibukakan pintu, Muwardi menyampaikan keinginan para pemuda. Bung Karno menolak desakan para pemuda itu. Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin melakukan sendiri tanpa hadirnya Drs. Moh. Hatta.

Dokter Muwardi masih mendesak terus, dan menyatakan bahwa hal itu lebih baik dikerjakan oleh Ir. Soekarno sendiri tanpa kehadiran Bung Hatta, sebab naskah Proklamasi telah ditandatangani mereka berdua. Karena didesak terus, maka Ir. Soekarno menjawab dengan nada marah: "saya tidak akan membacakan Proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silahkan membaca Proklamasi sendiri".⁶⁴

Justru pada saat itu dari halaman luar terdengar suara-suara, "Bung Hatta datang". Lima menit sebelum acara dimulai, Hatta datang, dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Hatta, Soekarno yang ketika itu demam kemudian bangkit dari tidurnya dan langsung berpakaian. Ia juga mengenakan stelan putih-putih seperti Hatta.

Beberapa menit sebelum pukul 10.30 (waktu Jawa zaman Jepang), *Cudanco* Latief Hendraningrat mengetuk pintu kamar Ir. Soekarno, dan setelah dibukakan pintu, ia bertanya: "Apa-

⁶⁴ Sudiro *op. cit.*, hal. 30; Cindy Adams, *Sukarno: An Autobiography* hal. 219; Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, hal. 54.

kah Bung Karno sudah siap?'. Kedua pemimpin itu mengganggu, lalu keluar bersama-sama menuju tempat yang tersedia diiringi oleh Nyonya Fatmawati Soekarno.⁶⁵ Upacara berlangsung tanpa protokol. Segera Latief memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief mempersilahkan Ir. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang mantap dan jelas ia mengucapkan pidato pendahuluan yang singkat sebelum membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan.

''Saoedara-saoedara sekalian! Saja telah minta saoedara hadir disini oentoek menjaksikan soeatoe peristiwa maha penting dalam sedjarah kita. Berpoeloeh-poeloeh tahoen kita bangsa Indonesia telah berdjuang oentoek kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratoes-ratoes tahoen. Gelombangnja aksi kita oentoek mentjapai kemerdekaan kita itoe ada naiknja ada toeroennja, tetapi djiwa kita tetap menoedjoe kearah tjita-tjita. Djoega didalam Zaman Jepang, oesaha kita oentoek mentjapai Kemerdekaan Nasional tidak berhenti. Di dalam Zaman Jepang ini tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnja, tetap kita menjoesoen tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaya kepada kekoeatan sendiri. Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan koeatnja. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemoeka-pemoeka rakjat Indonesia dari seloeroeh Indonesia. Permoesjawaratan itoe seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja oentoek menjatakan kemerdekaan kita.

Saoedara-saoedara !

Dengan ini kami menjatakan keboelatan tekad itoe. Dengarkanlah Proklamasi kami :

⁶⁵ Cindy Adams, *op. cit.*, hal. 219.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan tjara seksama dan tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05

Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

Demikianlah saodedara-saodedara !

Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satoe ikatan lagi jang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Moelai saat ini kita menjoesoen negara kita! Negara Merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi. Insya 'Allah, Toehan memberkati kemerdekaan kita itoe".⁶⁶

Tepat pada saat pengucapan Proklamasi itu pengeras suara yang dipakai rusak. Padahal sebelum dipergunakan telah dicoba beberapa kali berjalan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan kabel-kabelnya rusak, terinjak-injak oleh massa.

Acara selanjutnya pengibaran bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih-kurang dua meter di depan tiang. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan, dan mengikatnya pada tali dengan bantuan *Cudanco* Latief. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan irama lagu Indonesia Raya. Seusai pengerekan bendera diteruskan dengan sambutan dari Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi.

⁶⁶ Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945 (terbitan baru)*, Jakarta, 1951, hal Pendahuluan bagian I.

Upacara peristiwa besar itu berlangsung dengan penuh khidmat sekalipun sangat sederhana selama lebih-kurang satu jam. Peristiwa ini membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Berita Proklamasi yang telah meluas di seluruh Jakarta segera disebarkan ke seluruh Indonesia. Pada pagi hari, 17 Agustus itu juga, naskah Proklamasi telah sampai ke tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Berita *Domei*, *Waidan B. Palenewen*. Ia menerima naskah itu dari seorang wartawan *Domei*, yang bernama Syahrudin. Segera *Palenewen* memerintahkan *F. Wuz*, seorang markonis, untuk menyiarkannya tiga kali secara berturut-turut. Baru dua kali *F. Wuz* melakukan tugasnya, masuklah orang Jepang keruangan radio dan mengetahui berita Proklamasi itu telah tersiar ke luar lewat udara. Dengan marah-marah Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan. Tetapi *Waidan Palenewen* memerintahkan kepada *F. Wuz* untuk terus menyiarkannya. Berita ini kemudian diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran itu, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakannya sebagai kekeliruan.⁶⁷ Pada hari Senin 20 Agustus 1945 pemancar itu disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

Sekalipun pemancar pada Kantor Berita *Domei* disegel, para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio seperti Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Sukandar. Alat-alat pemancar yang diambil dari kantor berita *Domei* bagian demi bagian dibawa ke rumah *Waidan B. Palenewen*, dan sebagian ke Menteng No. 31. Akhirnya terciptalah pemancar baru di Menteng No. 31, dengan kode panggilan DJK I. Dari sinilah seterusnya berita Proklamasi disiarkan.⁶⁸ Usaha para pemuda dalam penyiaran berita ini tidak terbatas melalui radio, melainkan

⁶⁷ Adam Malik, *Riwayat Proklamasi*, hal. 60.

⁶⁸ *Tempo*, 16 Agustus 1975.

juga melalui pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya 20 Agustus memuat berita Proklamasi dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Demikianlah berita Proklamasi tersiar ke seluruh pelosok tanah air.

2. Pembentukan Lembaga-lembaga Negara

Kesibukan para pemimpin sesudah Proklamasi adalah menyusun tatanan kehidupan kenegaraan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merencanakan mengadakan rapat pada 18 Agustus 1945, rapat yang pertama sesudah Proklamasi. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta merencanakan untuk menambah sembilan orang anggota baru, termasuk dari golongan pemuda antara lain Sukarni, Chairul Saleh dan Wikana, tetapi setelah berlangsung pembicaraan yang tidak memuaskan antara Hatta dan Chairul Saleh, para pemuda meninggalkan rapat itu. Mereka tetap menganggap bahwa PPKI sebagai aparat buatan Jepang.⁶⁹ Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat pada 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", karena para pemeluk agama lain merasa keberatan atas kalimat tersebut.⁷⁰ Bung Hatta bersama keempat anggota tersebut masuk salah satu ruangan untuk bertukar pikiran mengenai cara pemecahan masalah tersebut. Dalam waktu 15 menit dicapai kata sepakat untuk menghilangkan kalimat, "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang akan menjadi rintangan bagi persatuan dan

⁶⁹ Adam Malik, *op. cit.*, hal. 63; Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 61.

⁷⁰ Masalah tersebut sesungguhnya telah dibahas atas keberatan Mr. Latuhary pada Rapat Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta, 1971, hal. 259.

kesatuan bangsa Indonesia, karena apabila masalah ini dibicarakan dalam rapat pleno akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut.⁷¹ Setelah pertukaran pikiran itu, rapat pleno PPKI dibuka pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 orang anggota. Soekarno membuka rapat itu dengan pidato singkat sebagai berikut :

"Sidang jang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satoe saat jang mengandoeng sedjarah. Pada hari ini kita menjusun Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia jang kemerdekaannya kemarin menoeroet kehendak rakjat telah dipermakloemkan dengan Proklamasi jang dioemoemkan pula kepada rakjat kira-kira djam setengah 12 Nippon.

Toean-toean sekalian tentoe mengetahoei dan mengakoei bahwa kita doedoek dalam suatoe zaman jang beralih sebagai kilat tjepatnja. Maka berhoeboeng dengan itoe saja minta kepada toean-toean sekalian soepaja kitapoen bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ketjepatan kilat. Djanganlah kita terlaloe tertarik oleh kehendak jang ketjil-ketjil, tetapi marilah kita menoeroet garis besarnja sadja jang mengandoeng sedjarah".

Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar. Pembahasan rancangan pembukaan dan Undang-undang Dasar yang telah disiapkan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, berhasil dibahas dalam tempo kurang dari 2 jam.⁷² Sidang diistirahatkan untuk sementara pada pukul 21.50, dan akan dimulai lagi pukul 03.15. Pada awal pembukaan sidang kedua ini Ir. Soekarno mengumumkan enam orang anggota baru PPKI. Mereka adalah Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subardjo.

Sebelum meningkat ke acara selanjutnya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno meminta agar pasal

⁷¹ Moh. Hatta, *op. cit.*, hal. 57-59; T. Muhammad Hassan, '*Bung Hatta di Sumatera*', dalam *Bung Hatta mengabdikan pada tjita-tjita perdjoeangan bangsa*, Djakarta, 1972, hal. 182-183.

⁷² Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 399-427.

III dalam Aturan Peralihan disahkan.⁷³ Kemudian Oto Iskandar di Nata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia memajukan calon Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Setelah acara pemilihan presiden dan wakil presiden, sidang meneruskan acara membahas pasal-pasal rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Dengan perubahan-perubahan kecil, seluruh rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan disepakati oleh sidang.

Presiden Soekarno menutup acara pembahasan itu dengan menyatakan : "Dengan ini toean-toean sekalian, Oendang-Oendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia serta Atoeran Peralihan telah sah ditetapkan".⁷⁴ Sebelum rapat PPKI pertama itu ditutup, presiden menunjuk sembilan orang anggota Panitia Kecil untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian yang mendesak, yaitu pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Mereka adalah Oto Iskandar di Nata, Ahmad Subardjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, AA. Hamidhan, Dr. GSSJ. Ratulangi, dan Mr. I Gusti Ktut Pudja.

Rapat dilanjutkan pada hari Minggu 19 Agustus 1945, pukul 10.00. Acara pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar di Nata. Hasil Panitia Kecil Oto Iskandar di Nata dibahas dan menghasilkan keputusan :

- (1) Pembagian wilayah atas delapan provinsi beserta para calon gubernurnya yaitu: Sutardjo Kartohadikusumo untuk Jawa Barat, RP. Soeroso untuk Jawa Tengah, RMTA. Soeryo untuk Jawa Timur, Ir. Pangeran Moh. Noor untuk Borneo (Kalimantan), DR. GSSJ. Ratulangi untuk Sulawesi, Mr. J. Latuharhary untuk Maluku, Mr. I Gusti Ketut Pudja untuk

⁷³ Pasal III Aturan Peralihan itu berbunyi: Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persediaan Kemerdekaan.

⁷⁴ Muhammad Yamin, *op. dt.*, hal. 437.

- Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Mr. T. Mohammad Hassan untuk Sumatera, dan dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta;
- (2) Adanya Komite Nasional (Daerah). Sebelum acara dimulai Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo⁷⁵ untuk membentuk Panitia Kecil yang merencanakan bentuk organisasi departemen. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subardjo mengusulkan adanya 13 kementerian. Setelah dibahas oleh sidang, diputuskan adanya 11 departemen yaitu: Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Ketahanan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum.⁷⁶

Pembahasan mengenai masalah departemen ditunda. Kemudian presiden membahas masalah tentara kebangsaan. Dalam hal ini Oto Iskandar di Nata mengusulkan:

- (1) Rencana Pembelaan negara dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang mengandung politik perang tidak dapat diterima;
- (2) Tentara Peta di Jawa dan Bali serta Lasykar Rakyat di Sumatera dibubarkan, karena merupakan organisasi buatan Jepang, yang kedudukannya di dunia Internasional tidak berketentuan. Negara Indonesia membutuhkan alat pertahanan yang sebaik-baiknya, karena itu diusulkan agar presiden memanggil pemuda-pemuda yang mempunyai kecakapan militer untuk membentuk tentara kebangsaan yang kokoh.

⁷⁵ Menurut Ahmad Subardjo, bukan Mr. Kasman tetapi Mr. Alex Andries Maramis, lihat Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *op. cit.*, hal. 346; Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 438.

⁷⁶ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal 461-462.

Usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang. Urusan kepolisian oleh Panitia Kecil dimasukkan ke dalam Departemen Dalam Negeri. Untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian, presiden diminta menunjuk pelaksanaannya. Hal itu disetujui oleh sidang, dan kemudian presiden menunjuk Abdul Kadir, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Oto Iskandar di Nata untuk mempersiapkan pembentukannya. Abdul Kadir ditunjuk sebagai ketua pelaksana.⁷⁷

Pembicaraan lain dari para anggota menekankan perlunya ketenteraman dan segera dimulainya perjuangan. Rapat pada siang hari, 19 Agustus ini, ditutup pada pukul 14.55. Pada waktu presiden dan wakil presiden akan pulang, mereka diminta oleh pemuda-pemuda untuk hadir pada rapat yang mereka adakan di Jalan Prapatan No. 10.

Presiden dan wakil presiden memenuhi permintaan untuk hanya hadir pada rapat itu yang ternyata dipimpin oleh Adam Malik bersama Mr. Kasman Singodimedjo dan Ki Hadjar Dewantara. Hadir pula di situ Sutan Syahrir. Mereka mengharap agar Soekarno-Hatta melakukan perebutan terhadap kekuasaan Jepang yang diatur dengan cepat dan serentak. Presiden Soekarno memberikan tanggapan bahwa apa yang mereka kehendaki tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Para pemuda menolak pendapat presiden, yang dianggapnya berbahaya dan merugikan bangsa Indonesia di mata dunia. Adam Malik kemudian membacakan Dekrit mengenai lahirnya tentara Republik Indonesia yang berasal dari Peta dan Heiho.⁷⁸ Bung Karno dan Hatta menyetujui usul pemuda tersebut, namun belum dapat memutuskan pada saat itu. Rapat kemudian bubar.

Pada malam hari, 19 Agustus 1945 itu, rapat PPKI dilanjutkan di Jalan Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10. Rapat antara lain membicarakan pembentukan Komite Nasional

⁷⁷ *Ibid*, hal. 464.

⁷⁸ Menurut Adam Malik, Soekarno-Hatta telah setuju dengan pembentukan tentara itu, tetapi minta waktu untuk mempertimbangkan. Bung Hatta mempunyai kesan dari sikap para pemuda bahwa mereka ingin badan mereka diakui sebagai parlemen; lihat pula dalam karya Mohammad Hatta, *op. cit.*, hal. 63.

Indonesia (KNI) yang akan membantu presiden. Kemudian Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Oto Iskandar di Nata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran Martoatmodjo, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuludin membahas calon-calon yang akan diangkat sebagai anggota KNI. Disepakati bahwa anggota KNI berjumlah 60 orang.⁷⁹ Rapat pertama KNI ditetapkan 29 Agustus 1945 malam hari bertempat di Gedung Komidi, Jalan Pos (sekarang Gedung Kesenian) Pasar Baru, Jakarta.

Rapat PPKI dilanjutkan kembali pada 22 Agustus 1945. Dalam rapat ini telah diputuskan tiga persoalan pokok yang pernah dibahas di dalam rapat-rapat sebelumnya yaitu dibentuknya: (1) Komite Nasional, (2) Partai Nasional, dan (3) Badan Keamanan Rakyat.

Komite Nasional seperti dibicarakan dalam sidang-sidang BPUPKI merupakan "pendjelmaan keboelatan toejoean dan tjita-tjita bangsa Indonesia oentoek menjelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Komite Nasional di poesat memimpin dan memberi petoenjoek kepada komite-komite nasional daerah. Komite nasional di poesat, di poesat daerah dan daerah dipimpin oleh seorang ketoea dan beberapa orang anggota peng-oeroes jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional".⁸⁰

Pembubaran PPKI pada 29 Agustus 1945 merupakan rapat pertama KNIP. Dapat dikatakan bahwa KNIP merupakan kelanjutan dari PPKI. Soekarno dan Hatta memilih 135 orang (termasuk dari mantan anggota PPKI) menjadi anggota KNIP. Tugas KNIP hanya sebagai badan penasihat presiden dan tidak mempunyai tugas-tugas membuat perundang-undangan. Pasal IV Aturan Peralihan UUD menyebutkan bahwa sebelum dibentuk MPR, DPR dan DPA segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Seperti diungkapkan dalam sidang BPUPKI rencana pembentukan Partai Nasional yang diumumkan pada 22 Agustus,

⁷⁹ Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 461-462.

⁸⁰ DOKUMEN BPUPKI/PPKI.

dikatakan partai itu merupakan wahana untuk "memperkoekat persatoean bangsa dan negara, memperbesar rasa tjinta, setia dan bakti pada tanah air, mengichtiarkan program ekonomi dan sosial dan membantoe tertjapainja keadilan sosial dan perikemanoesiaan, dengan djalan perdamaian internasional."⁸¹

Dalam perkembangannya, Partai Nasional yang merupakan "Partai Negara" (*staatspartij*), dianggap telah melampaui keperluan dan menyaingi KNIP. Pada 1 September 1945 Partai Nasional dibubarkan.⁸²

Suatu badan yang mampu menolong penduduk yang menderita akibat peperangan, justru pada masa setelah PD II sangat didambakan rakyat Indonesia. Pada 20 Agustus 1945 di Kota Jakarta berdiri suatu badan yang diberi nama Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Dalam kerangka itu dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Juga di dalam pengertian itu usaha memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi bagian dari BKR.⁸³ Dalam awal pembentukannya, BKR bukan merupakan barisan yang dipersenjatai.

3. Menegakkan Kedaulatan Negara

Sesudah Proklamasi, terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegakkan kedaulatan Republik serta untuk memperoleh senjata. Di dalam rangka ini di Jakarta para pemuda yang dipelopori oleh Komite van Aksi⁸⁴, Menteng No. 31, mengerahkan massa untuk hadir dalam rapat raksasa di Lapangan Ikada dan agar para pemimpin RI dapat bicara di hadapan mereka.⁸⁵ Sambil mengerahkan massa, mereka juga menyampaikan rencana itu kepada presiden. Pada prinsipnya Presiden Soekarno

⁸¹ DOKUMEN BPUPKI/PPKI.

⁸² George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, hal. 148.

⁸³ DOKUMEN BPUPKI/PPKI.

⁸⁴ Ejaan ini sesuai dengan aslinya, lihat Adam Malik, *op. cit.*, hal. 76-77.

⁸⁵ *Ibid.*

dan Wakil Presiden Moh. Hatta setuju. Yang belum jelas dan menjadi persoalan bagi presiden adalah bagaimana sikap penguasa Jepang setelah mereka menyerah dan menjadi alat Sekutu. Apakah mereka memusuhi kita atau tidak. Masalah yang sulit ini kemudian dibicarakan dalam sidang kabinet bertempat di kediaman presiden. Sidang berlangsung sampai dini hari 19 September 1945 tanpa menghasilkan suatu keputusan yang bulat. Sidang dimulai lagi pada pukul 10.00 di sebuah gedung di Lapangan Banteng Timur (sekarang ini Departemen Keuangan RI) yang dihadiri oleh para pemimpin pemuda. Para pemimpin pemuda menyatakan agar rapat raksasa tidak dibatalkan. Sementara itu massa sudah berbondong-bondong membanjiri Lapangan Ikada siap mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpinnya. Situasi menjadi sangat tegang karena Lapangan Ikada telah dijaga secara ketat oleh pasukan bersenjata Jepang, yang juga mengerahkan tank-tanknya. Sewaktu-waktu bisa terjadi bentrokan berdarah. Sidang memutuskan agar para pemimpin datang untuk berhadapan muka dengan massa guna meminta kesediaan mereka mematuhi perintah-perintahnya. Selanjutnya menyerukan kepada mereka supaya bubar dan pulang ke rumah masing-masing.⁸⁶

Akhirnya presiden, wakil presiden dan para menteri menuju ke Lapangan Ikada. Di Lapangan Ikada telah penuh dengan massa yang membawa pelbagai macam senjata tajam. Tampak pula pasukan-pasukan Jepang dengan sangkur (bayonet) terhunus di samping tank-tanknya. Mobil presiden dan wakil presiden sebelum memasuki lapangan ditahan sebentar oleh komandan jaga. Mereka saling mengadakan pembicaraan, kemudian diperbolehkan meneruskan perjalanan. Bung Karno langsung menuju panggung, berpidato singkat. Ia minta kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Pemerintah Republik Indonesia atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh dengan jalan mematuhi perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin. Kemudian massa diperintahkan bubar dengan tenang.⁸⁷ Perin-

⁸⁶ Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *op. cit.*, hal. 369-373.

⁸⁷ Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, hal. 374; lihat pula. Adam Malik *op. cit.*, hal. 77.

tah itu ditaati. Ketaatan rakyat atas perintah itu adalah manifestasi pertama daripada kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia atas rakyatnya. Sekalipun rapat raksasa di Lapangan Ikada ini hanya berlangsung beberapa menit, namun berhasil menumbuhkan kepercayaan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia sebulan itu, sekaligus kepercayaan kepada rakyat akan kekuatannya sendiri.

Sementara itu di beberapa daerah terjadi pula perebutan kekuasaan, baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Di beberapa karesidenan di Jawa, pada bulan September 1945 pimpinan masing-masing daerah menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian Pemerintah Republik Indonesia dan mengancam bahwa segala tindakan yang menentang Pemerintah RI akan diambil tindakan keras.⁸⁸ Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dan mereka dilarang memasuki kantornya. Pada tahap selanjutnya para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan menguasai gedung-gedung vital. Di Surabaya selama bulan September, para pemuda melakukan perebutan senjata di arsenal (gudang senjata) bekas gedung sekolah Don Bosco, merebut Markas Pertahanan Jawa Timur (*Tobu Jawa Bo-ei tai*) merebut pangkalan Angkatan Laut Ujung, markas-markas tentara Jepang serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota. Pada 19 September 1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato (sekarang Hotel Majapahit). Insiden ini pecah ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel tersebut, dibantu oleh satu tim pasukan Sekutu yang ditugasi, untuk mendirikan Markas RAPWI (*Recovery of Allied Prisoner of War and Internees*). Mereka diterjunkan di Gunungsari. Orang-orang Belanda itu mengibarkan bendera mereka di puncak hotel tersebut. Sudah tentu peristiwa itu memancing kemarahan para pemuda. Hotel diserbu oleh para pemuda, karena permintaan Residen Surabaya Sudirman secara baik-baik agar mereka menurunkan bendera

⁸⁸ Semua surat kabar yang ada di Jawa dan Sumatera memuat berita tersebut, mengenai daerah masing-masing.

Belanda ditolak. Bentrokan tidak dapat dihindarkan lagi. Beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkannya kembali menjadi merah putih.⁸⁹

Sasaran yang harus direbut adalah Markas *Kempeitai* (Polisi Militer Jepang) di bekas gedung *Raad Van Justitie*. Gedung ini dianggap sebagai lambang kekejaman Pemerintah Jepang. Pada tanggal 1 Oktober 1945, markas itu diserbu oleh massa. Gedung dipertahankan dengan gigih oleh pihak Jepang, namun berhasil direbut massa setelah terjadi pertempuran selama lima jam. Dalam perebutan ini 25 orang pemuda gugur dan 60 luka-luka serta 15 orang tentara Jepang mati.⁹⁰

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada 26 September 1945. Sejak pukul 10.00 pagi hari semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor kepada Pemerintah Indonesia. Pada 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan Pemerintah RI.⁹¹

Sementara itu para pemuda berusaha memperoleh senjata dari Jepang melalui perundingan namun tidak berhasil. Pada 7 Oktober malam hari, massa pemuda BKR bersama dengan kelompok pemuda Polisi Istimewa bergerak menuju ke Kota Baru. Mereka menyerbu markas Batalyon Otsuka (*Otsuka Butai* = sekarang gedung SMA). Pertempuran meletus pada malam itu juga dan akhirnya pasukan Otsuka menyerah. Dalam

⁸⁹ Team Sejarah Dewan Harian Daerah Angkatan '45 Jawa Timur, "Peristiwa Perobekan Bendera Tiga Warna" dalam *Menyongsong Pembangunan Museum Perjuangan '45 Jawa Timur*, hal. 63-73.

⁹⁰ *Soeara Rakjat*, 3 Oktober 1945. Gedung yang dimaksud terletak di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Di tempat itu dibangun Tugu Pahlawan.

⁹¹ Kementerian Penerangan, *Daerah Istimewa Jogjakarta*, Djakarta, 1954, hal. 39.

penyerbuan ini 18 orang pemuda Polisi Istimewa gugur.⁹² Perebutan kekuasaan di Bandung dipelopori oleh para pemuda, yang pada bulan September 1945 berusaha merebut senjata Jepang di Pangkalan Udara Andir (sekarang Pangkalan Udara Husein Sastranegara) dan pabrik senjata bekas ACW (*Artillerie Constructie Winkel*, sekarang Pindad). Pertempuran meluas ke dalam kota. Pemuda-pemuda berusaha merebut objek-objek vital dan berlangsung sampai kedatangan pasukan Sekutu di Kota Bandung pada 17 Oktober 1945.

Di Semarang setelah para pemuda berhasil menguasai kota, perbenturan yang dahsyat terjadi antara para pemuda melawan tentara Jepang. Pihak Jepang merasa terancam oleh aksi-aksi pemuda yang berusaha merebut senjata mereka. Pada 14 Oktober 1945, 400 orang Jepang sipil yang ditawan di pabrik gula Cepiring dipindahkan oleh para pemuda untuk ditahan di Penjara Bulu. Sebelum mereka sampai di Penjara Bulu sebagian tawanan itu melarikan diri dan minta perlindungan kepada Batalyon Kido (*Kido Butai*). Para pemuda menjadi marah sehingga setiap pelarian orang Jepang yang ditemui disergap dan ditawan kembali. Akibat insiden ini, pada keesokan harinya pasukan Jepang menyerbu Kota Semarang dari tangsinya di Jatingaleh. Sejak hari itu mulailah pertempuran di dalam kota yang berlangsung selama lima hari. Peristiwa ini disebut Pertempuran Lima Hari di Semarang. Korban yang jatuh dalam pertempuran ini ditaksir 990 orang, dari kedua belah pihak.⁹³

Rombongan dr. Sam Ratulange, gubernur Sulawesi, pada 19 Agustus 1945 mendarat di Sapiria Bulukumba. Setibanya di Makassar (Ujung Pandang) gubernur mulai menyusun pemerintahan. Mr. Zainal Abidin diangkat sebagai sekretaris daerah.

⁹²*Ibid.*, hal. 343; R.P. Soedarsono, "Revolusi Djogja dan sekitarnya" *Penelitian Sedjarah*, No. 3, Th. I, hal. 30-31.

⁹³Panitiya Penulisan Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang, *Pertempuran Lima Hari di Semarang*, Semarang 1978, hal. 33; Nugroho Notokusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, hal. 138-141.

Beberapa orang dikirim ke daerah-daerah sebagai utusan gubernur dengan tugas menyusun pemerintahan. Tetapi semua tindakan gubernur dinilai oleh para pemuda terlalu hati-hati. Para pemuda yang telah mengorganisasikan diri dalam Pemuda Pusat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak gubernur agar merebut kekuasaan.

Pada 24 September 1945, pasukan Australia mendarat di Makassar. Bersama mereka ikut serta pejabat-pejabat NICA yang memindahkan markasnya dari Morotai ke Makassar. Aktivitas perwira NICA yang mencolok ialah menghubungi bekas pejabat-pejabat Hindia Belanda dan bersikap sebagai pemenang perang. Jawaban dari beberapa kelompok pemuda yang tergabung dalam PPNI, pelajar-pelajar menengah, adalah aksi serentak pada 28 Oktober 1945 serta merebut gedung-gedung dan objek-objek vital seluruh kota Makassar. Akibat peristiwa itu pasukan Australia melakukan penjagaan ketat dan menahan tokoh-tokoh pemuda. Pusat gerakan pemuda kemudian dipindahkan ke Polombongkeng.⁹⁴

Di Manado sekalipun telah hampir setengah tahun dikuasai oleh (NICA), usaha menegakkan kedaulatan negara berkobar juga. Pada 14 Februari 1946, pemuda-pemuda Indonesia anggota KNIL, bergabung dengan Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling. Mereka membebaskan para tahanan yang pro-Republik Indonesia antara lain Ch. Ch. Taulu, SD. Wuisan, Sumanti, GA. Maengkom, Kusno Dhanupojo, GE. Dauhan. Sebaliknya mereka menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan Penjara Manado. Dengan diawali oleh peristiwa itu para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita mengenai perebutan kekuasaan mereka kirim ke pemerintah pusat di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Taulu, tentang pembentukan pemerintah sipil pada 16 Februari 1946 dan memilih BW. Lapien sebagai residen. Tentara Republik

⁹⁴Radik Djawardi, *Naskah Sedjarah Corps Hasanuddin* 1972, hal. 5-9.

Indonesia setempat disusun dengan pimpinan kolektif Ch. Ch. Taulu, SD. Wuisan, dan J. Kaseger.⁹⁵

Di Gorontalo, pada 13 September 1945, terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan RI berhasil ditegakkan dan pemimpin-pemimpin Republik menolak setiap ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia. Kekuatan mereka berjumlah kurang-lebih 600 orang pemuda yang terlatih.⁹⁶

Di beberapa kota di Kalimantan sekalipun tentara Sekutu (Australia) telah mendukung, proklamasi tidak terbendung. Tentara pendudukan Australia segera mengeluarkan larangan semua aktivitas politik seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan menyelenggarakan rapat-rapat, namun kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Di Balikpapan, pada 14 November 1945 sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan kompleks NICA sambil membawa Merah Putih.

Di Pulau Sumbawa (NTB), pada bulan Desember 1945 pemuda-pemuda Indonesia berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Juga di Sape 400 orang pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang, juga di Raba terjadi peristiwa yang sama.⁹⁷

Di Bali, para pemuda telah membentuk beberapa organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), pada akhir bulan Agustus 1945. Mereka berusaha menegakkan kedaulatan RI melalui perundingan, tetapi mendapat hambatan dari Jepang. Pada 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, tetapi usaha ini pun gagal.⁹⁸

⁹⁵D. Wowor, *Sulawesi Utara Bergolak*, Jakarta, 1979, hal. 45 Major General S. Woodburn Kirby et al, *The War Against Japan*. Jilid V, hal. 355.

⁹⁶*Ibid* hal. 573.

⁹⁷Gavin Long, *The Final Campaign*, Canberra 1963, hal. 373.

⁹⁸Njoman S. Pendit, *Bali Berjuang*, Den Pasar, 1954, hal 41-44.

Di Kota Kotaraja (sekarang Banda Aceh), pada 6 Oktober 1945 para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). *Shucokan* (residen) Aceh memanggil para pemimpin pemuda pada 12 Oktober 1945. Ia menyatakan, sekali pun Jepang telah kalah, tetapi keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Jepang, karena itu ia meminta semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa izin dihentikan. Perkumpulan yang sudah terlanjur didirikan supaya dibubarkan. Para pemimpin pemuda menolak permintaan itu. Sejak hari itu dimulailah perebutan dan pengambilalihan kantor-kantor pemerintah dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Perlucutan senjata Jepang terjadi di beberapa tempat, yang diwarnai tindak kekerasan insiden bersenjata terjadi di Lho' Nga, Ulee Lheue, Langsa, dan tempat-tempat lain di Aceh.⁹⁹

Di Palembang, perebutan kekuasaan terjadi pada 8 Oktober 1945. Residen Sumatera Selatan dr. AK. Gani bersama seluruh aparat dan jabatan karesidenan dalam suatu upacara karesidenan menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara itu para pegawai kembali ke kantor masing-masing untuk menaikkan bendera Merah Putih. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Sumatera Selatan hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Republik Indonesia.¹⁰⁰

Di Biak timbul pemberontakan 14 Maret 1948 yang sasarannya adalah Kamp NICA, tangsi Sorido. Pemberontakan itu gagal, dua orang pemimpinnya dihukum mati dan beberapa lainnya dihukum seumur hidup.

Para pejuang seperti, Silas Papare, Martin Ludes dan Lucas Rum Korem telah merencanakan perlawanan pada 25 Desember 1945 dengan tujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia di

⁹⁹ Sjamaun Gaharu, "Perebutan kekuasaan dari tangan Djepang", *Modal Revolusi '45*, Kutaradja, 1960, hal. 30-37; Hoesin Joesoef, "Detik Proklamasi Atjeh", *ibid.*, hal. 43-45; Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Utara*, Djakarta, 1954, hal. 31.

¹⁰⁰ Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Sumatera Selatan*, Djakarta, 1953, hal. 42-43.

Irian Jaya. Akan tetapi pada malam hari, 14 Desember 1945, Belanda mencium rencana ini dan mengadakan penangkapan-penangkapan di Jayapura.¹⁰¹

Gubernur Sumatera TM. Hassan tiba di Medan pada 28 Agustus 1945. Di sini ia menjumpai suasana yang penuh keraguan terhadap Proklamasi, karena kuatnya pengaruh kelompok yang masih mengharapkan hadirnya Pemerintah Hindia Belanda. Di dalam suasana yang tidak menentu itu, pada 15 September 1945 dr. AK. Gani, residen Palembang, mengirim telegram yang mengingatkan gubernur agar segera melaksanakan Keputusan Jakarta. Surat telegram tersebut beredar luas di kalangan para pemuda. Mereka mendesak gubernur agar menyusun Komite Nasional, para pemuda membentuk Badan Pemuda Indonesia (BPI) yang dipimpin oleh Achmad Tahir pada 20 September 1945. Melalui organisasi para pemuda melakukan aksi perebutan kantor-kantor dan objek-objek vital yang masih diduduki Jepang. Selanjutnya BPI pada 3 Oktober 1945, menyelenggarakan rapat umum mendukung Republik.

Pada akhir bulan Agustus 1945 di Padang dan Bukittinggi terbentuk dua organisasi pemuda Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) yang dipimpin oleh Ismail Lengah dan Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dahlan Djambek. Dua organisasi ini yang memelopori pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Sumatera Barat. Selanjutnya para pemuda melakukan aksi perebutan kekuasaan, sedangkan Komite Nasional sibuk menyusun pemerintahan daerah. Komite memilih Syafei sebagai residen.

Pendaratan pasukan Sekutu dari Brigade 21 Divisi India 26 yang dipimpin oleh Brigadir Chambers di Padang, disambut dengan kibaran bendera Merah Putih sebagai peringatan bahwa Sumatera Barat adalah daerah Republik Indonesia. Para pemuda menolak kedatangan NICA yang dipimpin oleh Mayor Jenderal A.I. Spitq. Tentara Sekutu yang berusaha melucuti senjata para

¹⁰¹Drs. Bondan Soedharto MP, *et. al.*, *Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di Irian Jaya*, Jayapura, 1991. hal. 442.

pemuda mendapat perlawanan yang keras. Akibatnya hubungan RI dengan Sekutu rusak dan sering kali terjadi insiden bersenjata.

4. Menyusun Kekuatan Bersenjata

Sesudah keputusan rapat PPKI 22 Agustus itu, pada 23 Agustus Presiden Soekarno dalam pidatonya mengumumkan didirikannya tiga badan baru yaitu: Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Berkaitan dengan pembentukan BKR, badan itu bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah.¹⁰² Pada umumnya timbul kekecewaan di kalangan pemuda karena pemerintah tidak segera membentuk tentara kebangsaan. Sekali pun demikian sebagian besar pemuda terutama yang bekas anggota Peta, KNIL, dan *Heiho*, dan pemuda-pemuda yang sudah mempunyai pengalaman militer, segera membentuk BKR di daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan BKR itu sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangannya. Para pemuda bekas tentara Peta Jakarta sepakat membentuk BKR Pusat, untuk mengkoordinasikan BKR, agar BKR Daerah dapat dikendalikan secara terpusat. Terpilih sebagai pimpinannya Mr. Kasman Singodimedjo bekas *daidanco* Jakarta.¹⁰³ Karena Mr. Kasman Singodimedjo diangkat oleh pemerintah sebagai ketua KNIP, maka kedudukannya diganti oleh Kaprawi, bekas *daidanco* Sukabumi. Pimpinan BKR Pusat terdiri atas Kaprawi, (ketua umum), Satalaksana (ketua I), dan Latief Hendraningrat (ketua II) dengan dibantu oleh Arifin Abdurrachman, Mahmud dan Zulkifli Lubis. Mereka mengadakan kontak-kontak dengan para pimpinan BKR Jakarta (Mufreini), Jawa Timur (Drg. Moestopo), Jawa Tengah (Soedirman), Jawa Barat (Arudji Kartawinata).

¹⁰² *Tjahaja*, 23 Agustus 1945.

¹⁰³ Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus, Abdulkadir, Kasman, Oto Iskandar di Nata, ditunjuk sebagai Panitia yang mempersiapkan tentara kebangsaan dan polisi; Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 464.

Kelompok BKR Pusat bersama para bekas perwira KNIL pada bulan September 1945 menghubungi Menteri Penerangan Amir Syarifuddin dengan maksud agar ia mendesak residen membentuk tentara kebangsaan. Amir Syarifuddin meminta jaminan agar para perwira bekas KNIL itu menyatakan diri mendukung perjuangan bangsa Indonesia dengan segala konsekuensinya, lalu mereka membuat pernyataan bersama.¹⁰⁴

Sebagian lagi dari para pemuda Indonesia yang pada zaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok gerakan politik dan besar peranannya dalam mencetuskan Proklamasi, tidak puas dengan BKR. Mereka menginginkan dibentuknya tentara kebangsaan. Setelah usul mereka mengenai pembentukan tentara kebangsaan ditolak oleh presiden dan wakil presiden, mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatukan diri dalam Komite van Aksi, pimpinan Adam Malik,¹⁰⁵ Sukarni, Chairul Saleh, dan Maruto Nitimihardjo. Komite van Aksi bermarkas di Jalan Menteng No. 31. Badan-badan perjuangan yang bernaung di bawah Komite van Aksi adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).¹⁰⁶ Kemudian badan-badan perjuangan lainnya dibentuk oleh para pemuda di seluruh Jawa seperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), *Hizbullah*, *Sabilillah*, Pemuda Republik Indonesia (PRI), Angkatan Muda Indonesia (AMI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI). Ada juga badan yang membentuk badan perjuangan yang bersifat khusus seperti kesatuan-kesatuan pelajar (Tentara Pelajar atau TP, Tentara Genie Pelajar atau TGP dan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP).

¹⁰⁴ Wawancara dengan Prof. Dr. Arifin Abdurrahman, Latief Hendraningrat, Mahmud, Samidjo Mangoenwirono, Didi Kartasasmita, M.R.A. Soewardi, Yogyakarta, 18 Desember 1976.

¹⁰⁵ Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945*, Djakarta, 1962, hal. 66-67; Adam Malik, *Mengabdikan Republik, I*, Jakarta, 1978; hal. 27.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 71-72.

Pembentukan badan-badan perjuangan itu tidak terbatas di Jawa saja melainkan juga di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) di bawah pimpinan Sjamaun Gaharu dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) di bawah pimpinan A. Hasymi.¹⁰⁷ Di Sumatera Utara dibentuk Pemuda Republik Andalas; di Sumatera Barat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.¹⁰⁸ Di Sulawesi Selatan dibentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) di bawah pimpinan Manai Sophian, Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Pemuda Merah Putih, Penunjang Republik Indonesia (PRI).¹⁰⁹

Sementara itu di Jakarta sebagian dari kelompok bekas tentara Peta menemui Presiden Soekarno. Mereka mendesak presiden agar segera membentuk Tentara Kebangsaan dan mencalonkan Soepriadi sebagai pemimpin tertingginya. Presiden Soekarno menyetujui usul mereka. Menteri Penerangan Amir Syarifuddin yang pernah ditemui oleh kelompok-kelompok bekas perwira Peta dan KNIL menyampaikan masalah pembentukan tentara kebangsaan ini kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Masalah ini kemudian dibahas dalam sidang kabinet, dan diputuskan pimpinan tertinggi tentara adalah seorang kepala staf. Calon kepala staf yang dipilih adalah pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo.

Soekarno dan Hatta bertemu untuk membicarakan masalah dan memutuskan pembentukan tentara kebangsaan. Pimpinan tertinggi tentara kebangsaan ditunjuk Soepriadi, seorang tokoh pemberontak tentara Peta Blitar, dan Oerip Soemohardjo diangkat sebagai kepala stafnya. Sebelum diumumkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, Hatta memerintahkan memanggil Oerip Soemohardjo ke Jakarta untuk memangku jabatan kepala Staf Umum TKR.¹¹⁰ Pada 5 Okto-

¹⁰⁷ *Semangat Merdeka*, 27 Oktober 1945.

¹⁰⁸ *Soeara Moeda*, 21 November 1945.

¹⁰⁹ *Soeara Moeda*, 21 November 1945, Mereka mengadakan Kongres di Yogyakarta, pada 10-11 November 1945.

¹¹⁰ Nasution, TNI I.

ber dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara kebangsaan yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Soepriadi diangkat sebagai pimpinan TKR dan sebagai menteri keamanan rakyat *ad interim* diangkat Moh. Suljoedikusumo bekas *daidanco* Peta.

Atas dasar Maklumat Pemerintah tersebut Oerip Soemohardjo disertai tugas Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta sebagai tempat kedudukannya dan para anggota BKR pusat mantan perwira KNIL sebagai intinya. Sebelum Oerip Soemohardjo mengkonsolidasikan organisasi TKR, di Pulau Jawa telah terbentuk 10 divisi dan di Sumatera enam divisi. Berkembangnya kekuatan bersenjata yang begitu cepat memerlukan pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Soepriadi yang ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi TKR ternyata tidak pernah datang untuk menduduki jabatannya, karena itu pada bulan November 1945 atas prakarsa Markas Tertinggi TKR diadakan "konferensi" untuk memilih pimpinan tertinggi TKR yang baru. Kolonel Sudirman, Komandan Divisi V/Banyumas, terpilih dalam konferensi tersebut. Sebulan kemudian, pada 18 Desember 1945, ia dilantik sebagai Panglima Besar (Pangsar) TKR dan dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal. Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jenderal.

Terpilihnya Soedirman merupakan pangkal tolak perkembangan organisasi kekuatan bersenjata. TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada bulan Januari 1946.¹¹¹ Sementara itu kekuatan di luar TKR, para pemuda membentuk organisasi-organisasi pemuda berupa laskar-laskar atau badan-badan perjuangan. Atas prakarsa Chairul Saleh dan Sukarni diselenggarakan kongres pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta pada 10 November 1945. Kongres dipimpin oleh Chairul Saleh dan Sukarni dan dihadiri oleh 332 utusan dari 30 organisasi

¹¹¹ "Amanat Panglima Besar Soedirman, 7 Juni 1946", *Kumpulan Amanat Panglima Besar Djenderal Soedirman*, Djakarta, 1970, hal. 16.

pemuda. Organisasi-organisasi pemuda terpecah dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang beraliran nasionalis, sedangkan dua kelompok lainnya bersaing secara tajam yaitu kelompok Chairul Saleh dan kelompok Soemarsono. Kelompok Soemarsono yang terdiri atas beberapa organisasi membentuk organisasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), namun organisasi-organisasi pemuda itu sepakat membentuk Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKPI).¹¹² Dalam perkembangan selanjutnya Badan-badan Perjuangan ini di-tampung di dalam wadah Biro Perjuangan, di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Kedua kelompok pejuang ini kemudian diintegrasikan menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada bulan Juni 1947.¹¹³

C. PERTEMPURAN—PERTEMPURAN AWAL

1. Kedatangan Pasukan Sekutu dan Belanda

Faktor baru bagi para pemuda dalam melaksanakan perebutan kekuasaan itu adalah kedatangan pasukan Sekutu di Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka ada di bawah Komando Asia Tenggara (*South East Asia Command* = SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Kelompok Penghubung Sekutu (*Force 136*) pertama kali datang ke Indonesia pada 8 September 1945 di bawah pimpinan Mayor Greenhalgh. Mereka diterjunkan di Bandar Udara Kemayoran dengan tugas mempersiapkan pembentukan markas besar Sekutu dan mengadakan kontak dengan kamp-kamp interniran Sekutu.

Kedatangan Greenhalgh disusul oleh berlabuhnya kapal penjelajah *Cumberland*, yang diikuti oleh fregat Belanda, *Tromp*, di Tanjung Priok pada 15 September 1945. Kapal itu membawa Panglima Skadron Penjelajah V Inggris Laksamana

¹¹² A. Dahlan Ranuwihardjo, SH., *Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi*, Jakarta, 1979, hal. 16–20.

¹¹³ Nugroho Notosusanto, *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces*, Djakarta, 1970, hal. 6; *Kedaulatan Rakyat*, 1 November 1945, A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, II, Djakarta, 1968, hal. 86.

Muda WR. Patterson dan mendaratkan sebagian Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia. Pasukan ini merupakan komando bawahan SEAC yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI berkekuatan tiga divisi dengan tugas melaksanakan Perintah Gabungan Kepala-kepala Staf Sekutu yang diberikan kepada SEAC, di antaranya :

- (1) menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,
- (2) membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
- (3) melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan,
- (4) menegakkan dan mempertahankan keadaan damai terutama di kota-kota besar (Jakarta Semarang, Surabaya, Padang, Medan) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah sipil,
- (5) menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.¹¹⁴

Pasukan Sekutu pertama kali mendarat di Jakarta pada 29 September 1945. Kedatangan pasukan-pasukan Sekutu di beberapa kota mula-mula disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia, tetapi setelah diketahui pasukan Sekutu datang bersama orang-orang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, sikap pihak Indonesia kemudian berubah. Rakyat bangkit menentang dan menolak kedatangan mereka. Situasi keamanan menjadi lebih buruk sejak NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya berusaha memancing kerusuhan dengan teror dan mengadakan provokasi-provokasi. Reaksi pemuda dan Pemerintah RI atas sikap tentara Sekutu ini disadari oleh Christison. Pasukan-pasukan Sekutu tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia, karena itu Christison mau berunding dengan

¹¹⁴ *Independent*, 29 Desember 1945.

Pemerintah RI dan mengakui *de facto* Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945.¹¹⁵ Pengakuan ini diperkuat dengan penegasan Christison, bahwa Sekutu tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia. Sejak pengakuan *de facto* itu, masuknya pasukan Sekutu ke wilayah RI diterima dengan terbuka oleh pejabat-pejabat RI.

Namun kenyataannya di kota-kota yang didatangi oleh pasukan Sekutu terjadi insiden-insiden bersenjata bahkan pertempuran-pertempuran. Pasukan-pasukan Sekutu sudah tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia dan juga tidak menghargai pemimpin-pemimpinnya.

Akibatnya perlawanan terhadap pasukan Sekutu meningkat sampai akhir tahun 1945. Pihak Sekutu sudah merasa kewalahan, menuduh Pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban. Tuduhan itu mendapat sambutan hangat dari Panglima Angkatan Perang Belanda Laksamana Helfrich, dan dijadikan dasar untuk menambah jumlah pasukannya guna membantu pasukan Jenderal Christison.¹¹⁶

Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Pemerintah RI sekali lagi memperingatkan Sekutu akan tugas-tugasnya. Sekutu tidak berhak mencampuri persoalan politik yang semata-mata urusan pihak Indonesia dan Belanda. Tugas yang dihadapi oleh pasukan Indonesia dan Sekutu adalah sama, yakni menegakkan keamanan dan ketertiban. Tidak amannya dan tidak tertibnya keadaan, disebabkan karena teror yang dilakukan oleh Sekutu dan gerombolan NICA. Dan perbuatan itulah yang ditentang oleh rakyat Indonesia, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran di beberapa daerah.¹¹⁷

¹¹⁵ Osman Raliby, *Sedjarah Hari Pahlawan*, Djakarta, 1952, hal. 15; Vice Admiral The Earl Mountbatten of Burma, *Report to the Combined Chiefs of Staff by the Supreme Allied Commander South East Asia, 1943-1945*, hal. 290.

¹¹⁶ *Evening News*, 28 Desember 1945.

¹¹⁷ *Ibid*.

2. Pertempuran Surabaya

Pertempuran yang paling berdarah sejak masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia terjadi di Surabaya. Pertempuran melawan pasukan Sekutu ini tidak terlepas kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, dalam usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai pada 2 September 1945. Para pemuda berhasil memiliki senjata dan bersama para pemuka pemerintah telah siap menghadapi pelbagai ancaman. Pada 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir A.W.S. Mallaby, mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah satuan bawahan dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Brigade ini mendapat tugas dari panglima AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu di Jawa Timur. Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemerintah daerah Jawa Timur, yang dipimpin oleh Gubernur RMTA. Suryo. Setelah Mallaby mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil Pemerintah RI Jawa Timur dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- (1) Inggris berjanji bahwa di dalam tentara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda,
- (2) Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman,
- (3) Akan segera dibentuk *Contact Bureau* (Kontak Biro) agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya,
- (4) Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. ¹¹⁸

Sejak itu pihak RI memperkenankan tentara Inggris memasuki kota, dengan syarat hanya menguasai objek-objek yang sesuai dengan tugasnya, seperti kamp-kamp interniran.

Ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada 26 Oktober 1945 malam hari, satu peleton dari *Field Security Section* di bawah pimpinan Kapten Shaw, menyerbu penjara Kalisosok. Mereka berusaha membebaskan Kolonel Huiyer, perwira Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawan, utusan

¹¹⁸ *Soeara Rakjat*, 26 Oktober 1945.

thorn atasan Brigadir Mallaby, tiba di Surabaya. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, dan Pemerintah RI Jawa Timur berunding dengan Sekutu. Perundingan siang hari itu menghasilkan keputusan, "segera diumumkan penghentian kontak senjata antara kedua belah pihak". Perundingan dilanjutkan pada malam hari antara Presiden Soekarno yang didampingi oleh wakil Pemerintah RI di Surabaya dan wakil Pemuda dengan pihak Inggris yang didampingi oleh Jenderal Hawthorn. Perundingan ini menghasilkan pengakuan terhadap eksistensi RI oleh Sekutu dan usaha-usaha menghindari bentrokan senjata diatur sebagai berikut :

- (1) Surat-surat selebaran yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorn dinyatakan tidak berlaku,
- (2) TKR dan Polisi diakui oleh Sekutu,
- (3) Seluruh Kota Surabaya tidak dijaga tentara Sekutu kecuali kamp-kamp tawanan yang dijaga oleh tentara Sekutu bersama-sama TKR,
- (4) Untuk sementara waktu pelabuhan Tanjung Perak dijaga bersama TKR, Polisi dan tentara Sekutu guna menyelesaikan tugas pengiriman obat-obatan untuk tawanan perang.¹²¹

Pelaksanaan hasil perundingan dalam rangka "menyelamatkan" pasukan Mallaby dari kehancurannya, dipertegas oleh penjelasan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin.

- (1) Dibentuk suatu Kontak Biró yang terdiri dari unsur pemerintah RI di Surabaya bersama-sama tentara Inggris,
- (2) Daerah pelabuhan yang dijaga bersama, kedudukan masing-masing ditentukan oleh Kontak Biro,
- (3) Daerah Darmo, daerah Kamp interniran orang-orang Eropa dijaga oleh tentara Sekutu. Hubungan antara Darmo dengan Pelabuhan Tanjung Perak diamankan untuk mempercepat pelaksanaan pemindahan interniran,
- (4) Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan kepada masing-masing pihak.

¹²¹ *Merah Putih*, 30 Oktober 1945.

Pada perundingan tersebut disepakati nama-nama anggota Kontak Biro dari kedua belah pihak. Dari pihak Inggris lima orang, yaitu Brigadir A.W.S. Mallaby, Kolonel L.H.O. Pugh, Wing Commander Groom, Mayor M. Hubson, dan Kapten H. Shaw, sedangkan dari pihak Indonesia sembilan orang anggota, yaitu Residen Sudirman, Doel Arnowo, Atmaji, Mohammad, Sungkono, Suyono Prawirobismo, Kusnandar, Roeslan Abdulgani, dan TD. Kundan sebagai juru bahasa. Perundingan selesai pada 30 Oktober 1945. Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn meninggalkan Surabaya pada pukul 13.00.

Sementara itu di beberapa tempat masih terjadi kontak senjata, sekalipun sudah diumumkan adanya gencatan senjata, karena itu para anggota Kontak Biro dari kedua belah pihak bersama-sama mendatangi objek-objek yang masih terjadi pertempuran. Mereka bermaksud menghentikan pertempuran setempat-setempat itu.

Tempat terakhir yang dikunjungi oleh kedua belah pihak adalah Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung ini masih diduduki oleh pasukan Inggris dan dikepung oleh ratusan pemuda. Setibanya rombongan di tempat ini terjadi insiden baru. Pemuda-pemuda menuntut agar Mallaby memerintahkan pasukannya menyerah. Mallaby tidak dapat menerima tuntutan itu. Tiba-tiba terjadi tembakan gencar berasal dari dalam gedung yang dilakukan oleh pasukan Inggris dengan maksud melindungi Mallaby. Pemuda-pemuda membalasnya. Akibat tembakan tersebut terjadi keributan dan kekacauan. Para anggota Kontak Biro tercerai-berai mencari perlindungan sendiri-sendiri. Dalam kekacauan itu Mallaby terbunuh di dalam mobilnya.

Dengan terbunuhnya Brigadir Mallaby, pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban Pemerintah RI di Surabaya. Pada 31 Oktober 1945 Letnan Jenderal Christison, panglima AFNEI, memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar mereka menyerah jika tidak ingin dihancurleburkan.

Rakyat Surabaya tidak dapat memenuhi tuntutan Christison. Kontak Biro Indonesia mengumumkan, bahwa kematian

Mallaby adalah akibat kecelakaan, tidak dapat dipastikan apakah ia mati akibat tembakan rakyat atau tembakan dari tentaranya sendiri.¹²²

Satu minggu setelah terbunuhnya Mallaby, pihak Inggris mengirim pasukan baru ke Surabaya di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh. Pada 7 November, Mansergh menulis surat kepada Gubernur Soerjo, yang isinya menuduh bahwa gubernur tidak menguasai keadaan, seluruh kota telah dikuasai oleh gerombolan perampok yang menghalang-halangi tugas Sekutu. Pada akhir suratnya ia mengancam bahwa pasukan Inggris akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti "gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum", itu serta "menggil" Gubernur Soerjo untuk "menghadap".¹²³

Dalam surat balasannya 9 November 1945, Gubernur Soerjo membantah semua tuduhan Mansergh. Gubernur Soerjo mengutus Residen Sudirman dan Roeslan Abdulgani untuk menyampaikan surat balasan. Pihak Inggris kemudian menyebar pamflet yang berisi ultimatum kepada Bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu bertanggal 9 November 1945 yang maknanya dirasakan menghina martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Isi pokoknya adalah pihak Inggris ingin membalas kematian Mallaby, rakyat Surabaya harus bertanggung jawab. Ultimatum itu disertai instruksi agar semua pemimpin Indonesia, pemimpin pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah, harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala dan kemudian menandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat.¹²⁴ Pemuda-pemuda bersenjata harus menyerahkan senjatanya dengan berbaris sambil membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00, 10 November 1945. Apabila ultimatum tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara.

¹²² *Soeara Rakjat*, 3 Oktober 1945.

¹²³ 100 hari di Surabaya, hal. 73-74.

¹²⁴ Lukisan Revolusi.

Ultimatum ini ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansergh. Dalam menanggapi ultimatum ini para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka berusaha menelepon presiden, namun diterima oleh Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Subardjo. Menteri luar negeri menyerahkan kepada rakyat Surabaya untuk menentukan sikap. Secara resmi pada pukul 22.00, Gubernur Soerjo melalui radio, menyatakan menolak ultimatum Inggris.

Sementara itu para pemuda sudah siap siaga membuat pertahanan di dalam kota. Komandan BKR Kota, Soengkono, pada 9 November pukul 17.00 mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri atas para pimpinan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di Markas BKR—Kota Jalan Pregolan No. 4. Soengkono mempersilakan mereka yang ingin meninggalkan kota. Semua yang hadir bertekad untuk mempertahankan Kota Surabaya. Mereka membubuhkan tandatangan pada secarik kertas sebagai tanda setuju dan diteruskan dengan ikrar bersama. Soengkono dipilih sebagai komandan pertahanan.

Kota Surabaya dibagi dalam tiga sektor pertahanan yang meliputi sektor Barat, sektor Tengah dan sektor Timur. Sektor Barat dipimpin oleh Koenkiyat, Sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, dan Sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodihardjo.¹²⁵ Lini pertahanan pertama ditentukan Jalan Jakarta ke Krembangan, Kapasan dan Kedungcowek. Lini kedua di sekitar *Viaduct*. Lini ketiga di daerah Darmo. Sementara itu radio pemberontakan yang dipimpin oleh Bung Tomo (Sutomo) membakar semangat juang rakyat. Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar No. 4.

Sesudah batas waktu ultimatum Sekutu habis, keadaan semakin gawat. Surabaya digempur dengan meriam dari laut dan dibom oleh kapal-kapal udara Inggris. Kontak senjata pertama yang terjadi di lini pertama berlangsung sampai pukul

¹²⁵ Wawancara dengan Majen (Pur) Soengkono, Surabaya, 4–6 Nopember 1974.

18.00. Inggris berhasil menguasai lini pertama. Gerakan pasukan Inggris dibantu dengan pemboman yang ditujukan pada sasaran pemusatan kekuatan pemuda. Surabaya yang digempur oleh Inggris dengan kekuatan lebih dari satu divisi itu berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir tiga minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris mempergunakan senjata-senjata modern dan berat. Sekalipun dalam pertempuran yang terakhir di Gunung-sari pada 28 November 1945, Surabaya jatuh ke tangan Inggris, namun perlawanan secara sporadis masih terus berlangsung. Untuk selanjutnya markas Pertahanan Surabaya dipindahkan ke Desa Lebaniwaras yang terkenal dengan nama Markas Kali.

3. Pertempuran Ambarawa

Hampir bersamaan dengan pertempuran Surabaya, pertempuran di Ambarawa terjadi sejak 20 November dan berakhir 15 Desember 1945. Ambarawa adalah kota yang terletak dipersimpangan Semarang—Magelang dan Semarang—Solo. Peristiwa ini dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang. Sesudah Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945, mereka meneruskan perjalanannya ke Ambarawa dan Magelang. Oleh pihak RI mereka diperkenankan mengurus interniran yang berada di kamp-kamp interniran Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA, yang kemudian mempersenjatai para bekas tawanan itu. Pada 26 Oktober 1945 pecah insiden di Magelang yang berlanjut menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Sekutu. Pasukan Inggris hampir saja mengulangi pertempuran Surabaya. Pertempuran berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Bethell datang di Magelang atas permintaan Markas Besar Sekutu pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan mencapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam naskah persetujuan yang terdiri atas 12 pasal. Naskah persetujuan itu antara lain berisi :

- (1) Pihak Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi

dan mengurus evakuasi APWI. Jumlah pasukan Sekutu dibatasi sejumlah yang diperlukan,

- (2) Jalan raya Magelang – Ambarawa terbuka bagi lalu-lintas Indonesia dan Sekutu,
- (3) Sekutu berjanji mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pihak Sekutu ingkar janji. Kesempatan dan kelelahan pasal-pasal persetujuan itu disalahgunakan untuk menambah jumlah serdadunya yang berada di Magelang.

Sementara itu pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa pada 21 November 1945 dengan perlindungan pesawat-pesawat terbang. Pertempuran berkobar di dalam kota pada 22 November 1945. Pasukan Sekutu melakukan pemboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan-pasukan pemuda yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api yang membelah Kota Ambarawa. Dari arah Magelang, Batalyon TKR dari Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi, pada 21 November 1945 melakukan serangan fajar dengan tujuan memukul pasukan Sekutu yang berkedudukan di Desa Pingit. Batalyon Imam Adrongi berhasil menduduki Pingit kemudian merebut desa-desa di sekitarnya.¹²⁶

Sementara itu batalyon Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul datangnya tiga batalyon yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalyon 10 Divisi III di bawah pimpinan Mayor Soeharto (sekarang presiden), Batalyon 8 di bawah pimpinan Mayor Sardjono dan pasukan pemuda pimpinan Sugeng. Dengan demikian kedudukan musuh ter-

¹²⁶ Semdam VII/Diponegoro, *Palagan Ambarawa dan Hari Indanteri*, Semarang, 1967, hal. 53.

kepong. Musuh mencoba mematahkan kepongitan itu, mengadakan gerakan melambung dengan menggunakan tank-tanknya sehingga kedudukan pasukan kita terancam dari belakang. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan kita diperintahkan oleh masing-masing komandannya untuk mundur ke Bedono. Dengan datangnya bantuan dari Resimen 2 di bawah pimpinan M. Sarbini dan batalyon Polisi Istimewa di bawah Onie Sastroatmodjo serta satu batalyon dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu.

Di Desa Jambu, para komandan pasukan mengadakan rapat koordinasi dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya satu komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran (MPP) yang bertempat di Magelang. Sejak itu medan Ambarawa dibagi atas empat sektor yaitu Sektor Utara, Sektor Selatan, Sektor Timur dan Sektor Barat.

Kekuatan pasukan yang bertempur di Ambarawa sejumlah 19 batalyon. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan yang berasal dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak gugurnya Letnan Kolonel Isdiman itu, Kolonel Soedirman, panglima divisi di Purwokerto, mengambil alih pimpinan pasukan. Situasi pertempuran berubah menjadi semakin menguntungkan pasukan kita. Pada 5 Desember 1945 musuh dapat diusir dari Desa Banyubiru yang merupakan garis pertahanan terdepan.

Setelah mempelajari situasi pertempuran, Kolonel Soedirman pada 11 Desember 1945 mengambil prakarsa untuk mengumpulkan para komandan sektor. Mereka melaporkan situasi pada sektor masing-masing. Akhirnya Kolonel Soedirman menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit dan perlu segera dilaksanakan pukulan terakhir. Rencana pelaksanaannya disusun sebagai berikut :

- (a) Serangan pendadakan yang serentak dari semua sektor,
- (b) Masing-masing komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan,

- (c) Pasukan-pasukan Badan-Badan Perjuangan sebagai cadangan,
- (d) Ditentukan hari serangan adalah 12 Desember pukul 04.30.¹²⁷

Pada 12 Desember 1945 dini hari pasukan-pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu satu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Diperkirakan pertahanan musuh yang terkuat di Benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama tiga hari. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk melakukan gerakan mundur. Pada 15 Desember 1945 musuh meninggalkan Kota Ambarawa. Peristiwa ini mempunyai arti penting mengingat letak Kota Ambarawa yang strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka mengancam tiga kota utama Jawa Tengah sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan terutama Yogyakarta, tempat kedudukan Markas Tertinggi TKR.

4. Pertempuran Medan Area

Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir T.E.D. Kelly mulai mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945, dengan kekuatan satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan ikut bersama mereka. Pemerintah RI yang menghormati tugas Sekutu di Sumatera Utara, memperkenalkan pasukan itu menempati beberapa hotel di Kota Medan seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Sebagian dari mereka kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya.¹²⁸ Sehari setelah itu sebuah tim dari RAPWI mendarat, kemudian mereka mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Berastagi untuk membebaskan para tawanan. Atas persetujuan Gubernur T.M.

¹²⁷ Semdam VII/Diponegoro, *op. cit.*, hal. 58.

¹²⁸ Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Medan, 1976, hal. 240.

Hassan mereka dikirim ke Medan. Ternyata di antara para bekas tawanan itu membentuk sebuah batalyon KNIL di Medan. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai "pemenang" dalam perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagai insiden dengan para pemuda. Insiden pertama terjadi di sebuah hotel di Jalan Bali (sekarang Kantor Polisi Kota) Medan pada 13 Oktober 1945. Insiden itu berawal dari seorang penghuni hotel bangsa Belanda yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih para pejalan kaki. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh korban 96 orang luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang NICA.¹²⁹ Insiden itu kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Berastagi.

Sementara itu pada 10 Oktober 1945, terbentuk TKR Sumatera Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir.¹³⁰ Selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap para mantan *giyugun* dan *heiho* di seluruh Sumatera Timur. Panggilan ini mendapat sambutan yang luar biasa. Di samping TKR, di Sumatera Timur terbentuk pula organisasi badan-badan perjuangan yang pada 15 Oktober berfusi menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) Sumatera Timur dan sebulan kemudian berubah menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Setelah terbentuknya partai-partai politik pada bulan November 1945 menyusul pula laskah-laskar partai PNI memiliki Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), PKI mempunyai barisan Merah, Masyumi memiliki Hizbullah, Parkindo membentuk Pemuda Parkindo.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Sekutu memulai aksinya untuk melemahkan kekuatan Republik dengan mengultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Hal ini juga dilakukan oleh Brigadir T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada 18 Oktober 1945. Sejak saat itu tentara NICA merasa memperoleh dukungan dari pihak Inggris. Demikian pula pasukan Sekutu pun

¹²⁹ Team Asistensi Pangdam II/Bukit Barisan, *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II/Bukit Barisan*, Jilid I, Medan, 1977, hal. 107.

¹³⁰ Biro Sejarah Prima, *op. cit.*, hal. 212.

melakukan aksi-aksi terornya sehingga timbul rasa permusuhan di kalangan pemuda. Patroli-patroli pasukan Inggris ke luar kota tidak pernah aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh Pemerintah RI. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan secara sepihak batas kekuasaannya.

Pada 1 Desember 1945 pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan *Fixed Boundaries Medan Area* di pelbagai sudut pinggiran Kota Medan. Sejak saat itulah istilah *Medan Area* menjadi terkenal. Tindakan sepihak Inggris ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Pasukan Inggris bersama NICA kemudian melakukan aksi "pembersihan" terhadap unsur-unsur Republik yang berada di Kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi mereka dan membuat Medan menjadi tempat yang tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, bahkan seringkali terjadi tembak menembak. Pada 10 Desember 1945 pasukan Inggris dan NICA yang berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes berhasil digagalkan. Selanjutnya seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda dan beberapa buah truk dihancurkan. Karena peristiwa ini, maka Brigadir T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang terbukti melanggar akan ditembak mati. Daerah yang ditentukan adalah delapan setengah kilometer dari batas Kota Medan dan Belawan.¹³¹ Perlawanan semakin memuncak. Pada bulan April 1946 tentara Inggris berhasil mendesak kedudukan Pemerintah RI ke luar Kota Medan. Gubernur, markas Divisi TKR, walikota Medan pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris sepenuhnya menguasai Kota Medan.

Setelah melakukan konsolidasi di luar kota, pada 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama:

¹³¹ Biro Sejarah Prima, *op. cit.*, hal. 255.

Komando Resimen Lasykar Rakyat Medan Area. Daerah pertempuran Medan Area dibagi atas empat sektor dan tiap sektor dibagi lagi atas empat sub sektor. Setiap sektor berkekuatan satu batalyon. Markas komando berkedudukan di Sudi Mengeri (Trepes).¹³² Di bawah komando inilah kemudian mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

D. STRATEGI DIPLOMASI

1. Diplomasi Sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian

Pada 1 November 1945 pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat politik. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa pemerintah menginginkan pengakuan terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dari Sekutu maupun dari pihak Belanda serta berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang dikuasai oleh pemerintah. Bersamaan dengan maklumat itu dikeluarkan pula pernyataan bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik sebagai sarana perjuangan.¹³³ Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tersebut kabinet presidensial yang dipimpin oleh presiden diganti dengan kabinet ministerial. Sebagai perdana menteri ditunjuk Sutan Sjahrir, yang segera membentuk pemerintah baru (Kabinet Sjarir). Program Kabinet Sjahrir antara lain meneruskan garis kebijakan kabinet sebelumnya, yaitu segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris.

Hasil dari kontak itu disepakati akan diadakan perundingan segitiga di Jakarta. Pemerintah Inggris yang ingin secepatnya melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugasnya di Indonesia mengirimkan Sir Archibald Clard Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia.¹³⁴ Pemerintah Belanda diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook, sedangkan Pemerintah RI diwakili oleh Perdana Menteri Syahrir. Pe-

¹³² Biro Sejarah Prima, *op. cit.*, hal. 285.

¹³³ *Berita Repoeblrik Indonesia*, No. I, Tahun I, 17 November 1945, hal. 3.

¹³⁴ *Soeara Moeda*, 17 Februari 1946.

rundingan dimulai pada 10 Februari 1946. Pada awal perundingan van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintahnya yang terdiri atas enam fasal yang isinya mengulangi pidato ratu Belanda pada 7 Desember 1942, sebagai berikut :

- (1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Nederland,
- (2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus oleh Pemerintah Belanda,
- (3) Sebelum dibentuknya persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun,
- (4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Sementara perundingan berlangsung suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan (PP) melakukan oposisi terhadap Kabinet Sjahrir.¹³⁴ Persatuan Perjuangan berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari -- 2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijakan Kabinet Sjahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat, maka Sjahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden, tetapi presiden menunjuk kembali Sutan Sjahrir menjadi formatur kabinet.

Kabinet Sjahrir kedua terbentuk pada 12 Maret 1946. Kabinet baru ini menyusun jawaban yang berisi usul balasan Pemerintah RI yang terdiri atas 12 fasal antara lain :

- (1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas wilayah Belanda,

¹³⁵ Persatuan Perjuangan dibentuk pada 4-5 Januari 1946 di Surakarta atas prakarsa Tan Malaka (*Lasjkar*, 7 Januari 1946). Semula bernama Volksfront. Pada tanggal 15-16 Januari 1946 dibentuk badan tetap bernama Persatuan Perjuangan (PP). Program minimum PP adalah menolak perundingan tanpa dasar pengakuan kemerdekaan 100%. PP diikuti oleh semua organisasi massa bahkan *BPKNIP* menyambut lahirnya PP, *Berita Repoeblik Indonesia*, No. 7, Tahun II, 1 Februari 1946, hal. 56.

- (2) Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum 8 Maret 1942 menjadi tanggungan Pemerintah RI,
- (3) Federasi Indonesia — Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda,
- (4) Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan Tentara Republik Indonesia,
- (5) Pemerintah Belanda harus membantu Pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
- (6) Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.¹³⁶

Usul balasan ini disampaikan kepada van Mook, tetapi Pemerintah Belanda tidak dapat menerima baik usul balasan Pemerintah RI tersebut meskipun pihak Republik sudah memberikan konsesi-konsesi, yang oleh sebagian besar rakyat Indonesia sukar diterima. Kemudian van Mook mengajukan usul pribadi. Ia bersedia mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa dalam rangka kerjasama pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Nederland. Wakil dari semua bagian Hindia Belanda dan wakil semua golongan minoritas akan berkumpul untuk menetapkan struktur negara Indonesia. Selanjutnya pasukan-pasukan Belanda akan mendarat untuk menggantikan tentara Sekutu.¹³⁷

Pada 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir memberikan jawaban yang disertai konsep persetujuan dalam bentuk traktat yang isinya antara lain :

¹³⁶ Dr. H.J. van Mook, *Indonesie, Nederland en de Wereld*, Amsterdam, 1949, hal. 123-124.

¹³⁷ Alastair M. Taylor, *Indonesian Independence and the United Nations*, London, 1960.

- (1) Supaya Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan *de facto* RI atas Jawa dan Sumatera,
- (2) Supaya RI dan Belanda bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS),
- (3) Negara Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Dengan jawaban Pemerintah RI tersebut, pendapat kedua belah pihak telah saling mendekati, karena itu kedua belah pihak memandang perlu perundingan ditingkatkan. Setelah perundingan di Jakarta antara Sutan Sjahrir dan van Mook yang disaksikan oleh Archibald Clark Kerr berakhir kedua pemerintah sepakat mengadakan perundingan di Hooze Veluwe (Negeri Belanda). Pemerintah RI mengirimkan tiga orang delegasi yang terdiri atas Mr. Suwandi, dr. Sudarsono dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.¹³⁸ Mereka berangkat ke Nederland pada 4 April 1946 bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Kerr. Delegasi Belanda terdiri atas Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Royen, Prof. van Asbeck, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Surio Santoso.

Dalam perundingan ini ternyata pihak Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir – van Mook – Clark Kerr di Jakarta, terutama usul Clark Kerr tentang pengakuan *de facto* kedaulatan RI atas Jawa dan Madura yang dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu, sedangkan Republik Indonesia masih harus tetap menjadi bagian dari Kerajaan Nederland; demikian juga campur tangan Republik dalam menentukan perwakilan daerah-daerah di luar daerah Republik ditolak oleh Belanda. Perundingan yang berlangsung selama 10 hari itu (14 – 25 April 1946) gagal. Untuk sementara waktu hubungan Indonesia–Belanda terputus. Pada 2 Mei 1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahnya yang terdiri atas tiga pokok :

¹³⁸ Drs. Susanto Tirtoprodjo SH, *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*, Djakarta, 1963, hal. 19.

- (1) Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran (*gemeennebest*) Indonesia yang berbentuk federasi (serikat),
- (2) Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan Nederland, Suriname, dan Curasao di lain pihak akan merupakan bagian-bagian dari Kerajaan Belanda,
- (3) Pemerintah Belanda akan mengakui *de facto* kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda.

Usul Belanda itu pada 17 Juni 1946 ditolak oleh Pemerintah RI, karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Usul balasan Pemerintah RI antara lain :

- (1) Republik Indonesia berkuasa *de facto* atas Jawa, Madura, Sumatera, ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda;
- (2) Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal ini *gemeenebest*, *rijkverband*, *koloni*, *trusteeship territory* atau federasi a'la Vietnam) dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menambah jumlah pasukannya;
- (3) Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan (*overgangs-periode*) di bawah kedaulatan Belanda.¹³⁹

2. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi

Sesudah Kabinet Sjahrir dijatuhkan oleh Persatuan Perjuangan dalam sidang KNIP di Solo pada pertengahan bulan Februari 1946, sebenarnya Persatuan Perjuangan mengharapkan pimpinan PP Tan Malaka yang ditunjuk sebagai formatur kabinet. Penunjukan Sutan Sjahrir sebagai formatur menimbulkan ketidakpuasan kelompok PP. Sebelum presiden menunjuk Sjahrir, Adam Malik menghadap presiden meminta

¹³⁹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia*, Jogjakarta, 1949, hal. 354 dan seterusnya.

agar Tan Malaka diberi mandat untuk menyusun kabinet. Presiden menyatakan bahwa ia tidak dapat menerima Tan Malaka sebagai formatur. Jawaban yang sama juga diberikan oleh wakil presiden kepada Chairul Saleh, ketika ia menghadap wakil presiden.¹⁴⁰ Keinginan kelompok PP ini berdasarkan atas mayoritas suara dalam KNIP dan merupakan kesempatan untuk menghantam lawan politiknya, namun presiden dan wakil presiden mempertahankan Sutan Sjahrir karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis Soekarno-Hatta, khususnya mengenai politik diplomasi Tan Malaka dan kelompoknya menghendaki politik konfrontasi total terhadap Belanda.

Pada 12 Maret 1946 Kabinet Sjahrir II terbentuk, dan mengumumkan program kabinetnya, yang antara lain meneruskan kebijakan diplomasinya, dengan mengajukan usul balasan kepada Pemerintah Belanda. Persatuan Perjuangan tetap meneruskan oposisinya terhadap Kabinet Sjahrir, sekalipun program kabinet baru sudah merupakan kompromi antara pendapat Persatuan Perjuangan dengan haluan politik pemerintah. Program kabinet baru itu tidak memuaskan golongan Tan Malaka dan kawan-kawan yang menginginkan kedudukan dalam pemerintahan.¹⁴¹

Pada 17 Maret 1946 beberapa tokoh politik, khususnya dari Persatuan Perjuangan, ditangkap. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan penangkapan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar sebagai akibat tindakan pemimpin-pemimpin politik itu, karena terdapat bukti-bukti bahwa mereka mengacaukan, melemahkan dan memecah persatuan. Mereka melakukan oposisi yang tidak sehat dan tidak loyal melainkan hendak melemahkan pemerintah dan indikasi kuat mereka akan mengubah susunan negara di luar undang-undang.¹⁴²

¹⁴⁰ Adam Malik, *Mengabdikan Republik*, jilid II, Jakarta, 1978, hal. 167-168; Mohammad Hatta, *Memori*, Jakarta, 1978, hal. 481-482.

¹⁴¹ Sapta Darma Muhammad Yamin.

¹⁴² *Kedaulatan Rakyat*, 1 April 1946, Pengumuman Pemerintah sebagai penjelasan dari Pengumuman Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1946.

yang ditugasi untuk membahas penyelesaian masalah tersebut.

Ketiga, masalah golongan minoritas, Pemerintah RI berjanji akan melindungi mereka.¹⁴⁴

Sebagai realisasi pertemuan Sjahrir—Lord Killearn pada 17 September 1946 Pemerintah RI mengirimkan delegasi TRI dalam rangka pembicaraan gencatan senjata. Delegasi dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudibjo beserta enam anggotanya, antara lain Komodor S. Surjadarma, Kolonel M. Simbolon, dan Kolonel TB. Simatupang.¹⁴⁵ Dalam perundingan dengan Inggris ini delegasi Indonesia mengajukan nota yang terdiri atas lima fasal :

- (1) gencatan senjata secara total di darat, laut dan udara,
- (2) penghentian pemasukan pasukan Belanda ke Indonesia,
- (3) jaminan dari Inggris bahwa Sekutu tidak akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada pihak Belanda,
- (4) pembukaan atau kebebasan memakai jalan di darat, laut dan udara oleh pihak RI,
- (5) penyingkiran orang Jepang baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia.¹⁴⁶

Setelah berunding selama lima hari (9 – 14 Oktober 1946) tercapai persetujuan sebagai berikut :

- (1) Delegasi Indonesia, Inggris dan Belanda mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan dan kekuatan militer masing-masing pada saat dicapainya,
- (2) Disetujui bersama pembentukan Komisi Gencatan Senjata yang bertugas untuk menimbang dan memutuskan pelaksanaan gencatan senjata dan pengaduan terhadap pelanggaran,
- (3) Komisi ini bekerja sampai 30 November 1946. Susunan Komisi Gencatan Senjata dari pihak Inggris adalah Mr.

¹⁴⁴ *Kedaulatan Rakjat*, 20 Agustus 1946.

¹⁴⁵ *Kedaulatan Rakjat*, 16 September 1946.

¹⁴⁶ *Ibid*, 25 September 1946.

Wright, Mayor Jenderal A.C. Mansergh, Kolonel Laut Cooper, Komodor Udara Stevens, dan Mayor Jenderal Formann, dari pihak Indonesia dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, Laksamana Muda M. Nazir, dan Komodor (Jenderal-Mayor) Surjadarma, dan dari pihak Belanda Dr. Idenburgh, Letnan Jenderal Spoor, Laksamana Pinke, dan Mayor Jenderal Kengen,

- (4) Disetujui bersama membentuk sub komisi teknis yang terdiri atas para kepala staf militer Inggris, Indonesia, dan Belanda. Tugas sub komisi ini adalah selekasnya memberi perintah penghentian tembak-menembak, menyusun instruksi untuk pedoman pelaksanaan gencatan senjata, dan membentuk badan arbitrase.¹⁴⁷

Persetujuan mengenai gencatan senjata tersebut di atas tercapai baru pada tingkat prinsip dan bersifat politis.¹⁴⁸ Karena itu Panglima Besar Soedirman dalam pidato radionya menegaskan bahwa belum ada perintah penghentian tembak-menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan gencatan senjata. Sesuai dengan persetujuan itu pada akhir November dan awal Desember diadakan perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menetapkan garis demarkasi. Perundingan itu dihadiri oleh anggota Komisi Gencatan Senjata dari kedua belah pihak, tetapi tidak menghasilkan sesuatu keputusan.

Kabinet Sjahrir III melanjutkan perundingan politik dengan Belanda, setelah membeku hampir lima bulan, sejak penolakan usul Belanda bulan Juni 1946 dan krisis politik di dalam negeri bulan Juni 1946. Dalam perundingan ini Perdana Menteri Sjahrir memimpin sendiri delegasi Indonesia RI. Anggota delegasi berjumlah enam orang; tiga orang yaitu Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan dr. AK. Gani, sedangkan tiga anggota-anggota cadangan yaitu Mr. Amir Sjarifuddin, dr. Sudarsono, dan Dr. J. Leimena. Yang dijadikan dasar dan

¹⁴⁷ *Kedaulatan Rakjat*, 10 Oktober 1946.

¹⁴⁸ *Ibid.*, 18 Oktober 1946.

pedoman perundingan adalah program politik pemerintah, yang terdiri atas :

- (a) berunding atas dasar pengakuan Negara Republik Indonesia, merdeka 100%,
- (b) mempersiapkan rakyat dan negara disegala lapangan, politik, militer, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan RI.¹⁴⁶

Pihak Belanda membentuk komisi perundingan yang bernama Komisi Jenderal. Komisi ditugasi untuk berunding dengan Indonesia, dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan anggota Max van Poll, F. de Boer dan H.J. van Mook. Perundingan dimulai pada 7 Oktober 1946 di Jakarta.¹⁵⁰ Dalam perundingan ini Komisi Jenderal mengajukan usul-usul, antara lain, "seandainya Pemerintah RI bersedia menerima masa peralihan, diusulkan agar RI mau menerima kedudukan sebagai negara bagian". Usul lainnya adalah, "Komisi Jenderal menuntut agar RI memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga benar-benar menguasai keadaan di daerah yang dikuasainya". Pihak RI menyatakan bahwa dalam pikiran Komisi Jenderal masih diliputi oleh *rijkseenheidsgedachte* (gagasan kesatuan Kerajaan Belanda), sehingga masih menuntut RI agar tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Usul-usul komisi sulit diterima oleh RI hal inilah yang menjadi sebab untuk sementara perundingan tertunda. Kemudian pihak RI membuka kemacetan dengan usul baru yang berisi tawaran pengembalian hak-hak milik swasta Belanda. Karena tawaran-tawaran ini dianggap menguntungkan, maka Komisi Jenderal menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintahnya. Akhirnya perundingan diteruskan di Linggajati, suatu tempat peristirahatan di selatan Cirebon, pada 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada 15 November dan telah tersusun berupa naskah persetujuan yang terdiri atas 17 fasal. Naskah ini kemudian diparaf oleh delegasi kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah persetujuan itu antara lain adalah :

¹⁴⁹*Ibid.*, 7 Oktober 1946.

¹⁵⁰*Ibid.*, 8 Oktober 1946.

- (1) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang diberi nama Negara Indonesia Serikat,
- (2) Pemerintah NIS akan bekerjasama dengan Pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda.¹⁵¹

Setelah naskah diparaf, timbul pelbagai macam tanggapan dari masyarakat Indonesia. Mengenai masalah ini, Sutan Sjahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima oleh rakyat dan tanggapan dari masyarakat dijawab secara tuntas.

"Naskah persetoedjoean boekanlah oentoek ditafsirkan, sehingga menimboelkan anggapan seolah-olah meroepakan soerat wasiat jang menentukan hidoep-mati dan tidak dapat dioebah-oebah. Naskah sekedar alat oentoek mentjari djalan baroe bagi perdjoeangan di masa mendatang dan sebagai batoe lontjatan mentjapai toejoean, jaitu memperbaiki kedoedoekan politik. Hal ini dapat memberikan harapan kepada rakjat, oentoek menoendjoekkan djalan jang baik, jang tidak semata-mata beroepa statoes juridis, tetapi kedoedoekan politik".¹⁵²

Beberapa partai politik menyatakan menentang naskah persetujuan itu adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita. Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata, sedangkan yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BII, Lasykar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik, sebaliknya Dewan Pusat Kongres Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah persetujuan demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka yang berbentuk federasi. Kelompok yang menolak Linggajati bergabung di dalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri atas partai serta organisasi tersebut di atas, sehingga ratifikasi persetujuan itu oleh KNIP tertunda, karena suara kelompok ini merupakan suara mayoritas.¹⁵³

¹⁵¹ Lihat lampiran 3.

¹⁵² *Soeara Merdeka*, 3 Desember 1946.

¹⁵³ *Soeara Merdeka*, 3 Desember 1946.

Untuk mendobrak kemacetan di KNIP, pemerintah bertindak mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP. Untuk memperoleh suara mayoritas yang pro-Linggajati, pada bulan Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946. Peraturan ini berisi tentang susunan baru KNIP, dengan menambah jumlah anggota dan melarang para pejabat negara aktif sebagai anggota KNIP. Kepada partai-partai politik besar disuruh agar memilih calon-calon anggota sejumlah dua kali lipat jumlah hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil dari daerah di luar Jawa dan Madura.¹⁵⁴

Peraturan presiden ini mendapat tantangan keras dari partai-partai yang anti-Linggajati. PNI dan Masyumi berpendapat bahwa peraturan presiden tersebut tidak sah, karena setelah ada kabinet, presiden tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat legislatif.¹⁵⁵ Mereka juga menggugat bahwa peraturan itu dibuat tanpa konsultasi dengan Badan Pekerja KNIP. Hal ini mereka anggap sebagai pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat,¹⁵⁶ namun partai-partai pemerintah khususnya Partai Sosialis menyatakan bahwa peraturan presiden tersebut sah berdasarkan hak prerogatif presiden. Di dalam sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat di Malang, presiden menolak keberatan golongan penentang peraturan ini. Ia menyatakan bahwa penambahan anggota baru, membuat susunan KNIP menjadi lebih sempurna dan lebih mewakili seluruh rakyat Indonesia. Presiden mempersilakan sidang untuk mempertimbangkan keputusan Badan Pekerja yang menentang peraturan presiden tersebut.¹⁵⁷

Perdebatan pro dan kontra PP No. 6/1946 yang semakin tajam akhirnya telah mendorong Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta untuk tampil dan berpidato di depan sidang KNIP di Malang pada 27 Februari 1947. Ia menyatakan, ". kalaoe

¹⁵⁴ *Ibid.*, 4 Januari 1947.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 15 Januari 1947.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 4 Januari 1947.

¹⁵⁷ Parada Harahap, *Saat Bersejarah*, Djakarta, 1951, hal. 20.

pertangoengdjawaban kami dirasa tidak memoeaskan, lebih baik mentjari Presiden dan Wakil Presiden baroe”¹⁵⁸

Sidang menerima Peraturan Presiden tersebut, dan pada 28 Februari 1947 dilantik sejumlah 232 anggota baru KNIP.¹⁵⁹ Dengan penambahan suara itu pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi Persetujuan Linggajati. Akhirnya pada 25 Maret 1947 naskah persetujuan itu ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing.

Sekalipun Persetujuan Linggajati telah ditandatangani, namun hubungan Indonesia–Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan tafsir mengenai beberapa fasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan, apa lagi pihak Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan bersama pada 12 Februari 1947, sebelum persetujuan ditandatangani. Pada 27 Mei 1947 Komisi Jenderal menyampaikan nota kepada Pemerintah RI melalui misi Idenburgh. Nota tersebut harus dijawab oleh Pemerintah RI dalam ”tempo” dua minggu.¹⁶⁰ Isi nota tersebut adalah :

- (1) Membentuk pemerintahan peralihan bersama,
- (2) Garis demiliterisasi hendaklah diadakan dan pengacauan-pengacauan di daerah yang bergabung dalam Konferensi Malino seperti NIT, Kalimantan, Bali dan lain-lainnya harus dihentikan,
- (3) Sehubungan dengan tugas tentara, harus diadakan pembicaraan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk ini perlu sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Kerajaan Belanda tinggal di Indonesia untuk membangun suatu pertahanan yang modern,

¹⁵⁸ *Soeara Rakjat*, 28 Pebruari 1947. lihat juga : Susanto Zuhdi, ”*Perjanjian Linggarjati dilihat dari beberapa Surat Kabar Lokal di Jawa*”, hal. 145–14, dalam AB. Lapien & P.J. Drooglever (penyunting), *Menelusuri Jalur Linggajati Diplomasi Dalam Persepektif Sejarah*, Jakarta 1992.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 45; *Soeara Merdeka*, 14 Februari 1947.

¹⁶⁰ *Merdeka*, 30 Mei 1947.

- (4) Pekerjaan bersama dalam waktu yang singkat, dapat dijamin dengan pembentukan alat kepolisian (*Gendarmerie*) yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri,
- (5) Tentang masalah perekonomian, hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama.¹⁶¹

Pada 8 Juni 1947 Pemerintah RI menyampaikan nota balasan yang terdiri atas empat pokok masalah, yaitu masalah pemerintahan peralihan/politik, masalah militer, masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya.

Mengenai masalah politik, pemerintah menyatakan bersedia mengakui Negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan persetujuan Linggajati. Status Borneo harus dibicarakan bersama oleh RI-Belanda. RI tetap diakui sebagaimana termaktub dalam persetujuan Linggajati. Dalam bidang militer Pemerintah RI menyetujui dimiliterisasi daerah demarkasi antara kedua pihak dengan menyerahkan penjagaan daerah bebas militer itu kepada polisi. Peta demarkasi dikembalikan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak harus diundurkan dari daerah demarkasi ke kota garnisun masing-masing. Penyelenggaraan fasal 16 tentang pertahanan Indonesia Serikat, adalah urusan Negara Serikat sebagai kewajiban nasional dan pada dasarnya harus dilakukan oleh tentara nasional sendiri. *Gendarmerie* bersama ditolak.¹⁶²

Meskipun nota balasan itu cukup tegas, tetapi Sjahrir dianggap terlalu jauh memberikan konsesi kepada Belanda sehingga partainya sendiri melepaskan dukungannya, yang kemudian disusul oleh partai-partai lain. Akhirnya Kabinet Sjahrir III menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.¹⁶³

¹⁶¹ *Bahtera*, No. 7, Tahun I, 15 Juni 1947, hal. 2.

¹⁶² *Merdeka*, 10 Juni 1947.

¹⁶³ *Nasional*, 27 Juni 1947.

E. MENGHADAPI AKSI MILITER BELANDA I

1. Aksi Militer I

Gejala-gejala bahwa pihak militer Belanda akan melakukan aksi militer sudah terlihat sejak awal 1947. Pada 17 Maret 1947 dengan kekuatan 4.000 orang marinir yang dipimpin oleh Letnan Van Der Harelt, Belanda menyerbu Kota Mojokerto (Jawa Timur). Peristiwa ini merupakan pelanggaran atas persetujuan penghentian tembak-menembak yang diberlakukan sejak 15 Februari 1947. Pemerintah RI mengajukan protes kepada Komisi Jenderal dan menuntut agar pasukan Belanda ditarik mundur dari Mojokerto. Surat jawaban Komisi Jenderal kepada Pemerintah RI cukup singkat, yaitu : "Pemerintah Belanda menyatakan menyesal atas peristiwa itu", tanpa suatu keterangan yang jelas.¹⁶⁴

Serbuan Belanda terhadap Mojokerto merupakan aksi unjuk kekuatan. Sampai awal 1947 tentara Belanda di Jawa dan Sumatera berkekuatan tiga divisi. Di Jawa Timur ditempatkan satu divisi yang disebut Divisi C yang terdiri atas tiga brigadir. Di Jawa Barat ditempatkan Divisi 7 Desember yang berkekuatan tiga brigadir. Di Sumatera telah tersusun tiga brigadir berdiri sendiri yang masing-masing ditempatkan di Medan (Brigadir X), di Padang (Brigadir Y), dan di Palembang (Brigadir Z).¹⁶⁵

Peristiwa pelanggaran gencatan senjata ini diamati oleh pimpinan nasional dan pimpinan TRI. Pada 5 Mei 1947 presiden mengeluarkan penetapan, yang dalam waktu yang singkat TRI diintegrasikan dengan laskar menjadi satu organisasi tentara. Panitia kerja integrasi dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno dibantu oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, Panglima Besar Jenderal Soedirman, dan Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. Panitia Kerja menghasilkan keputusan, mensahkan nama Tentara

¹⁶⁴ *Soera Rakjat*, 4 Maret 1947.

¹⁶⁵ Dr. A.H. Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersendjata*, Jakarta 1965, hal. 104.

Nasional Indonesia (TNI) sebagai wadah bagi semua pejuang bersenjata. Sementara itu Markas Besar Angkatan Perang mengadakan rapat-rapat untuk menyusun rencana pertahanan yang disebut dengan istilah *Wehrkreise*, artinya "setiap daerah berswadaya mempertahankan daerah masing-masing dengan mengintegrasikan semua kekuatan yang ada di daerah itu". Sebagai realisasi dari rencana itu di Jawa Timur dibentuk daerah pertahanan dan Kolonel Drs. Moestapa diangkat sebagai panglimanya dan Kolonel AH. Nasution sebagai panglima pertahanan Jawa Barat, namun dalam pelaksanaannya TRI masih menggunakan sistem pertahanan linier, belum memadai makna sistem *Wehrkreise*.

Belanda memerlukan waktu $\pm$ empat bulan sebelum pasukannya yang dikenal dengan Aksi Militer I. Dalam bulan April dan awal Mei 1947 telah ditetapkan dua jenis rencana, yaitu :

- (1) Dengan menguasai strategi militer diarahkan untuk menguasai ekonomi pada bagian penting Jawa dan Sumatera.
- (2) Dengan serangan tentara menguasai seluruh Jawa.

Pada 21 Juli 1947 dari kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera yang telah diduduki Belanda melancarkan serangan ke wilayah RI. Dari Jakarta dan Surabaya, Markas Belanda menguasai daerah-daerah perkebunan subur dengan tujuan untuk menguasai Yogyakarta, Ibukota RI. Di Sumatera, dari Palembang dan Medan pasukan Belanda menyerbu daerah-daerah yang kaya secara ekonomi. Dengan keunggulan persenjataan-nya, pasukan Belanda dengan mudah menerobos daerah-daerah RI, apa lagi pertahanan TNI yang karena tidak berpengalaman yang bersipat linier, dengan mudah pasukan Belanda melewati jalan-jalan raya dan menguasai kota-kota dan daerah di sekitarnya. Pasukan TNI yang tidak mampu menahan serbuan itu menyingkir ke samping membentuk kantong-kantong pertahanan gerilya di daerah-daerah pedalaman.

^{165a} P.M.H. Groen, *Marsroutes en Dwaalspoelen Het Nederland Militair Strategisch Bleid Indonesia 1945-1950*, s'Gravenhage 1991, hal. 92.

2. Diplomasi yang Gagal

Agresi terbuka Belanda pada 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi dari dunia. Pada 30 Juli 1947 Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi pada PBB agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima baik dan pada 31 Juli dimasukkan sebagai acara pembicaraan Dewan Keamanan. Pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, yang dimulai pada 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler, yang anggotanya terdiri atas para konsul jenderal yang ada di Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Dr. Walter Foote dan beranggotakan konsul jenderal Cina, konsul jenderal Belgia, konsul jenderal Perancis, konsul jenderal Inggris, dan konsul jenderal Australia.¹⁶⁶ Komisi Konsuler ini diperkuat oleh personel militer Amerika Serikat dan Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Komisi Konsuler menyatakan bahwa sejak 30 Juli sampai 4 Agustus pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan pasukan-pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Perintah penghentian tembak-menembak tidak memuaskan. Belum ada tindakan yang praktis dalam menyelesaikan masalah penghentian tembak-menembak untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh.¹⁶⁷

Dewan Keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat, bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan harus dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik. Indonesia dan Belanda dipersilakan masing-masing memilih satu negara yang dipercaya untuk mengawasi peng-

¹⁶⁶ *Merdeka*, 15 Oktober 1947.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 11 Oktober 1947.

hentian tembak-menembak. Dua negara yang terpilih oleh Indonesia dan Belanda dipersilakan memilih satu negara ketiga untuk ikut serta sebagai anggota komisi. Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota komisi, Belanda memilih Belgia dan kedua negara yang terpilih itu memilih Amerika Serikat. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham. Komisi PBB ini dikenal sebagai *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) atau Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam masalah militer, KTN hanya berkewajiban memberikan saran dan usul, dan tidak mempunyai hak untuk memutuskan. KTN mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947, setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua pemerintah, akhirnya disepakati untuk kembali ke meja perundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat berunding, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap bahwa di Jakarta tidak ada jawatan RI yang aktif.¹⁶⁸ Republik menginginkan perundingan diselenggarakan pada suatu tempat di luar daerah pendudukan Belanda. KTN mengambil jalan tengah dan mengusulkan agar kedua belah pihak menerima tempat perundingan di atas sebuah kapal Amerika Serikat yang disediakan atas perantaraan KTN.

Sebelum itu sudah dibentuk komisi untuk melaksanakan gencatan senjata yang disebut Komisi Teknis. Anggota-anggota Komisi Teknis dari pihak Republik dipimpin Menteri Kesehatan Dr. J. Leimena. Anggota-anggotanya adalah Mr. Abdul Madjid, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, Kolonel Simbolon, dan Letnan Kolonel Bustomi.¹⁶⁹ Komisi Teknis pihak Belanda dipimpin oleh van Vredenburg dengan anggota-anggota Mayor Jenderal Buurman van Vreden, Kolonel Drost, Mr. Zulkarnaen, Letnan Kolonel Surio Santoso, Dr. Stuyt, dan Dr. P.J. Koets.¹⁷⁰ Di dalam

¹⁶⁸ *Merdeka*, 22 Oktober 1947.

¹⁶⁹ *Ibid.*, 3 November 1947. Kolonel M. Simbolon dan Letnan Kolonel Bustomi dari Sumatera.

¹⁷⁰ *Min Pao*, 18 November 1947.

perundingan Komisi Teknis itu, usul mengenai daerah bebas militer dianggap kurang praktis dan Belanda tetap menuntut dipertahankannya garis demarkasi sesudah 21 Juli 1947 yakni garis yang menghubungkan kedudukan-kedudukan pasukan Belanda yang dimajukan sesudah ke luarnya perintah Dewan Keamanan untuk menghentikan tembak-menembak. Garis demarkasi ini terkenal dengan garis Van Mook. Kemudian mereka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingannya di Kaliurang, yang isinya "dilarang melakukan sabotase, intimidasi, pembalasan dendam, dan tindakan yang semacam terhadap orang-orang, golongan dan harta benda kedua pihak."

Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, presiden memberikan mandat kepada Mr. Amir Sjarifuddin sebagai formatur kabinet. Kabinet Amir Sjarifuddin meneruskan program kabinet lama berunding dengan Belanda. Karena kedua belah pihak menerima usul KTN dipimpin oleh Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifuddin sendiri, dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Anggota-anggota terdiri atas dr. Tjoa Siek Ien, Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan, Ir. Djuanda dan Setiadjudi, serta 32 orang penasihat.¹⁷¹

Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojo-atmodjo, dengan Mr. H.A.L. van Vredenburg sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya terdiri atas Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran Kartanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A.H. van Ophuyzen, dan A. Th. Baud sebagai sekretaris.¹⁷² Perundingan yang diselenggarakan di geladak kapal angkut pasukan milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Renville, dibuka pada 8 Desember 1947 di bawah pimpinan Herremans, wakil Belgia di dalam KTN.¹⁷³

Ketika kedua belah pihak sepakat untuk kembali berunding, perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu. Pihak Be-

¹⁷¹ *Merdeka*, 29 Oktober 1947.

¹⁷² *Kedaulatan Rakjat*, 9 November 1947.

¹⁷³ *Merdeka*, 9 November 1947.

landa menolak saran KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB dan menolak merundingkan soal-soal politik selama masalah gencatan senjata belum beres.¹⁷⁴ Karena perundingan macet, maka Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan keterangan mengenai sebab-sebab kemacetan tersebut. Dinyatakan bahwa pihak Belanda hanya menyetujui hal-hal yang menguntungkan dirinya. Gerakan pasukan Belanda cenderung ingin berusaha menduduki daerah RI seluas mungkin dengan dalih operasi-operasi "pembersihan", namun situasi pada 4 Agustus 1947 menunjukkan bahwa pihak Belanda hanya menduduki kota-kota saja, di luar kota Pemerintah RI dan TNI tetap utuh dan aktif. Garis depan pertahanan RI ada di mana-mana, membentuk kantong-kantong pertahanan di belakang kedudukan Belanda yang terdepan, karena ketika Belanda menyerbu TNI tidak mundur, melainkan bergerak ke samping.

Untuk mengatasi kemacetan perundingan Komisi Teknis itu, KTN mengajukan usul baru, yaitu supaya masing-masing pihak berunding dulu dengan KTN. Kedua belah pihak setuju dan mengadakan perundingan pendahuluan dengan KTN. Dari hasil perundingan itu KTN menyimpulkan bahwa persetujuan Linggajati dapat dijadikan dasar perundingan selanjutnya, namun terbentur oleh masalah gencatan senjata. Belanda tetap menginginkan adanya garis demarkasi van Mook, sedangkan pihak Republik menolak. Wakil Australia mengusulkan diadakannya daerah demiliterisasi yang diawasi oleh polisi. Pasukan masing-masing mundur sejauh 10 kilometer. Kemudian KTN mengajukan usul politik yang didasarkan atas persetujuan Linggajati, yaitu:

- (a) Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia,
- (b) Kerjasama Indonesia-Belanda,
- (c) Suatu negara yang berdaulat atas dasar federasi,
- (d) Uni antara Indonesia Serikat dan bagian lain Kerajaan Nederland.

¹⁷⁴ *Ibid.*, 11 Desember 1947.

Sebagai balasan atas usul KTN, pihak Belanda mengajukan 12 usulan prinsip politik untuk disampaikan kepada pihak Indonesia. Usul-usul prinsip Belanda antara lain, pengurangan pasukan dan menghidupkan kegiatan ekonomi, tetapi dalam usul itu tidak disebutkan masalah penarikan tentara Belanda. Belanda menyatakan bahwa usul tersebut adalah usaha yang terakhir, dan apabila ditolak, Belanda tidak mau lagi melanjutkan perundingan, dan RI diberi waktu 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari bahwa sikap ultimatif pihak Belanda itu mengakibatkan situasi menjadi sangat berbahaya. Untuk mengatasi masalah itu, Dr. Graham mengajukan enam prinsip tambahan untuk mencapai penyelesaian politik. Karena prinsip-prinsip itu oleh KTN disampaikan kepada mereka, maka Pemerintah RI mendapat jaminan KTN, bahwa kekuasaan Republik tidak akan berkurang selama masa peralihan sampai diserahkan ke daulatan Belanda kepada negara federal Indonesia. RI mau menerima prinsip-prinsip KTN itu karena prinsip yang ke 4 dari enam prinsip itu dinyatakan bahwa antara enam bulan sampai satu tahun sesudah ditandatanganinya persetujuan politik akan diadakan plebisit di seluruh Indonesia di bawah pengawasan KTN, untuk menentukan apakah penduduk berhasrat bergabung dengan Republik atau tidak. Pihak Belanda juga berjanji akan menerima prinsip yang diajukan oleh KTN apabila pihak RI menyetujui sampai batas waktu 9 Januari 1948. Akhirnya pada 17 Januari kedua belah pihak bertemu kembali di geladak kapal Renville untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikan oleh KTN.

Sementara perundingan Renville berlangsung, pihak Belanda masih berusaha membentuk negara-negara boneka. Konferensi Jawa Barat II diselenggarakan di Bandung pada 16 - 19 Desember 1947 untuk menentukan status Jawa Barat sebagai negara yang terlepas dari RI. Konferensi ini mendapat tantangan dari rakyat Jawa Barat sendiri, yang menyatakan bahwa Jawa Barat tak dapat dipisahkan dengan RI.¹⁷⁵ Di samping

¹⁷⁵ *Merdeka*, 22 Desember 1945.

itu Belanda juga membentuk Komite Indonesia Serikat sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Beel pada 19 Desember 1947 dan membentuk Negara Sumatera Timur¹⁷⁶

Di pihak RI, ketika berlangsungnya perundingan Kabinet Amir Syarifuddin diadakan *reshuffle* untuk memperkuat Kabinet 169 dalam melaksanakan perundingan.¹⁷⁷ Kabinet Amir menjadi kabinet koalisi yang kuat dan kompak, namun setelah Kabinet Amir menerima Persetujuan Renville, kembali partai-partai politik menentanginya. Masjumi yang merupakan pendukung utama kabinet, menarik kembali menteri-menterinya, karena Masjumi berpendapat bahwa Amir Sjarifuddin menerima begitu saja ultimatum Belanda atas dasar 12 prinsip politik dan enam tambahan dari KTN. Tindakan Masjumi didukung oleh PNI. Sebagai hasil sidang Dewan Partai pada 18 Januari, PNI menuntut supaya Kabinet Amir menyerahkan mandatnya kepada presiden. PNI menolak Persetujuan Renville, karena persetujuan itu tidak menjamin dengan tegas akan kelanjutan dan kedudukan Republik. Kabinet Amir yang hanya didukung oleh "Sayap Kiri" tidak berhasil dipertahankan, dan pada 23 Januari 1948 Amir Sjarifuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.

F. MENUMPAS PEMBERONTAKAN KOMUNIS

1. Biro Perjuangan, TNI Bagian Masyarakat, Sayap Kiri

Sesudah rapat besar TKR pada bulan November 1945, oleh beberapa perwira diusulkan agar pada Markas Tertinggi dibentuk badan pendidikan tentara. Usul tersebut disetujui oleh pimpinan TKR dan sebagai realisasinya dibentuk suatu komisi yang bertugas menyusun garis-garis besar tentang pendidikan tentara. Anggota komisi terdiri atas enam orang.¹⁷⁸ Di sam-

¹⁷⁶ *Merdeka*, 22 Desember 1945.

¹⁷⁷ Hasil reshuffle kabinet tanggal 12 November 1947 adalah Partai Sosialis 7 kursi, *Masyumi* 5 kursi, PNI 7 kursi, PSII 5 kursi, PBI, PKI, Partai Katholik, Parkindo, Badan Kongres Pemuda masing-masing 1 kursi, golongan tak berpartai 5 kursi. Jumlah 37 kursi, *Merdeka*, 13 November 1947.

¹⁷⁸ Anggota komisi: KRT. Soegiono Josodiningrat, Mr. Sunario, Mr. Kasman, Surjadarma, Kaprawi, Martono Tirtonegoro.

ping komisi dibentuk pula staf Badan Pendidikan Tentara yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat.¹⁷⁹ Kedua badan itu pada bulan Februari 1946 berhasil merumuskan lima bidang pendidikan bagi TRI, yaitu bidang politik, agama, kejiwaan, sosial, dan pengetahuan umum. Anggota-anggota badan pendidikan itu kemudian diangkat sebagai perwira TRI.

Pada organisasi TRI dan Kementerian Pertahanan, bulan Mei 1946 terdapat kesepakatan antara Menteri Pertahanan, pimpinan TRI dan pimpinan laskar-laskar pada 24 Mei 1946, bahwa Badan Pendidikan ini dialihkan dari Markas Tertinggi TRI ke Kementerian Pertahanan.¹⁸⁰ Namanya diubah menjadi Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), yang akan dipimpin oleh opsir-opsir politik. Pada 30 Mei 1946, 55 opsir-opsir politik dilantik oleh menteri pertahanan. Sebagai pimpinan *Pepolit* ditunjuk Sukono Djojopratignjo dengan pangkat letnan jenderal.

Rumusan Komisi pendidikan yang telah disepakati itu, sejak dibentuknya Pepolit tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan persoalan baru dalam tubuh TRI. Para opsir politik ditugasi untuk merapatkan hubungan antara tentara dan rakyat diperbantukan pada setiap divisi sebanyak lima orang diberi pangkat letnan kolonel.¹⁸¹ Opsir-opsir politik dan Pepolit, ternyata dimanfaatkan oleh Menteri Keamanan Amir Sjarifuddin untuk kepentingan kelompoknya, sehingga Pepolit tumbuh menjadi semacam komisaris politik seperti pada Angkatan Perang Uni Soviet yang berkedudukan sejajar dengan para komandan pasukan, karena itu para panglima divisi dan para komandan pasukan menolak kehadiran mereka. Akibatnya aktivitas Pepolit merosot di daerah-daerah. Reorganisasi memutuskan membentuk lembaga baru yaitu Biro Perjuangan dan dikukuh-

¹⁷⁹ Anggota-anggota Staf Pendidikan: R. Sukono Djojopratignjo, Wijono, dr. Moestopo, Farid Ma'ruf, H. Abdullah Mukti, Anwar Tjokroaminoto, Soemarsono, *Kedaulatan Rakjat*, 22 Januari 1946; *Tentara Keselamatan Rakjat*, No. 2, Tahun I, 25 Januari 1946, hal. 43.

¹⁸⁰ *Antara*, 25 Mei 1946.

¹⁸¹ *Ibid.*, 30 Mei 1946.

kannya Dewan Penasihat Pimpinan Tentara.¹⁸² Biro Perjuangan adalah badan pelaksana dari Kementerian Pertahanan yang bertugas menampung semua laskar-laskar bersenjata. Terbentuknya Biro Perjuangan sangat menguntungkan bila dilihat dari segi ketahanan nasional. Laskar-laskar atau badan badan perjuangan yang semula terpecah-pecah di dalam pelbagai kelompok ideologi dan "anak" partai politik dapat disatukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah akan memiliki potensi cadangan yang tangguh dan besar di samping tentara reguler.¹⁸³ Pembagian tugas dan rombongan antara tentara reguler dan laskar-laskar rakyat sebagai partisan dapat diatur secara serasi dan harmonis.¹⁸⁴ Biro Perjuangan akan merupakan pusat cadangan nasional yang menyalurkan dan mengatur tugas cadangan di dalam rangka ketahanan nasional. Tugas cadangan tidak semata-mata untuk bertempur, tetapi merupakan tenaga yang aktif dan berperan di dalam masyarakat, seperti aktivitas menambah produksi.¹⁸⁵ Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin berusaha keras untuk menguasai biro ini untuk kepentingan politik kelompoknya. Pimpinan biro ini dipegang oleh sekelompok orang yang seideologi dengan Amir Sjarifuddin, yaitu kelompok komunis. Menteri Pertahanan menunjuk Djokosujono dan Ir. Sakirman sebagai kepala dan wakil kepala. Mereka mendapat pangkat jenderal mayor. Biro ini peranannya penting setelah Kabinet Sjahrir III mendapat tantangan dari kelompok Persatuan Perjuangan, terutama setelah terjadi penculikan atas Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan pemerintah menyatakan negara dalam keadaan bahaya.¹⁸⁶ Organisasi Biro Perjuangan diperluas dan ditingkatkan tugasnya sejak bulan September

¹⁸² *Kedaulatan Rakjat*, 2 Mei 1946.

¹⁸³ *Maklumat MT TKR*, tanggal 6 Desember 1945.

¹⁸⁴ Nasution, *Tentara Nasional I*, 1968, hal. 158.

¹⁸⁵ *Siasat*, No. 14, Tahun I, 5 April 1947.

¹⁸⁶ Pada tanggal 28 Juni 1946. Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1946. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan dibentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Dewan Pertahanan Daerah (DPD). DPN mengeluarkan Peraturan Negara Nomor 9 Tahun 1946 tentang Lasykar yang Barisan. *Biro Perjuangan* adalah wadah daripada Lasykar, berhak membentuk Inspektorat Pusat dan Daerah.

1946 dan diberi wewenang untuk mengkoordinasikan Barisan Cadangan, Dewan Kelaskaran, dan Polisi Tentara Laskar. Fungsi cadangan sebagaimana yang dikehendaki tidak terlaksana. Kelompok Amir yang memonopoli Biro Perjuangan ini memasukkan seluruh program dan konsepsi perjuangan partainya sehingga biro ini lebih merupakan pendukung kekuatan politik Amir daripada sebagai badan resmi pemerintah.¹⁸⁷

Akibat kebijakan yang berat sebelah itu, terjadi dualisme organisasi dan pelaksanaan tugas di bidang pertahanan nasional. Reguler (TRI) di bawah pimpinan Jenderal Soedirman dikendalikan oleh Markas Tertinggi TKR dan laskar-laskar yang secara *de facto* dipimpin Menteri Pertahanan melalui Biro Perjuangan. Laskar-laskar mempunyai posisi dan tugas yang tidak ada bedanya dengan TRI.¹⁸⁸

Kedua-dua ini disadari oleh pimpinan nasional. Adanya dua kekuatan bersenjata bisa menimbulkan perpecahan nasional. Kemudian dua kekuatan itu disatukan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947. Pimpinan TNI terdiri atas unsur pimpinan TRI dan laskar yang merupakan pimpinan kolektif dalam Pucuk Pimpinan TNI (PPTNI), dengan demikian berakhirilah peranan Biro Perjuangan. Berakhirnya peranan Biro Perjuangan ini tidak berarti berakhirnya usaha Amir Sjarifuddin untuk menghimpun kekuatannya. Sebagian besar laskar yang berideologi komunis tidak bergabung ke dalam TNI secara penuh. Mereka ditampung dalam suatu wadah yang diberi nama TNI Bagian Masyarakat yang dibentuk pada bulan Agustus 1947.¹⁸⁹

Pemimpin TNI Bagian Masyarakat adalah Ir. Sakirman yang juga duduk dalam pucuk pimpinan TNI. Pada 26 Oktober 1947 dalam Konferensi TNI Bagian Masyarakat, Wakil Perdana Menteri Setiadji yang seialiran dengan Amir Sjarifuddin menegaskan pendirian kelompoknya bahwa TNI bagian Masyarakat adalah

¹⁸⁷ Djenderal A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia II*, 1968, hal. 41.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 83.

¹⁸⁹ *Ibid.* hal. 83. George M. Turman Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, hal. 261.

bagian dari usaha mempersatukan tenaga dalam pertahanan serta memberikan pendidikan ideologi kepada tentara.¹⁹⁰ Struktur Pucuk Pimpinan TNI yang bersifat kolektif itu dimanfaatkan oleh kelompok Amir Sjarifuddin, sehingga kelompok ini secara sah menghimpun kembali kekuatan di bawah naungan nama TNI, dengan konsepsi dan garis politik yang tidak berbeda dengan Biro Perjuangan.

Kebijaksanaan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin ini memancing perdebatan sengit pada sidang BPKNIP 12 November 1947. Beberapa anggota KNIP menuduh bahwa pembentukan TNI Bagian Masyarakat ini terlalu politis, tidak sesuai dengan konsepsi pertahanan rakyat semesta (*Total People's defence*)

Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Muda Pertahanan Arudji Kartawinata menjawab tuduhan lawan-lawan politiknya bahwa dibentuknya TNI Bagian Masyarakat merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip pertahanan, bahwa tentara harus mengenal politik, agar mereka sadar membela kepentingan politik, jika pada suatu saat pertentangan politik memuncak berubah menjadi perang.¹⁹¹ Tantangan keras datang dari PNI dan Masyumi. PNI menyatakan TNI bagian Masyarakat bukanlah tentara, melainkan organisasi politik, karena hampir 100% pimpinannya dari kelompok sayap kiri. TNI Bagian Masyarakat tidak mengikutsertakan semua organisasi-organisasi rakyat, sehingga tidak tercipta suatu *fighting democracy*.¹⁹² PNI setuju dalam prinsip, tetapi menolak bentuk itu bahkan menganjurkan agar TNI Bagian Masyarakat dibubarkan saja.¹⁹³ Belum usai perdebatan mengenai status TNI Bagian Masyarakat, Zainul Baharuddin dari fraksi Sayap Kiri mengajukan mosi kepada KNIP tentang rasionalisasi Angkatan Perang (TNI). Mosi ini diterima secara aklamasi oleh KNIP, mengingat kondisi organisasi TNI yang "menggebu".

¹⁹⁰ *Berita Indonesia*, 27 Oktober 1947.

¹⁹¹ *Merdeka*, 13 November 1947.

¹⁹² *Berita Indonesia*, 14 November 1947.

¹⁹³ *Ibid*, 10 November 1947.

2. Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang (TNI).

Sesudah jatuhnya Kabinet Amir (Januari 1948), presiden menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru. Hatta mencoba membentuk kabinet koalisi dengan mengikutsertakan semua partai dalam kabinet untuk menggalang persatuan nasional. Ia menawarkan tiga kursi tanpa *portofolio* kepada fraksi Sayap Kiri, tetapi Sayap Kiri menuntut sedikitnya empat kursi termasuk jabatan menteri pertahanan. Permintaan ini tidak dapat disetujui dan Hatta menyusun kabinetnya tanpa Sayap Kiri. Pada 31 Januari 1948 susunan kabinet baru diumumkan dengan Moh. Hatta sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Kabinet ini didukung oleh partai-partai Masyumi, PNI, Partai Katholik, dan Parkindo. Salah satunya anggota Sayap Kiri yang duduk di dalam kabinet adalah Supeno sebagai pribadi. Ia menjabat menteri pembangunan dan pemuda. Program Kabinet Hatta terdiri atas :

- (1) Berunding atas dasar Persetujuan Renville,
- (2) Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS),
- (3) Melaksanakan rasionalisasi,
- (4) Pembangunan.

Kabinet Hatta sekalipun mendapat serangan yang tajam dari kelompok Komunis, tetapi tetap melaksanakan programnya yang ketiga yaitu rasionalisasi Angkatan Perang (TNI). Tujuan rasionalisasi adalah untuk perbaikan organisasi sebagai salah satunya jalan untuk memerangi inflasi yang membahayakan kehidupan rakyat. Rasionalisasi dilaksanakan dengan cara yang baik dan bijaksana, yaitu :

- (a) melepaskan mereka dengan sukarela untuk meninggalkan tentara bagi mereka yang ingin kembali ke pekerjaan semula,
- (b) menyerahkan penampungan sebagian rasionalisan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda,
- (c) mengembalikan 100.000 orang ke dalam masyarakat desa.¹⁹⁴

¹⁹⁴ *Merdeka*, 15 September 1948.

Rasionalisasi Angkatan Perang (TNI) mendapat tantangan hebat dari Sayap Kiri pencetus gagasan rasionalisasi. Setelah Kabinet Hatta terbentuk pada bulan Februari 1948, Amir Sjaifuddin bertindak sebagai oposisi, dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang merupakan fusi dari partai PKI, Partai Buruh, Pesindo, dan kelompok-kelompok yang sealiran. FDR menggerakkan ofensif politik dan militer, namun tidak menggoyahkan kedudukan Kabinet Hatta, karena dukungan dua partai politik besar PNI dan Masyumi, serta beberapa organisasi pemuda seperti BPRI dan organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Badan Perjuangan Seberang (KRIS, IPK, PIM, GRISK) yang dipimpin oleh Mr. Latuharhary.¹⁹⁵

Pada akhir bulan Agustus 1945 di Padang dan Bukittinggi terbentuk dua organisasi pemuda Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) yang dipimpin oleh Ismail Lengah dan Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dahlan Djambek. Dua organisasi ini yang memelopori pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Sumatera Barat.

Selanjutnya para pemuda melakukan aksi perebutan kekuasaan, sedangkan Komite Nasional sibuk menyusun pemerintahan daerah. Komite memilih Syafei sebagai residen.

Pendaratan pasukan Sekutu dari Brigade 21 Divisi Indie 26 yang dipimpin oleh Brigadir Chambers di Padang disambut dengan kibaran bendera Merah Putih sebagai peringatan bahwa Sumatera Barat adalah daerah Republik Indonesia. Para pemuda menolak kedatangan NICA yang dipimpin oleh Mayor Jenderal A.I. Spitq. Tentara Sekutu yang berusaha melucuti senjata para pemuda mendapat perlawanan yang keras. Akibatnya hubungan RI dengan Sekutu rusak dan sering kali terjadi insiden bersenjata.

Kabinet Hatta dirongrong dengan aksi-aksi politik dan Organisasi-organisasi buruh yang bernaung di bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di Pabrik Karung Delanggu (Klaten) pada 5 Juli 1948. Lima hari kemudian terjadi bentrokan

¹⁹⁵ *Ibid.*, 16 September 1948.

antara kelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) organisasi petani dari Masyumi yang menentang pemogokan politik itu.¹⁹⁶ Peristiwa tersebut diangkat menjadi pembicaraan di dalam sidang KNIP. Ada tiga mosi yang diajukan, namun tidak diperoleh keputusan yang pasti apakah mengutuk atau mendukung. Di Sumatera, FDR juga melakukan aksi-aksi politik. Rapat-rapat umum diadakan di Bukittinggi, Solok, Batangkar, dan Sawahlunto, yang dipimpin oleh Abdul Xarim. Kelompok ini menyerang kebijaksanaan Kabinet Hatta. FDR menuntut agar diadakan *reshuffle* kabinet, dibentuknya kabinet baru, kabinet parlementer. Sebagai reaksi terhadap pernyataan-pernyataan FDR. Partai Nasional Indonesia (PNI) menyatakan setuju *reshuffle*, tetapi Hatta harus tetap memegang pimpinan, berhubungan dengan gawatnya situasi negara. Sekelompok politisi lainnya, yaitu para pengikut Tan Malaka pada bulan Juni 1948 membentuk Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) di bawah pimpinan dr. Muwardi, Sjamsu Harya Udaya, dan Chairul Salen. Gerakan baru ini bertujuan mengimbangi aksi-aksi FDR, karena itu mereka menuntut kepada pemerintah agar membebaskan Tan Malaka, Sukarni, dan Abikusno,¹⁹⁷ serta para pemimpin mereka yang dipenjara akibat Peristiwa 3 Juli 1946.

Bersamaan dengan aksi-aksi FDR, pada bulan Agustus 1948 Musso, seorang tokoh kawakan PKI yang telah bermukim di Moskow sejak tahun 1926, tiba kembali ke Indonesia. Kedatangan Musso ternyata membawa garis baru bagi kaum komunis dan membawa perubahan-perubahan besar dalam gerakan komunis. Partai yang berhaluan komunis yakni Partai Sosialis dan Partai Buruh pada akhir bulan Agustus 1948 berfusi dengan PKI. Amir Syarifuddin sebagai pemimpin Partai Sosialis menyatakan bahwa, "yang menjadi dasar dari fusi partai-partai itu adalah perubahan keadaan politik internasional pasca Perang Dunia II. Partai Sosialis insaf bahwa politik kerjasama dengan imperialis harus diputuskan sesudah hancurnya fasisme, dan diganti dengan politik anti-imperialis di bawah pimpinan kaum komunis".¹⁹⁸

¹⁹⁶ *Merdeka*, 12 Juli 1948.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*, 1 September 1948.

Pada bulan Agustus itu juga Musso muncul kembali sebagai tokoh politik. Ia mengadakan pembaharuan struktur organisasi Politbiro PKI. Di dalam Sekretariat Umum antara lain duduk Musso, sedangkan Amir Sjarifuddin menjabat sekretaris urusan pertahanan.¹⁹⁹

Di bidang politik Musso mengecam kebijaksanaan dan strategi perjuangan pemerintah. Ia menganggap revolusi Indonesia bersifat defensif, karena itu gagal. Untuk memperbaiki kekeliruan itu ia menyarankan agar dibentuk Front Persatuan Nasional.²⁰⁰

Di dalam tahap perjuangan demokrasi baru, masih digunakan segenap aliran, tetapi pada suatu waktu mereka harus disingkirkan karena hanya orang-orang PKI yang dapat menyelesaikan revolusi.²⁰¹ Kampanye politik Musso semakin meningkat dengan mengadakan rapat-rapat umum di beberapa kota. Dalam rapat umum di Madiun, Musso menuduh, pemerintah Hatta membawa negara pada "penjajahan baru dengan bentuk lain" dan membantah tuduhan bahwa ia menerima instruksi dari Moskow.²⁰²

3. Pemberontakan dan Penumpasan

Aksi-aksi politik FDR meningkat menjadi pertentangan politik. Di Solo terjadi insiden bersenjata antara simpatisan FDR/PKI dengan lawan-lawan politiknya termasuk juga dengan TNI. Berawal dari insiden-insiden bersenjata di Solo itu, pada 18 September 1948 di Madiun tokoh-tokoh PKI memproklamasikan berdirinya Republik Sovyet Indonesia, sebagai pembuka pemberontakan PKI Madiun. Oleh karena pemberontak Kolonel Djokosuyono diangkat menjadi "gubernur militer" Madiun dan Letnan Kolonel Dahlan, Komandan Brigade XXIX,

¹⁹⁹ *Merdeka*, 2 September 1948.

²⁰⁰ *Ibid.*, 16 Agustus 1948.

²⁰¹ *Ibid.*, 9 September 1948.

²⁰² *Ibid.*, 15 September 1948.

menjadi "komandan komando pertempuran" Madiun. Pihak pemberontak menguasai Kota Madiun dan Radio Gelora Pemuda. Dalam pidato radionya di Madiun, Djokosuyono menyatakan, "bahwa bagian yang terpenting revolusi adalah membersihkan tentara Republik Indonesia dari golongan reaksioner kolonial". Ia menuduh TNI melakukan kampanye terhadap kelompok "pasukan revolusioner" di Solo. Kemudian Musso menyerang Pemerintah Soekarno Hatta, bahwa mereka telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris dan hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis.²⁰³

Pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan untuk menumpasnya. Angkatan Perang melancarkan operasi militer dan hanya dalam waktu dua minggu, yakni pada 30 September 1948, pukul 16.15, Kota Madiun berhasil direbut kembali.²⁰⁴ Dua bulan kemudian operasi-operasi penumpasan dinyatakan selesai.

Sesudah pemberontakan PKI berhasil ditumpas, kedudukan PKI dalam KNIP dibekukan, sekalipun tidak ada pernyataan yang tegas tentang pembubaran PKI. Sebaliknya lawan politik utama PKI yaitu kelompok GRR melakukan suatu gerakan politik baru. Muhammad Yamin, salah seorang tokoh pendukung kelompok Tan Malaka, mengajukan saran agar dibentuk pemerintahan yang berdasarkan *triple platform*, yaitu pemerintahan yang terdiri atas golongan agama, nasionalis, dan sosialis, untuk memperoleh dukungan rakyat.²⁰⁵ Selanjutnya GRR mengadakan konsolidasi. Pada 3 Oktober 1948 GRR dengan partai-partai yang sehaluan mengadakan fusi, yakni Partai Rakyat, Partai Rakyat Djelata, Partai Buruh Merdeka, Angkatan Komunis Muda (ACOMA) dan Wanita Rakyat.²⁰⁶ Hasil fusi itu melahirkan Partai Murba. Setelah pemberontakan PKI, kegiatan partai politik menurun dan untuk sementara waktu oposisi terhadap Kabinet Hatta mereda.

²⁰³ *Ibid.*, 21 September 1948.

²⁰⁴ *Ibid.*, 2 Oktober 1948.

²⁰⁵ *Merdeka*, 5 Oktober 1948.

²⁰⁶ *Ibid.*

G. MENGHADAPI AKSI MILITER BELANDA II

1. Campur Tangan PBB

Untuk meneruskan perundingan dengan Belanda tentang pelaksanaan Renville, Pemerintah Hatta menunjuk Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Mr. Roem berkisar di sekitar empat masalah, yaitu soal pemerintahan federal, Uni Indonesia–Belanda, pemerintahan peralihan, dan sidang konstituante. Sebagai pendahuluan perdana menteri membuka pembicaraan dengan van Mook mengenai masalah plebisit, kedudukan RI, dan penyerahan kekuasaan RI kepada pemerintah sementara. Jumlah negara-negara bagian tidak boleh lebih dari ketentuan-ketentuan di dalam Linggajati, yaitu RI, Negara Indonesia Timur, dan Borneo (Kalimantan). Selama adanya pemerintahan peralihan, RI harus tetap diakui *de facto* dan hubungan dengan luar negeri selama masa peralihan tetap terpelihara agar tidak terjadi kekosongan. Hal ini dapat diselesaikan dengan pasal 1 Prinsip. Pembicaraan pendahuluan ini juga mengalami kegagalan karena perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan politik. Delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Kadir Widjoj-atmodjo dan Husein Djajadiningrat setelah tiga minggu berunding dengan pihak RI tidak menghasilkan suatu keputusan apa pun, Wakil Amerika Serikat dalam KTN mengajukan usul kompromi untuk menembus kemacetan ini sebagai berikut:

- (a) di daerah-daerah Jawa, Madura dan Sumatera dibentuk distrik-distrik pemilihan yang akan memilih anggota-anggota konstituante,
- (b) sidang konstituante yang menentukan apakah daerah-daerah (Pasundan, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Madura) menghendaki masuk Republik Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara.²⁰⁷

Pemerintah RI sekali lagi menegaskan bahwa RI belum pernah menolak plebisit. RI berpendapat bahwa plebisit harus

²⁰⁷ *Merdeka*, 5 Mei 1948.

dilaksanakan di daerah-daerah yang dipersengketakan. Untuk keperluan plebisit ini tentara RI yang menjadi tulang punggung pertahanan gerilya akan menyongsong daerah-daerah kantong gerilya. Plebisit harus diadakan di Jawa, Madura, dan Sumatera.

Sementara itu tersiar kabar bahwa Pemerintah RI melalui duta besarnya di Praha, RM. Suripno, telah mengadakan perundingan dengan Uni Sovyet dan negara-negara Blok Timur lainnya untuk saling mengadakan pertukaran konsul. Berita ini sangat berpengaruh bagi usaha meneruskan perundingan, karena itu Pemerintah Belanda mengirimkan *aide memoire* kepada Pemerintah RI mengenai dua hal yakni: "meminta kepada RI melaksanakan hal-hal yang telah disetujui dalam Persetujuan Linggajati, yakni pengakuan kedaulatan Belanda di seluruh Indonesia pada masa peralihan", dan "sampai di mana hubungan luar negeri yang dilakukan oleh RI, terutama hubungannya dengan Uni Sovyet".

Pada 10 Juni 1948 Pemerintah RI mengirimkan jawaban melalui ketua delegasi Mr. Moh. Roem. Isi jawaban Pemerintah RI adalah mengenai pengakuan kedaulatan Belanda di seluruh Indonesia, RI bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS). Sebelum NIS dibentuk, kedudukan RI tetap seperti sekarang. Tentang perjanjian persahabatan dengan Uni Sovyet, karena belum diratifikasi oleh KNIP, maka perjanjian itu belum dianggap berlaku.²⁰⁸

Karena tidak ada persesuaian pendapat, maka perundingan tahap ini mengalami kemacetan lagi. Pendapat umum di Indonesia merasa kecewa terhadap KTN yang dianggap lebih banyak berperan sebagai wasit dari pada sebagai perantara,²⁰⁹ sekalipun demikian jalan keluar untuk mengatasi kemacetan itu sebenarnya telah dirintis oleh usul Du Bois-Critchley, masing-masing adalah wakil Amerika Serikat dan Australia. Du Bois dipanggil kembali oleh pemerintahnya, digantikan oleh Merle Cochran. Cochran mengajukan usul baru untuk mengatasi kemacetan

²⁰⁸ *Ibid.*, 10 dan 11 Juni 1948.

²⁰⁹ *Ibid.*, 10 Agustus 1948.

itu. Usul itu pada dasarnya tidak berbeda dari usul Du Bois, tetapi Cochran mendahulukan pembentukan pemerintahan interim dari pada pembentukan konstituante sebagaimana yang diusulkan oleh Du Bois-Critchley.²¹⁰

Jalan buntu masih belum dapat ditembus. Pihak RI tetap berpegang pada usul Du Bois-Critchley dan beranggapan bahwa perundingan baru dapat dilunasi setelah pihak Belanda menjamin imunitas diplomasi pihak Republik. Sebaliknya pihak Belanda menuduh bahwa keadaan militer di Jawa semakin buruk, dan jumlah pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan pihak Republik semakin meningkat.²¹¹

Tanpa melalui KTN, PM Hatta mengadakan pendekatan politik baru dengan van Mook. Kedua belah pihak bersedia mengadakan perundingan langsung dengan KTN sebagai saksi. Pada 27 November 1948 delegasi Belanda datang di Indonesia, terdiri atas Menteri Seberang Lautan Mr. E.M.J.A. Sassen, Menteri Luar Negeri D.U. Stikker, dan Wakil Pemerintah Agung Belanda L. Neher.²¹²

Perundingan dilangsungkan di Kaliurang antara PM Hatta dan delegasi Belanda secara langsung tanpa disaksikan KTN. Perundingan tetap mengalami jalan buntu. Akhirnya PM Hatta menyatakan bahwa sebab terhentinya perundingan ialah karena perselisihan masalah prinsip. Setelah gagalnya perundingan, pada 9 Desember 1948 Pemerintah RI mengirimkan nota kepada KTN mengenai pendirian RI yang isinya:

- (1) Pemerintah RI telah mengalah sedapat-dapatnya untuk mendekati pendirian Belanda,
- (2) Petunjuk yang diberikan kepada Belanda terbatas pada pen-jajagan apakah pada dasarnya RI menerima baik syarat-syarat yang diajukan Belanda, sehingga tidak merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian melalui perundingan,

²¹⁰ *Merdeka*, 9 Agustus 1948.

²¹¹ *Ibid.*, 16 September 1948.

²¹² *Pelita Rakyat*, 29 Nopember 1948.

- (3) Pemerintah Belanda terbukti pada tahun 1948 akan membentuk pemerintah interim tanpa RI, tanpa merundingkannya dengan RI di bawah pengawasan KTN.

Dua hari kemudian, 11 Desember 1948, KTN juga menerima nota dari Pemerintah Belanda, yang isinya :

- (1) Dalam perundingan di Kaliurang terbukti RI tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya, karena itu tidak dapat diharapkan kerjasama yang sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran persetujuan gencatan senjata,
- (2) Pendirian RI mengenai Wakil Tinggi Mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan, bertentangan dengan kedaulatan Belanda sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian pertama pokok-pokok. Persetujuan Renville, yang berarti berlangsungnya suatu keadaan yang tak dapat dipertahankan, di mana ada dua tentara saling berhadapan di bawah pimpinan yang terpisah,
- (3) Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan berarti RI menolak naskah persetujuan yang direncanakan oleh KTN pada 10 September sebagai dasar perundingan,
- (4) Pemerintah Belanda akan melaksanakan keputusan mengenai pembentukan pemerintahan interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah federal.

Sebagai penutup dari nota tersebut Pemerintah Belanda menyatakan bahwa perundingan di bawah KTN tidak berfaedah, karena pada hakekatnya RI tidak mau mengakui adanya perjanjian gencatan senjata dan Persetujuan Renville.²¹³

2. Persiapan-persiapan di Bidang Pertahanan

Berdasarkan perkiraan keadaan setelah diterimanya Persetujuan Renville, Belanda berusaha mengepung Republik Indonesia, secara politis, ekonomis dan militer. Gejala-gejala akan da-

²¹³ *Pelita Rakyat*, 15 Desember 1948.

tangnya suatu serangan militer telah dirasakan oleh pimpinan Angkatan Perang, sejak Belanda mencoba mengulur waktu mengenai perundingan pelaksanaan Persetujuan Renville. Di beberapa tempat tentara Belanda melakukan pemindahan pasukan ke dekat garis demarkasi.²¹⁴

Sebagai jawaban atas tindakan Belanda itu, pimpinan Angkatan Perang menyusun konsepsi pertahanan yang berdasarkan konsep Pertahanan Rakyat Semesta (*total people's defence*). Dalam pelaksanaannya, jika sewaktu-waktu terjadi perang, pelaku perang bukan semata-mata Angkatan Perang, melainkan seluruh rakyat. Penjabaran konsepsi ini pada tingkat politis dan strategis berhasil diselesaikan setelah pemberontakan PKI ditumpas. Penjabarannya didasarkan atas pengalaman selama menghadapi Belanda pada Aksi Militer I, penarikan lebih-kurang 35.000 prajurit ke luar dari kantong-kantong pertahanan yang berada di daerah pendudukan Belanda, baik di Jawa maupun di Sumatera. Dengan mengaji pengalaman perang negara-negara lain dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapi, pimpinan Angkatan Perang menjabarkan konsepsi pertahanan semesta dalam bentuk yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Penjabarannya dituangkan dalam Perintah Siasat Panglima Besar Angkatan Perang No. 1/1948 yang pokok-pokoknya adalah bahwa TNI tidak akan melakukan pertahanan linier, namun ada tiga prinsip yang harus dilaksanakan yaitu:

- (a) apabila terjadi serbuan musuh, TNI harus memperlambat serbuan musuh, melaksanakan pengungsian dan bumi-hangus total.
- (b) membentuk kantong-kantong pertahanan di tiap-tiap onderdistrik militer (kecamatan militer), membentuk pemerintah gerilya dalam bentuk *wehrkreise*; beberapa kompleks pegunungan harus dijadikan basis perlawanan gerilya.
- (c) pasukan-pasukan yang berasal dari daerah "federal" pendudukan Belanda menyusup kembali ke daerah asalnya (aksi

²¹⁴ Djenderal A.H. Nasution, TNI, Jilid II, Jakarta, 1968. hal. 250-251.

wingate), sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang besar.²¹⁵

Di Sumatera TNI menyusun kantong-kantong pertahanan di sekitar kota-kota strategis dan bergerak sebagai "ular membelit".

Maksud pokok perintah siasat (operasi) tersebut adalah mengadakan perlawanan gerilya agresif yang dilakukan oleh tentara bersama rakyat dengan mengintegrasikan seluruh kekuatan untuk menegakkan kedaulatan RI dan memenangkan perang. Dalam pelaksanaannya diperlukan organisasi suatu pemerintah militer gerilya yang dipegang oleh lurah (kepala desa) sampai kepada pimpinan tertinggi, dalam hal ini Panglima Besar Soedirman. Politik non-koperasi dan non-kontak dilaksanakan dengan tegas. Semua aparat pemerintah dilarang melakukan kebijaksanaan lain dalam hubungannya dengan musuh. Organisasi TNI disusun dalam tiga kategori pasukan:

- (a) pasukan mobil, yang bertugas tempur dengan perbandingan senjata dan personil 1 : 1. Pasukan ini disusun dalam divisi, brigade, batalyon.
- (b) pasukan teritorial, yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawanan rakyat, berbagai penyelenggaraan pemerintahan militer, pasukan ini disusun atas Teritorium, Sub Teritorial Komando (STC), Komando Distrik Militer (KDM) dan Komando Onder Distrik Militer (KODM). Luas teritorium militer, disamakan dengan propinsi, dan seterusnya. Pasukan mobil dan teritorial membentuk *wehrkreise* (lingkaran pertahanan) pada tingkatan yang ditentukan.
- (c) melaksanakan "wingate" (menyusup) ke daerah kekuasaan musuh, yang pernah ditinggalkan karena "hijrah" untuk

²¹⁵ Djenderal A.H. Nasution, *Op. cit.*, hal. 189. Istilah *Wingate*, berasal dari nama Mayor Jenderal Charles Orde Wingate, Komandan Brigade Pasukan Inggris yang dalam operasinya melawan Tentara Jepang di Chindit (Myanmar) berhasil melakukan penyusupan (penetrasi) jauh ke dalam daerah musuh dengan doktrinnya yang terkenal 'the long-range penetration'.

diisi dengan kekuatan gerilya, untuk menciptakan kantong di daerah tersebut.

Sidang kabinet 16 Desember 1948, menunjuk lima orang menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dr. Sukiman, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Persediaan Makanan Rakyat IJ. Kasimo, Menteri Pembangunan/Pemuda Supeno dan Menteri Agama K.H. Masjkur untuk diperbantukan kepada Pemerintah Militer.

Staf Angkatan Laut dipindahkan ke Aceh di bawah pimpinan Kepala Staf Kolonel Subijakto. Beberapa orang perwira ditugaskan pada beberapa kesatuan di Sumatera.

Sampai pertengahan Desember 1948, persiapan pertahanan telah mencapai keadaan sebagai berikut :

- (a) Bidang militer, reorganisasi dan rekonstruksi Angkatan Perang telah diselesaikan,
- (b) Bidang pemerintahan, instruksi-instruksi tentang pertahanan rakyat telah disebarkan, persiapan militerisasi jawatan-jawatan vital telah diselesaikan melalui undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Gerilya

Setelah perundingan di Kaliurang (Yogyakarta) mengalami jalan buntu, Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap RI. Pada 19 Desember 1948 Yogyakarta (ibukota RI) berhasil direbut dan diduduki. Presiden dan wakil presiden serta sejumlah pembesar negara ditawan oleh tentara Belanda. Berdasarkan keputusan sidang kabinet, pemerintah telah memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Secara kebetulan sejak November 1948 Menteri Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI sedang berada di Bukittinggi untuk meninjau kemakmuran di Sumatera. Bunyi mandat Presiden Soekarno/Wakil Presiden Hatta kepada Mr.

Syarifuddin Prawiranegara melalui kawatnya 19 Desember 1948 adalah sebagai berikut:²¹⁶

‘Kami Presiden Repoeblik Indonesia memberitahoekan bahwa pada hari Minggoe tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah moelai melantjarkan serangannja atas iboe kota Yogyakarta.

Djika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannja lagi, kami mengoeasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmoeran Indonesia oentoek membentoe pemerintah Repoeblik Indonesia Daroerat di Soematera”.

Yogyakarta, 19 Desember 1948

Presiden

Wakil Presiden

Soekarno

Moh. Hatta

Pada hari yang sama wakil presiden dan Menteri Luar Negeri H. Agus Salim mengirim kawat kedua kepada Mr. Soedarsono Palar, dan Mr. AA. Maramis di New Delhi yang isinya, ‘Jika Mr. Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada mereka dikuasakan untuk membentuk *Etile Government* Republik Indonesia di India. Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman yang masih dalam keadaan sakit mengundurkan diri ke luar ibukota Yogyakarta dan memimpin perang gerilya. Di Sumatera Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Akibat dari aksi militer itu Dewan Keamanan PBB pada 24 Januari 1949 segera bersidang. Amerika Serikat mengajukan resolusi yang disetujui oleh semua anggota yang berisi : (a) hen-

²¹⁶ Mr. S M. Rasjid, *Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*, Jakarta 1982. hal. 20.

tikan permusuhan, (b) bebaskan presiden dan pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada 19 Desember 1948, dan (c) memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.²¹⁷

Pihak TNI dalam waktu hampir satu bulan setelah serbuan militer Belanda itu berhasil melakukan konsolidasi, karena TNI tidak melakukan pertahanan *linier*. Ketika pasukan Belanda menyerbu, TNI bergerak ke samping garis serbuan dan mulai membalas serangan tentara Belanda. Sasarannya adalah garis-garis komunikasi. Kawat-kawat telepon diputuskan, jalan dan jembatan dirusak, konvoi-konvoi Belanda di siang hari dihadang dan diserang, sehingga pihak Belanda terpaksa memecah kekuatannya dengan memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang didudukinya. Dengan demikian serdadu Belanda terpaksa pada ribuan pos kecil di seluruh daerah Republik yang merupakan satu medan gerilya yang luas. Setelah pasukan-pasukan Belanda tersebar di luar kota-kota yang didudukinya, TNI mulai menyerang kota-kota itu. Serangan Umum 1 Maret 1949 pada siang hari terhadap Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto (sekarang Presiden) berhasil menduduki kota tersebut selama enam jam. Hal ini membuktikan kepada dunia bahwa TNI tidak hancur, bahkan masih mempunyai kemampuan ofensif. Inisiatif sudah beralih ke pihak TNI, karena telah mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang sebagaimana yang tersurat dalam Perintah Siasat No. 1.

Jalan buntu di bidang militer dibarengi dengan ancaman Amerika Serikat untuk mencabut bantuan *Marshall Plan*, akhirnya memaksa Belanda untuk menerima KMB yang bermuara kepada pengakuan kedaulatan sesuatu negara Indonesia terhadap wilayah bekas Hindia Belanda.

²¹⁷ *Pelita Rakyat*, 27 Januari 1949.

H. AKHIR PERANG KEMERDEKAAN

1. Pendekatan-pendekatan RI dengan Negara-negara Federal

Pada bulan Januari tahun 1949, karena didesak oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda kembali mengadakan pendekatan-pendekatan diplomatis. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Supomo, salah seorang anggota delegasi RI dalam perundingan lanjutan Renville, untuk membuka kembali perundingan.²¹⁸ Pertemuan itu merupakan yang pertama sejak 19 Desember 1948. Pertemuan berikutnya pada 21 Januari 1949 delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)* atau musyawarah antara "negara-negara bagian"²¹⁹ yang terdiri atas Mr. Djumhana dan dr. Ateng, menghadap menemui Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta di Bangkok guna menyampaikan pendirian BFO mengenai cara penyelesaian konflik. Sehubungan dengan pendekatan-pendekatan diplomasi itu, Mr. Moh. Roem, ketua delegasi Republik dalam perundingan lanjutan Renville, menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO dengan syarat harus diawasi oleh Komisi PBB apabila telah mencapai tingkatan formal.²²⁰ Pada 13 Februari Wakil Presiden Moh. Hatta secara resmi menyatakan pendirian Pemerintah RI bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan syarat dikembalikannya Pemerintah RI ke Yogyakarta dan pemunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB.²²¹ Usul Wakil Presiden Moh. Hatta ini kemudian disetujui dan didukung oleh BFO. Hasil dari pendekatan diplomasi RI, BFO dan Belanda ini pada 26 Februari 1949 Pemerintah Belanda mengumumkan niatnya untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang membicarakan masalah Indonesia dan merundingkan syarat-syarat "penyerahan" kedaulatan serta pembentukan Uni Indonesia-Belanda. Perkembangan selanjutnya secara resmi pada 28 Februari 1949. Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai

²¹⁸ *Merdeka*, 14 Januari 1949.

²¹⁹ *Ibid.*, 24 Januari 1949.

²²⁰ *Ibid.*, 10 Februari 1949.

²²¹ *Ibid.*, 14 Maret 1949.

Wakil Tinggi Mahkota pergi ke Bangka menemui Presiden Soekarno dan beberapa orang pembesar RI lainnya guna menyampaikan maksud Pemerintah Belanda yang terdiri atas tiga masalah, yaitu:

- (a) pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag, guna membahas "penyerahan" kedaulatan yang dipercepat,
- (b) penarikan pasukan-pasukan Belanda secepatnya setelah "penyerahan" kedaulatan,
- (c) masalah pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta, dinyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan.²²²

Selanjutnya Dr. Koets menyampaikan undangan kepada presiden untuk menghadiri KMB di Den Haag. Pada 3 Maret 1949 Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO dan menegaskan pendirian RI, bahwa kedudukan Pemerintah RI harus dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sesuai pertemuan itu, pada keesokan harinya, 4 Maret 1949, Presiden Soekarno menyatakan kepada Wakil Tinggi Mahkota bahwa ia tidak bersedia menghadiri KMB kecuali dengan syarat, yaitu:

- (1) pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk memulai perundingan,
- (2) kedudukan dan kewajiban Komisi PBB untuk Indonesia dalam membantu melaksanakan resolusi PBB tidak akan terganggu.²²³

Dari pihak BFO mengeluarkan pernyataan bahwa BFO tetap pada pendirian semula, yakni:

- (a) supaya pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta,
- (b) Komisi PBB untuk Indonesia membantu melaksanakan resolusi PBB,
- (c) RI memerintahkan gencatan senjata.²²⁴

²²² *Ibid.*, 19 April 1949.

²²³ *Merdeka*, 19 April 1949.

²²⁴ *Ibid.*, 19 April 1949.

Pada 23 Maret 1949 Dewan Keamanan PBB mengirim kawat kepada Pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa Komisi PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan pada 28 Januari 1949 dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak.²²⁵ *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI), memberikan bantuan terhadap:

- (1) tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan 28 Januari 1949 paragraf 1 dan 2, yakni menghentikan aksi militer oleh Belanda dan pengembalian para pemimpin RI ke Yogyakarta,
- (2) menetapkan tanggal dan waktu serta syarat untuk mengadakan KMB di Den Haag agar dapat diselenggarakan selekasnya.²²⁶

Berdasarkan petunjuk dari Dewan Keamanan dan hasil pendekatan politis antara pihak RI dan Belanda, pada 14 April 1949 Komisi PBB memprakarsai terselenggaranya perundingan RI – Belanda. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes (sekarang Duta Merlin) Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran (Amerika Serikat). Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sebagai ketua dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Adapun anggota-anggotanya adalah dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. J. Latuharhary disertai lima orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan empat orang penasihat.²²⁷

Merle Cochran yang memimpin perundingan ini sekali lagi menyatakan bahwa perundingan diselenggarakan atas inisiatif pihak PBB sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 29 Januari 1949. Delegasi RI dalam pidatonya mengemukakan pendirian RI bahwa perundingan harus terlebih dahulu menyetujui pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta. Dengan kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta, baru terbuka kemungkinan bagi

²²⁵ *Ibid.*, 14 Maret 1949.

²²⁶ *Ibid.*,

²²⁷ *Ibid.*, 19 April 1949.

delegasinya untuk mengambil keputusan bagi soal-soal lainnya.²²⁸ Delegasi Belanda bersedia menyatakan mendahulukan perundingan mengenai syarat-syarat untuk memungkinkan kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta, dengan syarat terjaminnya persetujuan penghentian tembak-menembak dan penentuan waktu serta syarat penentuan pelaksanaan KMB di Den Haag.²²⁹ Perundingan berjalan sangat lamban, masing-masing pihak berpegang pada pendiriannya. Sementara itu Ketua Pemerintah Darurat RI Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyatakan setuju terhadap pernyataan Mr. Moh. Roem dalam perundingan itu.

Karena perundingan berjalan sangat lamban, bahkan hampir mengalami jalan buntu, maka pada 24 April Drs. Moh. Hatta memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Selanjutnya pihak RI mengadakan pertemuan informal dengan ketua delegasi Belanda Dr. van Royen yang disaksikan oleh Merle Cochran.²³⁸ Hatta menyatakan bahwa isi dalam pertemuan informal bermaksud membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda. Perundingan semacam itu kemudian dilanjutkan oleh ketua Delegasi RI dengan ketua Delegasi Belanda sebanyak tiga kali, yakni pada 28 April, 4 dan 5 Mei 1949.²³¹

Mengenai pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta yang dituntut oleh delegasi Republik, pada dasarnya Pemerintah Belanda setuju dengan syarat harus diiringi dengan perintah penghentian perang gerilya. Syarat ini dapat disetujui, namun yang masih mengganjal adalah mengenai masalah luasnya daerah kekuasaan RI. Petunjuk dari Bangka kepada ketua Delegasi RI agar resolusi Dewan Keamanan dan pengembalian daerah RI (menurut Persetujuan Renville) dilaksanakan secara berangsur-angsur. Petunjuk dari Bangka lebih menekankan pengembalian Pemerintah RI ke Kota Yogyakarta, sekali pun hanya dengan daerah seluas lima mil persegi sebagai langkah permulaan,²³²

²²⁸ *Merdeka*, 19 April 1949.

²²⁹ *Ibid.*, 18 April 1949.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*, 4 Mei 1949.

²³² *Ibid.*, 25 April dan 6 Mei 1949.

tetapi Delegasi RI menganggap bahwa wilayah lima mil persegi sangat berbahaya bagi keamanan .Delegasi RI menuntut daerah seluas Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Lapangan Terbang Maguwo dengan batas selatan Samudera Hindia. Sebaliknya pihak Belanda menafsirkan Resolusi Dewan Keamanan tentang pengembalian Pemerintah RI hanya ke Kota Yogyakarta dan sekitarnya hanya seluas lima mil persegi. Belanda menolak menyerahkan Lapangan Udara Maguwo (sekarang Pangkalan Udara Adi Sutjipto).

Pada hari itu pukul 17.00, di depan Komisi PBB ketua Delegasi RI Mr. Moh. Roem atas nama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyampaikan kesanggupan mereka sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 23 Maret 1949 yaitu:

- (1) pengeluaran perintah kepada "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya,
- (2) kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban,
- (3) turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat tanpa syarat.²³³

Selanjutnya ketua Delegasi Belanda Dr. Van Royen membacakan pernyataannya yang berisi antara lain:

- (1) Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan untuk:
 - (a) mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintah RI,
 - (b) mempelajari dan memberikan nasihat tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban,
- (2) Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus

²³³ *Merdeka*, 9 Mei 1949.

bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Karesidenan Yogyakarta,

- (3) Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik dan tahanan politik yang tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948,
- (4) Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat,
- (5) Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut diadakan pembicaraan tentang cara-cara mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat.²³⁴

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, Pemerintah Darurat RI di Sumatera memerintahkan kepada Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintah di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta.²³⁵ Partai Politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya Persetujuan Roem-Royen adalah Masyumi. Dr. Sukiman selaku ketua umum Masyumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Delegasi RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan RI,²³⁶ sedangkan Mr. Sujono Hadinoto, ketua umum Partai Nasional Indonesia (PNI) menyatakan bahwa Persetujuan Roem-Royen merupakan suatu langkah ke arah tercapainya penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia.²³⁷ Akhirnya kedua partai ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa Persetujuan Roem-Royen sekalipun masih kurang memuaskan, merupakan langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.

²³⁴ *Merdeka*, 16 Mei 1949.

²³⁵ *Ibid.*, 26 Mei 1949.

²³⁶ *Ibid.*, 27 Mei 1949.

²³⁷ *Ibid.*, 30 Mei 1949.

Sebaliknya pihak Angkatan Perang menyambut adanya persetujuan itu dengan perasaan curiga.²³⁸ Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman pada 1 Mei 1949 memperingatkan kepada para komandan kesatuan agar tidak memikirkankan masalah perundingan. Pernyataan sama yang memper tegas amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dikeluarkan juga oleh Panglima Tentara dan Territorium Jawa Kolonel AH. Nasution pada 5 Mei 1949. Pernyataan itu mengetengahkan bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanya merupakan taktik perjuangan dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan militer.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Roem—Royen, pada 22 Juni diadakan perundingan formal antara RI, BFO dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB dipimpin oleh Critchley (Australia). Hasil perundingan itu adalah :

- (1) Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Karesidenan Yogyakarta dikosongkan oleh Tentara Belanda dan pada 1 Juli 1949 Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu,
- (2) Mengenai penghentian permusuhan dan dibahas setelah kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta.
- (3) Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag.²³⁹

Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta, pada 13 Juli 1949 pukul 20.30 diadakan Sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden/ Perdana Menteri Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.²⁴⁰ Kemudian

²³⁸ Markas Besar Angkatan Darat, *op. cit.*, hal. 117 (stensil).

²³⁹ *Indonesia*, 23 Juni 1949.

²⁴⁰ *Ibid.*, 15 Juli 1949.

Persiden Soekarno memerintahkan Angkatan Perang untuk menghentikan permusuhan yang berlaku sejak 15 Agustus untuk wilayah Jawa dan 17 Agustus untuk wilayah Sumatera. Perintah yang sama juga dilakukan oleh pihak Belanda.

2. Pengakuan Kedaulatan

Sekembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta, perundingan dengan BFO yang dirintis di Bangka dimulai lagi. Dari Bangka telah menjadi pokok bahasan adalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Pada 19 -- 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan, bahwa politik, *divide et impera* Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari Republik Indonesia mengalami kegagalan. Pada Konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat :

- (1) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalisme,
- (2) RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
- (3) Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian (Senat). Pertama kali akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS),
- (4) Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.

Di bidang militer juga telah tercapai persetujuan :

- (1) Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS,

- (2) Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri,
- (3) Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkaran Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia bekas satuan-satuan militer Belanda.²⁴¹
- (4) Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai panglima besar.²⁴²

Konferensi Antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada 30 Juli 1949, dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada 4 Agustus 1949 Presiden Soekarno mengangkat delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Mr. Mohd. Yamin, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Mr. Sumardi, dan Kolonel TB. Simatupang, sedangkan Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak beserta anggota-anggotanya. Pada 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai pada 2 November 1949.

Hasil KMB diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Pada 6 Desember 1949 KNIP menerima hasil-hasil KMB dengan pemandangan 226 pro dan 62 kontra, serta 31 meninggalkan sidang.

²⁴¹ Satuan-satuan ini adalah Koninklyk Nederlandsch Indische Loger (KNIL), Militaire Leiditvoort (ML), Koninklyk Marine (KM), Vellighies Batalion (VB), dan Territoriale Bataljons.

²⁴² Ronde Tafel Conferentie te Gravenhage en Documenten, Gravenhage, 1949, hal. 143-158.

Selanjutnya pada 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden pada 16 Desember 1949 dan pada 17 Desember diambil sumpahnya. Pada 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta dilantik oleh presiden. Akhirnya pada 23 Desember 1949 Delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani akte "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda.²⁴³ Dan pada 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah "penyerahan" kedaulatan. Di Nederland bertempat di Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah "penyerahan" kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink membubuhkan tanda tangannya pada naskah "penyerahan" kedaulatan.

²⁴³ Bangsa Indonesia memakai istilah resminya "pengakuan kedaulatan", karena kita beranggapan, bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia.

BAB II

DEMOKRASI LIBERAL

A. DARI KONSTITUSI RIS KE UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA

1. Republik Indonesia Serikat (RIS)

Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 2 November 1949 di Den Haag Negeri Belanda, terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri atas 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah wilayah Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur. Sebagai presiden atau kepala negara yang pertama RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri serta tetap sebagai wakil presiden. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam Kabinet RIS antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, Dr. Leimena, Arnold Mononutu, dan Ir. Herling Laoh, dari pihak Republik sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.¹

¹ Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesia Foreign Policy*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press 1990.

Kabinet RIS merupakan *Zaken Kabinet*,² dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik.

Hal ini berkaitan erat dengan pandangan bahwa bentuk negara serikat dalam RIS merupakan jalan sementara yang ditempuh dalam mencapai cita-cita nasional Indonesia Merdeka dari Sabang sampai Merauke. Apalagi penerimaan bentuk Negara RIS dilihat dalam rangka penyelesaian pengembangan wilayah Irian Barat dalam jangka waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Pemerintah Belanda.³

Di samping masalah penyelesaian Irian Barat, penerimaan dibentuknya RIS didasarkan pandangan bahwa pemerintah tersebut bersifat pemerintah peralihan yang harus menyelenggarakan segala persiapan untuk mengambil alih kekuasaan kolonial, mengadakan pemilihan umum, dan membentuk konstituante (badan pembuat UUD).⁴

Dalam hubungan dengan sifat peralihan itu, Pemerintah RIS yang bersifat parlementer itu tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga perwakilan (DPR atau sering disebut parlemen) yang ada.⁵

Kabinet RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta memerintah sampai 17 Agustus 1950. Dalam usia yang singkat itu Perdana Menteri Hatta harus memecahkan masalah-masalah intern dalam kehidupan suatu negara muda. Seperti diketahui akibat Perang Kemerdekaan, banyak prasarana yang hancur ditambah keadaan ekonomi umum yang buruk. Dalam bidang ekonomi masalah utamanya adalah inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Untuk mengatasi inflasi pemerintah menjalankan kebijaksanaan dalam bidang keuangan dengan mengeluarkan peraturan mengenai pemotongan uang pada 19 Maret 1950.

Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden ke atas dipotong menjadi separuh, sehingga nilainya ting-

² Yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya.

³ Lihat naskah perundingan Konferensi Meja Bundar.

⁴ Lihat program Kabinet RIS yang berisi tujuh hal, dapat dibaca juga dari keterangan Presiden RIS di depan DPR RIS dan Senat RIS. *Ichdisar Parlemen atau Risalah DPR RIS*.

⁵ Lihat Pasal 122 Konstitusi RIS.

gal setengahnya. Walaupun banyak pemilik uang yang terkena peraturan ini, tetapi pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi. Di samping soal keuangan, ekonomi umum juga dapat diperbaiki. Meletusnya Perang Korea memungkinkan perdagangan ke luar negeri meningkat, terutama bahan mentah (karet). Dengan demikian pendapatan negara bertambah juga.

Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Seusai perang, jumlah pasukan harus dikurangi, karena keuangan negara tidak mendukungnya. Bekas tentara perlu mendapat penampungan bila diadakan rasionalisasi. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan melanjutkan pelajaran bagi bekas tentara di pusat-pusat latihan militer yang memberi pendidikan keahlian menempuh karier sipil profesional. Di samping itu dilakukan juga usaha transmigrasi dengan wadah Corps Tjadian Nasional (CTN). Walaupun demikian masalah pengalaman bekas tentara belum dapat dikatakan selesai.

Dalam pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) intinya diambil dari TNI, sedangkan yang lain diambil dari kalangan bekas anggota Angkatan Perang Belanda.⁶

Personel bekas anggota Angkatan Perang Belanda yang akan dilebur ke dalam APRIS berjumlah sekitar 33.000 orang dengan 30 orang perwira, sedangkan dari Angkatan Udara diserahkan 10.000 orang. Pembentukan APRIS sebagai salah satu keputusan KMB yang menyebut TNI sebagai intinya ternyata telah menimbulkan masalah psikologis. Di satu pihak TNI berkeberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuhnya. Sebaliknya dari pihak KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. Gejala ini terlihat di Bandung berupa gerakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang mengirimkan ultimatum kepada Pemerintah RIS dan Negara Pasundan serta

⁶ Notosoetardjo, *Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar* Djakarta, 1956, hal. 21.

menuntut untuk diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya negara tersebut.⁷ Di Kalimantan Barat Sultan Hamid II menentang masuknya TNI serta menolak untuk mengakui Menteri Pertahanan RIS dan menyatakan bahwa dialah yang berkuasa di daerah tersebut. Di Makassar muncul gerakan Andi Azis dan di Ambon gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).⁸

Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Hubungan dengan Negeri Belanda diusahakan untuk menjadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan Irian Barat (Irian Jaya). Atas inisiatif pihak RI di Jakarta pada bulan April 1950 dilangsungkan Konferensi Tingkat Menteri yang pertama antara Indonesia dan Belanda. Dalam konferensi tersebut dibicarakan persiapan-persiapan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Hasil konferensi ialah dibentuknya suatu Komisi Irian, yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tugas komisi ialah mengadakan penyelidikan di Irian Barat serta melaporkan hasilnya kepada pemerintah masing-masing. Konferensi sepakat untuk melanjutkan perundingan mengenai masalah Irian Barat atas dasar laporan komisi dalam Konferensi Tingkat Menteri Kedua di Den Haag pada 4 Desember 1950.

Dalam konferensi tentang materi kedua, delegasi RI dengan pimpinan Menteri Luar Negeri Mr. Mohamad Roem mengajukan dua kali usul kompromi, yaitu agar pengakuan kedaulatan atas Irian Barat dilaksanakan pada 27 Desember 1950, sedangkan penyerahannya dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 1951. Di samping itu Indonesia juga memberikan jaminan mengenai kemerdekaan agama, hak-hak azasi manusia dan otonomi seluas-luasnya bagi penduduk Irian Barat serta jaminan perlindungan atas kepentingan-kepentingan Belanda di wilayah tersebut. Pihak Belanda hanya sepakat pada suatu persetujuan yang menyatakan bahwa kedaulatan atas Irian Barat berada pa-

⁷ Drs. Saleh As'ad Djamhari, *Ichitisar Sedjarah Perjuangan ABRI*, (1945-sekarang), Djakarta, 1971, hal. 65.

⁸ Drs. Saleh As'ad Djamhari, *op. cit.*, hal. 65-70.

da Uni Indonesia-Belanda, sedangkan *de facto* pemerintahan di wilayah tersebut tetap di tangan Belanda. Belanda menyarankan pembentukan suatu Dewan Irian Barat di mana Indonesia mempunyai wakil-wakil yang sama jumlahnya dengan wakil-wakil Belanda. Keadaan itu menunjukkan bahwa perundingan sudah tidak bisa diharapkan lagi.⁹

2. Kembali ke Negara Kesatuan

Pada 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persiapan untuk membentuk negara kesatuan ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, sebab di dalam negara-negara bagian kehendak untuk bersatu sudah lama timbul.¹⁰

Rakyat di negara-negara bagian umumnya menuntut agar wilayahnya dikembalikan kepada Republik Indonesia. Pada 8 Maret 1950, di Bandung, melalui demonstrasi rakyat Jawa Barat menuntut agar Negara Pasundan dibubarkan dan seluruh wilayahnya dimasukkan ke dalam RI. Tuntutan ini ditampung RI, dan selanjutnya Sewaka yang sebelumnya komisaris RIS diangkat menjadi gubernur RI untuk daerah Jawa Barat.

Keinginan mengubah RIS ke bentuk Negara Kesatuan juga timbul diberbagai negara bagian daerah lainnya. Dalam hubungan ini DPR RIS dan juga Senat RIS membicarakan hal-hal tersebut dalam beberapa usul mosi yang diajukan oleh anggotanya. Pada umumnya isi mosi itu mengusulkan penggabungan negara bagian/daerah sebagai provinsi dari negara bagian RI dalam RIS, kecuali Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur.¹¹

Penyelesaian usul gabungan negara/daerah ke dalam Negara RI, kecuali Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Ti-

⁹ *Departemen Luar Negeri, Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, Jakarta 1971, hal. 88, 219.

¹⁰ Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, hal. 326-327.

¹¹ Lihat *Ichisar Parlemen*, begitu juga ketentuan dalam Konstitusi RIS pasal 134 (1).

mur, ditempuh dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, ditambah lagi dengan serangkaian penetapan presiden dalam bulan-bulan Maret dan April 1950¹². Untuk penyelesaian usul gabungan NST dan NIT ditempuh dengan jalan perundingan antara kedua negara bagian tersebut dengan Pemerintah RIS. Hal ini sesuai dengan usul mosi dalam DPR RIS yang berpokok "mengajukan" kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian bagi soal-soal yang hangat dan timbul sebagai akibat perkembangan politik di waktu-waktu yang akhir dengan cara integrasi dan program tersebut.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, diselenggarakan konferensi segitiga antara RIS—NIT—NST. Kedua negara bagian tersebut (NIT dan NST) menyerahkan mandatnya kepada Presiden RIS. Untuk selanjutnya Pemerintah RIS berunding dengan Pemerintah RI yang melahirkan Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Atas dasar Piagam Persetujuan ini dibentuk panitia bersama dengan tugas khusus menyusun Rancangan UUD Negara Kesatuan.¹⁴

Panitia bersama bekerja atas dasar pandangan yang tercantum dalam piagam persetujuan yaitu, ke dalam, menyempurnakan penghidupan rakyat dan persatuan bangsa Indonesia, sementara ke luar, memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain. Panitia bersama juga memperhatikan beberapa hal lain sesuai dengan maksud Piagam Persetujuan seperti penghapusan Senat, penghapusan Dewan Pertimbangan

¹² Risalah DPR RIS, hal. 496-497.

¹³ Ichdisar Parlemen, hal. 134, dan 208.

¹⁴ Panitia beranggotakan 14 orang, tetapi tinggal 12 orang karena dua orang (Ir. Sakirman dan Hutomo Supandan, keduanya dari PKI) mengundurkan diri dengan alasan tidak setuju dan tidak bertanggung jawab dengan cara-cara pembentukan yang diusulkan oleh Pemerintah RIS. Keduabelas anggota tersebut ialah dari RI (Dr. Abdul Halim, Mr. AA. Suhardi, Djohan Sjahruzah, Harsoedi, Dr. Rustamudji, dan Rh. Kusnun), dan dari RIS (Mr. Dr. Soepomo, Mr. Kosasih Purwanegara, Mr. AM Tambunan, B. Sahetapy Engel, Ir. Lobo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan. Lihat Soepomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, hal. 8, lihat juga *20 tahun Indonesia Merdeka*, hal. 500-501.

Agung. DPR Sementara terdiri atas penggabungan DPR-RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Konstituante terdiri atas anggota yang didapat melalui pemilihan umum atas satu anggota mewakili 300.000 suara.¹⁵

Setelah diadakan pembahasan di masing-masing lembaga perwakilan (DPR RIS, Senat RI, dan BP-KNIP),¹⁶ Rancangan UUD Negara Kesatuan diterima dalam DPR-RIS dengan 90 suara setuju dan 18 suara tidak setuju.¹⁷ Sementara itu dalam BP-KNIP, Rancangan UUD Negara Kesatuan diterima oleh 31 suara dan dua negara tidak setuju.¹⁸ Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUD tersebut yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUD 1950).

UUDS ini mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan dari Konstitusi RIS. Menurut UUDS 1950 pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan Undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden juga dapat mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan, tetapi walaupun demikian, kabinet, baik secara keseluruhan maupun secara perorangan, bertanggungjawab pada DPR yang mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individual.¹⁹

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan adanya kelembagaan negara yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Negara, Dewan Per-

¹⁵ Risalah DPR-RIS, hal. 569.

¹⁶ Sesuai dengan kesepakatan dalam panitia bersama, *Ibid*.

¹⁷ Ichdisar Parlemen (1950), No. 104, hal. 380-381. Sesuai ketentuan yang ada, dalam Senat RIS tidak ada pemungutan suara.

¹⁸ *Antara*, 14 Agustus 1950.

¹⁹ Notosoetardjo, *Dokumen-dokumen KMB*, Djakarta, 1956, hal. 53.

timbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA).²⁰ Dalam pidatonya di hadapan sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu, Ir. Soekarno antara lain mengatakan:

” toean-toean semoeanja tentoe mengerti, bahwa Oendang-Oendang Dasar jang (kita) boeat sekarang ini adalah Oendang-Oendang Dasar Sementara. Kalaoe boleh saja memakai perkataan ini, adalah oentoek Oendang-Oendang Dasar kilat. Nanti kalaoe kita telah bernegara didalam suasana jang lebih tenteram kita akan mengoempoeikan kembali Madjelis Permoesjawaratan Rakjat jang dapat lebih sempoeana.²¹

Dalam UUD Sementara 1950 terdapat beberapa hal pokok yang mewarnai kehidupan politik dan penentuan selama masa berlakunya UUD Sementara. Masalah hubungan antara ”parlemen-kabinet-presiden” menjadi perhatian pertama. Parlemen menduduki posisi penting dan berperan utama, seperti peranannya dalam menerima atau menolak pertanggungjawaban kabinet. Hal ini didasari pandangan sistem pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen.²² Peran lainnya adalah hak-hak DPR untuk membuat perundang-undangan dan peraturan bagi pelaksanaan negara di tingkat nasional. Hal ini didasari pandangan bahwa kedaulatan RI ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh DPR. Lembaga ini merupakan satu-satunya badan kekuasaan tertinggi yang menggambarkan kedaulatan rakyat.²³ Hak DPR yang menonjol adalah hak mosi dan resolusi serta hak petisi.²⁴ Sepanjang perjalanan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Parlemen sering berhadapan dengan adanya usul-usul dari DPR dalam menggunakan hak mosi dan resolusi, dan dalam petisi itu.

²⁰ JCT. Simorangkir dan Drs. Mang Rey Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 26-27.

²¹ Prof. Mr. H. Muh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, I, Cet. 2, Djakarta, 1962, hal. 410.

²² UUD Sementara pasal 1 yang berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

²³ Ichdisar Parlemen (1950), No. 103, hal. 378; lihat juga ulasan Sopomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, hal. 22-23.

²⁴ Usul mosi Sunario disetujui pemerintah tanpa pemungutan suara.

Di sisi lain peranan dan kedudukan presiden berada dalam kerangka tidak dapat diganggu gugat dan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah negara. Paham ini menempatkan posisi presiden yang bersifat simbolis sebagai kepala negara. Kedudukan simbolis ini menimbulkan pandangan bahwa presiden berdiri di atas partai-partai dan menjadi faktor penjamin stabilitas pemerintahan,²⁵ tetapi dalam kenyataan, peran dan kedudukan presiden jauh dari yang dimaksud oleh UUD Sementara.

Dalam UUD Sementara terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hal keagamaan, jaminan hak demonstrasi dan mogok, masalah monopoli dan lapangan pekerjaan, hak senioritas dan diskriminasi ras, dan hak pembagian daerah (otonomi dan swapraja).

B. SISTEM LIBERAL DAN PEMILU 1955

1. Ketidakstabilan Politik

Dari tahun 1950 sampai Pemilihan Umum tahun 1955 terdapat lima kabinet, sehingga rata-rata setiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-turut ialah Kabinet Natsir (September 1950 -- Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 -- Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 -- 1953) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 -- 1955) dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dapat dikatakan dalam waktu rata-rata satu tahun itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya, bahkan pernah terjadi partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri, yaitu Kabinet Ali I. Semua kabinet, termasuk yang resminya bersifat *Zaken Kabinet*, didukung oleh koalisi dari pelbagai partai. Komposisi pihak oposisi juga dapat berubah-ubah. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik.

Kabinet Natsir yang memerintah dari 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951 adalah kabinet koalisi. PNI sebagai partai

²⁵ Lihat Zulfikar Ghazali, "UUD Sementara Perspektif Politik", *Ilmu dan Budaya*, No. 9, Juni 1990.

kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta. Salah satu sebab PNI menolak turut dalam kabinet ini ialah karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai keinginan partai tersebut. Inti kabinet ini adalah Masyumi, ditambah dengan PIR, PSI, Parindra, PSII, Parkindo. Katholik dengan meliputi juga anggota-anggota kabinet yang non partai. Banyak di antara anggota yang cukup punya nama dan dianggap ahli pada bidangnya, sehingga sesungguhnya kabinet ini termasuk kuat. Tokoh-tokoh terkenal di antaranya ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat (bekas pejabat presiden RI), Ir. Djuanda, dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Di antara program-programnya yang penting ialah:

- (1) mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dalam waktu singkat,
- (2) mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan,
- (3) menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman,
- (4) mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi ekonomi nasional yang sehat,
- (5) menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat,
- (6) memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini

Selain soal keamanan, yang menjadi beban pemerintah ialah perjuangan pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia. Belanda rupa-rupanya tidak bermaksud untuk mengembalikan Irian kepada Indonesia. Perundingan soal Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda dimulai pada 4 Desember 1950 semasa Kabinet Natsir, tetapi perundingan ini menemui jalan buntu, karena masing-masing pihak tidak beranjak dari pendirian mereka. Krisis menjadi lebih mendalam dengan adanya mosi S. Hadikusumo (PNI) sekitar pencabutan PP Nomor 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota-anggota DPRDS yang

diterima oleh Parlemen dengan 76 anggota setuju dan 45 anggota tidak setuju, sehingga Kabinet Natsir mengundurkan diri.²⁶ Pada 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Sartono mendekati pemimpin-pemimpin partai PNI dan Masyumi, sebab kedua partai ini merupakan partai yang terkuat dalam DPR saat itu, tetapi usaha Mr. Sartono mengalami kegagalan, karena itu pada 18 April 1951 ia mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada hari itu juga Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru yaitu Sidik Djojokusarto (PNI) dan Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) untuk dalam waktu lima hari membentuk kabinet koalisi. Setelah diadakan perundingan, akhirnya pada 26 April dapat diumumkan susunan kabinet baru di bawah Perdana Menteri Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi), dan Wakil Perdana Menteri Suwirjo (PNI).

Program kabinet yang penting di antaranya ialah:

- (1) Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan,
- (2) Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran rakyat nasional dalam jangka pendek dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani,
- (4) Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan,
- (5) Mempercepat persiapan pemilihan umum untuk memberantas konstituante dalam waktu yang singkat.
- (6) Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.²⁷

²⁶ "The Resignation of the Natsir Cabinet", *Indonesia Affairs*, Vol. I, No. 3, March 1951. Mosi S. Hadikusumo ditandatangani juga oleh PIR, Partindo, Buruh, PSII, Parkindo, PKI dan Tani. *Risalah Perundingan 1951*, Jilid IX, hal. 3250-1.

²⁷ Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945-1970. Djakarta : Pradjna Paramita, 1970.

Kabinet ini juga tidak berusia lama karena banyak mendapat tantangan dalam parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI sendiri. Salah satu sebab mundurnya Kabinet Sukiman ialah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar *Mutual Security Act* (MSA), Undang-undang Keamanan Timbal-Balik. Dalam parlemen masalah MSA itu menimbulkan usul mosi Sunario.²⁸ Usul mosi Sunario berangkat dari ketidakberhasilan parlemen dan pemerintah untuk mencari kesamaan pandangan tentang arti perjanjian internasional dalam hubungan dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Pengusul mosi menilai bahwa parlemen diabaikan dan tidak diajak berunding dalam berbagai perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah. Sunario, dengan alasan konstitusi,²⁹ berpendapat "campur tangan parlemen tindakan-tindakan di kalangan internasional itu".³⁰ Pandangan yang dilakukan Sunario tentang keterlibatan parlemen diterima oleh pemerintah.³¹

Pada 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojokusarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur. Yang diminta oleh presiden kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari Parlemen. Usaha kedua formatur membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada 19 Maret kedua formatur itu mengembalikan mandatnya, dan presiden menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. Akhirnya setelah berusaha dua minggu, pada 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi, masing-masing mendapat jatah empat orang, PSI dua orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh dan PSII masing-masing satu orang dan go-

²⁸ Usul mosi Sunario ditandatangani pula oleh anggota dari Fraksi Buruh, Masyumi dan Tani.

²⁹ Pengusul menunjuk pada UUD Sementara Pasal 120 (2).

³⁰ *Risalah Perundingan*, 1952, jilid II, hal. 568.

³¹ Usul mosi Sunario disetujui pemerintah tanpa pemungutan suara.

longan tak berpartai tiga orang. Dalam menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang terpadu sebagai *Zaken Kabinet* sehingga dapat secara bulat mendukung kebijaksanaan pemerintah.

Dalam konstelasi politik saat itu kehadiran partai-partai kecil tetap diperhitungkan agar dapat mencapai mayoritas di Parlemen. Sikap dan posisi partai menjadi lebih jelas lagi selama berlangsungnya perdebatan dalam DPR mengenai Keterangan Pemerintah dan Program Kabinet. Pada sidang itu pemerintah tidak meminta kepercayaan, melainkan hanya memberitahu kepada DPR bahwa pemerintah akan melanjutkan pekerjaannya kecuali apabila DPR menghendaki lain. Suara yang setuju memberikan dukungan bekerja kepada kabinet ada 125 suara, sedangkan yang tidak ada lima suara. Suara yang tidak setuju antara lain dari Partai Murba dan SKI (Sarekat Kerakyatan Indonesia), sedangkan Fraksi Progresif, PRN, PIR, Fraksi Demokrat dan beberapa anggota tak berpartai memilih *abstain*.

Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia seperti karet, timah dan kopra, sedang kecenderungan impor terus meningkat. Karena penerimaan negara akan mengalami penurunan dalam jumlah yang besar dan karena banyaknya komitmen-komitmen lama yang harus dipenuhi, maka defisit tidak dapat dihindarkan, sekalipun diadakan penghematan-penghematan yang drastis. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sebesar 20% tetap dilaksanakan, tetapi pembagian jatah beras pegawai terpaksa dihentikan, sedangkan hadiah lebaran tidak pula dapat diberikan.³² Kesulitan lain yang dihadapi ialah produksi panen yang menurun, sehingga perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk mengimpor beras.

Dalam usaha meningkatkan ekspor yang perlu untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil

³² Wilopo S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya*, Jakarta 1978, hal. 28-29.

langkah menurunkan pajak ekspor serta menghapuskan sistem sertifikat yang oleh kabinet sebelumnya diadakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengorbankan barang-barang yang pada waktu itu kuat pasarnya. Di lain pihak dilakukan pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak terhadap barang-barang non-essensial dan mewajibkan para importir membayar uang muka sebesar 40%.³³ Program Kabinet Wilopo terutama ditujukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum (untuk Konstituante, DPR dan DPRD), kemakmuran, pendidikan rakyat dan keamanan, sedangkan program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik bebas-aktif menuju perdamaian dunia.³⁴ Wilopo dengan kabinetnya banyak menghadapi kesukaran. Salah satu masalah penting adalah soal dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan nama Peristiwa 17 Oktober (lihat bagian "Masalah-masalah Angkatan Darat").

Kedudukan kabinet yang sudah goyah itu semakin goyah karena masalah tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan Peristiwa Tanjung Morawa.³⁵ Peristiwa itu disebabkan karena pemerintah, sesuai dengan apa yang diputuskan dalam persetujuan KMB, mengizinkan pengusaha asing kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Sebenarnya Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukiman, pada tahun 1951 sudah mengadakan kompromi sebagai dasar penyelesaian masalah perusahaan perkebunan asing.

Pemerintah sudah menyetujui dikembalikannya tanah *Deli Planters Vereeniging (DVP)* yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan dan sementara itu digarap oleh petani Sumatera Utara yang terdiri atas bangsa Indonesia dan keturunan Cina. Kabinet Wilopo dengan Menteri Dalam Negeri Mohamad Roem

³³ *Ibid.*, hal. 29.

³⁴ Kementerian Penerangan, *Keterangan dan Djaman Pemerintah atas Program Kabinet Wilopo*, Djakarta, 1952.

³⁵ *Antara*, 17 Maret 1953, *Ken Po*, 17 Maret 1953; Wilopo S.H., *Ibid.*, hal.

(Masyumi) kemudian melaksanakannya. Pada 16 Maret 1953 polisi dengan kekerasan mengusir penduduk liar dari tanah garapannya yang sejak lama sudah ditinggalkan oleh pengusaha perkebunan. Penduduk yang dihasut oleh kader-kader Partai Komunis Indonesia menolak untuk pergi. Sebagai akibatnya terjadilah bentrokan senjata sehingga beberapa petani terbunuh. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosional baik dari pers maupun dalam parlemen. Mosi tidak percaya dilancarkan oleh Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia (Sakti).³⁶

Usul mosi Sidik ditolak oleh parlemen. PM Wilopo tetap menyokong kebijaksanaan menteri dalam negeri, sementara partai PM Wilopo (PNI) mendukung usul mosi kecuali dengan meminta konsensi tertentu pada Masyumi. Hal ini ditolak oleh Masyumi, dan sebelum diadakan pemungutan suara kabinet telah meletakkan jabatan.³⁷ Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 2 Juni 1953. Kabinet kembali demisioner dan timbul krisis pemerintahan lagi.

Setelah mengalami masa krisis yang agak lama (58 hari) akhirnya kabinet baru terbentuk dengan Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) sebagai perdana menternya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum Pemilihan Umum 1955 dan terkenal dengan nama kabinet Ali I atau Ali-Wongso yang diresmikan pada 31 Juli 1953. Dalam kabinet ini Masyumi sebagai partai kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta dan sebagai gantinya Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai kekuatan politik baru. Dalam parlemen Kabinet Ali Wongso didukung oleh 122 setuju dan 24 tidak setuju.³⁸

Selain soal keamanan di daerah-daerah yang belum dapat dipulihkan pada waktu itu, seperti gerombolan "DI/TII"

³⁶Usul mosi ditandatangani pula oleh BTI, Buruh, Progresif dan non partai.

³⁷*Risalah Perundangan* 1953, jilid VI, hal. 3420. dan jilid VII, hal. 3701. Lihat juga Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta : Pustaka Utata Grafiti, 1987), hal. 289-92.

³⁸*Ichtiisar Parlemen* 1953 No. 147, hal. 847.

Kartosuwiryo di Jawa Barat, "DI/TII" Daud Beureueh di Aceh dan "DI/TII" Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan, Kabinet Ali I juga menghadapi persoalan-persoalan lain, baik soal dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan ialah persiapan Pemilihan Umum yang direncanakan akan diadakan pada pertengahan tahun 1955.

Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk pada 31 Mei 1954 dan diketuai oleh S. Hadikusumo (PNI). Pada 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk Parlemen akan diadakan pada 29 September 1955. Dengan adanya pengumuman ini kampanye yang dilakukan oleh partai-partai semakin meningkat. Mereka masing-masing berusaha untuk mendapat suara yang terbanyak dan kampanye sampai ke pelosok-pelosok desa.³⁹

Kabinet Ali-Wongso dapat dikatakan merupakan kabinet yang paling lama bertahan, dan banyak mendapat berbagai usul interpelasi dan usul mosi, tetapi mampu bertahan karena dukungan kalangan tertentu (baca : fraksi kiri seperti PKI, SKI, BTI dan lainnya).⁴⁰ Akhirnya pada 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjodjo mengembalikan mandatnya. Salah satu sebab utama jatuhnya kabinet itu adalah persoalan dalam pimpinan dalam TNI-AD, sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober, yang menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI-AD.⁴¹

Pada 20 Juli 1955, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya, yang kemudian diikuti oleh partai-partai lain. Terjadinya keretakan dalam kabinet, memaksa Ali Sastroamidjodjo mengembalikan mandatnya.

³⁹ Herbert Feith, *The Indonesian Election of 1955*, Ithaca, New York, 1957, hal. 353-354.

⁴⁰ Zulfikar Ghazali, *Mosi dalam Parlemen Indonesia*. Laporan penelitian untuk lembaga Penelitian UI, 1989.

⁴¹ Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam*, Djakarta, 1968, hal. 120, lihat pula bagian : "Masalah-masalah Angkatan Perang".

2. Pemilihan Umum 1955

Dalam periode yang dimulai dengan pelaksanaan pemilihan umum 1955 sampai diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah mengalami tiga kabinet yang silih berganti, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959). Setelah Kabinet Ali-Wongso menyerahkan mandatnya kembali, pada 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan nama tiga orang formatur yang bertugas membentuk kabinet baru. Ketiga orang formatur itu ialah Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI) dan Assaat (non-partai). Pada waktu itu Presiden Soekarno sedang ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji.

Ketiga formatur ini mencapai persetujuan akan menempatkan Hatta sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan, tetapi kemudian timbul kesukaran karena Hatta masih menjabat sebagai wakil presiden. Karena soal itu, maka timbul pertentangan pendapat antara PNI dan Masyumi, masing-masing saling menolak rencana yang diajukan. Formatur (dari Masyumi) mengajukan usul agar presiden mengumumkan bahwa Hatta non-aktif sebagai wakil presiden selama menjadi perdana menteri. Setelah tugasnya selesai, ia kembali sebagai wakil presiden. Usul tersebut ditolak oleh PNI yang mengusulkan agar Parlemen mengeluarkan resolusi yang memungkinkan Hatta sebagai warga negara memimpin kabinet parlementer. Usul ini ditolak oleh Masyumi, dan Sukiman diinstruksikan partainya untuk mengembalikan mandatnya. Pada 3 Agustus ketiga formatur mengembalikan mandatnya.

Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Burhanuddin Harahap mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran ini, tetapi menuntut hak untuk menunjuk orang yang akan duduk di dalamnya, sedangkan formatur menghendaki agar orang-orangnya dipilih oleh formatur sendiri. Jalan buntu hampir tak dapat dihindarkan, tetapi

akhirnya Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa PNI. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri yang diisi oleh beberapa orang Masyumi dan beberapa orang dari partai lain. Dalam parlemen kabinet ini disetujui oleh 135 suara dan dua suara tidak setuju.⁴²

Kabinet baru ini bertugas antara lain untuk :

- (a) mengembalikan kewibawaan Pemerintah, yakni mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah;
- (b) melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.⁴³

Setelah kabinet terbentuk, Polisi Militer menangkap Ruslan Abdul Gani dan Mr. Djody Gondokusumo, bekas menteri kehakiman dalam Kabinet Ali I, dengan tuduhan korupsi. Wakil Jaksa Agung Abdul Muthalib Moro mengumumkan bahwa tindakan Polisi Militer ini tidak ada hubungannya dengan kabinet yang baru dibentuk.⁴⁴

Tindakan Polisi Militer ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan dan tampak adanya hubungan yang dekat antara Angkatan Darat dengan kabinet. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1955 serangkaian penangkapan terhadap pejabat tinggi berlangsung. Tindakan ini merupakan salah satu pelaksanaan program kabinet, yaitu pemberantasan korupsi.

Program lain dari Kabinet Burhanuddin Harahap yang harus diselesaikan seperti telah dijanjikan dalam pembentukan kabinet, ialah pemilihan umum. Golongan oposisi mendesak terus pada kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum itu secepat mungkin. Panitia Pemilihan Umum Pusat telah menetapkan bahwa pemilihan untuk Parlemen akan diadakan pada

⁴² *Ichthisar Parlemen* 1956, No. 113 hal. 858.

⁴³ *Pedoman*, 1 Agustus 1955 lihat juga *Keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet Boerhanuddin Harahap di Dewan Perwakilan Rakyat*, Kementrian Penerangan RI 1955.

⁴⁴ Herbert Feith, *op. cit.*, hal. 422; *Berita Indonesia*, 15 Agustus 1955.

29 September 1955. Di dalam kabinet sendiri timbul pertentangan karena ada yang menghendaki pemilihan umum ditunda, dengan alasan persiapan belum selesai, dan sebaliknya ada yang menuntut tetap diadakan pada waktu yang sudah ditentukan.⁴⁵

Semakin mendekati waktu yang ditentukan suasana semakin tegang, sebab masing-masing pihak berusaha untuk menang. Koran-koran partai saling menyerang partai lawannya, dan melontarkan tuduhan-tuduhan tertentu.

Pada 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum I ini ternyata dimenangkan oleh empat partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI sedangkan, yang lain mendapat suara jauh lebih sedikit dari keempat partai tersebut. Pemilihan umum untuk konstituante diadakan pada 15 Desember 1955. Pemilihan untuk lembaga Kabinet UUD lebih tenang dari pada ketika menghadapi pemilihan untuk DPR.

Sementara itu dalam bulan Oktober terjadi penggantian kepala Staf TNI-AD. Tiga orang calon diajukan yaitu Kolonel Simbolon, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Zulkifli Lubis, tetapi tidak ada kesepakatan dalam parlemen siapa dari ketiga calon ini yang akan dipilih. Atas usul dari NU, Parlemen mencalonkan Kolonel AH. Nasution, yang kemudian di terima oleh yang bersangkutan pada 25 Oktober 1955. Akhirnya pada 28 Oktober 1955 diputuskan oleh kabinet bahwa Kolonel AH. Nasution kembali diangkat menjadi kepala Staf Angkatan Darat.

Tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai dengan selesainya Pemilihan Umum, sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang akan bertanggung jawab pada parlemen baru. Pada 3 Maret 1956 Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan pada 8 Maret 1956 presiden menunjuk Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabi-

⁴⁵ NU menuntut tetap dilaksanakan pada waktunya, sedangkan PSI dan PIR menghendaki agar ditunda karena komposisi Panitia Pemilihan Pusat dan Daerah perlu diubah.

net baru. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dari tiga partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU yang memegang peranan, di samping beberapa partai kecil lainnya.

Terbentuknya kabinet dengan susunan yang lengkap diumumkan pada bulan 20 Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang baru ini mendapat tentangan dari PSI dan PKI Karena kedua partai tersebut tidak diikutsertakan.⁴⁶ Tantangan dari partai-partai lain tidak begitu besar sebab banyak yang diajak serta duduk dalam kabinet, personalia menteri-menterinya ada 24 orang.

Program kabinet yang disebut Rencana Lima Tahun, memuat rencana jangka panjang, misalnya usaha perjuangan memasukkan Irian Barat ke Indonesia, melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat pemilihan anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menysihatkan keuangan negara sehingga tercapainya im-bangan anggaran-belanja serta berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.⁴⁷ Namun demikian Kabinet Ali Sastroamidjojo II juga tidak luput dari kesukaran-kesukaran, di antaranya yang penting adalah berkobarnya semangat anti-Cina.

Ditandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada 3 Mei 1956, menimbulkan persoalan bagaimana nasib modal Belanda yang ada di Indonesia. Ada anjuran untuk mengadakan nasionalisasi atau Indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda itu, tetapi sebagian besar anggota kabinet menolak tindakan tersebut. Sementara itu banyak perusahaan Belanda yang menjual perusahaannya,

⁴⁶Penolakan masuknya PKI ke dalam kabinet termasuk usul mulanya PKI oleh Presiden Soekarno dikemukakan secara terbuka oleh Masyumi. Hal ini didukung oleh Formatur lainnya dalam kesepakatan pemahaman bahwa Presiden Soekarno adalah Presiden Konstitusional, sehingga pembentukan kabinet adalah masalah di luar kewenangan presiden.

⁴⁷*Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo II*, Jakarta, 1956.

terutama kepada orang-orang Cina karena pada umumnya mereka yang memiliki modal. Menanggapi keadaan itu, pada 19 Maret 1956 Mr. Assaat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya mengatakan perlunya pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi perusahaan-perusahaan nasional, sebab perusahaan itu tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing, khususnya orang Cina.

Pernyataan Assaat ini mendapat sambutan hangat dalam masyarakat, dan lahirlah "gerakan Assaat" di mana-mana. Pemerintah menanggapi gerakan ini dengan pernyataan Menteri Perekonomian Burhanuddin (NU) bahwa pemerintah akan memberi bantuan terutama pada perusahaan-perusahaan yang 100% diusahakan oleh pribumi.

Perasaan anti-Cina ini menimbulkan tindakan kekerasan antara lain perusakan toko dan mobil milik seorang pengusaha keturunan Cina sebagai ekor pemukulan terhadap seorang dokter tentara. Selain itu juga tidak sedikit tulisan-tulisan anti-Cina disebar, baik di Jakarta, Bandung, Semarang maupun Solo.⁴⁸

3. Krisis Sesudah Pemilu 1955

Hasil Pemilihan Umum (29 September untuk Parlemen, 15 Desember 1955 untuk Konstituante), memperlihatkan gambaran luasnya pengaruh masing-masing partai. Yang menonjol adalah munculnya NU dan PKI sebagai partai-partai besar di samping Masyumi dan PNI. Gambaran dari hasil pemilihan umum dapat dilihat pada daftar-daftar terlampir.⁴⁹

Kabinet Ali II juga mendapat oposisi dari daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan daerah. Oposisi itu didukung oleh para panglima daerah yang bersangkutan Gerakan daerah-daerah ini mendapat

⁴⁸ *Suluh Indonesia*, 27 Juli 1956; Periksa Juga : Wilopo *Zaman Pemerintah-an Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya*, hal. 48.

⁴⁹ Dr. Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat*, Djakarta, 1971, hal. 33-36.

simpati dari Partai Masyumi, PSI dan lain-lain. Gerakan itu akhirnya menimbulkan peristiwa PRRI/Permesta.

Dalam peringatan Sumpah Pemuda 1957 Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara pada waktu itu disebabkan terdapatnya banyak partai-partai politik, sehingga merusak persatuan negara, karena itu ada baiknya partai-partai dibubarkan. Dengan alasan menyelamatkan negara, Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi yaitu Demokrasi Terpimpin. Konsepsi ini mendapat tantangan yang hebat. Sebagai reaksi terhadapnya, gerakan-gerakan daerah semakin menjadi-jadi dengan didirikannya Dewan Banteng di Sumatra Tengah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.⁵⁰

Pada bulan Februari 1957, Presiden Soekarno memanggil semua pejabat sipil dan militer serta semua pimpinan partai ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengajukan konsepsinya yang berisi antara lain :

- (1) Dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang terdiri atas wakil-wakil semua partai ditambah dengan golongan fungsional,
- (2) Dibentuknya Dewan Nasional (kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung), yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dalam masyarakat; dewan ini berfungsi memberi nasihat kepada kabinet baik diminta atau tidak.⁵¹

Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak konsepsi ini dan berpendapat bahwa mengubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante.

Pada 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan "untuk kembali

⁵⁰ Daniel. S. Le., *The Transition To Guided Democracy : Indonesian Politics*, 1966, hal. 11-17.

⁵¹ Presiden Sukarno, *Menyelamatkan Indonesia*, Djakarta, 1957, hal. 8-12.

kepada Undang-Undang Dasar 1945". Anjuran presiden tersebut diberikan setelah konstituante selama kurang-lebih tiga tahun berdebat belum berhasil merumuskan sebuah Undang-Undang Dasar.

C. POLITIK BEBAS - AKTIF

1. Politik Luar Negeri Indonesia

Hubungan luar negeri yang dirintis sejak Perang Kemerdekaan berkembang sesudah Pengakuan Kedaulatan 1949. Kabinet RIS di bawah Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang dititikberatkan pada negara-negara Asia dan negara-negara Barat, karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait di Eropa, pasaran hasil bumi Indonesia masih berpusat di Negara Belanda dan Eropa Barat pada umumnya. Untuk kepentingan yang sama pemerintah mengirimkan Ir. Djuanda guna mencari bantuan yang tidak mengikat ke Amerika Serikat. Garis itu diteruskan oleh kabinet penggantinya yaitu Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951) setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan.

Kabinet Sukiman (April 1951 -- Februari 1952) pengganti Kabinet Natsir, yang menempuh kebijaksanaan yang menyimpang dari politik bebas-aktif. Pada bulan Januari 1952 Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran surat dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam usaha mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan *Mutual Security Act (MSA)*. Sekalipun masih di dalam tingkat pertukaran surat, kejadian ini mengundang reaksi dari pelbagai pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengajukan interpelasi atas kebijaksanaan politik luar negeri, yang menyangkut MSA. Pemerintah dianggap telah meninggalkan politik bebas-aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.

Dasar hubungan dengan Amerika Serikat yang ditempuh oleh Kabinet Sukiman diteruskan, tetapi "perjanjian" Subardjo - Cochran" diubah dengan bentuk lain yang tidak melebihi

batas kerja sama biasa antarbangsa. Isi perjanjian dibatasi pada bantuan ekonomi dan teknik saja.⁵² Bagi pemerintah, selanjutnya kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kabinet Sukiman ialah menentukan batas "kanan" bagi pelaksanaan politik bebas-aktif demi kepentingan Nasional.

Upaya dan pelaksanaan yang lebih ofensif dan melonjak di bidang diplomatik tampak pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Hal itu tercermin dalam jawabannya pada 3 Juni 1952 kepada Parlemen agar pemerintah menetapkan sikap yang pasti antara tiga kemungkinan politik luar negerinya, yaitu :

- Pertama: kerjasama dengan semua negara dengan menitikberatkan kerja sama dengan Amerika Serikat, dengan segala konsekuensinya,
- Kedua : kerja sama dengan semua negara dengan menitikberatkan kepada kerja sama dengan Uni Sovyet, dengan segala konsekuensinya,
- Ketiga : kerja sama dengan semua negara dengan menitikberatkan kepada penyusunan kekuatan ketiga, di samping blok Amerika dan blok Uni Sovyet.

Selanjutnya dalam keterangannya kepada parlemen pada 25 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengemukakan betapa pentingnya usaha pemupukan kerja sama antara negara-negara Asia-Afrika. Dalam keterangannya tersebut dikemukakan, "Kerja sama dengan golongan negara-negara Asia-Afrika (Arab) kami pandang penting benar, karena kami yakin bahwa kerja sama erat antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal."

Kabinet berikutnya yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap berusaha menjalankan politik yang bebas-aktif dengan agak dekat ke Barat. Selain dengan Australia dan Amerika Serikat, hubungan baik juga dijalin dengan Kerajaan Inggris, Si-

⁵²Departemen Luar Negeri, *Duapuluh tahun Departemen Luar Negeri RI*, hal. 232, 241, 242.

ngapura, dan Malaya. Salah satu hasilnya adalah Indonesia memperoleh bantuan surplus makanan dari Amerika Serikat seharga \$ 96.700.000 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2 Maret 1956. Presiden Soekarno juga secara resmi diundang untuk mengunjungi Amerika Serikat oleh John Foster Dulles, menteri luar negeri Amerika Serikat yang datang ke Indonesia pada bulan Maret 1956.

Selain mengadakan hubungan baik dengan negara-negara Barat, kunjungan itu dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Indonesia menganut politik bebas-aktif. Presiden Soekarno pada bulan Agustus 1956 mengunjungi Uni Sovyet. Dalam kunjungan ini telah ditandatangani perjanjian kerja sama dengan pemberian bantuan ekonomi tanpa ikatan dari Uni Sovyet sebesar \$ 100.000.000.⁵³ Pada bulan yang sama presiden mengadakan kunjungan ke Cekoslovakia dan Yugoslavia. Kunjungan ke RRC dilakukan pada bulan Oktober.

Dengan Belanda dicoba membuka hubungan baru untuk menyelesaikan masalah Uni Indonesia-Belanda dan masalah Irian Barat. Perundingan tentang hal ini memakan waktu yang lama dan berlarut-larut, sehingga menimbulkan tentangan dari partai-partai anggota kabinet sendiri. Indonesia dianggap merendahkan diri dan meminta-minta pada Belanda. Pada akhirnya pemerintah memutuskan Uni Indonesia-Belanda dibatalkan secara sepihak. Tindakan ini disambut dengan hangat. Pada 22, 23, dan 24 Februari 1957 bendera Merah Putih dikibarkan sebagai tanda syukur bahwa satu lagi sisa ikatan kolonial diputuskan.

2. Di Antara Dua Blok

Pandangan sikap pemerintah Indonesia tentang politik luar negeri bebas-aktif dapat dikaji dari berbagai keterangan kabinet-kabinetnya. Keterangan Kabinet Natsir kepada Parlemen pada bulan September 1952.⁵⁴ yang meninjau politik luar negeri

⁵³ Ide Anak Gde Agung, *Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965*. Paris, 1973, hal. 1980.

⁵⁴ Sejak bulan Agustus 1950 sampai tanggal 4 Juli 1959, Negara Republik Indonesia berada dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Indonesia dari segi pertentangan antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet, antara lain menyebutkan, "Antara dua kekuasaan yang telah timbul, telah muncul persaingan atas dasar pertentangan ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua belah pihak sedang mencari dan mendapatkan kawan atau sekutu, membentuk golongan atau blok, yaitu blok-Barat dan blok-Timur. Dengan demikian pertentangan paham dan haluan makin meluas dan mendalam, sehingga menimbulkan keadaan perang dingin dan dikuatirkan sewaktu-waktu akan menyebabkan perang di daerah-daerah perbatasan antara dua pengaruh kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas. Dan dalam menjalankan politik yang bebas itu kepentingan rakyatlah yang menjadi pedomannya, di samping itu pemerintah akan berusaha untuk membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa menjadi politik oportunis yang hanya didasarkan perhitungan laba-rugi dan tidak berdasarkan cita-cita luhur".⁵⁵

Dalam keterangannya kepada Parlemen pada bulan Mei 1951, Sukiman antara lain mengatakan, "Politik luar negeri RI tetap berdasarkan Pancasila, pandangan hidup bangsa yang menghendaki perdamaian dunia. Pemerintah akan memelihara hubungan persahabatan dengan setiap negara dan bangsa yang menganggap Indonesia sebagai negara dan bangsa sahabat, berdasarkan harga-menghargai, hormat-menghormati. Berhubung dengan adanya ketegangan politik, yaitu antara blok Uni Sovyet dan blok Amerika Serikat, maka Pemerintah Indonesia tidak akan menambah ketegangan itu dengan turut campur dalam perang dingin yang terjadi antara dua blok itu". Atas pendirian di muka, Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentu menggunakan forum PBB tersebut untuk membela cita-cita perdamaian dunia.⁵⁶

⁵⁵ Moh. Hatta, *Dasar-Dasar Politik Luar Negeri RI*, Djakarta, 1953 hal. 17; Departemen Luar Negeri *Duapuluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, hal. 59-60.

⁵⁶ *Ibid*.

Kabinet Wilopo menerangkan kepada parlemen pada bulan Mei 1952 antara lain, "... asal mulanya pemerintah menyatakan sikap bebas dalam perhubungan luar negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan adanya dua aliran bertentangan dalam kalangan internasional yang mewujudkan dua blok, yaitu Blok Barat dengan sekutu-sekutunya dan Blok Timur dengan teman-temannya. Republik Indonesia bersikap bebas dengan makna : (a) tidak memilih salah satu pihak untuk selamanya dengan mengikat diri kepada salah satu dari dua blok dalam pertentangan itu dan (b) tidak mengikat diri untuk selamanya atau akan bersikap netral dalam tiap-tiap peristiwa yang terbit dari pertentangan antara dua blok itu tadi".

Ternyata kemudian keterangan sikap yang semata-mata bersifat negatif itu menimbulkan salah paham atau sedikit keraguan dalam kalangan politik dalam negeri maupun pada pihak dua blok yang bertentangan itu. Dalam sesuatu soal atau peristiwa yang timbul yang mengenai pertentangan antara dua blok itu, Republik Indonesia tetap berdasarkan sikapnya kepada politik bebas-aktif, dengan mengingat:

- (a) paham tentang niat dan tujuannya sebagai anggota yang ikhlas setia dan bersungguh-sungguh daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa,
- (b) pandangannya tentang kepentingan negara dan bangsanya yang berpengaruh besar pada jangka masa dekat ataupun masa jauh.⁵⁷

Dalam pada itu jelas bahwa politik luar negeri itu tidak semata-mata ditentukan oleh faktor subjektif, sesuai dengan keinginan satu negara, atau perasaan simpati atau antipati dari para negarawan serta pemimpin-pemimpin sesuatu negara.⁵⁸ Faktor-faktor objektif turut serta menentukan corak politik luar negeri itu, karena itu sering terjadi bahwa haluan politik luar negeri sesuatu bangsa, berlainan dengan politik dalam negerinya dan tidak tergantung kepada ideologi sesuatu

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

partai atau golongan yang pada suatu waktu memegang kekuasaan. Politik bebas-aktif adalah pada hal memilih sikap yang ditentukan oleh kepentingan bangsa sendiri. Republik Indonesia menggandengkan politik bebas-aktifnya dengan politik bertetangga baik (*good neighbour policy*), dan berdasarkan semangat demikianlah terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika.

Perkembangan baru dalam pelaksanaan politik bebas-aktif ini terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 – Juli 1955). Kabinet Ali I tidak menitikberatkan hubungannya ke Barat, tetapi lebih mendekatkan diri dengan negara-negara Asia-Afrika dan negara-negara Blok Sosialis. Ali telah merintis ofensif diplomatik bebas-aktif dan lain-lain.

Untuk meredakan ketegangan dunia yang ditimbulkan oleh ancaman perang nuklir antara kedua negara raksasa Amerika Serikat dan Uni Sovyet, Indonesia kemudian berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Bagi bangsa Asia-Afrika, Konferensi A-A merupakan titik kulminasi solidaritas di kalangannya. Konferensi memulai kerja sama baru dan pemberian dukungan lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. Khusus bagi Indonesia konferensi memberi dukungan utama bagi pembebasan wilayah Irian Barat.

Kabinet Ali II (sesudah Pemilihan Umum) melaksanakan hubungan dengan negara Blok Sosialis. Pada bulan Maret 1954 dibuka hubungan diplomatik dengan Uni Sovyet. Berdasarkan atas prinsip politik bebas-aktif itu, sesudah Pemilihan Umum 1955 presiden melaksanakan muhibah, baik ke negara-negara Blok Barat (Mei – Juli 1956) maupun ke negara-negara Blok Timur (Agustus 1955).⁵⁹

3. Konferensi Asia – Afrika

Contoh konkret politik bebas aktif adalah Konferensi Asia-Afrika. Konferensi itu berawal pada Konferensi Kolombo yang berlangsung dari 28 April sampai 2 Mei 1954 dan dihadiri

⁵⁹ Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hal. 233.

oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Perdana Menteri U Nu dari Birma, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India dan Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Sri Lanka.

Dalam konferensi tersebut Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyarankan agar pertemuan-pertemuan selanjutnya diperluas dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lainnya dari Asia-Afrika. Selanjutnya dalam akhir kunjungan PM Ali Sastroamidjojo ke India dikeluarkan Pernyataan Bersama Indonesia-India yang menekankan kembali perlunya diselenggarakan konferensi negara-negara Asia-Afrika yang akan bermanfaat bagi usaha menunjang perdamaian dunia serta mengadakan pendekatan-pendekatan mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Setelah berkunjung ke India, PM Ali Sastroamidjojo mengunjungi Burma. Pada akhir kunjungannya dikeluarkan pernyataan bersama. Di dalam pernyataan ini dijelaskan bahwa Perdana Menteri Burma menganggap suatu Konferensi Asia-Afrika perlu dan akan bermanfaat bagi perdamaian dunia. Setelah itu diadakan pertemuan kembali para perdana menteri peserta Konferensi Kolombo di Indonesia untuk membicarakan persiapan-persiapan konferensi negara-negara Asia-Afrika di Indonesia.⁶⁰

Pertemuan selanjutnya diselenggarakan di Bogor dari 28 Desember sampai 31 Desember 1954. Konferensi Bogor mengajukan rekomendasi untuk :

- (1) mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955,
- (2) menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor,
- (3) menetapkan 25 negara-negara Asia-Afrika yang akan diundang,
- (4) menentukan empat tujuan pokok dari Konferensi Asia-Afrika, yaitu untuk : (a) memajukan kemauan baik dan

⁶⁰ Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalannku*, Jakarta, 1972, hal. 476-477.

- kerja sama antara bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam menjelajah dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama mereka serta memperkokoh hubungan persahabatan dan bertetangga baik, (b) meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili, (c) mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili, (d) mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika, seperti masalah mengenai kedaulatan nasional, rasialisme dan kolonialisme, dan (5) meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan yang dapat mereka berikan dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Setelah Konferensi Persiapan di Bogor, dari 18 – 25 April 1955 diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dengan dihadiri oleh 24 negara undangan dan kelima negara pengambil prakarsa. Negara-negara kolonial Barat pada umumnya menyangsikan kemampuan negara-negara baru itu untuk menyelenggarakan suatu konferensi politik. Sambutan-sambutan dan dorongan-dorongan positif sebaliknya telah terdengar dari pihak-pihak negara sosialis. Dengan makin kuatnya usaha negara-negara sosialis dan negara-negara lain untuk menonjolkan *peaceful-coexistence*, agenda Konferensi Bandung memuat lima pokok acara yang akan dibicarakan, yaitu :

- (1) kerja sama ekonomi,
- (2) kerja sama budaya,
- (3) hak azasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri (di dalamnya antara lain termasuk soal Palestina dan rasialisme),
- (4) masalah-masalah bangsa-bangsa yang tidak merdeka (di dalamnya antara lain termasuk soal Irian Barat dan Afrika),
- (5) masalah Perdamaian Dunia dan kerja sama internasional (di dalamnya termasuk beberapa segi tentang PBB, soal koeksistensi, masalah Indo-Cina, Aden serta masalah pengurangan persenjataan serta masalah-masalah senjata pemusnah massal).⁶¹

⁶¹ Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hal. 116–118; lihat juga George Mc. Turnan Kahin, *The Asian-African Conference*, New York, 1955, hal. 76-84.

Dalam pidato pembukaannya mengenai keadaan dunia Presiden Soekarno antara lain mengingatkan bahwa kolonialisme belum lagi mati.⁶² Pidato-pidato sambutan baik dari Indonesia maupun dari para ketua delegasi negara peserta selain telah menimbulkan suasana yang membesarkan semangat persaudaraan dan persatuan di antara para peserta konferensi juga merupakan suatu pernyataan lahirnya Asia-Afrika yang baru.

Sesuai dengan keterangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat sementara (14 Juni 1955) mengenai hasil-hasil Konferensi Asia-Afrika, antara lain dikemukakan bahwa konferensi dapat mengelakkan diri dari medan pertentangan perang dingin. Selain itu beberapa ketegangan yang timbul di beberapa bagian benua Asia-Afrika dapat diredakan. Konferensi ternyata juga dapat menerima cara pendekatan Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat. Sistem musyawarah dan mufakat ternyata dapat diterapkan pada konferensi tersebut dengan hasil yang baik. Dengan berkumpulnya 29 negara Asia-Afrika yang memiliki aneka warna dasar hidup kemasyarakatan, perekonomian, ketatanegaraan, sebenarnya telah diperhatikan ke-eksistensi secara damai dalam praktek.

Pada akhir konferensi dihasilkan beberapa dokumen, yaitu *Basic Paper on Racial Discrimination* dan *Basic Paper on Radio Activity*. Keduanya dianggap sebagai bagian dari keputusan konferensi. Dokumen yang kemudian terkenal dengan nama Dasasila Bandung ialah 10 prinsip yang tercantum dalam *Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation*.⁶³ Kesepuluh perjanjian tersebut adalah:

- (1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat dalam piagam PBB,
- (2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa,

⁶² Roeslan Abdulgani, *Perkembangan* dan seterusnya, hal. 23; 161-169.

⁶³ Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hal. 248-249.

- (3) Mengakui semua persamaan suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil,
- (4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dengan soal-soal dalam negeri negara lain,
- (5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri-sendiri atau secara kolektif, yang sesuai dengan piagam PBB,
- (6) Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain,
- (7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu bangsa,
- (8) Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim ataupun lain-lain cara damai lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan piagam PBB,
- (9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama,
- (10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.⁶⁴

Untuk Indonesia sendiri konferensi ini membawa keuntungan yang nyata, yaitu ditandatanganinya persetujuan dwi-kewarganegaraan harus memilih salah satu, menjadi warga negara Indonesia atau RRC, yang tidak bisa memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya, dan keuntungan kedua ialah dukungan yang diperoleh berupa putusan Konferensi Asia-Afrika mengenai perjuangan merebut Irian Barat.⁶⁵

⁶⁴ George Mc T. Kahin, *Asia Afrika Conference*. Ithaca: Modern Indonesia Project Cornell University Press 1956; lihat juga Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection: Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955*. Jakarta: PT. Gunung Agung 1980.

⁶⁵ Herbet Feith *op. cit.*, hal. 393.

D. MASALAH—MASALAH ANGKATAN PERANG

1. Peristiwa 17 Oktober 1952⁶⁶

Setelah Pengakuan Kedaulatan, pimpinan Angkatan Perang khususnya Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berusaha untuk mengkonsolidasi dan memajukan TNI. TNI yang terdiri atas pejuang-pejuang yang bermodalkan semangat dan masih diikat oleh loyalitas pribadi, akan ditingkatkan menjadi angkatan perang yang lebih tinggi mutu teknis militernya, lagi pula diikat oleh disiplin yang melembaga. Jika usaha ini berhasil, Angkatan Perang akan menjadi sesuatu kekuatan sosial-politik yang utuh untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Namun demikian ada upaya untuk merusak cita-cita itu. Langkah-langkah mulai diambil melalui seorang perwira senior. Kolonel Bambang Supeno, yang mendatangi panglima-panglima daerah dan mengajak mereka untuk menandatangani pernyataan agar presiden mengganti KSAD Kolonel AH. Nasution.⁶⁷

Pada 12 Juli 1952 diadakan pertemuan perwira-perwira pimpinan Angkatan Darat dari pusat dan daerah dan kebanyakan di antara mereka tidak menyetujui cara yang ditempuh oleh Kolonel Bambang Supeno, inspektur infantri itu, karena merusak solidaritas intern Angkatan Perang. Keesokan harinya Kolonel Bambang Supeno menulis surat kepada perdana menteri, menteri pertahanan dan Parlemen. Di dalam surat itu ia menyatakan bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan pada atasannya. Sementara itu Parlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi yang menuntut agar diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.⁶⁸

Pada 18 Juli 1952 KSAP mengirim surat kepada pemerintah, mendesak agar peristiwa tersebut diselesaikan sesuai

⁶⁶ A.H. Nasution, "Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 9 November 1972.

⁶⁷ T.B. Simatupang, "Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 16–21 Oktober 1972.

⁶⁸ *Antara*, 7 Maret 1953, *Keng Po*, 17 Maret 1953.

dengan prosedur militer. Karena tindakan Kolonel Bambang Supeno dianggap melanggar disiplin, maka Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX membebastugaskannya. Sementara itu seksi pertahanan dari Parlemen memberi perhatian yang serius terhadap masalah ini. Pembebasan tugas Kolonel Bambang Supeno ternyata ditolak ketika diajukan kepada presiden.

Selanjutnya atas inisiatif Kolonel Djatikusumo, dengan seizin KSAP, diselenggarakan rapat kolegial pada 10 Oktober yang dihadiri oleh para panglima serta para perwira menengah yang berada di Jakarta. Dalam rapat tersebut diadakan pertukaran pendapat mengenai perdebatan kebijaksanaan Kementerian Pertahanan dalam DPRS yang membahayakan keutuhan organisasi Angkatan Perang serta negara. Rapat mencapai kesepakatan untuk berkumpul lagi apabila ternyata DPRS sampai menerima mosi. Rapat khusus lanjutan antara KSAD dengan para panglima membicarakan mosi DPRS diadakan pada 11 Oktober. Hasil keputusan rapat ialah bahwa mereka secara solider akan menghadapi perkembangan selanjutnya. Masih dalam rangkaian pembicaraan DPRS tentang Angkatan Perang, pada 15 Oktober para panglima diundang rapat lagi ke Staf Umum Angkatan Darat karena DPRS akan menyatakan putusannya pada 16 Oktober. Dalam DPRS sendiri ada tiga usul mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu:

- (1) Mosi Burhanuddin yang berfokus pada ketidakpercayaan terhadap kebijaksanaan menteri pertahanan dan pimpinan AP.,⁶⁹
- (2) Mosi Kasimo/Natsir yang mendesak peninjauan kembali susunan Kementerian Pertahanan dan APRI,⁷⁰
- (3) Mosi Manai Sophiaan yang menuntut peninjauan kembali pimpinan Angkatan Perang.⁷¹

⁶⁹ Usul Mosi Burhanuddin ditolak dengan 39 suara setuju dan 80 suara tidak setuju *Risalah Perundingan* 1952, jilid XII, hal. 611-7.

⁷⁰ Usul Mosi Kasimo/Natsir ditarik karena pemerintah sependapat dengan usul tersebut.

⁷¹ Usul Mosi Manai disetujui 91 suara dan ditolak 44 suara *Risalah Perundingan* 1952, jilid XII, hal. 6121-3.

Menghadapi perkembangan DPRS itu, pimpinan AD, berdasarkan hasil konsensus dengan para panglima teritorial pada 16 dan 17 Oktober 1952, mengeluarkan Pernyataan Pimpinan AD. Pernyataan yang terdiri atas tujuh butir keputusan itu, pada butir kelima mengemukakan kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan. Pimpinan Angkatan Perang dalam pernyataannya tersebut antara lain mendesak kepada kepala negara untuk membubarkan DPRS dan membentuk DPR baru.

Pernyataan itu ditandatangani oleh KSAD, para panglima teritorial, asisten-asisten KSAD, dan inspektur-inspektur kesenjataan/jawatan sebanyak 16 orang perwira menengah. Penyampaian surat pernyataan tersebut dilaksanakan pada 17 Oktober kepada presiden dipercayakan kepada Wakil KSAD Letkol Sutoko yang juga dipercayakan bertindak sebagai juru bicara. Karena malam hari sebelumnya presiden sudah diberitahu melalui Kolonel dr. Mustopo, maka ia merasa tidak begitu terkejut. Presiden menolak desakan itu dan berjanji akan menyelidiki lebih dahulu keinginan rakyat di luar Jakarta dan akan mendesak pemerintah agar mempercepat pemilihan umum.

Demonstrasi masyarakat di depan istana yang menuntut pembubaran parlemen terjadi pada siang hari itu juga. Menghadapi kemungkinan terjadinya demonstrasi, telah diadakan penjagaan pada posisi yang strategis seperti di Lapangan Banteng dan Lapangan Merdeka.⁷²

Akibat Peristiwa 17 Oktober, perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengatasinya. KSAD Konolen AH. Nasution mengajukan permintaan berhenti. Ia merasa bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut.

2. Masalah Pimpinan Angkatan Darat

Usaha mengutuhkan kembali Angkatan Darat dicoba dengan cara musyawarah antara golongan pro-17 Oktober dan golongan anti-17 Oktober dalam pertemuan yang di-

⁷² Jenderal Dr. A.H. Nasution, *17 Oktober 1952*, hal. 8-11.

hadiri oleh 29 orang perwira senior Angkatan Darat di Yogyakarta yang berlangsung dari 21 sampai 25 Februari 1955. Pertemuan yang disebut *Rapat Collegial* (Raco) ini membahas tiga masalah pokok, yaitu :

- (1) Keutuhan dan persatuan Angkatan Darat,
- (2) Penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952, dan
- (3) Pembangunan Angkatan Darat.

Raco menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia. Dengan ditandatangani Piagam Yogyakarta oleh kedua puluh sembilan orang peserta Raco itu, Peristiwa 17 Oktober 1952 di kalangan Angkatan Darat dianggap selesai.

Tidak lama setelah berakhirnya konferensi Asia-Afrika, KSAD Kolonel Bambang Sugeng meletakkan jabatannya karena merasa tidak mampu melaksanakan isi Piagam Yogya. Terjadilah kesukaran-kesukaran untuk menunjuk penggantinya, tetapi akhirnya pemerintah memutuskan mengangkat Kolonel Bambang Utojo, panglima Tentara dan Territorium II/Swiiwijaya sebagai KSAD. Pengangkatan Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD mendapat tantangan dari Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis dan kalangan Angkatan Darat sendiri. Upacara pelantikan KSAD baru yang dilaksanakan pada 27 Juni 1955 diboikot oleh para perwira senior Angkatan Darat, sedangkan Zulkifli Lubis sebagai pejabat KSAD menolak untuk melaksanakan serah terima. Pemerintah yang tidak mendapat dukungan Angkatan Darat ternyata tidak dapat melakukan sesuatu tindakan terhadap Kolonel Zulkifli Lubis, sehingga akhirnya kewibawaan pemerintah menjadi goyah apa lagi dengan adanya mosi Zainul Baharuddin terhadap kebijaksanaan menteri pertahanan. Akibatnya Mr. Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan. Krisis ini memuncak setelah partai-partai pendukung pemerintah menarik dukungannya. Parindra misalnya, pada 12 Juli menyerukan penarikan menterinya yakni RP. Soejono dari kabinet, sedangkan PSII bahkan menuntut kabinet dibubarkan saja. Akhirnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyerahkan kembali

mandatnya kepada wakil presiden pada 24 Juli 1955 karena saat itu presiden sedang menunaikan ibadah haji.⁷³

3. Peristiwa Halim

Peristiwa yang hampir serupa di Angkatan Darat pada 27 Juni 1955 terjadi pula di Angkatan Udara. Di Pangkalan Udara Cililitan (kini Halim Perdanakusuma) pada 14 Desember 1955 terjadi keributan menjelang pelantikan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara Hubertus Suyono. Beberapa saat sebelum Komodor Suyono dilantik, secara tiba-tiba 25 orang prajurit dari pasukan kehormatan bersama-sama maju serta berteriak, "Tidak setuju, tidak setuju". Secara beramai-ramai mereka meninggalkan barisan. Upacara pelantikan mengalami kegagalan, karena Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap menolak melantik Komodor Suyono tanpa panji-panji.

Akibat peristiwa tersebut maka dilakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap para pelaku huru-hara. Masalah pengusutannya diserahkan kepada Jaksa Tentara Agung. Guna mengatasi peristiwa itu kemudian presiden/panglima tertinggi dengan didampingi oleh KSAU. Laksamana Muda Surjadarma dan Komodor Noordraven memberikan amanatnya di hadapan para perwira AURI di Halim. Dalam penjelasannya di hadapan para perwira, presiden menyatakan bahwa ia telah menerima permohonan berhenti dari KSAU Surjadarma, tetapi telah ditolaknya.

Latar dari peristiwa Cililitan ini sebenarnya merupakan masalah intern Angkatan Udara yang timbul sejak tahun 1950. Pada 28 -- 29 Januari 1950 atas inisiatif Komodor Dr. Hardjolutomo diadakan rapat guna membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh Angkatan Udara dan dihadiri oleh 10 perwira senior AURI dipimpin oleh Komodor Muda Suyono. Rapat yang sama diselenggarakan di Bandung dari 30 Januari sampai 9 Februari dipimpin oleh Komodor Muda Wiweko. Dalam

⁷³ Wilopo S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-partai*, hal. 41-42 lihat juga Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, hal. 334-5.

rapat ini pimpinan AURI dikecam, dianggap tidak mempunyai kebijaksanaan yang tegas.

Sementara itu pada 2 Juli dan 12 Juli 1952 di Pangkalan Halim diselenggarakan rapat yang membahas masalah pendidikan dan penerbangan yang dipimpin oleh Komodor Muda Suyono. Terjadinya rentetan rapat-rapat itu menunjukkan bahwa di kalangan perwira AURI terdapat dua kelompok, sebagian mendukung KSAU dan sebagian lagi menentang kebijaksanaan KSAU.

Tindakan selanjutnya dari Komodor Muda Suyono pada 30 Oktober 1952 adalah mengumpulkan para perwira Angkatan Udara yang sudah diliputi oleh suasana pertentangan paham. Karena tindakan-tindakannya, maka Suyono dipanggil oleh KSAU dan pada 11 Mei 1953 diperintahkan untuk berangkat ke luar negeri. Karena ia merasa bahwa perintah itu adalah hukuman, maka ia kemudian minta izin kepada KSAU agar diperbolehkan mengadakan masalahnya kepada Menteri Pertahanan. Permintaan diluluskan, tetapi ternyata surat pengaduannya diberikan tembusannya kepada DPR. Tindakan ini dipersalahkan oleh pimpinan AURI. Peristiwa ini berlanjut dengan adanya permohonan pengunduran diri beberapa perwira muda penerbangan AURI. Permohonan pengunduran diri beberapa perwira muda ini tidak dikabulkan oleh KSAU.

Menanggapi peristiwa intern AURI ini, pada bulan Januari 1954 Kabinet Ali Sastroamidjojo menyatakan mempertahankan Surjadarma sebagai KSAU, sedangkan kepada Suyono dan rekan-rekannya yang tidak menyetujui kebijaksanaan KSAU diajukan pilihan akan tinggal atau keluar dari AURI. Komodor Muda Suyono dikenakan tahanan. Suyono kemudian direhabilitasi dan untuk sementara ditugaskan pada Kementerian Pertahanan. Penyelesaian peristiwa Halim dan masalah intern AURI dilakukan oleh Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap, jabatan yang dirangkapnya di samping sebagai perdana menteri dengan membagi tugas dua persoalan yang masing-masing terpisah, yaitu :

- (1) Masalah yang terjadi di Pangkalan Halim diselesaikan oleh Jaksa Tentara Agung.
- (2) Penyempurnaan AURI dalam arti yang luas ditugaskan kepada GKS (Gabungan Kepala Staf) yang pada waktu itu dipimpin oleh KSAD Mayor Jenderal AH. Nasution. GKS diberi kebebasan untuk membentuk panitia khusus untuk keperluan tersebut.⁷⁴

E. MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI

1. Peristiwa APRA

Pada masa RIS tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut akan kehilangan hak-haknya bila Belanda meninggalkan Indonesia. Salah satu manifestasinya adalah gerakan yang dikenal dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah pimpinan eks Kapten Raymond Westerling pada bulan Januari 1950.

Salah satu selubung bagi gerakan itu adalah ideologi yang hidup di kalangan rakyat. Westerling memahami bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik di bawah Belanda maupun di bawah Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya.

Dengan taktik gerak-cepat pasukan memasuki Kota Bandung dan secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang mereka jumpai. Gerombolan APRA yang berjumlah lebih dari 150 orang juga berhasil menduduki Markas Staf Divisi Siliwangi setelah membunuh hampir seluruh regu jaga yang hanya berjumlah 15 orang serta Letnan Kolonel Lembang.

⁷⁴ Drs. Saleh As'ad Djamhari, *op. cit.*, hal. 88-89.

Hanya tiga orang yang berhasil selamat karena dapat meloloskan diri dari pengepungan.

Keganasan gerakan APRA di Kota Bandung memakan korban lebih dari 79 anggota APRIS tewas termasuk penduduk sipil. Pemerintah RIS segera mengirimkan bala bantuan ke Bandung. Di Jakarta juga segera diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya adalah bahwa Mayor Jenderal Engels, komandan tentara Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota sore hari itu. Setelah meninggalkan Kota Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai tempat dan terus dikejar APRIS.

Selain ke Bandung gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Di sini Westerling mengadakan kerja sama dengan Sultan Hamid II yang menjadi menteri negara tanpa departemen (*portofolio*) dalam Kabinet RIS. Menurut rencananya gerombolan APRA ini akan menyerang gedung tempat diadakan sidang kabinet. Mereka akan menculik semua menteri dan membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan Pejabat Staf Angkatan Perang Kolonel TB. Simatupang,⁷⁵ tetapi berkat kesiagaan APRIS, usaha APRA di Jakarta juga mengalami kegagalan. Walaupun demikian Westerling dengan gerombolan APRA-nya masih terus mencoba untuk mencapai tujuannya walaupun usahanya itu sia-sia. Pada 22 Februari 1950 Westerling meninggalkan Indonesia dengan pesawat terbang Belanda.

2. Peristiwa Makasar dan Kerusuhan KNIL

Rongrongan kedua yang dialami RIS adalah petualangan yang dijalankan oleh Kapten Andi Azis di Makasar (Ujung Pandang). Motif peristiwa ini adalah sikap menolak masuknya unsur-unsur TNI ke Sulawesi Selatan. Kapten Andi Azis adalah perwira KNIL yang telah diterima ke dalam APRIS. Pada 30

⁷⁵ Persadja, *Proses Peristiwa Sultan Hamid II*, Djakarta, 1955, hal. 54-60.

Maret 1950 ia bersama-sama dengan pasukan KNIL yang berada di bawah komandonya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Letnan Kolonel AJ. Mokoginta. Pada waktu itu keadaan Makasar sendiri tidak tenang, sebab rakyat yang anti-federal mengadakan demonstrasi sebagai desakan agar NIT secepatnya bergabung dengan RI.

Golongan yang setuju pada sistem federal juga mengadakan demonstrasi, sehingga ketegangan semakin memuncak. Di samping itu pada 5 April 1950 terdengar berita bahwa Pemerintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI/APRIS di bawah pimpinan Mayor HV. Worang, diangkut dengan dua buah kapal dan sudah berlabuh di luar Pelabuhan Makasar. Berita ini mengkhawatirkan pasukan KNIL yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri "Pasukan Bebas" di bawah pimpinan Kapten Andi Azis.⁷⁶ Pagi hari sekitar pukul 05.00 Andi Azis dengan pasukannya menyerang markas TNI di Makasar. Pasukan APRIS jumlahnya jauh lebih sedikit dari gerombolan penyerbu. Beberapa orang prajurit TNI jatuh menjadi korban dan beberapa orang perwira termasuk Letnan Kolonel AJ. Mokoginta ditawan.

Pada 5 April Perdana Menteri NIT Ir. PD. Diapari mengundurkan diri karena tidak menyetujui tindakan Andi Azis. Pemerintah kemudian dipegang oleh kabinet baru yang pro-RI di bawah pimpinan Ir. M. Putuhena yang mendapat mandat dari Pemerintah RIS untuk membubarkan NIT.⁷⁷

Dalam menghadapi gerakan Andi Azis Pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum pada 28 April yang menginstruksikan agar Andi Azis dalam 4 x 24 jam datang melaporkan diri ke Jakarta, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, juga diperintahkan agar pasukan dibuat pimpinannya konsi-

⁷⁶ Herbert Feith, *op. cit.*, hal. 67 : juga Major Bardosono; Peristiwa Sulawesi Selatan, Djakarta, 1950.

⁷⁷ R.Z. Leiressa, *Ir. Natum Putubean, Karya dan Pengabdianya* Jakarta : IDSN 19,.

nyasi, senjata-senjata dikembalikan dan semua tawanan dilepaskan. Keberangkatan Andi Azis ke Jakarta pada 15 April dianggap terlambat untuk melaporkan diri, karena itu ia ditangkap sebagai pembangkang untuk kemudian diadili. Pada waktu yang bersamaan dikirimkan sebuah pasukan ekspedisi ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang. Sementara itu Batalyon Worang yang belum jadi mendarat di Makasar meneruskan perjalanan ke Jenepono dan kemudian mendarat di situ. Pasukan Worang kemudian bergerak ke arah Makasar dan pada 21 April berhasil memasuki Makasar tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan pemberontak.

Setelah seminggu lamanya Batalyon Worang menduduki Makasar, pada 26 April, mendarat pasukan ekspedisi di bawah kolonel AE. Kawilarang di pantai timur tenggara dan barat Sulawesi Selatan. Kekuatan konvoi di bawah pimpinannya terdiri atas 12 kapal dengan membawa dua tank pendarat serta $\pm$ 12.000 orang pasukan. Dengan datangnya bantuan tersebut, semangat tempur prajurit meningkat. Setiap prajurit hingga perwiranya diberi peralatan senjata lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada.

Keamanan di Makasar tidak berlangsung lama, karena di kota ini masih terdapat pasukan KL dan KNIL yang menunggu penarikan ke luar Kota Makasar. Pasukan KL-KNIL ini sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS.

Pasukan yang bertempat tinggal di dekat tangsi KNIL dan tidak bersalah sering dianiaya atau dipukuli. Tindakan yang sama juga dilakukan terhadap anggota APRIS yang sedang berjalan tanpa senjata. Tindakan provokasi pasukan KNIL terhadap APRIS semakin meningkat dan mulai melancarkan serangannya menembaki pos APRIS, terutama asrama yang berada di Kampemen Kis dan Tangsi Mattoangin. Keduanya terletak di kota bagian selatan.

Pertempuran antara KNIL dengan APRIS/TNI terjadi pada 15 Mei 1950. Dalam pertempuran tersebut APRIS berhasil

memukul mundur pasukan lawan. Walaupun demikian bentrokan-bentrokan bersenjata masih juga terjadi seperti terhadap tangsi di Mattoangin, Mariso (Kampemen Kis), Boomstraat (dekat pelabuhan) dan Markas Staf KNIL di Hoge pad. Selanjutnya pasukan APRIS mengadakan pengepungan terhadap tangsi-tangsi KNIL itu. Dengan pertimbangan bahwa pertempuran mungkin akan berlangsung di dalam Kota Makassar, maka Komandan APRIS Sektor Makassar Letkol Soeharto memerintahkan kepada masing-masing sub sektor untuk mengirimkan 1 kompi pasukan ke kota.

Untuk mengatasi kemelut tersebut, pada 18 Mei 1950 diadakan perundingan antara pimpinan APRIS dan KNIL. Pihak APRIS diwakili oleh Kolonel Abdul Haris Nasution sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Kolonel Pereira. Dalam perundingan itu disepakati bahwa akan dilakukan penjagaan bersama oleh Polisi Militer (PM) dari pihak APRIS/TNI dan MP (Militer Politie) dari pihak KNIL di daerah tangsi-tangsi KNIL. Di daerah tersebut KNIL tak boleh keluar dan sebaliknya prajurit APRIS tidak boleh masuk. Di dalam kota dilakukan patroli bersama.

Hasil perundingan ini ternyata hanya ditaati selama beberapa bulan saja. Kota Makassar dan penduduknya kembali dalam keadaan gelisah, karena pertempuran-pertempuran berkobar lagi. Hal ini terjadi setelah terjadinya pembunuhan terhadap seorang perwira APRIS Letnan Jan Ekel yang ditembak mati oleh KNIL pada 1 Agustus 1950. Perwira ini baru datang dari daerah Nusa Tenggara dan belum mengetahui peraturan mengenai garis demarkasi, sehingga memasuki daerah KNIL/KL.

Pertempuran meletus lagi pada 5 Agustus petang hari, ketika Markas Staf Brigade Mataram secara tiba-tiba diserang oleh KNIL/KL. Mereka dapat dipukul mundur lagi ke tangsi-tangsi masing-masing di Kampemen Kis dan Mattoangin. Di sini KNIL/KL kemudian dikepung. Serangan umum dilakukan oleh APRIS dengan mengikutsertakan unsur-unsur infanteri maupun artileri, serta kekuatan udara dan laut. Dalam pertempuran

ini APRIS menggunakan taktik diri. Pada 8 Agustus KNIL/KL sudah sangat lemah. Menyadari kedudukannya yang sangat kritis, maka pada hari itu juga pihak KL-KNIL minta berunding. Perundingan diadakan antara Kolonel Kawilarang dengan Mayor Jenderal Scheffelaar dari KL-KNIL. Hasil perundingan menyatakan bahwa kedua pihak setuju menghentikan tembak menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL-KNIL harus sudah meninggalkan Makassar.

Dengan adanya persetujuan itu, keamanan di Makassar pulih kembali dan semangat untuk bergabung dalam suatu negara kesatuan tidak ada lagi penghalangnya.⁷⁸

3. Pemberontakan RMS

Cobaan lain yang dihadapi RIS dan berlanjut sampai masa RI adalah gerakan separatis untuk membentuk "negara" sendiri yang tidak saja memisahkan diri dari NIT melainkan juga dari RIS, yaitu yang disebut Republik Maluku Selatan (RMS). Pendiri RMS ialah Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil, bekas Menteri Kehakiman dan jaksa agung NIT.⁷⁹ Persamaan antara peristiwa-peristiwa Westerling, Andi Azis serta usaha-usaha Soumokil adalah ketidakpuasan mereka dengan terjadinya proses kembali ke negara kesatuan setelah KMB. Pemberontakan-pemberontakan ini menggunakan unsur KNIL yang merasa tidak pasti mengenai status mereka setelah KMB.

Bersamaan dengan peristiwa Andi Azis, timbul krisis kabinet Negara Indonesia Timur (NIT). Golongan republiken yang sebelumnya mendukung NIT kemudian berusaha membubarkannya dan memasukkan wilayah Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan RI. Keberhasilan usaha APRIS untuk menguasai keadaan pada saat itu telah memperbesar semangat golongan republiken dalam parlemen NIT. Pada 20 April Pupella dari

⁷⁸ Rokhamni Santoso, *op. cit.*, hal. 6-12; Periksa juga : Major Bardosono, *op cit.*

⁷⁹ Soe Hok Gie, *Kisah Penumpasan "RMS" (Gerakan Operasi Militer III)*, Djakarta, 1965, lihat juga Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta, 1985.

Pemuda Indonesia Maluku (PIM) mengajukan mosi tidak percaya pada parlemen NIT. Mosi itu diterima pada 25 April dan kemudian kabinet NIT meletakkan jabatan.⁸⁰ Sebagai perdana menteri selanjutnya dipilih Ir. Putuhena. Program kabinet ini adalah pembubaran NIT dan penggabungan wilayahnya ke dalam wilayah kekuasaan RI.⁸¹ Meskipun demikian Soumokil tidak melepaskan niatnya untuk memisahkan Maluku Tengah dari Negara Kesatuan RI. Dalam pada itu upaya untuk mencegah pembubaran NIT telah berlangsung setidaknya sejak kegagalan pemberontakan Andi Azis. Dua orang yang paling gigih mendukung gagasan Republik Indonesia Timur adalah Soumokil dan Metekohy, kepala Badan Pengawas Keuangan NIT. Dari kedua orang itu pula dijanjikan bantuan militer pasukan Andi Azis dan pasukan KNIL. Oleh karena Metekohy sangat aktif dan bersemangat untuk melaksanakan gagasan tersebut, maka rencana itu terkenal sebagai "plan Metekohy".⁸²

Pada 15 April 1950, dari Makassar Soumokil bersama dengan Kepala Staf Komandan Teritorial pasukan Belanda di Indonesia Timur, Letnan Kolonel Gijsberts pergi ke Manado. Keesokan harinya mereka menuju Ambon. Di kedua kota itu Soumokil mengetahui keresahan di kalangan pasukan KNIL. Kesempatan itu ingin ia gunakan untuk memperoleh dukungan KNIL bagi terbentuknya "RMS" bila jadi diproklamasikan. Meskipun mengetahui bahwa "plan Metekohy" tidak terlaksana di Ambon, Soumokil tetap pada pendiriannya untuk merencanakan bersama pasukan KNIL yang berada di Ambon untuk mendirikan Republik Maluku Selatan.⁸³

Pada 18 April 1950 di Ambon dilansungkan demonstrasi besar-besaran di bawah pimpinan Ir. Manusama. Dalam rapat yang dinyatakannya sebanyak 9000 orang, Manusama memulai pidatonya tidak dengan meneriakan "merdeka". Ia tidak merasa perlu dengan teriakan itu, karena faktornya tidak di-

⁸⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, *Ibid*, hal. 751.

⁸¹ *Ibid*, hal. 755.

⁸² *Ibid*, hal. 741.

⁸³ *Ibid*, hal. 742.

gunakan orang Ambon yang memiliki perasaan asli yakni nasionalisme Ambon.⁸⁴ Dalam rapat itu Ir. Manusama menyatakan adanya dukungan rakyat di sana pada pemerintah Negara Indonesia Timur dan mengimbau agar NIT tetap dipertahankan. Jika rencana itu tidak berhasil, harus diproklamasikan Republik Indonesia Timur yang merdeka. Dengan pernyataan ini dapat dilihat pengaruh Soumokil di dalam rapat rahasia itu.⁸⁵

Perkembangan selanjutnya nampak jelas peranan aktif Soumokil dalam proses pembentukan RMS ketika ia mengadakan rapat rahasia di Tulehu. Dalam rapat ini para pamongpraja sengaja tidak diikutsertakan, sedangkan para pemuka KNIL dan Ir. Manusama mereka undang. Dalam rapat itu Soumokil menganjurkan agar KNIL bertindak. Seluruh anggota Dewan Maluku Selatan disarankan untuk dibunuh, kemudian daerah itu dinyatakan sebagai negara merdeka. Sebagian peserta rapat menolak gagasannya untuk melakukan pembunuhan.⁸⁶ Untuk melaksanakan proklamasi disarankan agar pemerintah daerah sendirilah yang melakukan. Pada rapat kedua sore hari itu Kepala Daerah Maluku Selatan, J. Manuhutu dipaksa untuk hadir di bawah ancaman pasukan KNIL.

Praktek-praktek mengintimidasi massa dengan teror telah nampak mulai dilaksanakan sejak bulan Februari 1950 dengan menggunakan tenaga polisi. Pihak-pihak yang pro-Republik mengalami tekanan-tekanan. Teror dalam ujud serangkaian pembunuhan terjadi di beberapa tempat. Pelaksanaan gerakan teror ini selain mendapat bantuan polisi didukung pula oleh pasukan istimewa KNIL yang pernah merupakan bagian dari *Korps Speciale Troepen* yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di Batujajar (dekat Bandung). Mereka ikut mengambil bagian dalam pemberontakan Westerling di Bandung pada

⁸⁴ Richard Chauvel, *Nationalists, Soldiers and separatists : Tha Ambonese Islamnds From Colonialism to Revolt 1985-1950*, Leiden, 1990.

⁸⁵ Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 743

⁸⁶ R.Z. Leirissa, "Republik Maluku Selatan", Prisma, No. 7 Th. VII. Agustus 1978, hal. 34; lihat juga : R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Jakarta, 1975, hal. 174-180; Ben Van Kam, *Ambon Door de Eeuwen*, 1977, hal. 91-95; 119-120.

awal tahun 1950. Semula mereka hanya berjumlah 60 orang di Ambon, tetapi kemudian pada bulan April 1950 ada sekitar 200 orang. Mereka kemudian menjadi pengikut Soumokil dan melakukan tindakan teror terhadap golongan republiken di antaranya Wim Reawaru, ketua Persatuan Pemuda Indonesia Maluku yang kemudian menjadi korban pembunuhan.

Sampai bulan April di Ambon telah ada 2.000 orang anggota KNIL. Sebagian tiba di sana dalam rangka pengembalian-nya ke masyarakat dan sebagian lagi ingin bergabung dengan APRIS, tetapi di samping itu terdapat pula kelompok yang dikirim ke sana lengkap dengan senjatanya untuk menjadi pengikut Soumokil. Letkol Tahiya, perwira Staf KSAP yang dikirim kementerian pertahanan RIS mencatat nama sejumlah prajurit KNIL yang ingin masuk APRIS, menjadi terhenti karena kekacauan-kekacauan itu.

Pada masa prolog sebelum dicanangkan proklamasi "RMS" dilancarkan propaganda-propaganda separatis oleh Gabungan Sembilan Serangkai yang beranggotakan KNIL dan Partai Timur Besar. Menjelang Proklamasi, pada 24 April 1950, Soumokil berhasil menghimpun kekuatan yang ada di lingkungan masyarakat Maluku Tengah. Selain KNIL dan Polisi yang dapat dipengaruhi, juga para rajapati dengan melalui Manusama, serta pemerintah daerah melalui Manuhutu serta bagian golongan cendekiawan. Orang-orang yang menyatakan dukungannya kepada Republik dipenjarakan atau diancam.⁸⁷

Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah ini dengan damai yaitu dengan jalan mengirimkan dr. Leimena, tetapi misi damai ini ditolak oleh Soumokil, bahkan mereka meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari dunia luar, terutama dari Negeri Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia.⁸⁸

Masyarakat Ambon pun ikut membantu mencoba mencari jalan penyelesaian. Bekas anggota-anggota badan perjuangan

⁸⁷ R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, hal. 178.

⁸⁸ Laporan A. Tahiya, hal. 10.

mengadakan pertemuan untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada masyarakat Ambon. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya provokasi dari kelompok-kelompok yang mendukung "RMS".

Masih dalam rangkaian usaha membendung meluasnya pengaruh "RMS", pada 12 sampai 13 Juni diselenggarakan Konferensi Maluku di Semarang yang dihadiri para politikus asal Ambon yang umumnya terdiri atas tokoh-tokoh zaman pergerakan, menganjurkan agar masyarakat Maluku mengirim suatu misi perdamaian ke Ambon. Mereka juga menyusun suatu daftar usul kepada pemerintah agar diberikan otonomi kepada Maluku Tengah, tetapi para pemuda dari kelompok badan-badan perjuangan tidak menyetujui gagasan itu dan menganjurkan agar pemerintah melaksanakan operasi militer.⁸⁹

Misi perdamaian selanjutnya terdiri atas para politikus, pendeta, dokter, dan wartawan. Meskipun berhasil diberangkatkan, tetapi mereka tidak dapat bertemu dengan pengikut Soumokil. Karena usaha kompromi mengalami jalan buntu, maka akhirnya pemerintah terpaksa menumpas petualangan itu dengan kekuatan senjata. Ekspedisi militer untuk menumpas RMS disebut Gerakan Operasi Militer (GOM) III. Selaku pemimpin Ekpedisi ditunjuk Kolonel Kawilarang, panglima Tentara dan Territorium Indonesia Timur.

Pada 14 Juli pagi hari, pasukan ekspedisi APRIS sebanyak 850 orang di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat di Laha, Pulau Buru. Dengan susah-payah, TNI berhasil merebut pos-pos penting di pulau Buru, Komandan pasukan RMS menyerah dan menghadap Kolonel Kawilarang. Setelah Pulau Buru dikuasai, pasukan APRIS dilanjutkan ke Pulau Seram. Rupanya RMS bermaksud memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di Pulau Seram dan Ambon. Pertempuran kemudian terjadi di Namlea. Pada 28 September 1950 pasukan ekspedisi yang mendarat di Ambon bagian utara berhasil dikuasai. Serangan selanjutnya ditujukan ke Teluk Poso. Dalam serangan

⁸⁹*Ibid*, hal. 178-179.

itu pasukan dibagi atas tiga grup, yaitu Grup I dipimpin oleh Mayor Achmad Wiranatakusumah, Grup II dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Grup III di bawah pimpinan Mayor Surjo Subandrio. Grup III berhasil menguasai lapangan terbang Laha, sedangkan Grup II ketika mendarat di Tulehu disambut dengan gembira oleh rakyat. Serangan-serangan ini dilindungi oleh tembakan-tembakan dari udara dan dari laut. Sementara Grup II menyerang Waitatiri, pada 3 November 1950, Grup I didaratkan di Ambon dan berusaha merebut Benteng Nieuw Victoria. Pada hari itu juga Kota Ambon dapat dikuasai setelah terjadi pertempuran dramatis, seorang lawan seorang. Pasukan "RMS" dengan menyamar sebagai APRIS serta membawa bendera merah putih berhasil menguasai benteng itu kembali. Beberapa saat setelah peristiwa itu, datang Grup II di bawah pimpinan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Dalam pertempuran jarak dekat di depan Benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur.

Dengan jatuhnya Kota Ambon, perlawanan RMS praktis telah dipatahkan. Banyak para tokohnya yang melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram dan selama beberapa tahun mengadakan serangkaian pengacauan.⁹⁰

4. Pemberontakan "DI/TII"

Di tengah-tengah situasi rumit yang lahir dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda, terjadi pula pertentangan-pertentangan di antara sementara pemimpin bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal misalnya masalah ideologi, masalah agama, bahkan oleh kekecewaan atas kegagalan mencapai tujuan politik atau tujuan pribadi tertentu. Pertentangan itu ada yang melahirkan perlawanan pemberontakan terhadap pemerintah Negara Republik Indonesia (RI). Salah satu di antara yang dimaksud ialah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

⁹⁰ Drs. Saleh As'ad Djamhari, *Ikhtisar Sedjarah Perjuangan ABRI*, hal. 66-67. 66-67.

Gerakan ini diawali oleh proklamasi berdirinya "Negara Islam Indonesia (NII)" oleh Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949 di Malangbong Jawa Barat. Untuk mewujudkan maksud proklamasi berdirinya NII itu, Kartosuwirjo yang sekaligus mengangkat dan menyebut dirinya sebagai "imam" (kepala negara) NII, membentuk gerakan yang dikemudian hari dikenal dengan nama Gerakan DI/TII.

Setelah memproklamasikan berdirinya NII di Jawa Barat itu, Kartosuwirjo kemudian mengkonsolidasikan kekuatan untuk mengembanglebarkan pengaruh perlawanan Gerakan DI/TII yang dipimpinnya di Jawa Barat. Usahanya nampak berhasil, terutama ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Keberhasilan Kartosuwirjo melebarkan pengaruhnya ke daerah-daerah lain tentu tidak saja oleh kehendak Kartosuwirjo untuk melebarkan pengaruhnya, melainkan karena keadaan yang berkembang di daerah itu masing-masing.

Kondisi yang berkembang di Jawa Tengah diawali oleh pemimpin Majelis Islam (MI) Amir Fatah yang menyatakan diri bergabung dengan gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Hal itu terjadi sejak awal tahun 1950. Selanjutnya di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan juga terjadi persoalan-persoalan yang membuka peluang bagi lahirnya gerakan DI/TII di daerah-daerah ini. Persoalan penyelesaian masalah bekas pejuang di dalam periode Perang Kemerdekaan merupakan satu penyebab. Para bekas pejuang ini, setelah penyerahan kedaulatan pada akhir tahun 1959, mengharapkan untuk dijadikan sebagai anggota tentara, anggota APRI, tetapi keinginan para bekas pejuang itu tidak mungkin dipenuhi sepenuhnya. Artinya, tidak semua bekas pejuang di daerah-daerah dapat dijadikan sebagai anggota tentara, karena untuk menjadi anggota tentara diperlukan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berkehendak menjadi tentara. Hal ini melahirkan kekecewaan yang amat besar di kalangan para bekas pejuang. Hal itu terjadi pada bekas gerilya pejuang di Sulawesi

Selatan yang dipimpin oleh seorang perwira menengah Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar. Kekecewaan itu terjadi juga di kalangan bekas gerilya pejuang di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh seorang perwira pertama Letnan Dua Ibnu Hadjar.

Di Aceh juga terjadi kekecewaan semacam itu di kalangan sementara bekas gerilya pejuang, tetapi di samping itu Mohamad Daud Beuereueh yang merupakan tokoh pejuang dan ulama yang besar pengaruhnya, kecewa karena penggabungan Aceh sebagai bagian dari Sumatera Utara. Sebelum penggabungan itu Daud Beuereueh adalah gubernur militer Aceh, Langkat, dan Karo. Setelah penggabungan itu, Daud Beuereueh dengan sendirinya "kehilangan" kedudukannya.

Pada mulanya pemerintah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian secara damai. Di Sulawesi Selatan misalnya, Abdul Qahhar Mudzakkar bersama pasukannya dilantik sebagai Corp Tjadangan Nasional (CTN) dengan komandannya tetap Abdul Qahhar Mudzakkar, tetapi walaupun demikian, mereka tetap menuntut untuk diresmikan sebagai anggota APRI. Abdul Qahhar Mudzakkar (1952), mengganti nama pasukannya dengan Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR).

Di dalam perkembangan kemudian, tuntutan para bekas pejuang itu, baik di Sulawesi Selatan, di Aceh maupun di Kalimantan Selatan tidak dapat dipenuhi oleh pimpinan APRI dan pemerintah.

Di tengah-tengah situasi yang berkembang menjadi rumit itu, para pemimpin bekas gerilya pejuang itu mencari alternatif untuk diri mereka. Mereka nampaknya melihat penggabungan diri dan pasukannya sebagai bagian dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat sebagai "alternatif terbaik untuk diri dan pasukan mereka". Tentu saja, sebelum penggabungan secara resmi diumumkan, mereka telah mengadakan hubungan-hubungan untuk melaksanakan maksud penggabungan itu. Hubungan-hubungan itu antara lain dilakukan dengan cara mengirimkan utusan (*kurir*) untuk membicara-

kan pelaksanaan maksud penggabungan itu. Langkah-langkah semacam itu sudah dilakukan sejak akhir tahun 1950 sampai tahun 1952.

Pada 7 Agustus 1953, Abdul Qahhar Mudzakkar sebagai pimpinan TKR di Sulawesi Selatan, mengumumkan penggabungan diri pasukan dan daerah "kekuasaannya" menjadi bagian dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Langkah penggabungan yang serupa pula dilakukan oleh Daud Beureueh di Aceh, dan ini dilakukan pada 7 September 1953. Juga Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan mengumumkan penggabungan diri pasukan dan wilayahnya sebagai bagian dari gerakan pimpinan Kartosuwirjo yang bertujuan mendirikan NII itu. Itu dilakukan pada akhir 1953 atau awal 1954.

Pernyataan dukungan dan penggabungan diri pelbagai pihak dan pimpinan di beberapa daerah gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo yang bertujuan mendirikan NII itu tentu menambah rumitnya persoalan politik dan keamanan negara yang baru sekitar tiga tahun menyelesaikan Perang Kemerdekaan.

Di dalam menghadapi pemberontakan ini, pemerintah dan pimpinan APRI telah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui operasi militer, tetapi juga melakukan langkah-langkah melalui "perundingan" dengan pimpinan pemberontak itu, tetapi sebelum persoalan pemberontakan gerakan DI/TII itu berhasil diselesaikan lahir pula gerakan pemberontakan terhadap pemerintah ketika itu, yakni pemberontakan revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta) pada tahun 1958. Dengan demikian pemerintah RI pada waktu menghadapi setidaknya dua golongan kelompok pemberontakan, yaitu gerakan DI/TII dan gerakan PRRI/Permesta.

Di dalam perkembangan kemudian, pemerintah dan pimpinan APRI terus berusaha menyelesaikan masalah keamanan dalam negeri secara lebih intensif. Operasi militer dilakukan

secara lebih terorganisasi, tetapi sekaligus "pendekatan damai" terhadap tokoh-tokoh pemberontak, baik terhadap tokoh-tokoh DI/TII maupun PRRI/Permesta. Dalam hubungan itu operasi militer berhasil menangkap pimpinan tertinggi gerakan DI/TII "Imam" Kartosuwirjo, di Jawa Barat. Ini terjadi pada tahun 1962. Selanjutnya setelah diadakan "perundingan" yang antara lain dilakukan lewat "Missi Hardi" dan kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman sebagai panglima, akhirnya mendorong Daud Beureueh sebagai pimpinan DI/TII di Aceh berhasil ditangkap oleh pasukan-pasukan APRI yang melakukan operasi terhadap dirinya. Ia "menyerahkan" diri pada tahun 1962.

Gerakan PRRI/Permesta juga tidak mampu menghadapi operasi yang dilakukan oleh pasukan-pasukan APRI, dan sejak tahun 1961 satu persatu pimpinannya ditangkap atau menyerahkan diri ke pos-pos APRI yang terdekat; hal ini terjadi sejak tahun 1961.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1962 daerah yang belum dapat diselesaikan masalah keamanannya ialah daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Di daerah ini gerakan DI/TII pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar masih melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah RI, tetapi sejak tahun 1962 itu juga, persiapan operasi penumpasan terhadap gerakan pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar ini dilakukan secara lebih intensif dan lebih baik.

Di dalam melanjutkan perlawanannya itu, Abdul Qahhar Mudzakkar melakukan langkah-langkah untuk "memperkuat" diri. Dimulai sejak para pimpinan PRRI/Permesta melakukan pendekatan kepada pimpinan DI/TII di Aceh dan Sulawesi Selatan, yang kemudian melahirkan Republik Persatuan Indonesia (RPI) pada tahun 1960, yang kemudian gagal. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk apa yang disebutnya Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) pada tahun 1962, tetapi kesemua usahanya itu gagal, sementara operasi militer secara intensif dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya kegiatan operasi

militer berhasil menyergap dan menembak mati Abdul Qahhar Mudzakkar, yang menyebut dirinya sebagai pejabat chalifah/presiden RPII, pada 2 Februari 1965.

F. PERGOLAKAN DAERAH

1. Latar

Sudah sejak awal tahun 1950an beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterima dari pusat. Selain itu daerah-daerah itu sejak pertengahan 1950an juga tidak menaruh kepercayaan pada pemerintah. Gerakan-gerakan daerah mendapat dukungan dari beberapa panglima yang membentuk dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, komandan Resimen Infanteri 4 pada 20 Desember 1956, Dewan Gajah yang dibentuk oleh Kolonel Mauludin Simbolon, panglima Tentara dan Territorium I (TT I) di Medan pada 22 Desember 1956, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Permesta yang dipimpin Letnan Kolonel HN. Sumual, panglima TT VII/Wirabuana. Salah satu alasan lainnya adalah keinginan Bung Karno untuk mengubah sistem pertahanan sejak akhir 1956.⁹¹

Pembentukan Dewan Banteng dilaksanakan setelah dilangsungkan rapat reuni eks-Divisi Banteng di Kota Padang yang berlangsung dari 20 sampai 25 November 1956. Pertemuan itu pada pokoknya memutuskan bahwa usaha pembangunan daerah akan dilakukan dengan cara menggali otonomi seluas-luasnya. Masalah-masalah lain yang juga telah menjadi keputusan ialah menyusun Sejarah Perjuangan Sumatera Tengah, pembangunan Museum Perjuangan, masalah veteran dan invalid, persoalan panji, masalah janda dan yatim-piatu serta persoalan makam pahlawan. Semua itu dalam pelaksanaannya langsung akan diatasi dan diselesaikan oleh anggota eks-Divisi Banteng yang ada di daerah Sumatera Tengah.⁹²

⁹¹ R.Z. Leirissa, PRRI Permesta, *Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta : Grafiti Pers, 1990. 35-74.

⁹² *Ibid.* hal. 39

Diputuskan juga bahwa hubungan dengan pemerintah pusat akan diperjuangkan secara bertahap dengan berpedoman kepada keputusan rapat reuni. Reuni eks-Divisi Banteng juga telah menyarankan agar daerah diberi otonomi seluas-luasnya khususnya guna pembangunan. Juga diharapkan adanya penelitian mengenai penempatan pejabat-pejabat daerah, sehingga merupakan tenaga produktif bagi daerah. Selanjutnya pada bidang Pertahanan Daerah diusulkan agar dibentuk suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti teritorial, operatif dan inisiatif sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia yang merupakan komando utama. Pada bidang sosial dan ekonomi daerah menghendaki dihapuskan sistem sentralisasi yang pada kenyataannya menimbulkan birokrasi yang kurang sehat. Keadaan demikian itu menghilangkan inisiatif daerah khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Hasil pertemuan reuni kemudian dilaporkan ke Jakarta. Dibentuklah delegasi Dewan Banteng yang terdiri atas Kolonel Dahlan Djambek, A. Halim, Dahlan Ibrahim, Sidi Bakaruddin, dan Ali Lubis. Delegasi ini pada 28 November 1956 berhasil menemui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Berturut-turut delegasi juga menemui Drs. Moh. Hatta dan Mr. A.G. Pringgogido. Usahnya menemui presiden menemui kegagalan karena berbagai hal. Sementara itu sebagai kelanjutan dari keputusan rapat reuni bekas anggota Dewan Banteng, Letkol Achmad Husein selaku ketua Dewan Banteng telah mengambil keputusan untuk mengambil alih pemerintah daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Desember 1956 di Gubernuran Padang. Alasan yang dikemukakan ialah bahwa gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dipandang kurang berhasil dalam membangun daerah Sumatera Tengah.

Hasrat rakyat Sumatera Tengah yang disalurkan melalui Dewan Banteng mengenai masalah otonomi daerah dapat dipahami oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat menjadi heran dengan tindakan Dewan Banteng mengambilalih

kekuasaan pemerintah di Sumatera Tengah. Sejak itu timbul ketegangan antara pimpinan Dewan Banteng dengan pemerintah pusat. Tindakan Dewan Banteng mengambilalih pemerintahan di Sumatera Tengah oleh pemerintah pusat dipandang sebagai tindakan yang menyalahi hukum.

Mengenai alasan pembentukan Dewan Gajah di Sumatera Utara, Kolonel Maludin Simbolon menyatakan bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu dipandang sangat kritis, keadaan bangsa dan negara dalam keadaan kacau. Dalam suatu seruan melalui RRI Simbolon mengemukakan, meskipun keadaan Kota Medan pada waktu itu nampak agak kacau, tetapi undang-undang dan hukum yang telah ada masih tetap berlaku. Ia menyatakan pula tetap taat kepada Kepala Negara Presiden Soekarno, tetapi tidak dapat menaati kabinet yang dianggap gagal melaksanakan pembangunan. Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden Soekarno dalam salah satu pesannya menyerahkan kepada Simbolon agar segera kembali ke jalan yang seharusnya ditempuh oleh anggota tentara. Seruan Presiden Soekarno tersebut ternyata tidak dihiraukan. Simbolon kemudian malah menuntut agar kerukunan Dwitunggal Soekarno-Hatta dipulihkan kembali serta menuntut agar Pemerintah RI langsung berada di bawah pengendalian dwitunggal.

Kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian memecat Kolonel Maludin Simbolon dari jabatannya sebagai Panglima TT I. Selanjutnya dengan berpedoman pada keputusan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah Sumatera Utara, Letkol Djamin Ginting telah mengambilalih kekuasaan TT I yang berlaku sejak 27 Desember 1956.

Bersama pasukan sebanyak $\pm$ 300 orang Simbolon kemudian mengundurkan diri ke Tapanuli. Di daerah tersebut anak buah Simbolon mendapat perlindungan dari pasukan yang berada di bawah pengaruh Dewan Banteng. Dengan mundurnya Simbolon beserta anak buahnya ke luar Kota Medan, praktis aktivitas Dewan Gajah telah dapat dilumpuhkan.⁹³ Selanjutnya untuk

⁹³ Drs. Makmun Salim, *Sedjarah Operasi-operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*, Djakarta, 1971, hal. 1-5.

mengatasi masalah Dewan Banteng, pemerintah pusat mengirimkan misi ke Sumatera Tengah yang disebut Komisi Penyelidik Keadaan (*Fact-finding Commission*) terdiri atas Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Abdul Latief dan Soelaeman Effendi. Tugas utama tim ini ialah mengadakan penjajagan dan penyelidikan tentang dasar-dasar tuntutan daerah yang disalurkan melalui Dewan Banteng. Tugas tim menghadapi hambatan, karena ternyata Letkol Achmad Husein selaku ketua Dewan Banteng dan pimpinan daerah Sumatera Tengah tidak bersedia mengadakan pembicaraan dengan para anggota tim tersebut. Letkol. Husein hanya mau berbicara dengan delegasi yang resmi dari kepala negara.⁹⁴

Selain di Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, pergolakan juga terjadi di Sumatera Selatan. Sekelompok golongan politik bersama pimpinan militer setempat mencetuskan Piagam Pembangunan sebagai wadah yang dikatakan menampung segala aspirasi daerah dan kemudian membentuk suatu dewan dengan nama Dewan Garuda. Sebagai tindak lanjut kegiatannya dewan tersebut kemudian mencetuskan tuntutan kepada pemerintah pusat agar daerah Sumatera Selatan diberi otonomi seluas-luasnya. Mereka juga menuntut agar Dwitunggal Soekarno—Hatta memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Kongres Adat yang pernah diselenggarakan di Palembang pada dasarnya merupakan sumber lahirnya Dewan Garuda yang dikendalikan oleh beberapa tokoh politik di daerah tersebut. Selanjutnya Letkol Barlian selaku pejabat Panglima TT II, mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatera Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya. Gubernur Sumatera Selatan Winarno Danuatmodjo diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dalam rangka kelancaran usaha pembangunan di daerah Sumatera Selatan.

Rentetan tindakan yang telah diambil oleh Dewan Garuda serupa dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Banteng. Akti-

⁹⁴ Soeripto Putra Djaja, *Kegagalan Pemberontakan Husein CS.*, Surabaya, 1958, 1958, hal. 13.

vititas Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh wakil kepala Staf TT II Mayor Nawawi yang mendapat perlindungan dari panglimanya sendiri. Hubungan antara pimpinan Dewan Banteng di Sumatera Tengah dengan Dewan Garuda di Sumatera Selatan dilakukan melalui seorang kurir yaitu Sidi Bakaruddin, kepala eksploitasi Djawatan Kereta Api (DKA) daerah Sumatera Selatan, Sidi Bakaruddin adalah tokoh Dewan Banteng yang aktif di Sumatera Selatan, khususnya di kalangan kaum adat.⁹⁵

Parlemen ternyata kemudian memberikan perhatian pada kejadian di Sumatera. Guna menjajagi keinginan rakyat setempat, pada 4 Januari 1957 Parlemen mengirimkan wakilwakilnya ke Sumatera Utara, Tengah dan Selatan. Sebenarnya tugas yang dibebankan kepada para utusan dari Parlemen tersebut sama dengan tugas yang sebelumnya pernah diberikan kepada perutusan kabinet.

Ke Sumatera Tengah utusan dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad. Utusan berhasil mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dewan Banteng. Zainal Abidin sekembalinya di Jakarta menyatakan telah mendapat titik pertemuan pandangan antara tokoh-tokoh masyarakat Dewan Banteng dengan pemerintah pusat. Menurut Zainal Abidin Ahmad, posisi Dewan Banteng tidak membahayakan pemerintah. Komisi Parlemen ke Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Sumarman SH., berhasil mengadakan pembicaraan dengan para tokoh militer maupun sipil setempat.

Untuk memecahkan masalah Sumatera Tengah, pemerintah masih juga berusaha menempuh jalan berunding, yaitu dengan mengirimkan suatu delegasi di bawah pimpinan Menteri Pertanian Eni Karim. Misi tersebut mengalami kegagalan, karena tidak berhasil mengadakan pendekatan dengan pimpinan Dewan Banteng. Dalam perkembangan selanjutnya, atas prakarsa pimpinan Dewan Banteng dan Dewan Gajah telah diselenggarakan Kongres Rakyat Jambi. Dari pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa daerah Jambi dinyatakan sebagai daerah

⁹⁵ RZ. Leirissa. *PRRI Permesta*, hal. 35-55.

otonom setingkat dengan provinsi, meskipun administrasinya masih berada di bawah kekuasaan Provinsi Sumatera Tengah.

Selain di Sumatera, di Indonesia bagian timur terjadi pula pergolakan. Pada 2 Maret 1957 di Makasar Panglima TT VII/ Wirabuana Letkol HN. Sumual memproklamasikan Perjuangan Semesta (Permesta). Gerakan tersebut meliputi wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusantara, dan Maluku. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia bagian timur. Guna memperlancar pelaksanaan programnya, Letkol Sumual menyatakan daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh kaum militer.⁹⁶

Peristiwa-peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan Kabinet Ali II. Tak lama setelah munculnya Permesta, pada 14 Maret 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada presiden. Segera setelah menerima penyerahan mandat, Presiden mengumumkan berlakunya *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) yang berarti "negara dalam keadaan bahaya" dan dengan demikian Angkatan Perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara. Selain itu presiden menghubungi partai-partai untuk membentuk pemerintahan baru. Karena menghadapi oposisi dari sejumlah partai, maka akhirnya presiden menunjuk dirinya sendiri warga negara Soekarno sebagai formatur. Formatur Soekarno kemudian membentuk Kabinet Karya dengan Ir. Djuanda, seorang tokoh non-partai, sebagai perdana menteri.

Kabinet Djuanda resmi terbentuk pada 9 April 1957 dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Kabinet ini selain harus menghadapi pergolakan di daerah juga bertugas melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat serta menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk dengan merosotnya jumlah devisa dan rendahnya angka-angka ekspor. Program Kabinet Djuanda terdiri atas lima fasal atau disebut Panca Karya (sehingga dinamakan Kabinet Karya), yakni :

⁹⁶ *Kedaulatan Rakjat*, 4 Maret 1957.

- (1) membentuk Dewan Nasional,
- (2) normalisasi keadaan Republik,
- (3) melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB,
- (4) perjuangan Irian, dan
- (5) mempergiat pembangunan.⁹⁷

Dewan Nasional mempunyai fungsi penampung dan menyalurkan keinginan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga mempunyai tugas sebagai penasihat guna melancarkan jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan Nasional anggotanya berjumlah 45 orang dari golongan fungsional dan diketuai oleh presiden sendiri. Walaupun Dewan Nasional sebagai dewan penasihat sudah terbentuk, tetapi kesukaran-kesukaran yang dihadapi pemerintah tetap meningkat. Dari hari ke hari keadaan negara semakin buruk. Masalah daerah-daerah yang timbul di Sumatera dan Sulawesi menyebabkan hubungan pusat dan daerah terganggu. Masalah daerah juga membawa pengaruh di bidang ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sulit untuk melaksanakan program-programnya.

Untuk meredakan pergolakan daerah, pada 10 sampai 14 September 1957 telah dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional baik di pusat maupun daerah serta pimpinan militer. Hadir juga pada pertemuan itu bekas Wakil Presiden Moh Hatta. Di dalam musyawarah itu antara lain telah dibicarakan masalah-masalah pemerintahan, soal-soal daerah, ekonomi, keuangan, Angkatan Perang, kepartaian, dan masalah yang menyangkut Dwitunggal Soekarno-Hatta.

Musyawarah Nasional ini telah berhasil mengambil beberapa keputusan yang mencerminkan suasana saling pengertian. Pada penutupannya tanggal 14 September telah dikeluarkan suatu

⁹⁷Naskah Riwayat Hidup Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, (Arsip Kabinet Perdana Menteri).

pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan bekas Wakil Presiden Moh. Hatta.⁹⁸

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pada 25 November sampai dengan 4 Desember 1957 dilangsungkan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) bertempat di Gedung Olahraga Medan Merdeka Selatan di Jakarta. Tujuan utama adalah untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah-daerah. Musyawarah diikuti oleh para ahli ekonomi, wakil-wakil partai dan organisasi, tokoh-tokoh Pusat dan Daerah serta para pejabat militer. Para pemimpin militer dari segenap teritorium hadir dalam musyawarah ini, kecuali Letkol Achmad Husein dari Komando Daerah Militer Sumatera Tengah.⁹⁹

Di lingkungan Angkatan Darat, untuk membantu mengatasi persoalan Angkatan Darat, telah dibentuk panitia yang terdiri atas tujuh orang yang disebut Panitia Tujuh. Panitia ini terdiri atas Panglima Tertinggi Presiden Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Perdana Menteri Ir. Djuanda, Wakil Perdana Menteri Dr. Leimena, Menteri Kesehatan Kolonel dr. Aziz Saleh, Sultan Hamengku Buwono IX dan KSAD Mayor Jenderal AH. Nasution.¹⁰⁰ Panitia ini berhasil mengambil beberapa keputusan yaitu :

- (1) Menetapkan pedoman kerja,
- (2) Membentuk suatu panitia pengumpul bahan-bahan (*Fact finding committee*), yang terdiri atas Kolonel AJ. Mokoginta, Kolonel Sudirman, dan Major J. Muskita,
- (3) Menginstruksikan kepada semua anggota Angkatan Darat untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat menyulitkan penyelesaian peristiwa-peristiwa Angkatan Darat,

⁹⁸ Sekretariat Negara RI, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, 1978 hal. 349.

⁹⁹ *Antara*, No. 328/A, 25 November 1957, hal. 2.

¹⁰⁰ *Pedoman*, 19 September 1957, hal. 1.

- (4) Menginstruksikan kepada seluruh anggota Angkatan Darat untuk mengusahakan terpeliharanya pekerjaan rutin,
- (5) Menyerukan kepada semua Angkatan Darat dan masyarakat supaya berikhtiar ke arah kelancaran pekerjaan panitia.¹⁰¹

Sebelum Panitia Tujuh ini mengumumkan hasil pekerjaannya, telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957 yang dikenal sebagai Peristiwa Cikini. Ketika itu Presiden Soekarno sedang menghadiri pesta ulang tahun ke-15 Perguruan Cikini, tempat putra-putri beliau bersekolah. Percobaan pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan geranat tangan, sehingga menimbulkan banyak korban terutama anak-anak sekolah yang berada di halaman sekolah. Berkat kesigapan dan kecepatan bertindak ajudannya beliau Mayor Sudarto beliau berhasil diselamatkan.¹⁰²

Tidak lama kemudian (Desember 1956) para pemimpin Masyumi dan PSI pun bergabung di Padang karena merasa dirinya tidak aman di Jakarta. Untuk menggalang kekuatan melawan pusat, para pemimpin militer (Dewan Banteng, Dewan Gajah, Permesta) bersama para pemimpin partai tersebut membentuk Dewan Perjuangan dengan Ahmad Husein sebagai ketuanya.¹⁰³

2. PRRI dan Permesta

Sekalipun tidak terbukti Peristiwa Cikini dinyatakan sebagai perbuatan para perwira yakni Letkol Ahmad Husein, Letkol Berlian, dan Letkol Sumual, tiga tokoh utama pemimpin daerah-daerah bergolak, yang sedang menunggu putusan Panitia Tujuh tersebut terpaksa menyingkir ke daerah masing-masing. Bersama tokoh-tokoh politik dan sejumlah perwira lainnya, Ahmad Husein mengambil langkah baru di Padang. Pada 10 Februari 1958 Achmad Husein mengeluarkan ultimatum pada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Antara*, No. 334/A-B 30 November 1957, hal. 20-21.

¹⁰³ *Leirissa, Loc. cit*, hal. 37.

mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam.¹⁰⁴ Pemerintah membalas, yakni dengan memecat secara tidak hormat Achmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek. Kemudian KSAD. Pada 15 Februari 1958 di Padang diproklamasikan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI) dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Untuk memulihkan keamanan negara, pemerintah dan KSAD memutuskan untuk melancarkan operasi militer. Operasi gabungan AD-AL-AU terhadap PRRI di Sumatera Tengah itu diberi nama Operasi 17 Agustus.

Proklamasi PRRI yang diumumkan pada 15 Februari 1958 di Padang rupanya mendapat sambutan dari Indonesia bagian timur. Dalam rapat-rapat raksasa yang diselenggarakan di beberapa tempat di daerah tersebut KOMSUT (Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah) Kolonel DJ. Somba mengeluarkan pernyataan, bahwa sejak 17 Februari 1958 wilayah Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).¹⁰⁵

Terhadap Permestapun pemerintah tidak ragu-ragu untuk bertindak. KSAD sebagai penguasa perang pusat memecat Somba dan Mayor Runturambi, sedangkan batalyon yang berada di bawah KDMSUT termasuk dinas jawaban, wewenang komandannya diserahkan kepada "Komando Antar Daerah Indonesia Timur" (KOANDAIT). Untuk menghadapi aksi Permesta dilancarkan operasi Sapta Marga pada bulan April. Ternyata Permesta mendapat bantuan dari petualang asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh AL. Pope,, warganegara Amerika Serikat, pada 18 Mei 1958 di atas Ambon.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal, 204, 205.

¹⁰⁵ PUSSEMA, *Mengungkap Sapta Marga*, Djakarta, 1957, hal. 37-38.

BAB III

DEMOKRASI TERPIMPIN

A. SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Menegakkan Demokrasi Terpimpin

Sudah sejak 10 November 1956 Dewan Konstituante bersidang untuk menyusun dan menetapkan UUD Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan masa kerja.¹ Sidang resmi yang dibuka oleh Presiden Soekarno, ternyata tidak sanggup menyusun UUD baru, karena perbedaan paham yang tajam mengenai dasar dan bentuk negara.

Dalam perkembangan selanjutnya pada 22 April 1959 Presiden Soekarno berpidato lagi di Konstituante sesuai kesepakatan antara pimpinan Konstituante dengan pemerintah. Presiden menganjurkan agar Dewan Konstituante menetapkan UUD 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin menjadi UUD Negara RI yang tetap.²

Sebelum Dewan Konstituante menyatakan menerima atau menolak usul pemerintah itu, dari golongan Islam datang usul amandemen untuk mengembalikan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

¹Presiden Soekarno : *Susunan Konstituante yang Benar-benar Konstituante Res Publik*, brosur Kementerian Penerangan RI, Cet. II, tidak bernomor.

²*Risalah Perundingan Konstituante 1959. Jilid I* hal. 13-14 Bandung : Sekretariat Konstituante. 1959.

ke dalam Pembukaan UUD 1945. Keesokan harinya, 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses.

Untuk mencegah ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usul pemerintah oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal AH. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Perpepu), mengeluarkan peraturan No. Prt/Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan-kegiatan politik, yang berlaku mulai 3 Juni 1959, pukul 06.00.³ Pada 16 Juni 1959, Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI), Suwirjo, mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno (yang ketika itu sedang berada di Jepang dalam rangka perjalanan keliling dunia), agar Presiden Soekarno mendekritkan kembalinya UUD 1945 dan membubarkan Dewan Konstituante⁴. Usul yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kepada Presiden Soekarno.

Gagalnya usaha kembali ke UUD 1945 melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaknya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan, bahwa "keadaan ketatanegaraan membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur". Demi keselamatan negara, berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan diberlakukannya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.

Dekrit 5 Juli itu dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung.⁵ Dekrit itu juga didukung oleh KSAD yang merupakan salah seorang konseptornya⁶ Dalam perintah hariannya KSAD

³ *Antara*, 3 Juni 1959.

⁴ *Suluh Indonesia*, 18 Juni 1959.

⁵ Wirjono Prajodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, 1977, hal. 31.

⁶ Dalam rapat KSAD dengan Panglima-panglima Teritorium seluruh Indonesia di Surabaya pada pertengahan tahun 1958, diputuskan untuk mengusulkan kepada Presiden, agar kembali berlakunya UUD 1945; untuk ini lihat A.H. Nasution, *Dua Ceramah*, Gunung Agung, Jakarta 1972.

menginstruksikan kepada jajaran TNI-AD untuk melaksanakan dan menggunakan dekrit tersebut⁷.

Dengan dikeluarkannya "dekrit presiden", Kabinet Karya yang dipimpin oleh Djuanda sejak 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet yang baru itu Presiden Soekarno bertindak selaku perdana menteri sedangkan Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri pertama. Program kabinet meliputi penyelesaian masalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan sandang pangan.

Dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan beberapa persyaratan, (1) Setuju kembali kepada UUD 1945, (2) Setia kepada perjuangan RI dan, (3) Setuju dengan Manifesto Politik.

Menurut UUD 1945 keanggotaan MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan wakil golongan. Keanggotaan MPRS yang diangkat berdasarkan Penpres No. 12 tahun 1959 ini terdiri atas 261 orang DPR, 94 orang utusan daerah, dan wakil golongan karya sebanyak 200 orang. Dalam Penetapan Presiden ini disebutkan pula bahwa tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Dalam pada itu Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diketuai oleh Presiden dibentuk dengan Penpres No. 3 tahun 1959, dengan 45 orang anggota yang terdiri atas 12 orang wakil golongan politik, delapan orang utusan/wakil daerah, 24 orang wakil golongan politik, delapan orang utusan/wakil daerah, 24 orang wakil golongan karya dan satu orang wakil ketua. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah (pasal 16 ayat 2 UUD 1945). DPA dilantik pada 15 Agustus 1959. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilihan Umum tahun 1955 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7

⁷ Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, Dua puluh technic Indonesia Merdeka, Departemen Penerangan, 1965, hal. 326.

tahun 1953, tetap menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan surat presiden kepada lembaga pemilihan tersebut.

Pada mulanya anggota DPR lama mengikuti saja kebijaksanaan Presiden Soekarno, tetapi ketika pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 mereka menolak. Sebagai akibat penolakan Rencana Anggaran Belanja Negara tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, yang menyatakan pembubaran DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955. Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno selesai menyusun komposisi DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). "Penggodogan komposisi itu dilakukan di Istana Tampaksiring Bali, dengan mengundang para ketua tiga partai besar yaitu PNI, NU, dan PKI serta Kolonel Wiluyo Puspoyudo yang mewakili TNI-AD. Para anggota DPR-GR dilantik pada 25 Juli 1960. Perbandingan jumlah wakil golongan Nasionalis, Islam dan komunis adalah 44, 43, dan 30. Angka-angka itu berubah jika anggota yang resminya tidak mewakili partai politik ikut dihitung. Menilik afiliasinya, perimbangan suara anggota Nasionalis, $44 + 50 = 94$, Islam $43 + 24 = 67$, dan komunis $30 + 51 = 81$, padahal dalam DPR hasil Pemilihan Umum 1955 perbandingan kursi untuk Nasionalis, Islam, dan komunis adalah 65, 115 dan 42. Pembubaran DPR lama dan pembentukan DPR-GR, menyebabkan partai-partai Nasionalis memperoleh keuntungan masing-masing: $94 - 64$ kursi = 25 kursi, dan PKI $82 - 42 = 39$ kursi. Partai-partai Islam mengalami kerugian $115 - 67 = 48$ kursi.⁸ Dari sini dapat dilihat bahwa PKI memperoleh keuntungan terbesar dari kebijaksanaan Presiden Soekarno tersebut.

Seluruh anggota DPR-GR ditunjuk dan peraturan-peraturan tata tertibnya ditetapkan oleh Presiden dengan Peraturan Presiden No 24 tahun 1960. Pidato Presiden Soekarno pada upacara pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 menyebut-

⁸Mr. S.M. Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Tintamas, Djakarta 1967, hal. 50.

kan, bahwa tugas DPR—GR adalah melaksanakan Manifesto Politik (Manipol), merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat, dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Masalah tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden ketika melantik para wakil ketua DPR—GR, pada 5 Januari 1961. Presiden Soekarno menegaskan bahwa DPR—GR adalah pembantu Presiden/Mandataris MPRS dan memberi sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh MPRS.⁹

Terhadap perkembangan politik itu pernah ada reaksi dari kalangan partai-partai, antara lain dari beberapa pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) dan PNI. Beberapa tokoh NU pernah menyatakan keberatannya terhadap pembubaran DPR—lama hasil Pemilihan Umum tahun 1955 mengancam akan menarik pencalonan anggota-anggota untuk DPR—GR, tetapi karena ada penambahan jumlah kursi untuk NU, sikapnya berubah. NU memberi kesempatan kepada Presiden Soekarno untuk meneruskan politiknya, walaupun menolak duduk dalam satu kabinet dengan PKI.¹⁰

Dari kalangan PNI yang patut dicatat ialah sikap Mr. Sartono, tokoh kawakan PNI dan Ketua DPR lama hasil Pemilu 1955, dan Mr. Iskaq Tjokroadisuryo, kedua-duanya kawan seperjuangan Presiden Soekarno. Pada rapat terakhir DPR-lama pada 17 Maret 1960 Sartono menyatakan bahwa ia termasuk mereka yang merasa prihatin dengan perkembangan keadaan,¹¹ sedangkan Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menyatakan bahwa anggota partai mereka yang duduk dalam DPR—GR bukanlah wakil PNI. Hubungan antara mereka dengan PNI tidak ada lagi, sebab mereka duduk dalam DPR—GR itu atas hasil penunjukan. Reaksi juga datang dari Prawoto Mangunkusumito dari Masyumi dan Sutomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia.

Sutomo mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung dengan suratnya 22 Juni 1960 berbunyi antara lain, "Mengadukan kabinet yang dipimpin oleh Dr. Ir. Soekarno atas pelang-

⁹.20 Tahun Indonesia Merdeka, *op. cit.*, hal. 597.

¹⁰ *Abadi*, 30 Agustus 1960.

¹¹ Mr. S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 192–193.

garan yang dilakukan oleh kabinet tersebut atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945, dengan tindakan-tindakan Kabinet membubarkan Parlemen Republik Indonesia hasil pilihan rakyat . . ." Selanjutnya Sutomo menuduh kabinet bertindak sewenang-wenang dan mengemukakan beberapa fakta, yaitu:

- (a) Paksaan untuk menerima Manipol dan Usdek, tanpa di beri tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.
- (b) Paksaan supaya diadakan kerjasama antara golongan Nasionalis, Agama dan Komunis.
- (c) Paksaan pembongkaran Tugu Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur No 56 Jakarta.

Memang di kalangan partai-partai terdapat berbagai sikap dan pendapat. Tidak adanya kesatuan pendapat di kalangan partai-partai, terbukti dengan tindakan para tokohnya, sebagian ada yang menggabungkan diri dalam kelompok oposisi yang menamakan diri Liga Demokrasi yang menentang pembentukan DPR-GR.

Di dalam Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU, tergabung beberapa tokoh NU, Parkindo, Partai Katholik, Liga Muslim PSSI, IPKI, dan Masyumi. Pada akhir bulan Maret 1960 Liga tersebut mengeluarkan satu pernyataan yang antara lain menyebutkan supaya dibentuk DPR yang demokratis dan Konstitusional, karena itu rencana pemerintah membentuk DPR-GR yang telah diumumkan tersebut agar ditanggihkan. Adapun sebagai alasan dikemukakan antara lain:

- (a) Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPR—GR, memperkuat pengaruh dan kedudukan dari suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,
- (b) DPR yang demikian pada hakekatnya adalah DPR yang akan "meng-ia-kan" saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hukum dan demokrasi yang sehat,
- (c) Pembaharuan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu bertentangan dengan Azas-azas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Kegiatan Liga Demokrasi terhenti ketika Presiden Soekarno pulang dari perjalanannya di luar negeri. Perdana Menteri Djuanda, selaku pejabat Presiden selama Presiden Soekarno berada di luar negeri, bersikap toleran tetapi Presiden Soekarno melarang Liga Demokrasi

Tindakan Presiden Soekarno selanjutnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah mendirikan Lembaga Front Nasional, yang dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dalam penetapan itu disebutkan, Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.¹² Front Nasional itu diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri.

Regrouping pertama Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962, mengintegrasikan lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Lepernas dan Front Nasional. Akibatnya para pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu, yang selanjutnya ikut merumuskan dan mengamankan policy (kebijakan) pemerintahan dalam lembaga masing-masing.¹³

Selain lembaga-lembaga tersebut, presiden juga membentuk Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962. MPPR beserta stafnya merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR), dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR terdiri dari sejumlah menteri yang mewakili MPRS dan DPR-GR, departemen-departemen, angkatan angkatan dan wakil dari partai-partai politik Nasakom. Badan ini langsung berada di bawah presiden.

2. Interaksi Tiga Kekuatan

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya.

¹² Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, *op. cit.*, hal. 648.

¹³ *Ibid* Hal 598; Lihat Muh. Yamin, *Pembahasan UUD 1945*, Djakarta, 1960, hal. 197-200.

Sehubungan dengan strateginya yang "menempel" pada Presiden Soekarno, PKI secara sistematis berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan yang mendukung ajaran-ajaran Presiden Soekarno. Dipa Nusantara (DN) Aidit mengatakan "Melaksanakan Manipol" secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan Program PKI. Hanya kaum Manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabotase Manipol.¹⁴

Ajaran Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai unsur yang sah dalam Pergerakan Nasional dan dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Rupanya Presiden Soekarno juga menganggap bahwa aliansi dengan PKI menguntungkan bagi Demokrasi Terpimpin. Ujarnya, "Kaum Komunis Indonesia dalam melaksanakan program Manipol harus berdiri di barisan depan dan sungguh-sungguh bertekad untuk menjadi teladan"¹⁵

Usaha-usaha memancing dukungan politik dari masyarakat dilanjutkan dengan mengatakan, "Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila".¹⁶ Sehubungan dengan usaha-usaha PKI itu masyarakat juga ragu menyebarkan cuplikan-cuplikan dari pidato Presiden Soekarno, yang seolah-olah sejalan dengan gagasan-gagasan dan cita-cita politik PKI.¹⁷ Demikianlah PKI terus-menerus meningkatkan kegiatannya dengan pelbagai Isu yang memberi citra sebagai partai yang paling Manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia.

Sehubungan dengan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, pada tahun 1964 telah timbul

¹⁴D.N. Aidit, *Revolusi, Angkatan Bersenjata dan Partai Komunis*, Pamburuan, Djakarta, 1964, hal. 30.

¹⁵*Ibid*

¹⁶D.N. Aidit, *Marxisme dan Pembinaan Nasional Indonesia*, Jakarta, 1964, hal. 38.

¹⁷D.N. Aidit, *Marxisme* . . . hal. 38.

kehebohan dalam masyarakat, karena ceramah DN. Aidit (sebagai menko/wakil ketua MPRS) di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora. Dalam ceramah tersebut Aidit mengatakan, "bila kita (Indonesia) telah mencapai taraf hidup adil dan makmur dan telah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak lagi membutuhkan Pancasila". Bagian dari pidato ini kemudian dikutip dan ditajukkan oleh harian *Revolusioner* sehingga menimbulkan pelbagai reaksi di dalam masyarakat.¹⁸ Akibat adanya reaksi di kalangan masyarakat, Aidit memberikan keterangan yang isinya menolak pemberitaan di harian tersebut dan menuduh koran tersebut sebagai koran subversif.¹⁹ "Dan di sinilah Pancasila sebagai alat pemersatu" sebab kalau sudah satu" semuanya para saudara, Pancasila tidak perlu lagi, sebab Pancasila alat pemersatu bukan? Kalau sudah "satu" semua apa yang kita persatukan lagi".²⁰

Kekuatan politik lainnya dalam masa Demokrasi Terpimpin adalah TNI yang sangat kritis atas tindakan dan ucapan PKI.

TNI-AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan PKI di Jawa Tengah ("PKI malam"). Pimpinan TNI-AD baik secara lisan maupun tulisan melaporkan perbuatan-perbuatan itu serta minta perhatian Presiden Soekarno. Adanya bukti-bukti bahwa PKI akan mengadakan pengacauan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, menyebabkan pimpinan TNI-AD berdasarkan Undang-undang Keadaan bahaya mengambil tindakan-tindakan pengawasan terhadap PKI. Di pusat, *Harian Rakyat* dilarang terbit, dan dikeluarkan perintah menangkap DN. Aidit dan kawan-kawannya, tetapi mereka berhasil lolos. Di tingkat daerah, di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan kegiatan-kegiatan PKI dibubarkan.²¹ Tindakan pimpinan TNI-AD tidak disetujui Presiden Soekarno yang justru memerintahkan agar segala keputusan itu dicabut kembali. Pada bulan September

¹⁸D.N. Aidit, *Membela Pancasila*, Jajasan Pembaruan Djakarta, 1964, hal. 5.

¹⁹*Ibid*, hal. 6.

²⁰*Ibid*, hal. 21.

²¹A.H. Nasutin, *op. cit.*, hal. 32 - 33.

1960 diadakan sidang Penguasa Perang Tinggi (Peperti) dengan Penguasa Perang Daerah seIndonesia (Peperda) di Istana Negara. Dalam sidang tersebut pimpinan TNI-AD dan para panglima daerah mengingatkan Presiden Soekarno, "agar jangan terlampau percaya kepada PKI, baik atas pertimbangan ideologis maupun atas pengalaman-pengalaman lampau".²² Namun demikian Presiden Soekarno tetap menyalahkan sikap dan tindakan pimpinan TNI-AD terhadap PKI dan selanjutnya melarang Peperda untuk mengambil tindakan-tindakan politis terhadap PKI.

Pidato-pidato Presiden Soekarno yang berjudul Resopim, Takem, Gesuri, Tavip, Takari menggambarkan sikap politik Presiden Soekarno yang cenderung membela PKI dan merangsang PKI untuk menyudutkan TNI-AD sebagai pihak yang sumbang suaranya.²³

Dalam tahun 1964 pimpinan Partai Murba (salah satu lawan PKI) menemukan dokumen PKI, yang diberi nama "Resume Program dan kegiatan PKI Dewasa ini" Dokumen ini menyebutkan, bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Hal ini disangkal keras oleh Aidit dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu. "Heboh" dokumen di kalangan pimpinan partai ini kemudian dibicarakan oleh pimpinan partai-partai politik bersama Presiden Soekarno di Istana Bogor pada bulan Desember 1964 sehingga menghasilkan deklarasi yang isi pokoknya, "bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap Malaysia sebagai proyek Nekolim, setiap sengketa di antara unsur-unsur di dalam negeri supaya diselesaikan secara musyawarah".²⁴ Berkat sikap Presiden Soekarno itu, musyawarah Bogor berakhir dengan keputusan yang menguntungkan PKI. Dengan sukses itu PKI segera beralih kepada ofensif membalas serangan partai Murba. "Pemimpin-pemimpin

²²*Ibid.*, hal. 23.

²³*Ibid.*, *op. cit.*, hal. 34, 115-131. Dalam operasi anti Gestapu di Jawa Tengah, Dokumen "Resume Perjuangan PKI Dewasa ini" ditemukan pada tokoh-tokoh PKI.

²⁴*BPS, aksi dan reaksi*, Yayasan Pembaruan 1964. Hl. 38,;

PKI melancarkan tuduhan bahwa Partai Murba memecah belah persatuan Nasakom, dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno'. Karena tuduhan itu, Sukarni, pimpinan Partai Murba, ditangkap dan partainya dibekukan oleh Presiden Soekarno.²⁵

Pada awal 1965 PKI berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet karena merasa kedudukannya cukup kuat berdasarkan aliansinya dengan Presiden Soekarno. Aksi-aksi tuntutan dengan menggunakan coret-coret, pidato-pidato, petisi-petisi yang menyerukan, "bentuk kabinet Nasakom tahun ini juga" dilakukan di mana-mana. Sebelumnya, PKI belum begitu bernafsu untuk duduk dalam suatu kabinet. Ketika itu mereka hanya melancarkan kritik-kritik terhadap pemerintah, khususnya menteri-menteri yang tidak mereka sukai pandangan politiknya, tetapi di masa Demokrasi Terpimpin PKI juga melakukan pelbagai aksi tuntutan dalam rangka pencarian popularitas di kalangan masyarakat yang tidak sadar politik. Mereka menuntut agar pemerintah melaksanakan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) dan merangsang salah satu organisasi satelitnya (Barisan Tani Indonesia) untuk melaksanakan aksi-aksi sepihak. PKI juga mengkampanyekan *retooling* pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasi Tri Program Pemerintah (sandang pangan, keamanan, dan Irian Barat) dan anti-Nasakom serta mendesak supaya segera dibentuk Kabinet Gotong-Royong berporoskan Nasakom.²⁶

B. PEMBEBASAN IRIAN BARAT

1. Bidang Diplomasi

Salah satu program Kabinet Kerja adalah Pembebasan Irian Barat (sekarang Irian Jaya) yang pada hakekatnya merupakan tuntutan nasional secara mutlak. Pasal 1 Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) mengenai "penyerahan kedaulatan" atas

²⁵ A.H. Nasution, *op. cit.*, Hal. 34-35.

²⁶ D.N. Aidit, *Angkatan Bersenjata Dan Penyesuaian Kekuasaan Negara dengan Tugas-tugas Revolusi, Pembaruan*, Djakarta, 1964, Hal. 32-34.

Indonesia berbunyi, "Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dengan bersyarat dan tidak dapat dicabut, karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat."²⁷

Sekalipun isi persetujuan itu sudah jelas, Belanda tidak menuntaskan penyerahan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia karena pada ayat f "Piagam Pengakuan Kedaulatan", berbunyi, "mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka *status-quo* Irian (*Nieuw-guinea*) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan, Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan-jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland"²⁸.

Usaha-usaha penyelesaian lewat perundingan bilateral dimulai sejak 25 Maret 1950. Dalam konferensi Uni Indonesia-Belanda, Pemerintah Indonesia mengajukan masalah Irian Barat sebagai agendanya. Konferensi setuju membentuk komisi pengumpul fakta sebagai bahan untuk perundingan. Pihak Belanda menafsirkan hasil komisi itu dengan menyatakan, "penyerahan Irian Barat kepada Indonesia bertentangan dengan kepentingan penduduk asli". Setelah setahun umur persetujuan KMB, diadakan Konferensi Uni Indonesia-Belanda di Den Haag pada 15 Desember 1950. Indonesia mengajukan usul penyelesaian yang terdiri atas tujuh pasal. Jawaban Pemerintah Belanda. "Nederland tidak dapat mengakui tuntutan hak Indonesia atas Irian Barat", bahkan sejak Agustus 1952 Belanda secara resmi memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya. Sejak kegagalannya dalam perundingan bilateral itu Pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Barat ke dalam acara sidang

²⁷Notosutardjo, *Dokumen Konferensi Medja Bundar*, hal. 69

²⁸ *Ibid*

Majelis Umum PBB secara berturut-turut pada tahun 1954 dan 1955, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif. Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1957, menteri luar negeri Republik Indonesia mengancam bahwa Indonesia akan menempuh "jalan lain" yang tidak sampai kepada perang (*short of war*) dalam menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan Belanda.²⁹

Pidato Menteri Luar Negeri yang menyatakan tekad Pemerintah Indonesia akan menempuh jalan lain untuk menyelesaikan Irian Barat, tidak mengubah pendirian negara-negara pendukung Belanda. Resolusi yang disponsori 21 negara termasuk Indonesia tidak dapat mencapai duapertiga jumlah suara. Negara-negara Barat tetap mendukung Belanda. Sikap itu bertambah kuat karena berlangsungnya Perang Dingin antara Blok Barat lawan Blok Timur, karena itu posisi Kerajaan Belanda sangat kuat sehingga menolak membicarakan masalah tersebut. Setelah selama satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Dalam rangka itulah, sejak Desember 1957 dilancarkan aksi diplomatik, menghentikan aktivitas Konsulat Belanda yang disusul dengan aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia KASAD selaku Penguasa Perang Pusat mengambilalih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah.³⁰ Pada awal Januari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB), suatu lembaga yang memobilisasi kekuatan untuk pembebasan Irian Barat. Dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan, 17 Agustus 1958, Presiden Soekarno menyatakan bahwa tahun 1958 adalah tahun tantangan sebagai pernyataan sikap yang tegas dalam penyelesaian sengketa Irian Barat.

Hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda itu mencapai puncaknya pada 1960. Pemerintah Indonesia secara

²⁹ Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Jakarta, 1974, hal. 560

³⁰ *Antara*, 14 Desember 1957.

resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.

Dalam pidatonya yang berjudul *Membangun Dunia Kembali*, Presiden Soekarno mengatakan sebagai berikut:

"Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak membicarakan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami".³¹

Dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan September 1961 masalah Irian Barat diperdebatkan kembali. Sekretaris Jenderal PBB U Thant memprakarsai suatu perundingan rahasia antara Belanda dan Indonesia di Virginia (Amerika Serikat) dengan pimpinan Ellsworth Bunker, wakil tetap Amerika Serikat di PBB. Pokok-pokok usul Bunker secara singkat adalah, "agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun".³²

Pemerintah RI pada prinsipnya dapat menyetujui usul tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Pemerintah Kerajaan Belanda pun akhirnya menyetujui usul itu, dengan disertai berbagai persyaratan.

2. Rencana di Bidang Militer

Sementara itu pihak RI menyiapkan jalan lain untuk merebut Irian Barat dengan kekuatan militer. Tentara Nasional Angkatan Darat membentuk cadangan umum yang berkekuatan satu korp tentara yang diresmikan pada bulan Maret 1961. Di

³¹ Pidato Presiden Soekarno di PBB, *Membangun Dunia Kembali*, Panitia Pembinaan Jiwa Revolusi, Pantjawarsa Manipol, hal. 183-184.30.

³² *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri RI*, Djakarta, 1971, hal. 97.

samping itu dilatih pula pasukan calon infiltran yang dipersiapkan untuk diinfiltrasikan ke Irian Barat. Pada 12 April 1961 Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat dan Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan Perang (GKS) untuk menyusun rencana operasi gabungan merebut Irian Barat. Upaya pembangunan kekuatan Angkatan Bersenjata dibarengi dengan upaya pembelian senjata ke luar negeri. Karena upaya membeli senjata dari Amerika Serikat gagal, maka upaya pembelian senjata itu dilanjutkan ke negara-negara blok komunis terutama Uni Sovyet. Pada bulan Desember 1960, suatu misi di bawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution bertolak ke Moskow dan berhasil mengadakan perjanjian pembelian senjata.³³ Misi tersebut disusul dengan misi kedua 1961 dan ketiga pada bulan Februari 1962.

Pada tahun 1961 dikirim suatu misi yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional/Kasad mengunjungi beberapa negara seperti India, Pakistan, Muangthai, Philippina, Australia, Selandia Baru, Jerman Barat, Perancis, dan Inggris untuk menjajagi dan mendapatkan kesan mengenai sikap negara-negara itu, seandainya terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Kesimpulan dari Menteri Keamanan Nasional/Kasad dari hasil misi penjajagan itu adalah, beberapa negara tidak terikat kepada Belanda, beberapa negara juga menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada negara yang mendukung posisi Belanda.³⁴ Di samping usaha diplomasi, sejak tahun 1961 Angkatan Bersenjata RI melakukan operasi-operasi infiltrasi ke daratan Irian Barat.

Menanggapi persiapan-persiapan Indonesia itu, Belanda mengajukan protes kepada PBB dan menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya Belanda memperkuat kedudukannya di Irian dengan mendatangkan pasukan dan beberapa kapal perang-

³³ Howard Palfrey Jones, *The Possible Dream.*, New York, 1971, hal. 189-192

³⁴ A.H. Nasution, *Kekayaan ABRI*, Djakarta, 1971, hal. 390.

nya keperairan Irian di antaranya kapal induk *Karel Doorman*.³⁵ Jawaban pihak Indonesia diputuskan dalam sidang kabinet inti bersama Gabungan Kepala-kepala Staf (GKS) 11 Desember 1961 dan sidang Dewan Pertahanan Nasional 14 Desember 1961. Pada hari itu dibentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno selaku Panglima Besar dan Menteri Keamanan Nasional KSAD sebagai Wakil Panglima Besar. Perwujudan dari keputusan itu pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikor) yang isinya sebagai berikut :

- (1) Gagalakan pembentukan "Negara Boneka Papua" buatan Belanda Kolonial,
- (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia,
- (3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air Bangsa.

Dengan demikian mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Pada 2 Januari 1962 Presiden/Panglima Tertinggi APRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Keputusan Indonesia untuk melakukan konfrontasi total, menyebabkan Sekretaris Jenderal PBB U Thant dan kementerian luar negeri Amerika Serikat mulai mengerti akan sikap Indonesia. Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian mendapat tekanan dari Pemerintah Amerika Serikat agar berusaha menyelesaikan konfliknya melalui perundingan. Hal ini untuk mencegah terseretnya Uni Sovyet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat-daya karena masing-masing pihak memberi bantuan kepada pihak yang bersengketa, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Pada bulan Februari 1962 Jaksa Agung Amerika Serikat, Robert F. Kennedy selaku utusan

³⁵ Masashi Nishihara, *The Japanese and Sukarno's Indonesia, Tokyo - Jakarta Relation, 1951 - 1966*, Honolulu, hal. 160.

Presiden Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia menemui Presiden Soekarno dengan maksud untuk mengetahui pendirian Indonesia. Utusan Presiden Amerika Serikat itu meneruskan perjalanannya ke Negeri Belanda menemui Perdana Menteri de Quay dengan maksud yang sama. Akhirnya pihak Belanda menyatakan bersedia berunding dengan syarat:

- (a) Pemerintah RI harus bersedia membayar ganti rugi atas biaya pembangunan Irian Barat,
- (b) Mengembalikan perusahaan-perusahaan Belanda yang disosialisasi,
- (c) Selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun, penduduk Irian Barat diberi kesempatan untuk memilih.

Presiden Soekarno juga mengeluarkan pernyataan:

- (a) Indonesia bersedia berunding atas dasar pengoperan administrasi langsung, dan
- (b) Normalisasi keadaan akhirnya pada 20 Maret 1961 diadakan *Secret Preliminary Talks* antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat diwakili oleh duta besarnya untuk PBB, Ellworth Bunker, Indonesia diwakili oleh Sukardjo Wirjopranoto, Sudjarwo Tjondronegoro, Adam Malik, dan Zairin Zain, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh H.J. Van Roijen dan Schuurman. Perundingan berjalan lamban dan alot karena kedua belah pihak mempertahankan pendirian masing-masing. Duta Besar Amerika Serikat Ellworth Bunker mengajukan usul penyelesaian pada 2 April 1962.

- (1) Selama tahun pertama Pemerintah Belanda berangsur-angsur ditarik,
- (2) Pada tahun kedua pegawai Pemerintah Indonesia berangsur-angsur dimasukkan ke Irian Barat mengganti pegawai Belanda,
- (3) Setelah periode peralihan dua tahun pemerintahan akan diserahkan kepada Indonesia,

- (4) Sebuah badan Internasional akan menjamin *self determination* bagi penduduk pribumi, setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih pemerintahan.

Pada 2 April 1962 menteri luar negeri RI menyatakan menerima usul Bunker. Setelah Pemerintah Belanda menyadari bahwa operasi-operasi militer Indonesia di Irian Barat berhasil merebut Teminabuan serta mengepung kota-kota lainnya dan Amerika Serikat menekan agar Belanda membuka perundingan berdasarkan usul Bunker, Belanda kemudian menerima "Usul Bunker" dalam perundingan-perundingan rahasia di Virginia. Pada 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Persoalan terpenting dalam perjanjian itu ialah mengenai penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut dibentuklah *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) yang pada gilirannya akan menyerahkan pemerintahan itu kepada Republik Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Ada pun Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan *Act of free choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969, dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak baik Indonesia dan Belanda akan menerima hasilnya.

Sementara itu pemulihan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara dilakukan pada tahun 1963 itu juga, yakni dengan dibukanya Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta.

3. Operasi-operasi Militer Pembebasan Irian Barat

Selama perundingan-perundingan itu berlangsung, di Indonesia Trikora juga diwujudkan. Pada 13 Januari 1962 Brigadir Jenderal Soeharto (sekarang presiden Republik Indonesia) dilantik menjadi panglima Komando Mandala dan dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jenderal. Komando Mandala bermarkas di Makassar. Di samping menjadi panglima mandala, Mayjen Soeharto juga merangkap sebagai Deputy Kasad untuk

wilayah Indonesia bagian timur. Pada bulan Januari itu juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut:

- (1) Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat:
Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno
- (2) Wakil Panglima Besar : Jenderal AH. Nasution
- (3) Kepala Staf : Mayor Jenderal Achmad Yani

Susunan Komando Mandala adalah:

- (1) Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto
- (2) Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono
- (3) Wakil Panglima II : Letkol Udara Leo Wattimena
- (4) Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Ada pun pimpinan Komponen Angkatan tersusun sebagai berikut:

- (1) Angkatan Darat Mandala (ADLA): Panglima ADLA Mayor Jenderal Soeharto
- (2) Angkatan Laut Mandala : Panglima: Kolonel Laut Sudomo
- (3) Angkatan Udara Mandala : Panglima: Kolonel Udara Leo Wattimena.

Sementara itu pada 15 Januari 1962 terjadi peristiwa tragis yang dikenal sebagai Pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran yang tidak seimbang antara MTB ALRI melawan kapal perusak dan fregat Belanda, telah gugur Deputy Kasal Komodor (Laksamana Pertama) Yos Sudarso. Peristiwa ini mempengaruhi perkembangan situasi. Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 1 mengeluarkan instruksi kepada Panglima Mandala yang isinya:

- 1) Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer, dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara RI.
- 2) Mengembangkan situasi di wilayah Propinsi Irian Barat :
 - (a) sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi,
 - dan (b) supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di

wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara *de facto* diciptakan daerah-daerah bebas/atau didudukkan unsur kekuasaan/pemerintahan daerah RI.³⁶

Untuk melaksanakan instruksi itu, panglima mandala menyusun strategi Operasi Pembebasan Irian Barat, dan rencana operasi yang paling terkenal adalah Rencana Operasi Jayawijaya.

Dalam kehidupan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, peristiwa infiltrasi pasukan merupakan yang paling dramatis dan yang paling bersejarah di dalam riwayat perkembangan Angkatan Bersenjata kita. Pada 18 dan 20 Maret 1962 didaratkan empat peleton sukarelawan di Sungai Jera. Pada 24 April dilakukan Operasi Banteng Ketaton dengan menerjunkan Tim Garuda Merah di sekitar Fak-fak dan Garuda Putih di sekitar Kaimana, sedangkan Operasi Serigala mendaratkan pasukannya di sekitar Teminabuan. Selanjutnya pada 15 Mei pasukan Detasemen Pelopor Brigade Mobil Polisi didaratkan di sekitar Fak-fak. Operasi Naga penerjunan 214 orang. Pada 1 Agustus 1962 dilancarkan Operasi Jatayu yang bertugas menerjunkan pasukan-pasukan untuk memperkuat kesatuan yang telah terlebih dahulu didaratkan, yang terdiri atas pasukan Elang, pasukan Gagak, dan pasukan Alap-alap. Pasukan Elang diterjunkan di Sorong, pasukan Gagak di sekitar Kaimana, dan pasukan Alap-alap di sekitar Merauke.³⁷ Melalui laut, pada 7 Agustus 1962 didaratkan kesatuan dari Detasemen Pelopor 1232 Brimob, dan pada 9 dan 12 Agustus menyusul pasukan *raiders* dari Kodam XV/Hasanuddin dengan sasaran pendaratan di Pulau Misool.³⁸

Sementara itu telah disusun pula operasi Jayawijaya untuk merebut daerah Irian Barat. Operasi itu dibagi atas Operasi Jayawijaya I untuk merebut keunggulan di udara dan di laut.

³⁶ Brigjen Achmad Tahir, 'Soal Mandala dan Irian Barat'. *Karya Wira Djati*, No. 9/1963, hal. 360.

³⁷ Drs. Saleh As'ad Djamhari, *Ikhtisar Sedjarah Perjuangan ABRI (1945 – sekarang)*. 1979, hal. 103

³⁸ Maj. Djen. A.J. Mokoginta (Ed.), *Sedjarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*, Djakarta, 1964, hal. 165-167.

Operasi Jayawijaya II bertujuan merebut Biak, Operasi Jayawijaya III bertujuan merebut Hollandia (Jayapura) dari laut, Operasi Jayawijaya IV bertujuan merebut Hollandia dari udara. Untuk melaksanakan operasi tersebut, Angkatan Laut Mandala di bawah Kolonel Laut Sudomo membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17, yang terdiri atas tujuh gugus tugas, sedangkan Angkatan Udara membentuk enam kesatuan tempur baru.

Operasi Jayawijaya belum sempat dilaksanakan telah tercapai perjanjian New York. Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Jaya mengeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak pada 18 Agustus 1962 pukul 09.31 waktu Irian Barat. Perintah presiden itu disusul dengan Surat Perintah Panglima Mandala agar semua pasukan yang telah berada di Irian Barat menaati perintah penghentian tembak-menembak dan mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau PBB yang disertai oleh Brigjen Achmad Wiranatakusumah, Kolonel Udara Dewanto, dan Letnan Kolonel Laut Nizam Zachman.

Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah operasi Wisnumurti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada RI pada 1 Mei 1963. Tugas Komando Mandala dinyatakan selesai 1 Mei 1963 dan pada hari itu juga secara resmi dibubarkan.

C. POLITIK LUAR NEGERI

1. Landasan Politik Luar Negeri

Dasar politik luar negeri RI dengan jelas termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama Pembukaan, namun dalam Manifesto Politik (Manipol) pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

"Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara-negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar kerja sama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju perdamaian dunia yang sempurna".

Manipol menyatakan tujuan jangka pendek politik luar negeri, "melanjutkan perjuangan anti-imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri, yang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan dunia menuju kepada satu imbalan baru". Dalam jangka panjang bertujuan untuk "melenyapkan imperialisme di mana-mana, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi".

Diplomasi sangat erat hubungannya dengan unsur-unsur tentang "cara" pelaksanaannya. Menurut Manipol, cara itu tidak dapat lain kecuali "harus tidak mengenal kompromi", "harus radikal" dan "revolusioner". Cara semacam itu tidak dapat digolongkan sebagai sesuatu cara yang hanya bertujuan untuk menjalankan ofensif diplomatik saja, karena dalam kenyataannya ia telah menunjukkan sifat-sifat yang radikal, yang menjurus kepada *hostile attitude* terhadap hampir setiap permasalahan. Sebagai konsekuensinya, posisi Indonesia lambat-laun semakin terasing (*isolated*). Dengan "Manipol" itu Indonesia bermaksud untuk menghimpun kawan-kawan yang hendak dikonfrontasikan terhadap "musuh revolusi". Kenyataannya sahabat-sahabat Indonesia bersikap *reserved* terhadap garis politik Indonesia. Mereka yang seolah-olah akan dapat dieksportasi dan dapat dimasukkan oleh saling bergerak dan bermainnya kekuatan-kekuatan yang resminya adalah "sahabat-sahabat" sendiri. Bahaya dari suatu politik yang militan bukan sekedar *for the sake of militancy* saja, tetapi politik demikian itu mudah terjebak oleh siasat mereka, disangka "kawan" tetapi sebetulnya adalah "lawan".

Dalam pada itu Dewan Pertimbangan Agung, dalam keputusannya No. 1/Kpts/Sd/61, merumuskan politik luar negeri sebagai berikut:

Politik luar negeri Indonesia yang aktif menuju kepada persahabatan dengan segala bangsa sesuai dengan "Kerangka Ketiga Tujuan Revolusi dalam "Manipol" itu, Menteri Luar Negeri Subandrio menyatakan adanya dua aspek dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu :

- (a) menjalankan politik persahabatan dengan dunia luar secara konvensional, seperti yang dilakukan oleh semua negara, dan
- (b) berjuang menyelesaikan Revolusi Indonesia yang merupakan kenyataan dan harus diterima oleh dunia luar.

Suatu negara mungkin secara konvensional bersahabat dengan Indonesia, tetapi menentang revolusinya. Indonesia harus berhati-hati dalam membedakan hal ini. Jikalau suatu negara memberikan bantuan-bantuan material kepada Indonesia, bantuan-bantuan teknik dan lain-lain, hal itu bukan berarti bahwa negara itu 100% sahabat Indonesia.³⁹

Formulasi tersebut memberikan petunjuk bahwa diplomasi yang inkonvensional dapat tidak disertai landasan *peaceful means* dan *peaceful minds*. Forum *non-governmental* seperti Persatuan Wartawan Asia-Afrika (PWAA), KIAPMA, dan lain-lain menjadi salah satu forum kegiatan yang sangat mempengaruhi perkembangan politik dalam negeri. Organisasi-organisasi semacam ini di dalam perkembangannya telah didominasi oleh golongan komunis.

Menurut rincian Dewan Pertimbangan Agung, 19 Januari 1961, Garis-garis Dasar Politik Luar Negeri RI terdapat dalam pidato "Membangun Dunia Kembali"

"Membangun Dunia Kembali" yang dipidatoken oleh kepala negara RI di depan forum PBB bulan September 1960 itu, merupakan salah satu usaha agar Indonesia dipandang sebagai unsur yang diperhitungkan di Asia. Pada kesempatan itu Indonesia "menjual" konsepsi-konsepsinya untuk pemecahan berbagai masalah internasional dewasa itu. Posisi "Kepeloporan" (mercu suar) Indonesia hendak ditingkatkan, khususnya di bidang ekonomi. Mampu atau tidaknya Indonesia mengatasi kesulitan-kesulitan dalam negeri, inilah yang menentukan apakah suara Indonesia diperhatikan oleh dunia luar atau tidak.

³⁹ Drs. Budandrio, *Indonesia on the March*. Vol II, Departement of foreign Affairs, Republic of Indonesia, tanpa tahun, hal. 154 - 155.

Memang tidak ada yang menyangkal bahwa Indonesia merupakan suatu kekuatan yang potensial, tetapi ia belum lagi menjadi kekuatan yang riil. Apabila ia memiliki kekuatan yang riil, seharusnya diarahkan kepada pembinaan stabilitas wilayah yang dapat merupakan sumbangan bagi perdamaian dan kemakmuran umat manusia. Bagaimana pun peranan negara-negara besar masih tetap menentukan walaupun mutasi-mutasi kekuatan yang menandai pergolakan politik sesudah Perang Dunia kedua, memang telah membatasi kekuasaan negara-negara besar itu.

Usul Indonesia dalam "Membangun Dunia Kembali" agar Pancasila diterima dan dicantumkan di dalam Piagam PBB, agar Markas Besar PBB dipindahkan ke tempat yang bebas dari suasana perang dingin, agar pembagian kursi dalam Dewan Keamanan dan badan-badan serta lembaga-lembaga lainnya diubah dan agar sekretaris di bawah pimpinan sekretaris jenderal ditinjau kembali, walaupun masih merupakan garis-garis besar, pada umumnya tidak mendapatkan sambutan yang selayaknya dari para anggotanya PBB.

"Manipol", "Djarek" dan "Membangun Dunia Kembali" merupakan embrio kelahiran suatu doktrin politik baru, yaitu bahwa dunia tidak terbagi dalam Blok Barat dan Blok Timur, tidak pula dalam tiga blok di mana Asia-Afrika merupakan blok yang ketiga, tetapi terbagi menjadi dua blok, yaitu *New Emerging Forces* (Nefos) dan *The Old establised Forces* (Oldefos). Doktrin politik baru tersebut telah memberikan angin baik kepada negara-negara komunis dalam rangka usaha mereka dalam rangka memenangkan strateginya menghadapi Blok Barat. Pengaruhnya di bidang strategi pertahanan Indonesia ialah bahwa dengan doktrin politik baru itu, doktrin Hankam harus melepaskan kewaspadaan terhadap potensi musuh yang datang dari utara dan lebih banyak melihat kepada bahaya dari apa yang dinamakan negara-negara oldefos.

2. Indonesia Dalam Gerakan non-Blok

Menurut rumusan Demokrasi Terpimpin, politik bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme dan dalam hu-

bunganya dengan *non-alignment* bukan pula politik netralisme, karena itu diplomasi Indonesia senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi subjek dan bukan sebagai objek dalam pergolakan politik internasional. Gerakan Non-Blok merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh Demokrasi Terpimpin untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Gerakan tersebut diawali dengan KTT di Biograd pada 1 sampai 6 September 1961 yang dihadiri oleh 25 kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu Afganistan, Aljazair, Burma, Kamboja, Ceylon, Kongo, Kuba, Cyprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Tunisia, RPA, Yaman, dan, Yugoslavia. Selain itu tiga negara hadir sebagai peninjau, yaitu Bolivia, Brazilia, dan Equador.

Bertambah buruknya situasi hubungan antara Washington dan Moskow dan masih bercokolnya kolonialisme di beberapa bagian dunia, menjadi acara pokok konferensi. Pada kesempatan itu Presiden Soekarno mengemukakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya bukanlah sengketa ideologis, melainkan akibat dari konflik antara kekuatan-kekuatan yang baru bangkit. Dalam konflik mana imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme mengabdikan kepada kepentingan kekuatan lama. Setiap bangsa harus mengembangkan ideologi nasionalnya, hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain dan tidak melakukan campur-tangan dalam kekacauan ideologis intern bangsa lain.

KTT *non-Aligned* kedua diadakan di Kairo pada tahun 1964 dan dihadiri oleh 47 negara peserta, yaitu Afghanistan, Aljazair, Angola (*Government-in exile*), Burma, Burundi, Kamboja, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ceylon, Chad, Kongo (Brazaville), Kuba, Cyprus, Dahomey, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iran, Jordania, Kenya, Kuwait, Laos, Lebanon, Libya, Malawi, Mali, Mauritania, Maroko, Nepal, Nigeria, Northern Rhodesia (Zambia), Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Togo, Tunisia, Uganda, Republik Persatuan Arab, Republik Persatuan Tanganyika

dan Zanzibar, Yaman, dan Yugoslavia serta sepuluh negara-negara peninjau yaitu Argentina, Bolivia, Brazillia, Chili, Finlandia, Jamaika, Mexico, Trinidad, Tobago, Uruguay, dan Venezuela. Peninjau-peninjau lainnya ialah Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika dan Liga Arab.

Konferensi Kairo menghasilkan deklarasi yang berkenaan dengan :

- (1) Aksi Bersama untuk membebaskan negara-negara yang masih terjajah, penghapusan kolonialisme, neo-kolonialisme dan imperialisme,
- (2) Menghormati hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan mengutuk penggunaan kekerasan terhadap pelaksanaan hak,
- (3) Diskriminasi rasial dan politik *apartheid*,
- (4) Hidup berdampingan secara damai dan kodifikasi prinsip-prinsip oleh PBB,
- (5) Menghormati kedaulatan negara-negara dan keutuhan wilayah mereka; masalah bangsa-bangsa yang terpecah-pecah;
- (6) Penyelesaian persengketaan-persengketaan tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan sesuai dengan prinsip-prinsip PBB,
- (7) Pelucutan senjata secara umum dan total; penggunaan tenaga atom untuk tujuan damai, larangan segala percobaan senjata nuklir, penentuan daerah bebas nuklir, pencegahan penyebaran senjata nuklir dan penghapusan semua senjata nuklir,
- (8) Pakta-pakta militer, pasukan-pasukan dan pangkalan-pangkalan asing.
- (9) PBB, peranannya di dalam soal-soal internasional, pelaksanaan resolusi-resolusinya dan perubahan piagamnya.
- (10) Perkembangan dan kerjasama ekonomi, dan
- (10) Kerjasama kebudayaan, ilmiah dan pendidikan serta konsolidasi organisasi-organisasi internasional dan regional yang bekerja untuk tujuan itu.

Kominike bersama yang dikeluarkan setelah konferensi Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Filipina di Manila pada 1 sampai 11 Juni 1963 antara lain, bahwa ketiga menteri luar negeri "berhasil mencapai pengertian bersama dan yang timbul sebagai akibat dari rencana pembentukan Federasi Malaysia".

Sementara itu, pada 9 Juli 1963, Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman di London menandatangani pembentukan negara Federasi Malaysia, yang akan dilaksanakan pada 31 Agustus 1963. Tindakan Perdana Menteri Malaya dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai satu tindakan unilateral yang beriktikad buruk dan menyimpang dari pengertian bersama yang telah dicapai dalam pertemuan tiga menteri luar negeri di Manila itu. Namun demikian upaya diplomasi tetap dilakukan, dan akhirnya terselenggara pertemuan di Manila pada 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 yang dihadiri oleh kepala-kepala pemerintah ketiga negara. Pertemuan puncak itu menghasilkan tiga dokumen, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama.

Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta sekretaris jenderal PBB melakukan pendekatan yang segar terhadap persoalan itu, agar diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke Federasi Malaysia itu. Paragraf 10 Persetujuan Bersama Manila menyatakan antara lain, Indonesia dan Filipina akan menyambut baik pembentukan Malaysia, bilamana dukungan rakyat di daerah Borneo diselidiki oleh otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu sekretaris jenderal PBB atau wakilnya. Paragraf 11 dari Persetujuan Manila, menyatakan penghargaan Federasi Malaya atas sikap Indonesia dan Filipina dan kesanggupannya untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan Pemerintah Inggris dan Pemerintah Daerah-daerah Kalimantan Utara dalam rangka meminta sekretaris jenderal PBB atau wakilnya melakukan penyelidikan tentang kehendak rakyat daerah-daerah itu.

Hasil-hasil dari pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha untuk mendapat-

kan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai sumber sengketa, yaitu pembentukan Federasi Malaysia.

Ketiga kepala pemerintahan juga telah setuju untuk mempererat kerjasama antara ketiga negara, membentuk MAPHILINDO (Malaya, Filipina, Indonesia) dan mengadakan konsultasi-konsultasi berkala dan teratur pada segala tingkat, yang dinamakan Musyawarah MAPHILINDO.

Berdasarkan pasal 4 Pernyataan Bersama, pasal 10 dan 11 Persetujuan Manila, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk delapan orang untuk menjadi anggota tim misi PBB tentang masalah Malaysia di bawah pimpinan Lawrence Michelmore. Tim peninjau Indonesia dan Filipina terlambat mengikuti Tim PBB tersebut dalam peninjauannya ke Sabah dan Sarawak, karena Pemerintah Inggris mempersulit masuknya peninjau-peninjau ke dua negara itu ke daerah-daerah. Akibatnya para peninjau tidak dapat menyaksikan jalannya seluruh penyelidikan, melainkan hanya sepertiga saja dari pekerjaan pengawasan misi PBB sendiri menyedihkan tindakan Pemerintah Inggris.

Berbeda dengan yang direncanakan semula, proklamasi Federasi Malaysia baru dilaksanakan pada 16 September 1963. Proklamasi itu tetap dilakukan sebelum misi PBB menyampaikan laporan peninjauannya. Pemerintah RI menganggap tindakan itu sebagai pelanggaran atas martabat PBB dan juga sebagai pelanggaran atas Pernyataan Bersama Manila. Akibatnya Pemerintah RI pada 21 September 1963 memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Pada akhirnya tahun 1963 Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Proklamasi Negara Kalimantan Utara dan perjuangannya melawan "Neo-Kolonialisme Inggris" dengan mengirimkan sejumlah sukarelawan.

Pertikaian di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara yang menghendaki agar pertikaian itu dapat diselesaikan secara damai. Presiden Amerika Serikat Lindon B. Johnson, mengirimkan Jaksa Agung Robert Kennedy untuk menemui ketiga kepala pemerintahan tersebut untuk meratakan jalan ke arah perundingan.

Perdana Menteri Jepang Ikeda dan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman, juga berusaha ke arah itu, karena itu Soekarno pada 7 sampai 11 Januari 1964 berkunjung ke Filipina. Di dalam pernyataan bersama Musyawarah MAPHILINDO pertama antara Indonesia dan Filipina, dirumuskan suatu doktrin pemecahan yaitu masalah Asia diselesaikan oleh orang-orang Asia sendiri yang kemudian terkenal sebagai Doktrin Soekarno Macapagal, namun masalah pokok yang menjadi sebab sengketa dan memburuknya hubungan antara ketiga negara itu tidak terpecahkan karena ketidakhadiran perdana menteri "Malaya" yang pada waktu itu telah menjadi Malaysia".

Usaha untuk memecahkan masalah sengketa Indonesia-Malaysia itu dilakukan pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, dan Malaysia di Bangkok pada 5 sampai 10 Februari 1964, sebagai kelanjutan dari gencatan senjata yang telah diumumkan pada 25 Januari 1964 di sepanjang perbatasan Kalimantan-Indonesia dan Kalimantan Utara yang dicapai di Tokyo antara Presiden Soekarno dan Tengku Abdul Rachman. Pertemuan tidak mencapai sesuatu hasil karena terdapat perbedaan tafsiran tentang gencatan senjata itu, yaitu :

- (1) Indonesia menghendaki agar gencatan senjata hanya berarti penghentian tembak-menembak,
- (2) Malaysia menghendaki agar penghentian tembak-menembak disusul dengan penarikan "sukarelawan-sukarelawan Indonesia" dari Kalimantan Utara.

Pertemuan itu hanya menghasilkan Komunike Bersama yang menyatakan akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan lagi pada Konferensi tingkat Menteri Luar Negeri menjelang diadakannya Pertemuan Puncak kedua di Bangkok.

Pertemuan Bangkok kedua yang diselenggarakan pada 3 sampai 6 Maret 1964 antara menteri-menteri luar negeri ketiga negara ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang positif karena perbedaan tafsiran antara Indonesia dan Malaysia tentang gencatan senjata itu.

Pada 5 Juli 1964 diadakan pertemuan-pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri MAPHILINDO di Tokyo sebagai pendahuluhan dari Pertemuan Puncak yang diadakan tiga hari setelah pertemuan menteri-menteri luar negeri itu. Karena terdapat perbedaan tafsiran mengenai masalah penarikan mundur sukarelawan-sukarelawan Indonesia dari Kalimantan Utara, maka diputuskan menunda Pertemuan Puncak sampai 15 atau 19 Juli 1964. Walaupun dalam Pertemuan Puncak itu belum ada kepastian kehadiran Perdana Menteri Malaysia dan pembukaannya, namun presiden RI pada 8 Juni 1964 berangkat juga menuju ke Manila dan selanjutnya ke Tokyo.

Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri mendahului Pertemuan Puncak itu dimulai lagi di Tokyo pada 18 Juni 1964. Keesokan harinya, pada 19 Juni 1964, ketiga menteri luar negeri sepakat mengajukan agenda Pertemuan Puncak, yaitu : (1) peninjauan situasi dan (2) pertimbangan terhadap usul-usul untuk mencapai penyelesaian secara damai mengenai masalah-masalah yang ada.

Dalam Pertemuan Puncak yang diadakan pada 20 Juni 1964, Presiden Filipina Macapagal mengusulkan pembentukan suatu panitia konsiliasi yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari ketiga negara-negara MAPHILINDO ditambah dengan wakil dari negara-negara Asia lainnya yang akan bertindak sebagai ketua. Presiden Soekarno yang pada prinsipnya menyetujui usul Presiden Filipina itu, mengajukan suatu amandemen kecil sebagai berikut :

- (1) Presiden RI menyetujui usul Presiden Filipina tentang pembentukan suatu Komisi Konsiliasi Asia Afrika yang akan terdiri atas empat anggota, tiga di antaranya dipilih dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan yang keempat dipilih dengan suara bulat oleh ketiga anggota itu, dan
- (2) Komisi itu akan diminta untuk mempelajari masalah-masalah yang ada antara ketiga negara dan menyampaikan saran-saran komisi itu; Perdana Menteri Malaysia pada prinsipnya menyetujui usul itu, dengan pengertian bahwa

segala tindakan permusuhan terhadap Malaysia harus segera dihentikan.

Namun demikian masalah Malaysia tidak pernah diselesaikan di masa Demokrasi Terpimpin. Ketika Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, pada 31 Desember 1964 RI menarik diri dari PBB. Masalah konfrontasi dengan Malaysia baru diselesaikan di masa Orde Baru.

D. OFENSIF PKI

1. Menguasai Buruh dan Tani

Dalam usaha untuk menguasai massa buruh, PKI mempunyai keuntungan karena merupakan salah satu partai yang tua dan berpengalaman. Dalam memimpin aksi-aksi buruh, Serikat Organisasi Sentral Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), federasi yang dikuasai sejak akhir tahun 1946, menjadi sarana aksi buruh yang efektif. Sejak tahun 1961 PKI melaksanakan penyempurnaan organisasi SOBSI yang dimulai dengan rencana tiga tahun.

Sejak tahun 1950an PKI mengharapkan penggalangan kekuatan massa tani di desa-desa. Penggalangan ini diadakan dengan pertimbangan penduduk pedesaan meliputi 80% dari penduduk Indonesia, dan karenanya peranan mereka tidak dapat diabaikan. Desa merupakan sumber tenaga, sumber bahan keperluan hidup dan merupakan pangkalan untuk menyerang musuh di kota atau pangkalan tempat bertahan dari serangan musuh dari luar.

PKI mulai infiltrasinya terhadap tubuh BTI (Barisan Tani Indonesia) yang ketika itu masih dipimpin oleh Sadjarwo dari PNI. Dengan slogan yang menarik yaitu "tanah untuk kaum petani", PKI berhasil menambah BTI 100% menjadi anggota organisasi massa (ormas) PKI. Penguasaan BTI oleh PKI sudah tentu merupakan pukulan bagi PNI.

Untuk mempelajari psikologi para petani di desa-desa serta mengetahui keluh-kesah dan keinginan mereka, PKI mengadakan gerakan turun ke bawah, mengirimkan sekitar 4000–5000

kader ke desa-desa di Jawa Barat untuk menjalankan Aksi Tiga Sama, yaitu Sama Tinggal, Sama Makan, dan Sama Bekerja dengan para petani. Selanjutnya PKI menyusun satu manual (buku pegangan) yang berisi cara-cara bagaimana harus mendekati para petani di desa-desa. Juga diterbitkan buku pegangan kader PKI berjudul *Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa*. Dalam manual itu dijelaskan ketujuh setan desa adalah musuh petani yang harus dihancurkan, terutama yang terdapat di kalangan para kiai dan ulama desa yang dituduh oleh PKI sebagai tuan tanah jahat, tengkulak jahat, penghisap darah rakyat, penguasa jahat, bandit desa, tukang ijon, kapitalis birokrat, penghalang kemajuan rakyat di desa dan lain-lain. Dengan taktik ini seolah-olah PKI membela kepentingan kaum tani. Para kaum tani itu tentu saja tidak mengetahui, bahwa setelah kaum komunis berkuasa, di negeri-negeri lain justru menindas kaum tani.

Aksi "mengganyang setan-setan desa" inilah yang menimbulkan rasa dendam di kalangan masyarakat desa yang santri. Hal itulah yang menjadi sebab tumbuhnya aksi main hakim sendiri di kemudian hari.

Usaha menghancurkan pengaruh pada ulama di desa-desa diarahkan oleh PKI dengan sasaran untuk memperoleh dukungan dari angkatan muda non-santri di desa-desa sekaligus mematahkan kekuatan ormas dan partai-partai Islam. Dalam usaha menarik hati massa angkatan muda di desa-desa itu PKI mempergunakan ormas-ormas Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sementara itu BTI mendapat keuntungan dengan dikeluarkannya undang-undang baru, yakni Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dan Undang-undang Bagi Hasil (UUBH). PKI dan BTI menjadikan kedua undang-undang itu sebagai fokus kegiatannya. Mereka berkata kepada para petani bahwa kedua undang-undang tersebut tidak akan direalisasi jikalau massa angkatan muda di desa-desa tidak berhasil untuk memilih tokoh-tokoh PKI sebagai pemuka kampung dan lurah-lurah.⁴⁰

⁴⁰UUPA dan UUBH diundangkan pada tahun 1960. Menurut UUPA ada sejuta Ha tanah yang harus dibagikan tetapi sampai akhir 1963 yang dibagikan baru 18.000 Ha tanah.

Pihak PKI/BTI mempunyai tujuan sendiri tentang pelaksanaan UUPA dan UUPBH. Kader PKI menghasut kaum tani untuk secara sepihak menggarap tanah yang menurut mereka adalah milih petani berdasarkan UUPA. Akibatnya terjadi aksi-aksi sepihak di beberapa tempat dan sering terjadi konflik yang menjurus pada konfrontasi fisik yang membawa korban baik di kalangan rakyat maupun dari kalangan pejabat. Misalnya peristiwa yang terjadi di Indramayu, Bandar Betsy (Sumatera Utara) dan lain-lain.

Sebenarnya aksi-sepihak ini merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara pameran kekuatan PKI, seperti ganyang kaum imperialis dan kapitalis. Dengan macam-macam atraksi yang disajikan oleh Lekra di desa-desa seperti ketoprak, wayang kulit, wayang orang, ludruk, kuda lumping, reog Ponorogo, dan lain-lain, PKI juga memakai unsur-unsur budaya untuk penetrasi politiknya ke desa-desa. PKI juga melakukan ofensif psikologis dengan menyiarkan angka-angka statistik mengenai apa yang dikatakannya sebagai jumlah pendukung PKI.⁴¹

2. Menguasai Partai Politik dan Organisasi Massa

Usaha PKI menginfiltrasi PNI mulai berhasil yang terbukti antara lain dengan kenyataan bahwa sejak tahun 1959 PNI mengubah pengertian *Marhaenisme* menjadi "Marxisme yang diterapkan dalam kondisi Indonesia". Sejak itu pula PNI menempuh garis politik kiri anti-Amerika yang sudah barang tentu disokong dan didukung dengan penuh semangat oleh PKI. Beberapa tokoh PNI menyadari bahwa perubahan pengertian *Marhaenisme* itu bisa dimanfaatkan oleh PKI, karena itu mereka berusaha agar arti-marhaenisme tidak diselewengkan oleh golongan kiri yang berada dalam tubuh PNI. Mereka juga berusaha agar supaya garis politik PNI terus mengikuti garis politik PKI, tetapi karena golongan kiri dalam Badan Pekerja Kongres PNI

⁴¹Yahya Ismail, *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia* Kuala Lumpur, 1972. hal. 75-76. Aidit mengatakan, bila diadakan Pemilihan Umum, PKI akan mendapatkan suara 30 prosen dari suara pemilih. *Harian Rakjat*, 6 Mei 1964. Lihat Arnold Brackman. *Indonesia Communisme, a History*, New York, 1963. hal. 301.

lebih kuat, usaha-usaha mereka gagal, bahkan akhirnya mereka disingkirkan dengan diberi predikat "marhaenis gadungan". Tidak kurang dari Presiden Soekarno sendiri yang mencanangkan tindakan itu.

Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), organisasi budaya PNI yang dipimpin oleh Sitor Situmorang, dalam hubungan dengan hal ini menyatakan, ". . . . tidak ada perbedaan pokok antara LKN dan Lekra tentang soal kulturil dan kesusastraan". Karena landasan LKN dan Lekra (organisasi satelit PKI) sama-sama bertumpu pada Marxisme.⁴²

Setelah tahun 1959 PNI menonjolkan semangat baru dalam ormas PNI seperti Pemuda Marhaenis dan lain-lain. Mulailah lembaran baru dalam ormas-ormas PNI yang dipengaruhi oleh kader-kader komunis yang mungkin sekali dengan sengaja disusupkan oleh PKI ke dalam tubuh PNI. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi bentrokan antara pengurus cabang PNI, sebagian masih dikuasai oleh golongan nasionalis murni dengan pengurus ormas-ormas PNI, seperti Pemuda Marhaen, Buruh Marhaen, Wanita Marhaen, dan seterusnya ormas PNI seperti Konsentrasi Mahasiswa Yogya (CMI) masuk ke dalam tubuh PNI sesudah tahun 1959. Sebagai organisasi berhaluan kiri, dalam kesadaran politik CMI selalu mendesak untuk bekerja rapat dengan PKI serta ormas-ormasnya.

Pertentangan antara cabang dan ormas PNI tampak sekali dalam peristiwa aksi-sepihak yang dilancarkan oleh PKI beserta ormas-ormasnya seperti terjadi di Bojolali, Klaten, Jengkol, Kanigoro, Cilacap, dan lain-lain. Dalam aksi-sepihak itu ormas PNI berada di pihak PKI penggerak aksi-sepihak, sedangkan cabang PNI menentanginya. Keadaan yang sangat merugikan itu diuraikan oleh Hadisubeno, ketua umum PNI Jawa Tengah dalam sebuah buku putih. Hadisubeno dan kawan-kawannya dipersalahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PNI yang pada 4 Agustus 1965 menskors mereka dari DPP PNI. Dilihat dari latar itu tidaklah mengherankan apabila DPP PNI itu pada 1 Oktober

⁴²Yahya Ismail, *op. cit.*, hal. 75-76.

1965 pukul 10.00 mengeluarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Surachman, sekretaris jenderal PNI, bekas tokoh CMY Yogyakarta, bahwa PNI mendukung Gerakan 30 September.

Begitu juga penyusupan PKI ke dalam tubuh Partindo. Seluruh napas dan suara maupun kegiatan Partindo benar-benar untuk melaksanakan program perjuangan PKI. Hal ini dapat terjadi, karena 75% dari Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Partindo dijabat oleh orang-orang komunis berbaju Partindo.⁴³

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) adalah satu-satunya organisasi yang anggotanya terdiri atas guru-guru Sekolah Dasar, guru-guru Sekolah Lanjutan Pertama, guru-guru Sekolah Lanjutan Atas, tersebar luas sampai ke desa-desa. Anggota PGRI di tempat kediamannya menduduki posisi-politik yang cukup berpengaruh. Itulah sebabnya sejak didirikan, PGRI menjadi incaran PKI untuk diinfiltrasi dan dikuasai dari dalam seperti telah diakukannya terhadap IPPI, BTI, Gerwani, dan ormas-ormas lain, yang pada permulaannya bukanlah organisasi massa dari PKI.

Ketika usaha penguasaan PGRI dari dalam tidak berhasil, terpaksa PKI dalam tahun 1963 mengadakan PGRI tandingan dengan nama *PGRI Non-Vaksentral (PGRI-NV)* di bawah pimpinan Subandri dan Muljono, yang mendapat sokongan dari Menteri P dan K Prof. Dr. Prijono, dan Sekretaris Jenderal P dan K Supardo SH. Sampai dibubarkannya, setelah pemberontakan G30S/PKI, *PGRI-Non-Vaksentral* kurang berhasil mendapat dukungan dibandingkan dengan PGRI asli, terutama di luar Pulau Jawa, tetapi di Pulau Jawa sempat mendapat dukungan, terutama di kalangan guru-guru Sekolah Dasar di desa-desa, karena itu guru-guru Sekolah Dasar banyak yang terlibat secara organisatoris dengan organisasi massa PKI ini.

⁴³ Adisumarto, Sekjen Partindo, oleh Mahmillub dijatuhi hukuman 13 tahun, lihat Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI)*, Jakarta, 1978, hal. 75.

3. Mencampuri Bidang Pertahanan - Keamanan

Menurut keterangan Njono, Peris Pardede, maupun Sudisman dalam sidang Mahmillub, Aidit seorang dirilah yang diberi kekuasaan oleh politbiro untuk menentukan dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan ABRI. Dalam hal membina ABRI ternyata Ketua Aidit dibantu oleh sebuah biro khusus, yang pada tingkat pusat di Jakarta dipimpin oleh Syam Kamarussaman dan Soepono (Pono). Biro Khusus inilah yang dipergunakan PKI untuk melakukan infiltrasi ke dalam ABRI.

Biro Khusus ini tidak konstitusional dan menjadi alat kerja Ketua Aidit,⁴⁴ serta memainkan peranan penting seperti terbukti dalam pelaksanaan Pemberontakan G 30 S/PKI. Tugas Biro Khusus adalah untuk mencari dan memperluas pengaruh partai secara tertutup di kalangan ABRI. Badan ini sifatnya rahasia, tidak hanya bagi orang luar melainkan juga bagi anggota PKI sendiri serta langsung berada di bawah ketua CC PKI. Biro Khusus ini sejak tahun 1964 dikepalai oleh Syam Kamarussaman sedangkan Soepono (Pono) menjadi orang kedua, dan Bono Waluyo sebagai orang ketiga. Sejak tahun itu pula Biro Khusus berdiri sendiri secara otonom dengan garis kendali langsung dari Ketua CC PKI Aidit. Hanya segolongan kecil dari anggota partai yang mengetahui aktivitas Biro Khusus ini.⁴⁵ Badan ini dibentuk pada tingkat pusat dan daerah dengan pimpinan kolektif.

Dalam mencari anggota ABRI yang akan dibinanya Biro Khusus mengutamakan :

- (1) Anggota ABRI yang dahulu pernah turut serta atau sedikitnya menunjukkan simpati terhadap Pemberontakan PKI Madiun 1948, seperti bekas anggota Pasukan TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia), bekas anggota Batalyon Pesindo dan Laskar-laskar yang berafiliasi dengan PKI,
- (2) Perwira-perwira yang sakit hati, yang tidak puas terhadap pimpinannya, dan

⁴⁴ Mahmillub, *Pono*, hal. 13.

⁴⁵ Kopkamtib Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), hal. 54-57.

- (3) Anggota muda ABRI yang masuk ABRI sesudah tahun 1950. Mereka tidak mengalami dan tidak ikut ambil bagian dalam penumpasan Pemberontakan PKI Madiun, karena itu mereka diharapkan tidak mempunyai sikap anti-komunis.

DN. Aidit pernah menyatakan, ". . . . selama ini masih ada golongan rakyat yang belum diperhatikan dan belum kita jadikan objek karya-karya sastra dan seni, yaitu massa prajurit. Pada hal secara politis bagi kita sudah tidak ada lagi, mereka pada umumnya adalah rakyat pekerja yang memanggul senapan, sebab mereka pada umumnya berasal dari buruh, tani, dan rakyat pekerja lainnya.⁴⁶

Dengan dimasukkannya golongan prajurit menjadi soko guru PKI bersama buruh dan tani, adalah suatu perkembangan baru dalam strategi PKI. Aidit menyadari, bahwa suatu revolusi sosial dan politik tidak bisa sukses tanpa diikutsertakannya golongan prajurit. Praktis infiltrasi PKI ke dalam tubuh ABRI dilakukan oleh Biro Khusus.

Anggota-anggota ABRI yang dibina itu tidaklah secara otomatis menjadi anggota PKI, cukup menjadi simpatisan saja, karena itu Biro Khusus melakukan dua macam pembinaan, yaitu :

- (1) pembinaan untuk menghasilkan orang-orang yang mau melakukan tugas-tugas partai, misalnya Brigjen Supardjo, Kolonel Latief, Mayor Suyono, Letkol Untung, Laksamana Madya (Marsekal Madya) Omar Dhani, Kolonel Laut Sunardi, Letkol Heru Atmodjo, dan lain-lain, dan
- (2) pembinaan fungsional untuk menarik mereka yang ada di tingkat atas agar sejalan dengan usaha dan kebijakan PKI.

Adapun anggota-anggota ABRI yang menjadi pengikut PKI itu tidak secara resmi menjadi anggota PKI, bahkan keanggotaan mereka dirahasiakan. PKI secara diam-diam menyusup masuk ke dalam tubuh ABRI dan membina perwira-perwira tinggi, menengah, dan pertama serta bawahan supaya bersimpati pada per-

⁴⁶ DN. Aidit, Dengan Sastra dan Seni Jang Berkepribadian Nasional mengabdikan Buruh, Tani, Prajurit, Djakarta, 1946. hal. 30.

juangan PKI. Bahan-bahan yang dipakai untuk pembinaan di samping ajaran komunisme, adalah keadaan lingkungan hidup sehari-hari, keadaan ekonomi yang gawat, berbagai penyelewengan, dan lain-lain yang ditekankan pada kontradiksi-kontradiksi yang ada serta rasa tidak puas, terutama di bidang sosial-ekonomi dan politik. Memang harus diakui selalu ada saja yang timpang dalam kehidupan setiap masyarakat. Dalam hal ini kaum komunis tinggal merumuskan dan memberikan isi yang mantap serta memberi penekanan-penekanan bila perlu, tanpa memberi alternatif penyelesaiannya atas kondisi-kondisi yang ada. Jadi tema pembinaan itu tetap berpokok pada rasa keadilan, sesuatu yang bersifat universal.

Cara mencari hubungan dengan anggota ABRI adalah melalui kenalan kerabat, yakni untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Juga agar supaya anggota-anggota ABRI tidak *a priori* terhadap PKI atau *komunistophobi*, setidaknya-tidaknya dapat diajak bekerjasama dan tidak memusuhi PKI. Tujuan lebih jauh dari penyusupan melalui Biro Khusus ini adalah untuk menyusun kekuatan dalam ABRI sehingga dapat mendorong atau mengubah perimbangan kekuatan dalam negeri antara ABRI dan PKI. PKI menugaskan kader-kadernya untuk mendampingi para perwira menjadi simpatisan PKI. Hal ini terjadi misalnya saja dengan diri Letnan Kolonel Untung; ketika di Semarang, ia dibina oleh kader PKI bernama Sudarmo dan di Jakarta oleh Suyono.⁴⁷

Dari bukti-bukti yang ada, ternyata PKI telah banyak menyusup ke lingkungan Angkatan Bersenjata RI, walaupun intensitasnya berbeda-beda, seperti Ikatan Bintara Angkatan Laut (IBAL).⁴⁸ Dalam Angkatan Darat hampir semua Kodam dijadikan sasaran infiltrasi utama,⁴⁹ sedangkan perhatian khusus

⁴⁷ Pusat Sedjarah Angkatan Bersenjata, *40 hari kegagalan G 30 S*, Djakarta, 1965, hal. 11.

⁴⁸ Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/ PKI)*, hal. 62.

⁴⁹ Mahmillub, *Pono*, hal. 24.

diberikan kepada Staf I (intel), III (personel) dan V (teritorial) dari masing-masing Kodam. Bukanlah suatu hal kebetulan bahwa perhatian khusus diberikan pada Staf I, III, dan V, sebab staf-staf tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dilihat dari sudut kepentingan PKI. Selain ketiga staf tersebut, para komandan pasukan juga menjadi incaran PKI, sebab peranan dan pengaruh komandan terhadap anak buah dalam kenyataannya sangat besar, bahkan meliputi kehidupan mereka sehari-hari.

Seperti disebut di muka sasaran utama infiltrasi adalah Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang utama terhadap maksud mereka. Angkatan lain seperti Angkatan Laut dan Polisi dianggap sibuk mengurus soal internnya sendiri, sedangkan Angkatan Udara mereka anggap telah dikuasai. Akibat dari infiltrasi PKI ke dalam tubuh ABRI ialah timbulnya pengkhianatan terhadap ideologi negara Pancasila serta pengingkaran terhadap Saptamarga dan Sumpah Prajurit, karena mereka menilai ideologi komunisme lebih tinggi daripada disiplin prajurit TNI.⁵⁰

Sejak memegang tampuk pimpinan PKI, Aidit menyadari bahwa kekalahan dalam Pemberontakan PKI Madiun 1948 itu antara lain disebabkan karena PKI tidak mempunyai pasukan bersenjata sendiri seperti Mao Zedong di RRC atau Ho Chi Minh di Vietnam. Itulah sebabnya Aidit berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan supaya kesatuan-kesatuan organisasi massanya seperti Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI, dan Gerwani pada suatu ketika dapat dipersenjatai dan diberi latihan kemiliteran. Cita-cita Aidit itu tercapai sehubungan dengan kebutuhan Tri-kora dan Dwikora, dengan timbulnya gagasan mengenai pengerahan tenaga sukarelawan. Oleh sebab itu pada setiap kesempatan Aidit dan kawan-kawan mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mempersenjatai buruh dan tani yang kemudian berkembang mengimbangi usul dan usaha-usaha PKI itu dengan membentuk Hansip, Resimen Mahasiswa dan kesatuan-kesatuan

⁵⁰ Drs. Saleh As'ad Djamhari, *op. cit.*, hal. 119.

karyawan perusahaan-perusahaan negara,⁵¹ namun karena sikap Presiden Soekarno menunjukkan simpati terhadap gagasan-gagasan PKI itu, Aidit tidak henti-hentinya menyerukan supaya pemerintah mempersenjatai buruh dan tani dan membentuk Angkatan V di samping empat angkatan dalam lingkungan ABRI.

Gagasan semula tentang pembentukan Angkatan V ini berasal dari Zou Enlai yang disampaikan kepada Presiden Soekarno untuk memperkuat kedudukan PKI dalam usaha penyusunan kekuatannya. Dalam situasi yang demikian Presiden Soekarno melontarkan gagasan pembentukan Angkatan V di hadapan Kursus Reguler Lemhannas pada 31 Mei 1965.⁵² Pembentukan Angkatan V ini sudah pasti merupakan tantangan bagi Angkatan Darat. Gagasan Angkatan V ini oleh Presiden Soekarno kemudian dilemparkan lagi kepada para panglima angkatan. Para panglima menolak, kecuali Pangau Omar Dhani. Alasan penolakan para panglima angkatan ialah: "Akan berbahaya bila buruh dan tani dipersenjatai, mengingat hal itu menyangkut perjuangan PKI yang ingin menebus kekalahannya pada peristiwa Madiun, ditambah dengan menambah beban rakyat yang cukup banyak."

Saran Presiden Soekarno itu mendapat tanggapan positif dari luar ABRI. Menteri Penerangan Achmadi mengatakan, "adalah suatu keharusan sejarah untuk membentuk suatu tentara rakyat yang terdiri daripada sukarelawan".⁵³ Kemudian Sekretaris Jenderal Partindo mengatakan, "... sudah masanya melantik Angkatan V. Angkatan V adalah realisasi dari slogan tentara rakyat".⁵⁴

Secara diam-diam dan dengan bantuan oknum ABRI, PKI tetap melaksanakan keinginannya. Sesudah peristiwa G 30 S/PKI, diketahui bahwa PKI telah melakukan latihan-latihan militer bagi anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya sebagai persiapan perebutan kekuasaan.

⁵¹ AH. Nasution, *Kekarjaan ABRI*, hal. 32.

⁵² *Antara*, 31 Mei 1965.

⁵³ *Antara*, 8 Juni 1965.

⁵⁴ *Ibid*, 11 Juni 1965.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG EKONOMI

Dalam bab ini akan dikemukakan pokok-pokok kebijaksanaan yang diambil pemerintah dari masa Perang Kemerdekaan sampai Demokrasi Terpimpin. Harus diakui bahwa para sejarawan belum banyak menaruh perhatian pada aspek ini. Selain itu permasalahan kebijaksanaan ekonomi cukup luas dan meliputi berbagai bidang, seperti kebijaksanaan moneter, perdagangan, industri, prasarana, dan lain-lain.

A. MASA PERANG KEMERDEKAAN

1. Masalah Moneter

Masalah yang dihadapi Indonesia pada awal Perang Kemerdekaan adalah laju inflasi yang tinggi. Sumber inflasi adalah kekacauan moneter. Peredaran mata uang Jepang di masyarakat diperkirakan sejumlah empat milyar. Sampai pada bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja berjumlah 1,6 milyar. Ketika pasukan Serikat berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank, mereka mengedarkan uang cadangan bank sebesar 2,3 milyar untuk tujuan operasi dan membiayai kegiatan lain seperti gaji pegawai.

Pada masa awal itu Pemerintah Republik tidak dapat melarang beredarnya mata uang pendudukan Jepang. Hal ini

disebabkan negara sendiri belum memiliki mata uang sebagai penggantinya. Pajak dan bea masuk sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.¹ Untuk sementara waktu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Mata uang yang dinyatakan berlaku adalah tiga macam, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.²

Usaha lain dari pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter adalah dengan pinjaman nasional. Dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman itu yang direncanakan akan meliputi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang dibagi menjadi dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun.³ Pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyeter uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.⁴ Pinjaman nasional tahap pertama berhasil mengumpulkan uang sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai oleh pemerintah itu dapat dijadikan ukuran bagi dukungan rakyat. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi semacam itu pemerintah pasti akan mengalami kesulitan. Ditinjau dari segi politik, sukses ini menunjukkan kekeliruan perhitungan pihak Belanda mengenai kekuatan intern Republik.⁵

Upaya itu ternyata juga tidak berhasil mengatasi inflasi karena pihak Sekutu di bawah Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford, panglima AFNEI yang baru, memaklumkan berlakunya uang baru di wilayah yang diduduki Serikat. Uang baru itu dikenal sebagai uang NICA, dan dimasukkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat me-

¹ Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa Soal Keoeangan*, Djakarta, 1947, hal. 27.

² Makloemat Presiden RI., No. 1/10, tanggal 3 Oktober 1945. 15.

³ Makmoer, No. 10, Th. 1, 10 Mei 1946.

⁴ Soemitro Djojohadikoesoemo, *op. cit.*, hal. 27.

⁵ *Ibid.*, hal. 22 dan 27.

nurun. Kurs ditentukan 3% yaitu setiap satu rupiah uang Jepang dinilai sama dengan tiga sen uang NICA. Maklumat penggantian diumumkan sejak 6 Maret 1946. Perdana Menteri RI Sutan Sjahrir memprotes tindakan panglima AFNEI itu, karena melanggar persetujuan yang telah disepakati bersama. Dalam persetujuan itu dinyatakan bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan dikeluarkan mata uang baru untuk menghindari kekacauan di bidang ekonomi dan keuangan.⁶ Untuk menghadapi tindakan AFNEI itu Pemerintah mengingatkan kepada masyarakat, bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga macam mata uang sebagaimana yang telah diumumkan oleh pemerintah pada 1 Oktober 1945. Penduduk tidak dibenarkan mempergunakan mata uang NICA sebagai alat pembayar.

Pada bulan Oktober 1946, sebagai tindak lanjut, Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yang terkenal dengan nama Oeang Repoebliek Indonesia disingkat ORI (ejaan lama) untuk mengganti mata uang Jepang. Kurs mata uang Jepang dengan ORI adalah satu perseribu, artinya setiap seribu rupiah mata uang Jepang ditukar dengan satu rupiah ORI. Untuk sementara waktu pemerintah hanya mengizinkan setiap keluarga memiliki Rp 300,— dan bagi yang tidak berkeluarga sebesar Rp 100,—.

Tindakan pemerintah selanjutnya untuk memperbaiki keadaan moneter adalah membentuk Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia secara resmi dibentuk pada 1 November 1946, berawal sebagai Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.⁷ Sebelum berdirinya BNI, pemerintah telah merintis pembentukan Bank Raykat Indonesia sebagai kelanjutan dari *Shomin Ginko*. Bank Raykat Indonesia ini merupakan prototip dari BNI Negara.⁸ BNI Negara ini diberi tugas untuk

⁶ John O. Sutter, *Indonesianisasi*, New York, 1959, hal. 045–347.

⁷ *Antara*, 19 Mei 1947.

⁸ *Makmoer*, No. 7 Th. I, 10 April 1946.

mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

2. Perdagangan Internasional

Upaya pemerintah dalam perdagangan internasional antara lain diawali dengan bantuan beras kepada India. Ketika timbul paceklik di India Pemerintah RI menyatakan kesediaan untuk membantu pemerintah India dengan mengirimkan 500.000 ton beras ketika terbetik berita bahwa bangsa itu sedang tertimpa bahaya kelaparan. Alasan pemerintah ialah bahwa untuk panen tahun 1946 diperkirakan akan diperoleh surplus sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.⁹ Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Harga beras yang ditawarkan kepada India oleh Indonesia adalah penawaran yang paling rendah dibandingkan dengan penawaran pihak-pihak lain. Bagi RI yang terpenting bukanlah harga, tetapi aspek politik yang berhubungan dengan pelaksanaan Persetujuan Linggarjati. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa RI diharuskan mengirimkan dan menjual surplus berasnya ke daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Pemerintah RI menganggap lebih menguntungkan untuk menjual berasnya kepada negara sahabat daripada membantu Belanda.¹⁰ Perhitungan pemerintah ini terbukti tepat, karena India adalah salah satu negara di Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomatik di forum internasional dalam rangka solidaritas bangsa-bangsa Asia.

Usaha lain dari pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh ETC (*Banking and Trading Corporation*), suatu badan perdagangan semipemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (*Isbrantsen Inc.*).

⁹ Makmoer, No. 9, Th. I, 25 April 1946, hal. 312.

¹⁰ Dr. Soedarsono, "Pengiriman beras di India", *Siasat*, Th. I, No. 16, 9 April 1946.

Dalam transaksi pertama pihak perusahaan Amerika Serikat itu bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Kapal *Isbrantsen Inc*, yang masuk ke pelabuhan RI di Cirebon adalah kapal *Martin Behrmann* yang mengangkut barang-barang pesanan ETC dan memuat barang-barang ekspor RI, tetapi kapal itu kemudian dicegat oleh Angkatan Laut Belanda dan diseret ke Pelabuhan Tanjungpriuk. Seluruh muatannya disita.

Selain itu di Sumatera pemerintah juga berusaha menembus blokade Belanda. Tujuan utama pada waktu itu adalah Singapura dan Malaya. Karena jarak perairan relatif dekat, maka usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Usaha ini secara sistematis dilakukan sejak tahun 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan penembusan blokade ini dilakukan oleh Angkatan Laut RI dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah Aceh sebagai penghasil barang-barang ekspor. Sejak awal tahun 1947 Pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama *Indonesia Office* (Indoff). Secara resmi Indoff merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia adalah pengendali usaha penembus blokade dan usaha perdagangan barter. Badan perwakilan ini dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan dibantu oleh beberapa orang anggota stafnya seperti Soerjono, Daroesman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, Dr. Soeroso, dan Tamtomo. Badan inilah yang bertindak sebagai perantara dengan para pedagang Singapura dan juga mengusahakan kapal-kapal yang diperlukan.

Di samping Indoff, Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Ia dibantu oleh staf yang kecil terdiri atas Suhardjo, Harmoko, Kusmardjo, Ferdy Salim, dan Darry Salim. Tugas pokoknya adalah membeli senjata dan penembus blokade, dengan pelaku-pelaku utama seperti John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, Chris Tampenawas, dan lain-lain yang

selalu berkucing-kucingan dengan patroli laut Belanda. Selama tahun 1946 Belanda hanya menguasai Pelabuhan Belawan sehingga pihak RI bebas mengeksport karet *sheet* yang diselundupkan ke luar, terutama ke Singapura, sehingga mencapai jumlah puluhan ribu ton.¹¹ Selama tahun 1946 barang-barang yang diterima oleh Singapura dari Sumatera seharga *Straits* \$ 20.000.000,00 sedangkan yang berasal dari Jawa adalah *Straits* \$ 1.000.000,00 sebaliknya barang-barang yang dikirim ke Sumatera dari Singapura seharga *Straits* \$ 3.000.000,00 dan dari Singapura ke Jawa seharga \$ 2.000.000,00.¹²

3. Penataan Sektor-sektor Lain

Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak berupa konferensi ekonomi yang diselenggarakan pada bulan Februari 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan pejabat-pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, namun usaha ini merupakan rintisan dari pemecahan ekonomi secara menyeluruh. Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat di dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah : (1) masalah produksi dan distribusi bahan makanan, (2) masalah sandang, dan (3) status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Sampai saat itu sistem autarki dalam melaksanakan produksi dan distribusi dari masa pendudukan Jepang belum berubah. Konferensi memutuskan untuk menghapus sistem tersebut secara berangsur-angsur dan diganti dengan sistem desen-

¹¹ "Kolonel Askandar *et. al.*, " Operasi Lintas Laut Penembusan Blokade Belanda (1946-1949)", (Naskah) hal. 32 dst.nya.

¹² Perhitungan tersebut dikutip dari bulan September 1946. Selanjutnya lihat Mr. Moh. I. Thayeb, "Blokade Ekonomi", *Mimbar Indonesia*; No. 1 Th. II, 3 Januari 1947, hal. 10.

tralisasi. Untuk itu dibentuk Badan Pengawas Makanan Rakyat yang kemudian diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) di bawah supervisi Kementerian Kemakmuran. BPPBM yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dapat dianggap sebagai pendahulu dari Badan Urusan Logistik (Bulog) sekarang.¹³ Sejak adanya BPPBM, dihapuskanlah larangan pengiriman bahan-bahan antarkeresidenan kecuali beras. Konferensi juga menyumbangkan pokok pikiran mengenai penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI, tetapi baru dalam masa kabinet Sjahrir kedua, persoalan status dan administrasi perkebunan berhasil diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Menteri Kemakmuran.

Konferensi ekonomi kedua diadakan di Solo pada 16 Mei 1946 dengan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan konferensi pertama. Pembahasan mencakup program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini rencana konkret yang disarankan oleh Wakil Presiden Moh. Hatta adalah rehabilitasi pabrik-pabrik gula, karena gula merupakan bahan ekspor yang terpenting dan pengusahaannya dikuasai negara.¹⁴ Hasil ekspor ini diharapkan dapat dijual atau ditukar dengan barang-barang ini.

Realisasi keputusan mengenai perusahaan gula didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 3/1946 tanggal 21 Mei 1946 yang membentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dengan status perusahaan negara. BPPGN dipimpin oleh Notosudirdjo.¹⁵ Peraturan mengenai gula diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946. 6 Juni 1946, mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Status PPN adalah perusahaan negara, yang mempunyai tugas :

¹³ *Siasat*, Tahun 1 No. 20, 17 Mei 1947, hal. 4.

¹⁴ *Makmoer*, Tahun 1 No. 10 10 Mei 1946, hal. 331.

¹⁵ *Antara*, 22 Juni 1946.

- (1) meneruskan pekerjaan bekas perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh Jepang,
- (2) mengawasi perkebunan bekas milik Belanda,
- (3) mengawasi perkebunan-perkebunan lainnya, dengan cara mengawasi mutu produksinya.¹⁶

Langkah berikutnya dilakukan oleh Menteri Kemakmuran dr. AK. Gani pada 19 Januari 1947 dengan membentuk *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi).¹⁷ Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun untuk mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN. Setelah itu, Menteri Gani mengemukakan:

- (1) Bangunan umum, perkebunan dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara jatuh ke tangan Pemerintah RI,
- (2) Bangunan umum vital milik asing, akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi,
- (3) Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI,
- (4) Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda.¹⁸

Guna membiayai rencana itu Indonesia bersedia menerima penanaman modal asing, pinjaman dari dalam dan luar negeri. Bank Pembangunan didirikan untuk menampung dana-dana pembangunan yang direncanakan itu.

Untuk membiayai pembangunan 10 tahun ini pembangunan ekonomi Pemerintah mengerahkan dana-dana masyarakat, yaitu dengan pinjaman nasional dan tabungan rakyat serta

¹⁶ Lima Wilayah PPN, Jakarta, Banten, Bogor, Priangan-Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur.

¹⁷ *Antara*, 14 Juni 1947.

¹⁸ Kemudian disusun Rencana Pembangunan 10 tahun. Untuk *Siasat*, No. 15, Tahun 1, 12 April 1947, hal. 2.

pinjaman dari luar negeri sebagaimana telah direncanakan oleh *Planning Board*. Biaya lainnya didapat dengan cara mengikutsertakan badan badan swasta di dalam pembangunan ekonomi.¹⁹

Rencana itu ternyata tidak sempat dilaksanakan karena situasi politik dan militer tidak memungkinkan. Aksi militer Belanda pertama mengakibatkan sebagian besar daerah Republik yang ekonomis potensial jatuh ke tangan mereka. Wilayah RI yang tinggal hanyalah beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang minus dan berpenduduk padat.

Moh. Hatta yang menjabat perdana menteri sejak tahun 1948 mencoba mengatasi kemerosotan ekonomi dengan tindakan yang realistis, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara. Angkatan Perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dan laskar disalurkan pada bidang yang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Karena sumber dana yang utama adalah sektor pertanian, maka bidang ini akan dipergiat kembali. Dari Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo diturunkan Rencana Produksi Tiga Tahun 1948 - 1950 yang dikenal sebagai *Plan Kasimo* yang pada dasarnya adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar tanah-tanah yang kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 ha ditanami. Di Jawa diadakan intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul. Hewan yang berperanan penting dalam produksi pangan dipelihara sebaik-baiknya, dalam arti tidak disembelih. Sensus hewan pun harus dilaksanakan. Di setiap desa harus dibentuk kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik bagi rakyat. *Plan Kasimo* juga meliputi transmigrasi.²⁰

¹⁹"Dasar Pokok Rencana Ekonomi Indonesia", *Mimbar Indonesia*, No. 2, Tahun 1, 22 November 1947, hal. 7.

²⁰"Rencana Produksi Tiga Tahun" (Plan Kasimo), Buku Pengyongsong Konferensi Ekonomi Antar-Indonesia di Yogyakarta, 2-8 Desember 1949, Semarang, 1949, tanpa halaman.

Sementara itu Badan Perancang yang dibentuk dr. AK. Gani diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin sendiri oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan dr. AK. Gani menjadi wakilnya. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan bahan bagi kebijaksanaan pada pemerintah dan bahan-bahan guna merencanakan pembangunan ekonomi, serta nasihat-nasihat dalam rangka perundingan dengan Belanda. Panitia ini dibagi menjadi delapan bagian yang mempelajari masalah ekonomi yang mendesak pada waktu itu, yaitu:

- (1) masalah ekonomi umum,
- (2) masalah perkebunan,
- (3) masalah industri, pertambangan dan minyak bumi,
- (4) masalah hak milik asing,
- (5) masalah keuangan,
- (6) masalah listrik, kereta api dan trem,
- (7) masalah perburuhan,
- (8) masalah masalah di daerah penduduk Belanda.²¹

Panitia pemikir ini kemudian menghasilkan dasar pokok Rancangan Ekonomi Indonesia. Rancangan ini berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata, dengan cara:

- (a) mengintensifkan usaha produksi,
- (b) memajukan pertukaran internasional,
- (c) mencapai taraf hidup yang lebih tinggi,
- (d) mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat.

Adapun petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

Sektor perdagangan diaktifkan kembali. Impor dibatasi pada barang-barang yang penting seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri, dan alat transpor. Ekspor meliputi hasil-hasil perkebunan, hasil hutan, dan tambang. Persebaran penduduk di-

²¹ John. O. Sutter, *op. cit.*, hal. 496-497.

lakukan dengan cara memindahkan sejumlah 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera selama 15 tahun. Dengan cara demikian diharapkan kemakmuran di Jawa berkembang dan terbuka kemakmuran baru di Sumatera. Dasar politik ekonomi pemerintah adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, karena semua perusahaan vital harus dikuasai oleh negara. Perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan listrik dan air, perusahaan kereta api dan term, pos dan telekomunikasi serta bank sirkulasi.

Selama masa perang kemerdekaan, kegiatan ekonomi dikuasai pemerintah sehingga partisipasi pengusaha-pengusaha swasta kurang begitu menggembirakan, karena itu di dalam kongres Persatuan Tenaga Ekonomi di Malang, Wakil Presiden Moh. Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperkuat wadah persatuannya. Beberapa kegiatan swasta adalah sebagai berikut:

Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) di bawah pimpinan BR. Motik menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Tujuannya adalah menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkokoh ekonomi bangsa Indonesia, bahkan Presiden Soekarno pernah menjanjikan kepada PTE, bahwa bila PTE meningkatkan partisipasinya, akan diangkat calon-calon dari PTE di dalam Komite Nasional Pusat. Dianjurkan juga agar pemerintah daerah membantu usaha-usaha PTE, namun karena situasi perusahaan yang berada di bawah PTE semakin mundur. PTE hanya berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal pertama Rp. 5.000.000,00. Kegiatan PTE semakin mundur akibat aksi militer Belanda. PTE kemudian mencurahkan kegiatannya pada bidang perbankan.²²

²²Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dibentuk di Jakarta pada bulan September 1945 sebagai hasil permusyawaratan Kaum Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 20 Juli 1945; periksa *Indonesia Merdeka*, No. 7, Tahun 1, 25 Juli 2605 (1945), hal. 5. Ketua PTE adalah B.R. Motik. Tujuan PTE: menyusun segala tenaga ekonomi bangsa Indonesia dalam kebaktian terhadap Pemerintah memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia, Soewarno, "Persatuan Tenaga Ekonomi", Buku Penyongsong, tanpa halaman.

Salah satu usaha swasta lainnya yang membantu pemerintah adalah *Banking and Trading Corporation* (BTC), perseroan bank dan perdagangan tersebut di atas. Menurut Dr. Sumitro Djojohadikusumo, BPC adalah langkah persiapan organisasi badan perdagangan nasional, jika sewaktu-waktu perjuangan politik beralih ke perjuangan ekonomi.

Selain itu beberapa perusahaan lain dari kalangan swasta bergabung dalam bentuk gabungan perusahaan. Misalnya Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting yang berpusat di Malang. Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia (Puperti) yang berpusat di Cirebon. Produksi Puperti mencapai 170 juta batang rokok untuk konsumen di Jawa.²³

B. MASA DEMOKRASI LIBERAL

1. Keadaan Ekonomi

Sesudah Pengakuan Kedaulatan pada 27 Desember 1949, KMB membebaskan pada Indonesia hutang luar negeri sebesar Rp. 2.800 juta.²⁴ Struktur ekonomi yang diwarisi berat sebelah. Ekspor masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja.

Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah: (a) mengurangi jumlah uang yang beredar dan (b) mengatasi kenaikan biaya hidup,²⁵ sedangkan masalah jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Dari sisi moneter defisit pemerintah sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada 20 Maret 1950. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp. 1,6 milyar. Kemudian dengan kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 dari Negeri Belanda. Pada 13 Maret di bidang perdagangan diadakan usaha untuk memajukan ekspor dengan sistem serti-

²³ *Ibid*, 2 Januari 1947.

²⁴ Ir. Djuanda, "Ekonomi Nasional", *Mimbar Indonesia*, No. 32, Th. IV, 12 Agustus 1950, hal. 11.

²⁵ Sumitro Djojohadikusumo, *op. cit.*, hal. 138.

fiat devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Nilai tukar rupiah dari Rp. 3,80 setiap \$ 1 menjadi Rp. 7,6 untuk setiap \$ 1 untuk ekspor dan Rp. 11,40 setiap \$ 1 untuk impor.²⁶ Sistem ini memberikan penghasilan yang besar kepada eksportir dalam rupiah sehingga mereka dapat membayar lebih tinggi kepada produsen.

Keadaan membaik sedikit selama tahun 1950. Ekspor Indonesia menjadi 187% pada bulan April 1950, 243% pada bulan Mei atau sejumlah \$ 115 juta. Selain ini upaya memperbaiki ekonomi negara juga akan dilakukan dengan kredit dari luar negeri. Kredit ini dimaksudkan untuk pembangunan prasarana ekonomi. Misi Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda ke Amerika Serikat berhasil mendapatkan kredit dari *Exim Bank of Washington* sejumlah \$ 100.000.000. Dari jumlah tersebut di-realisis sejumlah \$ 52.245.000. Jumlah ini ditentukan untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara.²⁷ Namun demikian sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang lagi disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia dengan ekonomi agrariannya, tidak memiliki barang-barang ekspor lain kecuali hasil perkebunan.

Sejak itu perkembangan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan peningkatan. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik (biaya untuk operasi-operasi keamanan dalam negeri), adalah sebab utama bagi defisit. Di samping itu pemerintah sendiri tidak berhasil meningkatkan produksi. Kecuali itu kelemahan pemerintah lainnya adalah bahwa politik keuangannya tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Nederland.²⁸ Jadi sebab-sebab tidak semata-mata terletak pada perluasan program, tetapi dipengaruhi juga oleh dua faktor di atas.²⁹

²⁶ John Paul Meek, *The Government and Economic Development in Indonesia*, Ann Arbor, 1965, hal. 282-284.

²⁷ Kementerian Penerangan, *Exim Bank*, Djakarta, 1952, hal. 4-8.

²⁸ Ali Wardhana, *Monetary Problems of an Underdevelopment Economy : With Special Reference to Indonesia*, Ann Arbor, 1952, hal. 30.

²⁹ Ali Wardhana, *ibid*, hal. 11.

Pada tahun berikutnya pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan negara. Kebijakan moneter ditinjau kembali, sesudah pada akhir tahun 1951 *De Javasche Bank* diindonesiakan. Usaha pemerintah adalah menurunkan biaya ekspor dan melakukan tindakan penghematan, namun defisit pada tahun 1952 meningkat menjadi tiga milyar rupiah.

Karena defisit itu, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru yang menimbulkan tendensi inflasi. Kecenderungan inflasi secara tidak langsung menghambat produksi karena naiknya upah. Sejak tahun 1953 defisit anggaran belanja pemerintah menjadi Rp. 3.047 juta dan peredaran uang pada waktu itu berjumlah Rp. 7.6 milyar. Defisit ini meluncur terus sampai tahun 1958 sebagai berikut:³⁰

1953	3.047 juta rupiah
1954	3.600 juta rupiah
1955	2.000 juta rupiah
1956	2.300 juta rupiah
1957	5.300 juta rupiah

Upaya perbaikan ekonomi secara intensif diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian (1951) yang disusun Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo di masa Kabinet Natsir. Sasaran utamanya adalah industrialisasi. Setahun kemudian, pada zaman Kabinet Sukirman, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara yang berturut-turut dipimpin oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, Ir. Djuanda, dan Mr. Ali Budiardjo. Pada tahun 1956 badan ini menghasilkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956–1960) dan untuk melaksanakannya, Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional.³¹ Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp. 12,5 milyar, didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun, tetapi karena depresi di

³⁰ Mr. Lukman Hakim, "Keadaan dan Keuangan Pada Waktu Sekarang dan Jalan Keluar Mengatasi" *Menuju Ekonomi Marhaenis*, Yogyakarta, hal. 39.

³¹ John, O. Sutter, *Indonesia*, Ithaca, 1962, hal. 775.

akan bangkit sehingga struktur ekonomi kolonial berangsur-angsur akan berubah.

Gagasan Sumitro itu dilaksanakan oleh Kabinet Natsir (September 1950 - April 1951) ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.²⁴ Program ini terkenal pula dengan sebutan Program Benteng (Gerakan Benteng/Benteng Group) yang dimulai pada bulan April 1950. Selama tiga tahun (1950 - 1953) kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia telah mendapat kredit bantuan dari Program Benteng ini.²⁵

Langkah-langkah lain dalam usaha menumbuhkan dunia usaha nasional antara lain adalah mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar mereka dapat menduduki jabatan-jabatan staf, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional, dan memberikan perlindungan pada perusahaan-perusahaan itu agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga menjadi awal dari perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan ekonomi. Sesuai dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang dicanangkan Presiden Soekarno, penyelenggaraan ekonomi harus dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama nampak pada kebijaksanaan moneternya.

Dalam rangka usaha membendung inflasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku 25 Agustus 1959 pukul 06.00.²⁶

²⁴ Dalam Kabinet Natsir, salah satu programnya adalah: "memperembangkan dan memperkokoh kekuasaan ekonomi rakyat sebagai dasar melaksanakan ekonomi nasional yang sehat".

²⁵ Ralph Anspach, *The Problem of a Plural Economy and Its Effects On Indonesia Economy*, Ann Arbor, 1963, hal. 212.

²⁶ *Lembaran Negara*, No. 89/1959 dan Penjelasannya dalam Tambahan *Lembaran Negara* No. 1837/1959.

Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran Untuk mencapai tujuan itu nilai uang kertas pecahan Rp. 500,00 dan Rp. 1.000,00 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan masing-masing menjadi Rp. 50,00 dan Rp. 100,00.

Selain itu dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank yang dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran, terutama dalam tahun 1957 dan 1958 yang sangat meningkat jumlahnya.

Faktor-faktor yang menghambat antara lain adalah perdagangan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri, sehingga penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lain yang merupakan sumber-sumber penting untuk penerimaan negara dalam mata uang rupiah ikut merosot. Dengan demikian defisit anggaran belanja menjadi lebih besar lagi, yang hanya untuk sebagian kecil saja dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Hal-hal itu menyebabkan bertambahnya pencetakan uang kertas.

Rangkaian peraturan moneter yang dikeluarkan sesudah 25 Agustus 1959 diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959.²⁷ Isi pokoknya ialah ketentuan, bahwa bagian uang lembaran Rp. 1.000,00 dan Rp. 500,00 yang masih berlaku (dan yang kini bernilai Rp. 100,00 dan Rp. 50,00) harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum 1 Januari 1960. Untuk menampung akibat dari tindakan moneter itu, dibentuklah Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Tugas pokok panitia ini ialah menyelenggarakan tindak lanjut dari tindakan moneter itu, tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen dan jawatan yang bersangkutan.

Akibat utama dari tindakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah ialah terjadinya kesukaran likuiditas di semua

³⁷ *Lembaran Negara*, No. 696/1959 dan Penjelasannya dalam Tambahan *Lembaran Negara*, No. 1851/1959.

sektor, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, sebab itu pemerintah menginstruksikan penghematan pada instansi pemerintah serta memperketat pengawasan atas pelaksanaan anggaran belanja. Di samping itu diusahakan juga untuk menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara, baik yang sudah lama ada maupun yang baru diambil alih dari pihak Belanda. Dengan tindakan moneter 25 Agustus 1959 itu pemerintah mengharapakan akan dapat mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemandirian moneter, dengan menghilangkan *excess liquidity* dalam masyarakat. Hal itu diusahakan dengan cara menyalurkan uang dan kredit baru ke bidang usaha-usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Tetapi pada akhir tahun 1959 itu juga, jadi hanya empat bulan lebih sedikit setelah dilakukan tindakan moneter tersebut sudah ternyata bahwa pemerintah mengalami kegagalan. Peredaran uang pada akhir Juli 1959 mencapai jumlah Rp. 33.987 juta, sedangkan pada akhir Agustus 1959 Rp. 20.999 juta, jadi turun Rp. 12.988 juta atau 38,2% dalam satu bulan, tetapi pada akhir Desember 1959, jadi hanya empat bulan kemudian, jumlah uang yang beredar sudah mencapai Rp. 34.883 juta.²⁸ Setahun kemudian, yaitu pada akhir tahun 1960, volume uang yang beredar telah meningkat sampai Rp. 47.847, yaitu 37% lebih tinggi dari akhir tahun 1959 dan terus meningkat setiap tahun dengan persentase yang tinggi, sampai mencapai puncaknya pada akhir tahun 1966. Kalau pada akhir tahun 1959 jumlah yang beredar hanya Rp. 34.889 juta atau dibulatkan Rp. 35 milyar, pada akhir tahun 1966 mencapai jumlah Rp. 22.208 milyar atau 635 kali. Kenaikan yang luar biasa ini kecuali dari tindakan moneter Agustus 1959 juga akibat dari tindakan moneter kedua, yakni pengeluaran uang rupiah pada 13 Desember 1965 dengan Penetapan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1965.²⁹

²⁸ *Laporan Tahunan Bank Indonesia* tahun 1959-1960.

²⁹ *Lembaran Negara*, No. 102, 1965. Sementara itu dikatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan politik, untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang menuntut pembubaran PKI dan lain-lain yang menyangkut G. 30 S./PKI.

Akibat dari pengeluaran uang rupiah baru yang nilainya ditetapkan sebesar 1000 kali uang rupiah lama, tidak berarti harga barang-barang dalam rupiah menjadi seperseribu harga dalam rupiah lama, tetapi:

- (1) pengeluaran pemerintah dari Rp. (baru) 2.526 juta dalam 1965 meningkat menjadi Rp (baru) 29.867 juta, atau lebih kurang 12 kali, dan
- (2) peredaran uang dari Rp. (baru) 25.72 milyar dalam tahun 1965 menjadi Rp (baru) 22.208 milyar dalam tahun 1966, atau sembilan kali.

Keadaan ini menunjukkan bahwa nilai tukar antara uang rupiah baru dengan uang rupiah lama bergerak antara 1 : 10, jadi hanya dinilai oleh umum kurang-lebih 10 kali lebih tinggi dari uang rupiah lama dan bukan 1000 kali.

Bahwa segala tindakan moneter itu tidak mencapai sasarannya, adalah karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menyelenggarakan apa yang dikenal dengan proyek-proyek mercu suar seperti Ganefo dan Conefo (*Games of the New Emerging Force* dan *Conference of the New Emerging Forces*), pemerintah terpaksa harus melakukan pengeluaran-pengeluaran yang setiap tahun semakin besar, sehingga inflasi semakin meningkat dan harga-harga semakin membumbung. Tingkat kenaikan harga-harga paling tinggi terjadi dalam tahun 1965 (antara 200% – 300% dari harga tahun 1964) selaras dengan tingkat kenaikan peredaran yang paling tinggi dalam tahun 1965 karena ekspor merana, impor pun harus dibatasi karena kekuatan devisa.

Dalam pada itu sejak tahun 1961 Indonesia terus-menerus membiayai kekurangan neraca pembayarannya dari cadangan emas dan devisa. Pada akhir tahun 1965, untuk pertama kali dalam sejarah moneternya, Indonesia sudah habis membelanjakan cadangan emas dan devisanya, yang memperlihatkan saldo negatif sebesar US\$ 3 juta.³⁰ sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia.

⁴⁰ *Laporan Tahunan Bank Indonesia 1970/1971.*

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin itu bank-bank negara tidak banyak dikoordinasikan oleh suatu instansi. Presiden Soekarno menganggap perlu mengintegrasikan semua bank ke dalam suatu organisasi Bank Tunggal Milik Negara. Pembentukannya dikatakan didasarkan atas UUD RI dan doktrin doktrin revolusi Indonesia. Tugas bank tersebut adalah menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum.

Sebagai langkah pertama untuk menuju Bank Tunggal Milik Negara itu terlebih dahulu diadakan integrasi bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia. Sesudah proses pengintegrasian itu selesai, barulah dibentuk Bank Tunggal Milik Negara yang dibagi dalam beberapa unit, masing-masing unit menjalankan pekerjaannya menurut aturan aturan pendiriannya. Keadaan demikian itu berlangsung terus sampai bank tunggal itu dibubarkan pada tahun 1968 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968).

Suatu hal lagi yang menarik dari dalam Bank Tunggal Milik Negara itu ialah bahwa pengintegrasian bank-bank negara ke dalam bank tunggal diatur melalui penetapan presiden, sedangkan bank bank yang bersangkutan, sebelum diintegrasikan dibentuk atau didirikan atas dasar Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Pada tahun 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 081 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964³¹ yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai penghimpunan dan penggunaan 'dana-dana revolusi'. Dana-dana revolusi tersebut pada mulanya diperoleh dari pungutan uang *call SPP* dan dari pungutan yang dikenakan pada pemberian izin impor dengan *deferred payment* (impor yang dibayar dengan kredit ini dilakukan karena tidak cukup persediaan devisa). Impor dengan kredit ini dilakukan karena persediaan devisa sangat minus. Pada waktu itu persediaan devisa menipis sekali.

⁴¹ *Proses Perasdlan Jusuf Muda Dalam*, hal. 70.

Tetapi dalam praktek barang-barang yang diimpor dengan menggunakan *deferred payment* itu adalah barang-barang yang tidak membawa manfaat bagi rakyat banyak, bahkan sebaliknya merupakan barang-barang yang sudah dijadikan spekulasi dalam perdagangan misalnya *scooter* dan barang-barang luks lainnya. Jumlah izin impor dengan *deferred payment* khusus ini kita-kira US\$ 270 juta.³² Untuk setiap satu dollar Amerika yang diimpor dengan *deferred payment* itu orang harus menyetor antara Rp. 250 sampai Rp. 1.000,00 (uang lama) untuk Dana Revolusi di samping kadang-kadang harus juga membayar dengan valuta asing dalam jumlah tertentu. Pada umumnya yang mendapat izin *deferred payment* adalah mereka yang dekat dengan Presiden Soekarno.³³ Akibat kebijaksanaan kredit luar negeri itu hutang-hutang negara semakin menumpuk, sedangkan ekspor semakin menurun terus dan devisa makin menipis. Hutang luar negeri dibayar dengan kredit baru atau ditanggguhkan. Republik Indonesia tidak mampu membayar tagihan-tagihan dari luar negeri, hal mana mengakibatkan insolvensi internasional, sebab itu beberapa negara menghentikan impornya ke Indonesia karena hutang-hutang tidak dibayar.³⁴ Di dalam negeri berakibat mengganggu, menghambat atau mengacaukan produksi, distribusi dan perdagangan, serta menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk.

⁴² *Ibid*, hal. 73-84.

⁴³ A.H. Nasution *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*, Djakarta 1966 hal. *ibid*.

⁴⁴ *Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam*, hal. 103.

BAB V

KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN BUDAYA

A. MASA PERANG KEMERDEKAAN

1. Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai menteri pengajaran. Sampai bulan Juni 1947 terjadi pergantian menteri pengajaran berturut-turut, yaitu Dr. Mr. TSG. Mulia, Mohammad Syafe'ie, dan Mr. Suwandi.¹

Pada masa Mr. Suwandi menjabat menteri pengajaran, dibentuk suatu panitia yang bertugas meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran di alam merdeka. Panitia itu bernama Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pekerja KNIP 27 Desember 1945 atas usul pemerintah. Pembentukan panitia ini atas pertimbangan, bahwa dalam membina negara dan masyarakat baru, perlu diciptakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Melalui panitia ini pemerintah berharap akan adanya kebulatan paham

¹ Penggantian ini disebabkan oleh jatuh-bangun kabinet dalam masa Perang Kemerdekaan.

dalam masyarakat, dan juga antara pemerintah dengan masyarakat mengenai masalah pendidikan.²

Pada 12 Mei 1947 Menteri Pengajaran mensahkan Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggota 52 orang.³ Anggota panitia tersebut diambil dari semua lapisan dan aliran yang ada serta mencakup semua lapangan dan tingkatan. Panitia ini bertugas meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari usia tiga tahun hingga dewasa, atau dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi dengan segala macam coraknya. Menteri Suwandi memberikan pengarahannya sebagai pedoman kerja panitia sebagai berikut :

- (a) Panitia bertugas merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah (*schooltype*).
- (b) Menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat,
- (c) Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas termasuk fakultas, dengan disertai daftar dan keterangan-keterangan yang langsung.⁴
- (d) Hal-hal lainnya, khususnya mengenai masalah konsentrasi rencana pelajaran, perlengkapan sekolah, organisasi dan administrasi, serta pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran, termasuk soal-soal agama, budi pekerti dan budaya menjadi perhatian panitia.

Setelah bekerja beberapa bulan, dihasilkan saran-saran untuk disampaikan kepada pemerintah tentang pelbagai hal yang menyangkut bidang teoritis, praktis, teknis serta arah dan tujuan pendidikan dan pengajaran di alam merdeka dalam rangka penyusunan masyarakat baru. Pokok-pokok saran itu adalah :

- (1) Pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar,

² Prof. Sugarda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Djakarta, 1970, hal. 35.

³ *Berita Repoeblik Indonesia*, Tahun II, No. 15-6, 1 Juli 1946, hal. 145.

⁴ *Ibid.*

- (2) Khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa dapat tempat yang teratur dan seksama,
- (3) Mengenai pengajaran tinggi disarankan supaya diadakan seluas-luasnya. Tenaga pengajarnya bila perlu menggunakan tenaga bangsa asing sebagai guru besar,
- (4) Disarankan agar diusahakan berlakunya pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri,
- (5) "Paham perseorangan" yang masih dianut, harus diganti dengan "Paham susila dan rasa perikemanusiaan yang tinggi". Sebab tujuan pendidikan dan pengajaran diarahkan kepada usaha membimbing murid-murid, agar menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab.
- (6) Tentang kewajiban bersekolah. Wajib sekolah harus dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun,
- (7) Bidang-bidang pengajaran kejuruan, seperti pertanian, industri, pelayaran dan perikanan diharapkan mendapat perhatian istimewa, sedang pengajaran kesehatan dan olahraga hendaknya teratur dengan baik, sehingga akan dapat dihasilkan kecerdasan rakyat yang harmonis,
- (8) Tentang masalah pembiayaan, panitia menyarankan agar untuk sekolah dasar tidak dipungut uang sekolah, sedang untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi agar diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga soal keuangan tidak menjadi halangan bagi pembayar-pembayar yang kurang mampu.⁵

Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang dipimpin Ki Hajar Dewantara tidak semata-mata memikirkan pendidikan reguler, namun ingin pula mengembangkan suatu sistem pendidikan masyarakat. Landasannya adalah keadilan sosial. Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan yang layak di dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam tahap pertama, untuk memperkuat potensi dan kecerdasan masyarakat, satu-satunya cara yang diusulkan adalah

⁵ Sugarda, *op. cit.*, hal. 277.

pemerintah hendaknya membuka sekolah khusus untuk semua lapisan masyarakat. Metodik pengajaran yang digunakan adalah metode sekolah kerja. Tujuannya agar aktivitas yang dipusatkan kepada suatu pekerjaan atau ketrampilan tertentu dapat berkembang seluas-luasnya. Corak pendidikannya bersifat khas, karena sasarannya adalah orang-orang dewasa. Di samping itu perlu juga diadakan perguruan untuk pemimpin masyarakat, pada tiap bidang yang penting. Diusulkan juga untuk membentuk kelas masyarakat, yakni suatu kelas yang mengutamakan mata pelajaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dianjurkan agar setiap sekolah mengembangkan pandangan yang objektif, yang ditujukan kepada lingkungan hidup murid-murid dan kemudian baru dihadapkan dalam lingkungan masyarakat yang luas. Pertimbangan-pertimbangan lain mengenai pentingnya menyelenggarakan kelas masyarakat itu karena :

- (1) sistem pengajaran yang lama bercorak statis, tidak hidup tanpa dinamika,
- (2) hubungan antara sekolah (guru-guru) dengan orangtua murid renggang, dan terbatas,
- (3) pengajaran yang diberikan bersifat "diktatorial",
- (4) pengajaran kurang praktis,
- (5) murid-murid terlampaui pasif, hanya menerima saja.

Usaha-usaha yang perlu dilaksanakan adalah mempraktikkan pengajaran, menghidupkan pelajaran-pelajaran dan memperkuat otoaktivitas para murid. Klas masyarakat itu direncanakan terdiri atas empat macam yaitu : klas-klas masyarakat pertanian, perdagangan, kerajinan dan kewanitaan. Klas masyarakat itu diutamakan bagi murid-murid yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan. Lamanya pengajaran ditetapkan satu tahun. Selama setahun itu diusahakan membentuk jiwa anak agar dapat langsung bekerja di masyarakat. Dengan mengadakan klas masyarakat itu diharapkan akan timbul golongan "menengah" dan golongan "produsen" yang tangguh, Menurut catatan pada waktu itu jumlah murid tamatan Sekolah

Rakyat (Sekolah Dasar) 1944/1945 yang tidak melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan berjumlah 80.050 orang. Berdasarkan angka tersebut direncanakan akan dibuka paling sedikit 1.000 buah klas masyarakat. Untuk menyelenggarakan klas masyarakat itu perlu bekerjasama dengan Kementerian-kementerian Perdagangan dan Pekerjaan Umum.

Panitia penyelidik juga memikirkan pemberantasan buta huruf. Di Jawa pada tahun 1946 diperkirakan terdapat lima sampai enam juta penduduk yang buta huruf. Masalah ini dapat diatasi dengan cepat apabila pemerintah berhasil menyusun rencana yang terkoordinasi, dengan mengikutsertakan masyarakat. Peranan masyarakat adalah menentukan, karena biaya bagi pendidikan dan gaji bagi guru-guru pemberantasan buta huruf sangat mahal apabila hanya menjadi tanggungjawab pemerintah.

2. Realisasi Sistem Pendidikan

Setelah pemerintah menerima saran-saran dari panitia penyelidik pengajaran tersebut, disusun dasar struktur dan sistem pendidikan baru di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warganegara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Pendidikan terbagi atas empat tingkatan yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan rendah, anak-anak diajarkan dasar-dasar pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Dengan cara ini mereka dapat mulai memahami persoalan di sekitar mereka. Pengetahuan dasar tadi ditingkatkan pada pengetahuan lanjutan yang diberikan pada tingkat pendidikan menengah pertama. Pada pendidikan lanjutan atas umum, seperti juga pendidikan khusus pada klas terakhir, dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka memasuki perguruan tinggi.

Sementara pendidikan kejuruan seperti sekolah-sekolah perindustrian dimaksudkan untuk mendidik tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian khusus dan ini diselenggarakan guna memenuhi kebutuhan pemerintah.

Lama pendidikan dilihat dari tingkatannya dibagi sebagai berikut :

- (1) Sekolah Rakyat (Dasar) enam tahun;
- (2) Sekolah Lanjutan tiga hingga enam tahun;
- (3) Sekolah Industri tiga hingga enam tahun;
- (4) Perguruan Tinggi empat hingga enam tahun.⁶

Pada pendidikan dasar, anak akan mengikuti pendidikan dasar pada sekolah rakyat, dimulai pada usia enam tahun. Untuk dapat meneruskan pada pendidikan lanjutan, anak harus menyelesaikan pendidikan sekolah rakyat sebagai syaratnya.

Pendidikan sekolah lanjutan dibagi menjadi dua bagian yaitu tingkat lanjutan pertama tiga tahun dan tingkat lanjutan atas juga tiga tahun. Untuk sekolah lanjutan kejuruan dagang, di samping mata pelajaran umum para siswa diberi pelajaran mengetik, surat-menyurat, tata buku, ilmu dagang dan lain-lain. Pendidikan ini merupakan pendidikan kejuruan dagang tingkat pertama. Sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama lainnya yaitu sekolah teknik dan sekolah perindustrian.

Untuk persiapan tenaga-tenaga pengajar bagi pendidikan dasar diadakan sekolah guru yang lama pendidikannya lima tahun, dengan syarat siswa harus memiliki ijazah sekolah rakyat atau pendidikan sekolah guru dua tahun untuk mereka yang berijazah sekolah lanjutan pertama. Untuk menjadi pengajar harus berusia paling sedikit 18 tahun. Untuk tenaga pendidik bagi sekolah lanjutan pertama dibuka Kursus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama. Kursus ini merupakan pendidikan lanjutan bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan guru sekolah rendah dan telah memiliki masa kerja praktek mengajar dua tahun. Lama kursus tiga tahun, di mana diajarkan mata

⁶ 'Oeraian Tentang Kelas Masyarakat', Perwira, No. 1, 15 Juni 1945, hal. 10-8.

pelajaran (1) Matematika, (2) Ilmu Tubuh Manusia, (3) Ilmu Kimia, (4) Sastra (termasuk pelajaran bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman), (5) Ilmu Bumi dan Sejarah, (6) Tata Buku, (7) Ekonomi, (8) Zoologi dan Botani.

Semua matapelajaran tersebut diberikan selama mengikuti kursus tiga tahun. Mata pelajaran melukis, olahraga dan pekerjaan tangan (prakarya) diberikan pada tahun kedua. Ilmu jiwa praktis merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tersebut. Kursus diadakan pada petang hari, karena pada pagi hari para siswa bertugas sebagai guru. Mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut menerima diploma A, dan ini berarti mempunyai wewenang untuk mengajar di sekolah lanjutan pertama. Bagi mereka yang memiliki diploma A diberi kesempatan lagi untuk mencapai diploma B dengan persyaratan tertentu. Pemilik diploma B ini diberi wewenang untuk mengajar pada sekolah lanjutan atas. Bagi pemilik ijazah perguruan tinggi dan berhasrat mengajar, diberikan kualifikasi mengajar seperti pemilik diploma B.

Sekolah-sekolah kejuruan yang diutamakan adalah pendidikan teknik yang dibagi atas sekolah teknik pertama dan sekolah teknik menengah. Kedua sekolah ini merupakan cabang dari sekolah perindustrian. Pendidikan pada sekolah teknik pertama lamanya tiga tahun, demikian juga dengan pendidikan sekolah teknik menengah lamanya tiga tahun. Mata pelajaran bersifat praktis maupun teoritis. Pelajar pada sekolah teknik menengah diberi juga kesempatan untuk mengambil pengkhususan dengan mempelajari masalah-masalah perkapalan, tambang, kimia, dan lain-lain. Pada tingkat pendidikan tinggi, pada bulan Agustus 1945 telah berdiri Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia dengan fakultas-fakultas: Sastra, Kedokteran, Farmasi, dan Hukum yang dipimpin oleh Prof. dr. Sarwono Prawirodihardjo. Panitia menyarankan agar pendidikan tinggi dibagi menjadi lima fakultas yaitu Sastra, Ilmu Alam, Teknik, Kedokteran, dan Ekonomi. Sejak 1 Oktober 1946 urusan pengajaran pertanian dipindahkan wewenangnyanya,⁷ di mana sekolah-sekolah pertanian

⁷ Team Redaksi Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. *Sedjarah Singkat Universitas Indonesia*. Djakarta, 1967, hal. 16.

yang ada diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran. Sementara sekolah-sekolah pertanian yang diurus oleh pemerintah daerah, statusnya tetap.

Pada pendidikan dasar, guna memperluas sekolah pertama tiga tahun menjadi sekolah rakyat, mulai dilaksanakan pada awal tahun ajaran 1946 – 1947 berdasarkan keputusan Kementerian Pengajaran 3 September 1946, ditambah dengan kelas IV pada beberapa sekolah pertama. Juga diputuskan mengubah nama sekolah pertama yang mendapat tambahan kelas IV itu menjadi sekolah rakyat,⁸ sedangkan jenis sekolah lanjutan yang dikembangkan adalah Sekolah Lanjutan Pertama atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik Menengah (STM) Sekolah Guru Menengah (SGM), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Pertanian Menengah (SPM), dan Sekolah Dagang Menengah (SDM). Dalam kelompok sekolah lanjutan tingkat atas dimasukkan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Sekolah Menengah Tinggi Teknik (SMTT), Sekolah Pertanian Menengah Tinggi (SPMT). Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP). Sekolah Guru Tinggi (SGT).

Untuk keperluan ujian pada tiap-tiap sekolah lanjutan, oleh kepala pemerintah daerah keresidenan, daerah istimewa maupun kotapraja, dibentuk panitia ujian penghabisan yang terdiri atas kepala sekolah sebagai ketua, seorang guru yang ditunjuk olehnya sebagai penulis, guru-guru yang memberikan pelajaran di kelas tertinggi dan beberapa tokoh masyarakat sebagai anggota.

3. Perkembangan Perguruan Tinggi

Di dalam rangka pengembangan perguruan tinggi, di Yogyakarta diadakan Konferensi Perguruan Tinggi dari 25 April sampai 1 Mei 1947. Konferensi dihadiri oleh 220 orang peserta. Menurut kesimpulan konferensi itu, salah satu masalah yang menghalangi kemajuan perguruan tinggi ialah karena perguruan

⁸ *Berita Repoebluk Indonesia* No. 22-3, Tahun II, 1-15 Oktober 1946, hal. 266-7

tinggi tidak bernaung di bawah satu kementerian. Ada yang masuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Kemakmuran, juga ada yang menjadi milik partikelir atau swasta. Akibatnya kerjasama antarperguruan tinggi menjadi sulit. Konferensi menyarankan kepada pemerintah agar beberapa perguruan tinggi disatukan, sehingga diharapkan akan terdapat susunan pengajar dan saran yang lebih memuaskan. Beberapa pembicara dalam konferensi itu menyatakan keberatannya pada usaha untuk menyatukan semua perguruan tinggi dalam satu balai perguruan tinggi yang baik, dan yang berkumpul pada satu tempat saja. Hal itu disebabkan pada masa itu sebagian besar mahasiswa sudah bekerja, sehingga sulit untuk pindah ke lain tempat. Juga masalah pemondokan dan situasi politik yang labil merupakan faktor-faktor penghambat, namun konferensi itu telah mencetuskan dua gagasan penting tentang azas dan tujuan perguruan tinggi, yaitu: (1) mewujudkan pusat budaya dan ilmu-ilmu, dan (2) mendidik orang-orang yang memerlukan pendidikan tinggi guna keperluan masyarakat dan negara.

Konferensi mengusulkan tentang pembagian ilmu-ilmu dalam tiga bagian yaitu, pertama, ilmu-ilmu alam yang meliputi ilmu teknik, fisika, ilmu, pasti, kedokteran, biologi. Kedua, ilmu-ilmu kebudian yang meliputi sastra, filsafat, agama dan lain-lain, dan ketiga ilmu-ilmu sosial yang melingkupi hukum dan lain-lain. Atas dasar pembagian itu dapat disusun balai perguruan tinggi atau universitas. Diusulkan pula supaya diberikan gelar kepada mereka yang telah menamatkan ujian sarjana (doktoral) pada fakultas ilmu-ilmu alam dengan SA (Sarjana Ilmu Alam), sedangkan bagi dokter gelar itu akan berupa SAD (Sarjana Ilmu Alam Dokter). Untuk mereka yang telah menamatkan ujian doktoral pada ilmu-ilmu kebudian akan diberi gelar SB (Sarjana Ilmu-ilmu Kebudian), sedangkan bagi mereka yang telah menempuh ujian doktoral pada ilmu-ilmu sosial diberi gelar SS (Sarjana Ilmu-ilmu Sosial).⁹

⁹"Konferensi perguruan Tinggi". *Pembangunan*, No. 1, Tahun II, 1 April 1947, hal. 49-50.

Perguruan tinggi yang didirikan pada masa awal kemerdekaan adalah Sekolah Tinggi Teknik didirikan di Yogyakarta pada 17 Februari 1946. Pada 3 Maret 1946 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gajah Mada diresmikan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang terdiri atas Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastaan bertempat di Pagelaran, Yogyakarta.¹⁰ Pada 25 September 1946 dibuka Fakultas Hukum dan Kesusastaan Darurat di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Kota Malang. Perguruan Tinggi Kedokteran bagian II sebelumnya telah dibuka pada 4 Maret 1946 di Solo dan bagian I pada 5 Maret 1946 di Klaten. Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan dibuka oleh Menteri Kemakmuran Republik Indonesia di Bogor pada bulan Nopember 1946. Dengan meletusnya Aksi Militer I Belanda pada bulan Juli 1947, perguruan tinggi tersebut dipindahkan ke Klaten; demikian pula halnya dengan perguruan tinggi di Malang, sebagian mengungsi ke Klaten dan Yogyakarta.¹¹

Sementara itu pemerintah pendudukan Belanda dalam tahun 1947 telah mendirikan *Universiteit van Indonesie* sebagai gabungan dari perguruan tinggi yang berdiri yaitu fakultas-fakultas Hukum, Kedokteran, Ekonomi dan Sastra. Di Bogor, Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan, di Bandung Fakultas Teknik, kemudian diperluas lagi dengan perguruan-perguruan tinggi di Surabaya (Kedokteran Gigi) dan di Makasar (Ekonomi). Di pihak Republik diresmikan berdirinya Universitas Gajah Mada (Negeri) pada 19 Desember 1949 berkedudukan di Yogyakarta, yang terdiri dari enam fakultas.¹²

4. Sastra dan Budaya

Sejak masa Pergerakan Nasional, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan karena beberapa faktor, yaitu per-

¹⁰Istilah "fakulteit", "universiteit" kemudian diubah menjadi fakultet dan universitas, dan kemudian lagi menjadi fakultas dan universitas.

¹¹Berita Repoebliek, *Op. cit.*

¹²Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1965, hal. 9-12

tama, bangkitnya semangat kebangsaan Indonesia yang telah mengatasi kedaerahan dan kesukuan. Faktor kedua, telah terbitnya kitab *Logat Melayu* pada tahun 1901 karangan van Ophuyzen, yang digunakan di sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Melayu. Faktor ketiga, didirikannya *Commissie voor de Volkslectuur* pada tahun 1908, yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Hal ini mendorong perkembangan di bidang bahasa dan sastra, terutama dengan lahirnya kelompok "Pujangga Baru".

Faktor-faktor di atas mendasari fungsi bahasa tersebut sebagai bahasa baku yang memperkuat sikap masyarakat Indonesia terhadapnya. Adanya larangan menggunakan bahasa Belanda di Zaman Jepang memberikan peluang bagi pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang-bidang administrasi, pendidikan, komunikasi-massa, penerjemahan buku-buku pelajaran ke dalam bahasa Indonesia, serta pengembangan yang pesat di bidang sastra Indonesia. Timbulnya usaha-usaha kodifikasi tata bahasa, penyelenggaraan kata-kata baru dan peristilahan telah memberikan kerangka petunjuk kepada para penutur, sehingga kesadaran akan norma pun akhirnya bertambah besar.

Sejak awal perang kemerdekaan, bahasa Indonesia sudah memenuhi fungsi dan menerima sikap yang diperlukan sebagai bahasa baku. Contohnya teks Proklamasi ditulis dalam bahasa Indonesia.¹³ Pemerintah memegang peranan penting dalam usaha-usaha memajukan bahasa Indonesia. Sejak tahun 1947 usaha modifikasi diteruskan oleh Menteri Pengajaran Mr. R. Suwandi.¹⁴ Menteri Pengajaran pada waktu itu bermaksud menyederhanakan ejaan van Ophuyzen. Oleh menteri dibentuk Suatu Komisi Bahasa pada 18 Juni 1947. Komisi ini diberi tugas untuk :

- (1) Menetapkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia,
- (2) Menetapkan tatabahasa Indonesia,

¹³ Bh. Hoed, "Pembukaan Bahasa Indonesia", *Kompas*, 29 Juni 1972, hal. III, IX.

¹⁴ Lembaga Bahasa Nasional, *Bahasa dan Kesusasteraan*, Seri khusus, No. 9/1973, hal. 76.

- (3) Menyusun kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada dalam bahasa Indonesia untuk keperluan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.

Hasil panitia ini ialah lahirnya Ejaan Republik, yang biasa disebut "Ejaan Suwandi",¹⁵ serta ditetapkan 5.000 istilah baru.¹⁶

Kebutuhan akan pembakuan bahasa Indonesia didorong oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beraneka bahasa (*pluri-lingual*). Dalam usaha pembakuan bahasa Indonesia ini ternyata bahwa faktor bahasa asing dan bahasa daerah harus diperhitungkan. Sementara itu dirasakan pula bagaimana kuatnya kedudukan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari yang jumlahnya lebih-kurang 200 buah.

Dalam menghadapi hal tersebut, pembakuan bahasa merupakan salah satu segi dari politik bahasa. Politik bahasa adalah kebijaksanaan di dalam menentukan pilihan terhadap satu atau lebih bahasa dan bagaimana menggunakan serta mengembangkannya demi kepentingan masyarakat atau negara. Di samping itu, secara terpisah para ahli bahasa Indonesia, Perancis, dan Jerman telah mengadakan lokakarya mengenai masalah-masalah yang timbul. Selain itu diadakan juga pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah bahasa daerah, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda.

Pada zaman perang kemerdekaan, sastra Indonesia makin berkembang. Para sastrawan mencari bentuk yang berasal dari pelbagai budaya. Studi sastra dunia lebih dipergiat, sehingga para sastrawan dunia mulai mempengaruhi para pengarang Indonesia. Berlainan dengan sastrawan generasi sebelumnya yang orientasinya terbagi kepada sastra Belanda dan India, sastrawan sejak kemerdekaan orientasinya meliputi seluruh dunia. Dengan demikian horison mereka menjadi lebih luas. Akibat dari orientasi yang luas itu ialah adanya heterogenitas aliran di dalam sastra Indonesia.

¹⁵ Berdasarkan keputusan Menteri PP & K, No. 264/Bh. 4, 11 Maret 1947, diakui sebagai ejaan baru.

¹⁶ S. Takdir Alisjahbana, *Sejarah Bahasa Indonesia*. Djakarta 1956, hal 19

Pertumbuhan seni lukis yang telah mulai pada waktu masa pendudukan Jepang mengalami perkembangan yang luar biasa pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1946 atas prakarsa Sudjojono, Trisno Sumardjo, Sunindyo, dan Suradji didirikan organisasi Seniman Indonesia Muda (SIM), Pelukis-pelukis lainnya yang tergabung dalam badan ini, atau yang ada hubungannya ialah Sundoro, Zaini, Nasjah, Moh. Hadi, A. Wakidjan, Ismono, Sudiono, Sudibjo, Surono, Sjahri, Nahar, dan lain-lain. Pada tahun 1947 atas prakarsa pelukis-pelukis Affandi dan Hendra di Yogyakarta didirikan perkumpulan Pelukis Rakyat sebagai pecahan dari SIM.¹⁷ Anggota-anggota barunya yang dididik oleh himpunan itu antara lain Rachmat, Batara Lubis, Tarmizi, Amruz. Secara horizontal, Pelukis Rakyat ini mengalami perkembangan paling banyak, dengan dibantu tokoh-tokoh pemerintah. Para anggotanya tak hanya berkesempatan menjual banyak lukisan, melainkan lapangan mereka juga diperluas dengan seni patung.

Di Bandung berdiri Djiwa Mukti pada tahun 1948 dengan tokoh-tokohnya Barli Cs, St. Lucas Gilde (Sularko Cs), dan golongan-golongan lain. Kecuali itu terbentuk perkumpulan Sanggar Seniman oleh Kartono Yudhokusumo pada tahun 1952 dan Cipta Pancaran Rasa oleh ketuanya Abedy. Pihak pemerintah mendirikan pula Akademi Senirupa di Bandung, dipimpin oleh S. Sumardja. Di Surabaya lahir Prabangkara dipimpin oleh Karyono Js., di Malang berdiri Angkatan Pelukis Muda yang diketuai Widagdo. Di Medan lahir Angkatan Senirupa Indonesia (ASRI) pada tahun 1945 dengan tokoh-tokohnya Ismail Daulay, Tino Sidin, dan lain-lain. Di Bukittinggi berdiri organisasi Seniman Muda Indonesia (SEMI) dengan ketuanya Zetka, dan anggota-anggotanya antara lain A.A. Navis. Di Sulawesi beberapa pelukis bergabung dalam Wong Ken Weru. Di Ubud (Bali) terbentuk gabungan pelukis yang beranggotakan Anak Agung Gede Sobrat, Ida Bagus Made, dan lain-lain.

¹⁷ "Pertentangan Seni Lukis di Indonesia", *Madjalah Kebudayaan Indonesia*. Tahun I, 1949, hal. 593-8.

Di samping melukis dan mematung, para pelukis juga giat di lapangan-lapangan lain yang sejenis. Banyak di antara mereka membuat poster, ilustrasi dan gambar kulit buku. Di Jakarta Zaini dan kawan-kawan membuat dekor-dekor sandiwara, O. Effendi membuat rancang bangun (*design-design*) seni kerajinan. Di Yogyakarta Surono menghasilkan cukilan kayu paling baik, demikian pula Widayat dan Zakariah. Kecuali itu para pelukis mulai membuat percobaan-percobaan lukisan batik.¹⁸

Selama masa pendudukan Jepang diciptakan lagu-lagu dengan langgam baru yang berlainan dengan lagu-lagu keroncong asli. Timbulnya langgam dan corak baru pada lagu-lagu itu tidak terjadi pada masa revolusi, melainkan telah ada sebelumnya. Hanya saja jiwa revolusi telah mendorong terjadinya perkembangan pesat dalam pengubahan lagu-lagu. Jiwa revolusi menimbulkan kebebasan serta menghilangkan rasa rendah dan sebaliknya menimbulkan keberanian. Ritme atau irama dalam lagu-lagu baru pada masa revolusi 1945–1949 dapat dikatakan lain dari pada masa sebelumnya. Tentang corak dan tingkatan itu ada juga pencipta-pencipta lagu yang menciptakan lagu tanpa memakai tingkatan laras internasional, sehingga mewujudkan tingkatan laras pelog. Menurut para pengamat dan kritikus isi dari lagu-lagu yang diterjemahkan dengan rangkaian seni laras telah berbeda dengan isi lagu keroncong yang menurut para kritikus pada waktu itu harmoninya mengalami kemajuan. Keroncong asli disusun dengan harmoni sederhana. Dilihat dari segi pengetahuannya, para pengamat waktu itu berpendapat bahwa meskipun sebagian seniman kita tidak mendapat pendidikan khusus, namun hasil kreasinya baik dan mereka memiliki pengetahuan luas.¹⁹

Penggubah lagu-lagu selama masa revolusi selain meliputi penulis-penulis musik Indonesia, juga meliputi penulis-penulis lagu keroncong. Lagu-lagu langgam yang sudah dimulai pada

¹⁸Trisno Sumardjo, "Kedudukan Seni Rupa Kita", *Almanak Seni 1957*, hal. 132–5.

¹⁹Dr. R.M.T. Padmonagoro, "Seni Rupa Indonesia dalam Revolusi". *Siaran dan Masyarakat Indonesia*, 1950, hal. 37.

waktu yang lampau sampai ke masa kemerdekaan mendapat lahan yang subur setelah pengakuan kedaulatan. Kesempatan dan pertumbuhan ini mencapai "puncaknya" pada prestasi Sjaiful Bahri dan Iskandar dari RRI Jakarta. Kemajuan-kemajuan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh penulis-penulis musik Belanda seperti Jos Cleber dan Tom Diessevelt. Mereka ini membawakan aransemen-aransemen lagu-lagu keroncong lama maupun langgam. Jos Cleber mempunyai orkes besar yang ketika itu bernama Orkes Cosmopolitan.

Sesudah kepergian penulis-penulis Belanda itu, peranan berpindah kepada pemuka-pemuka keroncong di RRI Jakarta. Sjaiful Bahri menjabat pimpinan Orkes Studio Djakarta (OSD) dengan anggota lebih dari 50 orang mencontoh orkes Jos Cleber. Mulailah Sjaiful Bahri, Iskandar, dan Ismail Marzuki menulis aransemen-aransemen untuk OSD juga bagi lagu-lagu keroncong. Kemajuan dalam arti yang baik berbeda dengan Jos Cleber yang mampu bekerja dengan orkes besar, maka tak demikian dengan Sjaiful dan kawan-kawan. Kemajuan mereka tidak seperti yang diharapkan karena kemampuan teknis untuk mencipta, mengaransemen, dan memimpin orkes besar, rata-rata belum dipunyai oleh para musisi kita.

Sementara itu lagu-lagu dalam tujuan seninya berjalan dengan subur pula. Lagu-lagu ini baru datang belakangan dengan munculnya lagu-lagu corak Cornel Simandjuntak.²⁰ Amir Pasa-ribu, dan RAJ. Sudjasmin. Cornel Simandjuntak sebagai produk revolusi banyak menghasilkan lagu-lagu perjuangan, tetapi ada juga lagu-lagunya yang bersifat liris. Lagu-lagu ini merupakan langkah pertama ke lagu-lagu seni, yang diusahakan sendiri oleh penciptanya yang banyak melihat pada pencipta lagu di Eropa seperti Schubert. Selama tahun 1943 – 1945, merupakan tahun-tahun produktif bagi Cornel Simandjuntak meskipun pada waktu itu sebagian ciptaannya berbentuk lagu-lagu mars. Di antara lagu-lagu ciptaannya terdapat "Teguh Kukuh Berlapis Baja" (Asia Berpadu), "Sorak-sorak Bergembira", "Maju Tak

²⁰ "Gema Suara", *Madjalah Bahasa Indonesia*, 6 Juni 1950, hal. 354–6.

Gentar", "Padamu Pahlawan", "Mars Majapahit", dan "Mars Pembela Tanah Air". Lagu di atas diciptakan pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang dan menjelang kemerdekaan.²¹

Dalam lapangan musik vokal dengan bentuk-bentuk yang besar, belum ada yang dapat dikemukakan. Hal ini berlainan dengan bentuk instrumental yang mengingat waktu yang singkat dan keadaan yang belum menguntungkan sudah dapat dibanggakan. Dalam hal ini komponis Amir Pasaribu yang mengambil tempat yang terpenting. Dari tangannya telah lahir beberapa buah sonata untuk piano, variasi-variasi, ciptaan untuk biola, dan beberapa buah musik kamar.²²

Tentang perkembangan seni drama, usaha-usaha mempertinggi derajat serta mutu kesandiwaraan pada umumnya berpusat pada Serikat Artis Sandiwar. Usaha-usaha badan ini menemui jalan buntu disebabkan oleh kegelisahan masyarakat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah politik dan ekonomi. Seringkali kepentingan-kepentingan seni terdesak oleh kepentingan-kepentingan politik, hingga pada masa perang kemerdekaan timbul anggapan bahwa seni itu adalah suatu kemewahan dalam zaman perjuangan, sedangkan mereka yang harus berjuang melawan segala prasangka ini, masih tetap sejak zaman pendudukan Jepang tidak mendapat kesempatan istirahat, hingga dapatlah dimengerti, bahwa daya dorong yang ada pada mereka pun sudah sampai pada batasnya.

Meskipun dalam waktu tiga tahun setelah kemerdekaan tokoh-tokoh seni di berbagai tempat di Jawa berusaha menggiatkan perkembangan seni nasional, tetapi mengingat keadaan dan kesempatan, mereka belum mendapat sambutan yang layak terutama pada seni sandiwar yang pada umumnya memang menjadi cermin masyarakat yang tidak membohong. Selanjutnya setelah berlangsungnya Kongres Kebudayaan pada

²¹ Frans F. Harahap, "In Memoriam Cornel Simandjuntak", *Sinar Harapan*, 13 September 1971, hal. VI.

²² J. A. Dunga, "Studi Pendahuluan Perkembangan Musik Indonesia", *Alam-nak Seni 1957*.

bulan Juni 1948 di Magelang, mulai terlihat timbulnya suatu politik kebudayaan yang hampir pasti.

Ketika itu didirikan Institut Cinedrama yang mendapat sokongan penuh dari pemerintah, tetapi umurnya tidak panjang, karena meletusnya Aksi Militer II Belanda telah mengakhiri terlaksananya suatu rencana yang bagus dan indah itu.²³

Di Yogyakarta terdapat dua perusahaan film yaitu Cinedrama dan Yayasan Hiburan Mataram (YHM). Almarhum Dr. Huyung pendiri YHM telah membuat film "Antara Bumi dan Langit", dan kemudian diubah menjadi "Frieda". Dalam film itu diperkenalkan pemain baru Grace, seorang gadis Indo. Grace kemudian mendapat pasangan bermain yaitu Nana Mayo. Mereka memegang peranan utama dalam film "Olahraga". Sesudah itu didirikan Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) di bawah pimpinan Usmar Ismail dengan rekan-rekannya Surjosumanto, Djajakusuma, dan lain-lain. Sebelum itu telah muncul Persari (Persatuan Artis Republik Indonesia) yang berasal dari rombongan sandiwara Pancawarna di Zaman Jepang di bawah Pimpinan Djamaluddin Malik.

Dalam perkembangan seni bangunan dapat dikemukakan bahwa letak bangunan di kota-kota pada umumnya tak beraturan dan tak selaras dengan lingkungan. Sekolah-sekolah kantor-kantor besar, toko, gedung tua, pondok rakyat, be-selang-seling sepanjang satu jalan atau dalam satu bagian kota yang seharusnya mempunyai ketentuan pasti. Baik corak, isi maupun rupa tak berketentuan.

Sementara di kampung-kampung atau di desa-desa yang jauh letaknya dari kota, kebanyakan bangunan yang ditemui masih berpegang pada corak lama serta didirikan dengan bahan-bahan yang tak dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh lemahnya ekonomi rakyat. Di antara bangunan-bangunan itu ada yang mengikuti arus bangunan kota, ada juga yang meniru bentuk luarnya saja. Selanjutnya ada bangunan di beberapa

²³Usmar Ismail, "Sandiwara dan Masyarakat", *Madjalah Indonesia*, Th. 1, Djakarta, 1949, hal. 144-8.

daerah yang seolah-olah tak merasa bahwa keadaan sudah meminta patokan-patokan baru, seperti di kepulauan Indonesia yang tak begitu mengenal budaya Barat. Masyarakat ini masih mempunyai keindahan bentuk dan isi yang asli.²⁴

Kehidupan pers pada awal kemerdekaan berkembang dengan semangat revolusi. Surat kabar-surat kabar yang terbit di daerah Republik aktif ikut serta menghidupkan semangat perjuangan. Dengan terjadinya blokade Belanda, hubungan dengan dunia luar menjadi sulit. Hanya dengan komunikasi radio, berita-berita tentang perjuangan dapat disebarluaskan, baik bagi pers luar negeri maupun dalam negeri. Di daerah-daerah pendudukan Belanda, surat kabar-surat kabar berbahasa Indonesia pada umumnya menunjukkan sikap anti-Belanda. Para penerbit surat kabar di daerah pendudukan Belanda menghadapi saingan dengan surat kabar yang disponsori oleh Dinas Penerangan Belanda, tetapi selama masa tersebut jumlah pembaca surat kabar berbahasa Belanda menurun. Hal ini memberikan peluang bagi pemasaran surat kabar Indonesia.

Surat kabar pada waktu itu rata-rata empat halaman. Pemasukan iklan sangat kecil jumlahnya. Pada masa itu perusahaan-perusahaan penerbit surat kabar tidak menitikberatkan usahanya pada mencari keuntungan. Harga surat kabar relatif murah. Dengan mulai adanya seleksi dari masyarakat terhadap surat kabar, para penerbit beserta para wartawan berusaha meningkatkan mutu. Dalam kompetisi ini kualitas pemberitaan memegang peranan penting. Akibat kompetisi ini dapat lahir suatu surat kabar yang baru lagi. Di daerah Republik beberapa golongan politik mulai menggunakan surat kabar untuk kepentingan perjuangan golongannya. Berita-berita yang ada hubungannya dengan perjuangan seperti perundingan-perundingan dengan Belanda, keinginan-keinginan pemerintah serta hubungan internasional Indonesia digambarkan lebih tajam.

Ketika Belanda melancarkan aksi militer kedua, beberapa minggu setelah penumpasan Pemberontakan Madiun, beberapa

²⁴O. Effendi, "Seni Bangunan di Indonesia", *Gema Suasana*, No. 2 Pebruari 1948, hal 99-101.

surat kabar di daerah pendudukan Belanda menghilang dari peredaran, dan sebagian lagi ada yang bekerjasama dengan Belanda. Jumlah surat kabar di Indonesia selama berlangsungnya Aksi Militer II Belanda, berdasarkan UNESCO sampai bulan April 1949, adalah 81 surat kabar dengan oplah 293.000 eksemplar sehari. Keadaan persuratkabaran sampai akhir Desember 1948 bertambah baik. Terdapat 124 surat kabar dengan oplah 405.000 eksemplar.²⁵

Sarana komunikasi lainnya yang vital di negara kita adalah radio. Sejak Proklamasi, penyiaran radio dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan sendirinya corak siaran radio dapat disesuaikan dengan jiwa revolusi pada waktu itu. Pada masa awal Kemerdekaan, radio menjadi saluran penerangan yang terpenting. Semua radio umum hampir di seluruh pelosok tanah air selalu dikerumuni oleh rakyat yang ingin mengetahui kejadian-kejadian di Indonesia. Corak siaran pada masa itu banyak menggunakan siaran-siaran "kata-kata berat" mengenai politik dan agitasi untuk membakar semangat rakyat. Usaha lain yang dilakukan ialah mematahkan siaran propaganda dari pihak yang memusuhi Republik Indonesia.

Dilihat dari perkembangannya, setelah Jepang menyerah, tenaga-tenaga Indonesia berhasil merebut *Hosokyoku*, (kantor-radio) yang kemudian dilanjutkan siarannya dengan sebutan Radio Republik Indonesia, dimulai pada 11 September 1945.²⁶ Stasiun radio RRI yang pertama di Jawa ada delapan buah stasiun bekas *Hosokyoku*, yakni di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.

Pada masa perang kemerdekaan, di samping RRI dikenal juga Radio Pemberontakan Timur yaitu di Kota Surabaya, Malang, dan Solo. Terdapat pula radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer di Yogyakarta, Radio Perjuangan di Semarang, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta.²⁷

²⁵ UNESCO, *World Communication* (1951), hal. 86.

²⁶ Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai hari Radio.

²⁷ Kementerian Penerangan, Djawatan Radio Republik Indonesia, *Sedjarah Radio di Indonesia*, Jakarta, 1955, hal 277.

Pada masa Perang Kemerdekaan pembangunan RRI dalam arti yang sebenarnya belum dapat dilakukan. Meskipun demikian stasiun-stasiun RRI masih tetap mempertahankan diri, baik di Sumatera maupun di Jawa. Sejak tahun 1946 Yogyakarta menjadi stasiun pusat menggantikan studio Jakarta. Dengan adanya serbuan Belanda ke ibukota Yogyakarta, penyiaran berita dilakukan secara rahasia dan berpindah-pindah dari kampung ke kampung. Pada waktu itu RRI memiliki 12 stasion di Jawa, antara lain di Purwakarta, Magelang, Wonosobo (dari Purwokerto), Mojokerto (dari Surabaya) kemudian pindah ke Kediri, Blitar (dari Malang), dan Tawangmangu.

Sejak Aksi Militer II Belanda lenyaplah semua studio tersebut di atas, tetapi siaran-siaran darurat tetap dilaksanakan baik dari pegunungan-pegunungan di Sumatera maupun Jawa. Stasiun-stasiun di daerah pegunungan pada masa gerilya itu antara lain di Gunung Wilis (Jawa Timur), Balong-Wonosari-Lawu (Jawa Tengah), di Jawa Barat, dan di Bukit Barisan (Sumatera).

Setelah ada gencatan senjata, RRI bekerja agak tenang. Selanjutnya mulai tahun 1950 diadakan rencana lima tahun dengan mengusahakan penambahan-penambahan studio dan penyempurnaan alat-alat pemancar. Misalnya perubahan studio-studio dirasakan amat perlu dalam waktu singkat, dan di beberapa tempat harus dilakukan secepat-cepatnya. Jakarta sebagai pusat jawatan harus menggunakan pemancar-pemancar yang berkekuatan 100 kw sampai paling sedikit 1 mw.²⁸

B. MASA DEMOKRASI LIBERAL

1. Sistem Pendidikan

Setelah urusan pendidikan dialihkan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS pada tahun 1950, oleh menteri pendidikan pada waktu itu, yaitu dr. Abu Hanifah, disusun suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada speciali-

²⁸ *Siaran Kemernterian Penerangan I*, 6, 12 September 1958, hal. 8-12.

sasi. Menurut Menteri Abu Hanifah bangsa Indonesia amat terbelakang dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Pengetahuan umum dianggapnya penting, tetapi pengetahuan teknik mendapat prioritas utama karena dianggap sebagai kunci kemajuan. Dalam garis besar konsepsi itu mencakup hal-hal sebagai berikut :

Pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan tiga : satu. Bagi tiap-tiap tiga sekolah umum mulai dari bawah ke atas diadakan satu sekolah teknik. Yang diterima di sekolah teknik ialah anak-anak tamatan sekolah dasar. Sebagai lanjutannya ialah sekolah teknik menengah (tiga tahun) dan sekolah teknik atas, juga tiga tahun. Sekolah teknik harus mempunyai rencana pelajaran yang lengkap, sehingga bila telah tamat dari sekolah teknik menengah atau sekolah teknik atas, seorang murid sanggup mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya opzichter seperti pada masa penjajahan Belanda.²⁹

Di samping itu, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka di beberapa kota dibentuk Akademi Palayaran, Akademi Oceanografi, dan Akademi Research Laut. Kota-kota yang dimaksudkan itu adalah Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang. Tenaga-tenaga pengajarnya diminta dari luar negeri, yaitu dari Inggris, Amerika, dan Perancis. Di samping itu dikirimkan ke luar negeri mahasiswa-mahasiswa yang cerdas yang termasuk mahasiswa teladan tahun-tahun pertama di Indonesia.

Dalam pada itu Sekolah Tinggi Pertanian mendapat tempat yang pantas, karena sifat masyarakat Indonesia yang agraris. Direncanakan supaya di dekat Payakumbuh, Sumatera Tengah, diadakah filial dari Sekolah Tinggi Pertanian Bogor yang sama derajadnya.

Oleh Menteri Abu Hanafiah juga direncanakan "kota universiter" seperti cite *Universitirie* di Paris untuk kota-kota

²⁹Prof. dr. Abu Hanifah, "Pembangunan Negara dan Pendidikan Rakyat", *Kompas*, 21 Nopember 1970, hal. VI, IX.

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bukittinggi. Pembiayaan akan diambilkan dari anggaran belanja negara. di mana pendidikan mendapat bagian 15%. Di samping itu juga diusulkan kepada pemerintah tambahan 1% pajak pada pembayaran pajak di seluruh Indonesia untuk perbaikan kesejahteraan guru. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Eksakta lainnya juga mendapat perhatian. Direncanakan pula untuk mendirikan semacam *akademie voor wetenschappen*.³⁰

Sistem pendidikan diadakan dengan titik berat desentralisasi. Ini berarti bahwa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi urusan daerah (provinsi) dengan supervisi pusat, terutama dalam perencanaan pelajaran. Sekolah menengah atas menjadi kewajiban pusat, baik mengenai masalah keuangan maupun mengenai mata pelajaran. Untuk sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab provinsi atau daerah dapat dimintakan subsidi sebesar 40% dari anggaran belanja. Selebihnya menjadi tanggungan daerah. Guru-guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pusat. Tiap-tiap provinsi atau daerah harus mempunyai satu universitas negeri, di mana para lektor dan guru besarnya harus mempunyai kualifikasi negara. Selanjutnya juga dihidupkan kompetisi sehat untuk memiliki perguruan-perguruan yang tinggi mutu. Sebagai konsekuensi tentunya daerah-daerah diberi bagian lebih banyak daripada jumlah penghasilannya setahun, termasuk devisa. Daerah-daerah yang miskin dapat dipertimbangkan untuk mendapat lebih banyak bantuan dibandingkan dengan daerah-daerah yang kaya.³¹

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1950, pada 2 Februari 1950 Ir. Surachman diangkat menjadi presiden (rektor) Universitas Indonesia, yaitu gabungan dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta dengan *Universiteit van Indonesie* buatan Belanda, termasuk semua cabang-cabangnya seperti fakultas-fakultas yang ada

³⁰ Hanifah, *Ibid*.

³¹ *Ibid*

di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makasar. Selanjutnya selama periode Demokrasi Liberal ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 yang mulai berlaku 10 November 1954, didirikan sebuah universitas negara lain di Jawa yaitu Universitas Airlangga di Surabaya, yang terdiri atas fakultas-fakultas : (1) Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya (berasal dari Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Surabaya), (2) Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya (berasal dari Cabang Bagian Hukum, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada), (3) Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang, dan (4) Fakultas Ekonomi di Surabaya.

Perluasan Universitas-universitas di luar Jawa direalisasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal 1 September 1956 yang menetapkan berdirinya Universitas Hasanuddin di Makasar, serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 yang menetapkan berdirinya Universitas Andalas di Bukittinggi. Kemudian berturut-turut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1957 terhitung mulai 1 September 1957 di Bandung didirikan Universitas Pajajaran, serta dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1957 tanggal 1 September 1957 didirikan Universitas Sumatera Utara di Medan.³²

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak tahun 1959 di bawah Menteri PP dan K Prof. Prijono, disusun suatu rencana konsepsi pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama. Konsepsi yang terdiri atas tujuh ketentuan itu menurut menteri dalam rangka membuktikan kepada masyarakat bahwa lapangan pendidikan dapat membawa jiwa baru, serta dapat pula menyelaraskan diri dengan program Kabinet Kerja. Adapun yang dimaksudkan dengan konsepsi Sapta Usaha Tama itu meliputi usaha-usaha (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen PP dan K, (2) meningkatkan seni dan olahraga, (3) mengharuskan "usaha halaman", (4) mengharuskan penabungan,

³²Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, Djakarta, 1963, hal. 45-66.

(5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6) mengadakan klas masyarakat, dan (7) membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas.³³

Mengenai masalah penyelenggaraan sekolah-sekolah asing, pada tahun 1957 pemerintah telah mengambil tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Departemen Pengajaran dan pihak penguasa perang pusat. Yang dimaksud dengan asing ialah sekolah partikulier yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan pelajaran-pelajaran asing. Sejak Indonesia merdeka, jumlah sekolah asing bukan makin berkurang, melainkan makin bertambah. Pada masa perjuangan ada gejala-gejala bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak saja berusaha menahan anak-anak Indonesia yang terdapat di dalamnya, bahkan menjalankan usaha untuk menarik lebih banyak anak-anak kita itu ke dalam lingkungannya. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen PP dan K, dapatlah dikumpulkan angka-angka statistik mengenai sekolah-sekolah asing tersebut, sebagai berikut :

Tahun	Jumlah sekolah asing	Jumlah guru sekolah asing	Jumlah murid sekolah asing
1939/'40	26	73	3067
1952/'53	1271	8349	254730
1954/'56	1861	13441	415565

Berdasarkan angka-angka yang tercantum di atas maka sebagai pegangan dapat dikatakan bahwa pada pertengahan tahun 1957 di Indonesia terdapat lebih-kurang 2.000 sekolah asing dengan lebih-kurang 14.000 guru dan lebih-kurang 425.000 murid. Dari angka-angka itu, terdapat 60%--70% atau lebih-kurang 425.000 murid sekolah-sekolah asing itu

³³ Instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, No. 1, 17 Agustus 1959

adalah anak-anak Indonesia yang dengan sendirinya menerima pendidikan asing, dengan demikian mereka disiapkan untuk menjadi orang-orang Indonesia yang bersikap asing.

Pada pertengahan tahun 1957 tercatat sekolah asing lain lebih-kurang 1.800 dan 125 sekolah Belanda yang dinilai mempunyai aspek khusus. Pertama, karena bangsa Belanda belum bersikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia. Kedua, karena timbulnya sengketa politik antara Kuo Min Tang dan Kung Cang Tang di Negeri Cina yang telah meluas pula ke masyarakat Cina penduduk Indonesia. Berdasarkan pertimbangan pemerintah, ketegangan-ketegangan itu dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer tanggal 6 November 1957 No. 989/PMT Tahun 1957 tentang pengawasan pengajaran asing tersebut. Pengawasan itu berlangsung sampai 17 April 1958.^{3 4}

2. Perkembangan Sastra dan Budaya

Gagasan untuk menyempurnakan ejaan baru Indonesia timbul lagi pada waktu diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Kongres itu antara lain mengambil keputusan, supaya penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan yang diatur oleh pemerintah. Badan tersebut bertugas untuk menyusun suatu ejaan praktis bagi bahasa Indonesia. Sebagai realisasi keputusan Kongres Bahasa Indonesia tersebut, pemerintah membentuk Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia. Panitia tersebut mula-mula dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono, kemudian oleh E. Katoppo. Panitia pembahasan menghasilkan Konsep Pembaharuan. Hal ini merupakan satu langkah maju dalam aturan bahasa nasional kita.

Dalam pada itu pada bulan September 1956 diadakan Kongres Bahasa dan Perpustakaan Melayu yang ketiga di Johor, Malaysia. Dalam kongres tersebut timbul hasrat untuk menyatu-

³⁴Departemen Pengajaran dan Kebudayaan, Penguasa Perang Pusat, *Pengawasan Pengajaran Asing*, hal. 15, 28-9.

kan ejaan bahasa Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia. Hasil kongres itu dipergunakan juga oleh Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia sebagai bahan pertimbangan.

Pada 17 April 1957 diadakan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu. Pemerintah RI diwakili Perdana Menteri Ir. Djuanda dan Persekutuan Tanah Melayu oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Al-Haj.

Sebagai tindakan selanjutnya, pada 4 sampai 7 Desember 1959 di Jakarta diadakan sidang bersama antara Panitia Pelaksana Kerjasama Bahasa Melayu – Bahasa Indonesia, yang diketuai oleh Prof. Dr. Slamet Muljana dengan Jawatan Kuasa Ejaan Resmi Baharu Persekutuan Tanah Melayu, yang dipimpin oleh Syech Nasir bin Ismail. Sidang bersama itu menghasilkan Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu–Indonesia (Melindo), yang pada tahun 1961 diterbitkan oleh Departemen PP dan K Republik Indonesia. Dalam pengumuman Bersama tersebut dinyatakan, bahwa kedua pemerintah akan meresmikan Ejaan Melindo selambat-lambatnya pada bulan Januari 1962, tetapi keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan, karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya. Konsep lain pernah diajukan oleh Samsuri dalam majalah *Medan Ilmu Pengetahuan* Th. I, No. 4, 1950, yang selanjutnya disebut Konsep Samsuri. Konsep lainnya yaitu yang dihasilkan oleh Panitia Ejaan, Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan pada bulan Agustus 1966, yang selanjutnya disebut Konsep Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan (LBK). Keempat konsep itu mencoba mengadakan inventarisasi fonem.

Kesamaan fonem ditemukan dari keempat konsepsi tersebut, yaitu: p, b, t, d, c, j, k, g, m, n, s, h, w, y, r, l, i, e, a, dan u. Konsep pembaharuan memasukkan f sebagai fonem tambahan, berarti membuat ketentuan lain. Konsep Melindo menyebut f dalam rangka ujud tanda fonem konsumen, sedangkan konsep Samsuri dalam denah konsensusnya menyebutkan f, yang kemudian disusul oleh beberapa contoh pemikirannya, dan diperjelas dalam hubungannya dengan y. Tetapi kadang-kadang

tanda fonem tersebut diapit oleh tanda kurung, yang menandakan bahwa pengarangnya berpendirian bahwa *f* tidak termasuk dalam sistem fonem Indonesia. Konsep LBK menempatkan fonem *f* ke dalam tata konsonan Indonesia.

Mengenai *v* dari keempat konsep hanya konsep pembaharuan yang menyebut *v* sebagai fonem tambahan media *v* pada abjad Indonesia. Khusus mengenai *z* konsep Pembaharuan dan Melindo memasukkan *z* sebagai fonem tambahan. Konsep Samsuri tidak memasukkan *z* ke dalam tata fonemnya, sedangkan konsep LBK jelas memasukkan.

Tentang tata fonem *s*, dalam Konsep Samsuri tidak terdapat fonem tersebut, sedangkan konsep pembaharuan dan Melindo menyetujui penggunaan *s* ini sebagai fonem tambahan. LBK memasukkan *s* ke dalam tata fonem Indonesia, disertai alasan secara deskriptif bunyi yang mewakili (*s*) itu banyak kedapatan. Demikian antara lain mengenai masalah fonem-fonem dari keempat konsepsi yang disebutkan di sini.³⁵

Sastra Indonesia setelah merdeka memperlihatkan perkembangan yang menarik perhatian masyarakat. Misalnya pada saat bersamaan dengan datangnya Jepang pada tahun 1942, terjadilah dua perkembangan yang mempengaruhi sastra Indonesia modern. Pertama, bahasa Indonesia (sebagai wahana bagi sastra Indonesia) diharuskan oleh Jepang untuk dipakai sebagai bahasa pengantar untuk menggantikan bahasa Belanda. Kedua, terhentinya terbitan Pujangga Baru dan tampilnya Chairil Anwar dan kawan-kawannya yang telah mencanangkan fase baru dalam sastra Indonesia.³⁶

Mengenai istilah Angkatan '45, sejak semula orang Indonesia sendiri telah membahasnya, tetapi tidak pernah mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak. Sebenarnya istilah Angkatan '45 pertama kali merupakan nama retrospektif

³⁵ Djoko Kendjono, "Penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia" Bahasa dan kesusastraan Indonesia sebagai Tjerman Manusia Indonesia Baru. Djakarta, 1967. hal. 69-81.

³⁶ Emanuel Subangun, "Rapat Seniman-seniman Sastra se-Indonesia di Tim tanggal 9 dan 10 Desember 1972". Kompas, 9 Desember 1972, hal. IV, IX.

sifatnya, yaitu nama yang hanya digunakan setelah Chairil Anwar menghasilkan sebagian dari karya-karyanya.

Menurut H.B. Jassin,³⁷ istilah Angkatan '45 pertama kali digunakan oleh Rosihan Anwar dalam majalah *Siasat*, 9 Januari 1949. Istilah itu telah digunakan pula oleh Hasil Tanzil dalam *Pujangga Baru* keluaran bulan November 1948, tetapi karena bulan itu terlambat terbitnya, sehingga diduga mungkin artikel Rosihan Anwar yang terbit lebih dulu. H.B. Jassin berpendapat bahwa para penulis yang mulai memperkenalkan dirinya sepanjang tahun-tahun itu telah dikenal lebih dulu dengan pelbagai nama lain, sebelum istilah Angkatan '45 terkenal. Dalam artikelnya tentang angkatan ini yang diberi judul "Rasa Hidup Baru", dikemukakan sejumlah ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membedakan angkatan revolusi tahun 1945 dari Pujangga Baru.³⁸ Dalam menilai sastra Indonesia Angkatan '45 dan Angkatan Pujangga Baru, dinyatakan bahwa keduanya merupakan hasil pendidikan dan pengajaran kolonial Belanda. Mereka menentang Belanda sebagai penjajah, tetapi zat-zat yang mengalir dalam alam pikiran dan pendidikan mereka adalah hasil tanaman Belanda juga. Demikianlah dalam melihat sastra dari kedua angkatan tersebut, orang mau tak mau senantiasa melihat bayangan Angkatan 3 di Negeri Belanda pada Angkatan Pujangga Baru. Demikian juga dalam membicarakan Angkatan '45, orang selalu tidak lupa menyangkut ingatannya kepada Angkatan Perang Dunia Pertama di Negeri Belanda. Menurut Ajip Rosidi bukanlah hal yang kebetulan bahwa Chairil Anwar terpengaruh oleh Marsman, Slauerhoff dan Du Perron.³⁹

Istilah Angkatan Terbaru sebenarnya muncul pertama kalinya pada Simposium Sastra dan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada 14 Agustus 1960. Sebelum Ajip Rosidi menggunakan isti-

³⁷ H.B. Jassin, *Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik dan Esel*. Djakarta, 1955, hal. 189.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ajip Rosidi "Sumbangan Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia kepada perkembangan Kesusastraan Indonesia" (Prasaran Simposium Sastra, Pekan Kesenian Mahasiswa kedua di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960); dalam kumpulan tulisan Ajip Rosidi, *kapankah Kesusastraan Lahir?*, Djakarta, Bhratara, 1964, hal. 29-39.

lah tersebut, Nugroho Notosusanto sebagai ketua simposium terlebih dahulu memperkenalkan istilah tersebut. Nugroho Notosusanto sudah melihat adanya perbedaan pada karya pengarang sebayanya dengan para pengarang yang oleh para penelaah sastra dinamakan Angkatan '45. Dalam masalah periodisasi, Nugroho Notosusanto dalam ceramahnya pada seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 26 Januari 1963 membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa masa sesudah atau sejak 1950 merupakan periode baru dalam sejarah sastra Indonesia. Antara lain dikatakannya bahwa, "Sastrawan-sastrawan yang tampil ke muka dalam periode 1950 tidak lagi berat sebelah pada Belanda atau Eropa Barat, jangkauan orientasinya benar-benar meliputi seluruh dunia".

Diskonstasinya bahwa sebagian besar dari mereka tidak lagi menguasai bahasa Belanda. Medium mereka untuk mengenali karya-karya luar negeri adalah bahasa Inggris. Mereka mulai berkembang tatkala negeri kita mulai dibanjiri buku-buku *paper-backs* yang relatif murah dari Amerika serta buku-buku lebih murah lagi terbitan Pustaka Bahasa Asing dari Moskwa dan Peking. Gairah belajar dari sastrawan terkemuka di luar lingkungan diimbangi dengan penghargaan mereka yang wajar kepada sastrawan-sastrawan Indonesia sendiri, yang mereka jadikan guru-guru yang pertama. Demikianlah penyair-penyair periode 1950 belajar azas-azas persajakan dari Chairil Anwar atau Sitor Situmorang, dan tidak lagi dari Marsman atau Slauerhoff.⁴⁰ Bagi pengarang-pengarang cerita pendek, yang menjadi guru mereka yang pertama adalah Pramoedya Ananta Toer atau Idrus, dan bukan Ilya Ehrenburg atau Hemingway. Unsur persajakan mereka gali dari bahasa-bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia menjadi semakin kaya.⁴¹

Sementara HB. Jassin dalam esainya tahun 1951 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan kehidupan Angkatan-

⁴⁰ Ajib Rosidi, *Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Bahasa Indonesia*. Bandung, 1969, hal. 6 - 7 dsb. Lihat pula tentang angkatan terbaru, A. Teew, *Modern Indonesia Literature*, The Hague, 1967, hal. 227-31.

⁴¹ Basis (Majalah kebudayaan), No. 7 Tahun XII, April 1963, hal. 199-210.

an '45, sampai pada pendapat bahwa pengarang Angkatan '45 tidak mengabdikan kepada suatu isme, tetapi mengabdikan kepada kemanusiaan, yaitu segala yang baik dari semua isme. Mereka tidak berpikir dalam istilah-istilah, tetapi hidup dari pusat pribadi manusia dengan tidak menyebut dirinya nasionalis, atas dasar perasaan kemanusiaan mereka berdiri di pihak bangsa-bangsa, dengan tidak menyebut diri sosialis mereka menghendaki keadilan serta kesejahteraan sosial serta gaya ekspresi yang mendarahdaging, universal-nasionalis, revolusioner dalam sikap hidup dan visi.⁴²

Khusus tentang masalah periodisasi, Nugroho Notosusanto mengemukakan periodisasi Sejarah Sastra Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- I Sastra Melayu Lama
- II Sastra Indonesia Modern

Sastra Indonesia Modern dibagi menjadi dua masa yaitu:

- I Masa Kebangkitan (kurang-lebih 1920 - 1945)
- II Masa Perkembangan (1945 - sekarang)

Masa Kebangkitan dibagi menjadi tiga periode, yaitu:

- 1. Periode '20
- 2. Periode '33
- 3. Periode '42

Masa Perkembangan dibagi menjadi dua periode, yaitu:

- 1. Periode 1945
- 2. Periode 1950

Menurut Ajip Rosidi periodisasi itu lebih dapat diterima daripada semua periodisasi lain yang pernah dicoba orang tentang Sejarah Sastra Indonesia. Hanya saja ia menganggap pembagian seluruh sastra Indonesia menjadi dua bagian yaitu "Sastra Melayu Lama" dan "Sastra Indonesia Modern" tidaklah tepat. Nugroho Notosusanto dalam ceramahnya mengemukakan azas nasionalisme sebagai dasar seluruh periodisasi dalam Sejarah Sastra Indonesia, karena itu Ajip Rosidi mengemukakan

⁴² Brosur Angkatan '45. Jajasan Dharma, 1951; lihat juga H.B. Jassin, "Kesusastraan", *op. cit.*, hal. 7 23.

bahwa untuk bagian pertama sebaiknya jangan disebut Sastra Melayu Lama, melainkan Sastra Indonesia Klasik yang tidak hanya meliputi karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa (daerah) Melayu saja, melainkan dalam semua bahasa daerah yang terdapat di seluruh kepulauan Nusantara, sehingga namanya pun lebih tepat disebut sebagai Sastra Nusantara Klasik. Dengan ini termasuk di dalamnya Sastra Jawa, Sunda, Bali, Aceh, Makasar, Bugis dan lain-lain.

Periodisasi setelah 1945 bukanlah 1950, melainkan tahun 1953. Tahun 1950 para pengarang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh periode berikutnya kebanyakan belum muncul. Meskipun ada, baru satu atau dua saja. Pada tahun 1950 gelanggang sastra Indonesia masih mendapat ciri yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengarangnya pun kebanyakan berasal dari tokoh-tokoh sastra periode sebelumnya. Tahun 1953 terbit majalah *Kisah* yang mendapat perhatian serta memberi kesempatan yang besar kepada para pengarang yang muda-muda. Kemudian terbitlah majalah *Prose, Seni, Tjerita*, ruang kebudayaan '*Genta*' dalam majalah *Merdeka* dan lain-lain. Sementara itu dalam redaksi majalah-majalah kebudayaan *Indonesia, Budaja, Kompas*, lampiran kebudayaan *Gelanggang*, dalam *Warta Sepekan Siasat*, mingguan *Mimbar Indonesia*, dan lain-lain terjadi perubahan redaksi atau kebijaksanaan redaksional. Para pengarang yang muda-muda pada tahun 1950 belum berarti. Karya-karya sastra baru muncul dan mendapat tempat yang menonjol justru setelah terbitnya media berupa majalah-majalah dan ruangan-ruangan budaya yang telah disebutkan di atas. Dalam jangka waktu tahun 1953 hingga sekarang, Ajip Rosidi mendapatkan pula satu periode lagi, karena ada perbedaan-perbedaan yang khas, meski pun secara garis besar barangkali tidak berkelebihan. Sejak tahun 1961, ketika sistem Demokrasi Terpimpin sudah mulai menanamkan kekuasaannya, timbul suasana baru dalam sastra Indonesia, yaitu semacam semangat perlawanan.⁴³

⁴³ A. Teew, *Sastra Baru Indonesia*, hal. 138; Bujung Saleh, "Latar Belakang Kemasjarakatan Kesusastraan Indonesia", *Bahasa Indonesia dan Budaja*, 2 Mei 1954, hal. 9. Periksa juga Prof. Dr. A. Teew Pokok dan Tokoh, *Djilid II*, Djakarta 1958, hal. 22-3 dsb.

Perbedaan yang nampak jelas dengan yang lain adalah pengarang-pengarang komunis. Mereka mempergunakan sastra sebagai alat untuk memperjuangkan komunisme. Di antara para tokohnya terdapat antara lain Njoto, Bakti Siregar, HR. Bandaharo, Bachtiar Siagian, AS. Dharta (dengan nama-nama lain Yogaswara, Klara Akustia Kelana Asmara, Rodji), MS. Ashar, Buyung Saleh Puradisastra, dan kemudian juga Rifai Apin dan Pramoe-dya Ananta Toer. Mereka tergabung dalam organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dibina oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mengenai masalah daerah dalam sastra Indonesia dapat dikemukakan bahwa karena sifatnya, bahasa Indonesia mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas daripada bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Dengan bebas bahasa Indonesia mengambil serta memasukkan unsur-unsur yang dapat digunakannya dari segala bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, sedangkan bahasa daerah tidak mempunyai kemungkinan seluas itu serta tidak mempunyai kebebasan seluas itu, karena sudah memiliki suatu tradisi dalam pemakaiannya. Sebaliknya sifat-sifat bahasa daerah mempunyai suatu hal yang lebih menguntungkan daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai lingkungan masyarakat tertentu yang menggunakannya terbatas pada lingkungan-lingkungan resmi dalam pertemuan-pertemuan resmi. Penggunaan bahasa daerah dilakukan dalam lingkungan terbatas, misalnya dalam keluarga-keluarga yang hidup dalam kota besar yang bersifat nasional. Karena bahasanya, sastra daerah pun lebih mempunyai akar serta lingkungan apresiasi yang lebih konkret daripada sastra Indonesia yang terbatas pada lingkungan tertentu.

Selain itu pada umumnya sastra daerah mempunyai sastra klasik. Dari sastra klasik tersebut, dapat digali kekayaan-kekayaan kejiwaan, filsafat, watak serta lingkungan peradaban yang sudah terbentuk dalam tradisi. Beberapa sastrawan yang menulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan tulisan-tulisannya menunjukkan gejala bahwa yang menjadi tempat mereka berpijak adalah sastra daerahnya masing-masing.

Sastra Melayu bukanlah menjadi milik seluruh sastrawan Indonesia, melainkan hanya terbatas pada para sastrawan yang berasal dari lingkungan daerahnya Melayu saja. Bukti nyata tampak, misalnya pada Amir Hamzah yang memang berasal dari lingkungan masyarakat yang memiliki Sastra Melayu Klasik. Para sastrawan yang berakar pada sastra daerahnya masing-masing, seperti Ajip Rosidi, Rusman Sutiasumarga, Ramadhan KH. berakar pada sastra Sunda, sedangkan WS. Renda, Kridjomulyo serta Soeripman berakar pada sastra Jawa. Selain itu ada juga sastrawan yang mencari akarnya pada tradisi Eropa yang diakuinya sebagai sastra dunia.

3. Perkembangan Seni

Setelah pengakuan kedaulatan, di Yoyakartapun berdiri organisasi Pelukis Indonesia (PI). Mula-mula dipimpin oleh Sumitro, kemudian diganti oleh Solihin dan kemudian Kusnadi. Perkumpulan para pelukis muda ialah Pelukis Indonesia Muda (PIM) yang terbentuk tahun 1954 dan diketuai oleh Widayat. Paling awal di Yogyakarta berdiri Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI) dengan ketua Djajengasmoro. Oleh pihak resmi didirikan Akedemi Seni Rupa Indonesia (ASRI) dengan pelukis-pelukis setempat sebagai guru Akedemi dibagi dalam lima bagian, yaitu seni lukis, seni patung, seni ukir, seni reklame, dan pendidikan guru gambar.

Di Solo beberapa pelukis bergabung dalam Himpunan Budaya Surakarta. Di Madiun berdiri Tunas Muda. Tokoh-tokohnya antara lain Sunindyo, Ismono, dan lain-lain. Di Jakarta timbul Gabungan Pelukis Indonesia (GPI) dengan ketuanya Sutiksna, dan anggota-anggotanya: Nazhar, Zaini, O. Efenddy, Wakidjan, dan lain-lain.

Mengenai perkembangan seni tari, pada periode tahun 1945–1955 di Indonesia pembaharuannya baru terbatas pada teknik penyajian, yaitu dengan menyingkat waktu, memeras atau menyingkat cerita dan penyederhanaan. Selama periode 1955–1956 mulai tampil kresi baru, tetapi kreasi-kreasi itu masih materi elemen-elemen tari yang terdapat di Indonesia, baik

dari tari klasik maupun tari-tarian rakyat. Kebebasan dalam berkreasi sudah mulai timbul, tetapi masih merupakan kebebasan terbatas dan pada waktu itu terasa sekali dalam perkembangan tari. Pengaruh komunis mengakibatkan tarian klasik yang dianggap "berbau keraton" di sampingkan, . . . muncul di mana-mana kreasi tari yang dianggap bertema "kerakyatan" dan kehidupan sehari-hari seperti tari layang-layang, tari tani, tari tenun, tari nelayan, tari koperasi, dan lain-lain. Perkembangan semacam ini terjadi di mana-mana di seluruh tanah air.⁴⁴

Konservatori Karawitan didirikan di Surakarta pada 27 Agustus 1950. Pendiriannya mendapat persetujuan menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan pada 17 Juli 1950. Maksud pertama mendirikan konservatori karawitan ialah untuk mempertinggi serta mengembangkan karawitan. Konservatori ini mempunyai bagian-bagian Perguruan, Pendidikan, perpustakaan, Museum dan Pergelaran. Dalam lingkungan perguruan di siarkan dan dilatih soal pengetahuan kerawitan modern, sehingga para siswanya diharapkan dapat memiliki teknik "menabuh" serta mengembangkan bakat seni tarinya. Dalam bagian ini diajarkan tentang "niyaga kerawitan" (instrumentalis, vokalis), "empu kerawitan" (pengetahuan tentang komponis), guru kerawitan dan ahli kerawitan (musikolog).⁴⁵

Dalam periode ini perusahaan film di Indonesia yang tergabung dalam PPF (Persatuan Produsen Film Indonesia) milik bangsa Indonesia dan asing, berjumlah lebih-kurang 20 buah. Dari jumlah 20 perusahaan ini termasuk PFN (Perusahaan Film Negara), sedangkan jumlah perusahaan film milik bangsa Indonesia sendiri mula-mula hanya tujuh buah, yaitu Persari, Perfini, Pahlawan Merdeka Film coy, Titien Sumarni Motion Picture, Pesfilm (di Medan), Redikal Film dan Rafco. Jumlah semua studio film juga hanya tujuh buah, yaitu PFN, Persari, Bintang Surabaya, Garuda Film Corp., Tan and Wong Bros Film Coy, dan Golden Arrow.

⁴⁴ Masalah Modernisasi Senitari di Indonesia", Berita Yudha, 3 Juli 1972, hal. VII.

⁴⁵ Sastra dan masyarakat Indonesia, 1950, hal. 36.

Persaingan yang dihadapi oleh perusahaan film Indonesia tidak sedikit, bukan saja dari perusahaan Cina, tetapi juga dari pihak Perusahaan Film Negara (PFN), sebab instansi tersebut tidak saja mengusahakan pembuatan film dokumenter, tetapi juga turut membuat film cerita seperti "Inspektur Rachman", "Sekuntum Bunga di Tepi Danau", dan lain-lain. Produksi Perfini yang pertama adalah "The Long March" atau "Darah dan Doa", yaitu mengenai perjalanan Divisi Siliwangi dan disusul oleh "Enam Jam di Yogya".⁴⁶ Timbulnya persaingan berat dari India, serta tak adanya jaminan dari pemerintah dan soal tuntutan PPFI dalam menghadapi persaingan dengan film asing di sekitar tahun 1955an banyak perusahaan-perusahaan film yang menutup studionya.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul tokoh-tokoh seniman dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah ormas PKI yang mendukung konsepsi Presiden Soekarno dan mendesak agar seluruh kehidupan seni diperpolitikkan sesuai dengan garis partai mereka, seperti Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer, Basuki Resobowo, Kotot Sukardi, dan lain-lain. Oleh AS, Bey, salah seorang anggota Parpeti yang aktif, diusulkan agar diadakan simposium film dengan acara "Artis film dan Politik". Pada 8 September 1957 diadakan simposium film tersebut bertempat di Aula Universitas Indonesia. Para pemra-saran dalam simposium tersebut pada umumnya tidak menyetujui bahwa para artis film harus berpolitik.⁴⁷

4. Perkembangan Media Massa

Beberapa ciri umum dari pers zaman Liberal antara lain ditandai dengan liberalisme dalam hal penulisan berita, tajuk rencana dan pojok. Pada umumnya dari segi komersial kurang menguntungkan, meskipun pengusahaannya sudah diasuh secara liberal.

⁴⁶ "Kegiatan Cinemagtoprafi di Indonesia", *Gema Pemuda Al Irsjad*, No. 6, Tahun III, September 1956.

⁴⁷ Hasil Simposium Film Pertama dari Persatuan Pers. Film Indonesia (PERFERI). *Artis Film dan Partai Politik*, Djakarta, Desember 1957.

Gejala lain yang nampak pada waktu itu setiap individu, asal memiliki uang, tidak memandang golongannya, dapat menerbitkan surat kabar atau majalah, tanpa meminta izin kepada yang berwenang. Akibatnya menimbulkan perlombaan dalam penerbitan surat kabar yang kadang-kadang penerbitnya tidak memperhitungkan kemampuan keuangannya.

Suatu ciri ironis dari zaman Liberal ini, ialah bahwa surat kabar bekas milik Dinas Penerangan Belanda yang kemudian diambil alih oleh tenaga bangsa Indonesia, ternyata kondisi pengusahaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan pers yang diusahakan oleh modal swasta nasional. Percetakan-percetakan surat kabar bekas milik Dinas Penerangan Belanda umumnya kondisinya juga jauh lebih baik dari milik swasta nasional.⁴⁸

Pada tahun 1957 dengan adanya aksi-aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, surat kabar berbahasa Belanda lenyap dari peredaran. Dalam masa yang sama surat kabar berbahasa Cina ada 17 dengan jumlah oplahnya berkisar di sekitar 84.300 eksemplar sampai 129.500 eksemplar. Surat kabar berbahasa Inggris dari tahun 1952 sampai tahun 1957 mencapai oplah 25.000 eksemplar.

Pada zaman Demokrasi Liberal dengan adanya sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan berada di tangan kabinet. Partai-partai oposisi yang berada di luar pemerintahan dengan menggunakan surat kabarnya melemparkan rasa ketidak puasannya kepada pemerintah. Sikap sinis publik terhadap pemerintah dikemukakan oleh surat kabar.⁴⁹ Bagi perkembangan surat kabar selama zaman Liberal yang terpenting ialah diselenggarakannya Seminar Pers di Tugu, Bogor pada 24 sampai 26 Juli 1955, yang dihadiri oleh 29 orang peserta dan 12 orang peninjau, terdiri atas wakil-wakil 17 harian serta wakil-wakil instansi pemerintah.

Pers daerah pada waktu itu masih melakukan konsolidasinya, bahkan dalam banyak hal juga masih harus meletakkan

⁴⁸H. Soebagijo I.N., *Sedjarah Pers Indonesia*, Jakarta, 1957, hal 95.

⁴⁹John H. Sullivan, "The Press and Politics in Indonesia", *Journal Quarterly*, 44, 1976, hal. 102-4.

dasar-dasarnya. Menurut statistik Jakarta pada tahun 1955 berpenduduk 2,5 juta orang, mempunyai 24 harian, terbagi menurut bahasanya, yaitu 14 berbahasa Indonesia, tiga berbahasa Belanda, dua berbahasa Inggris dan lima berbahasa Cina. Banjarmasin yang hanya berpenduduk 65.000 orang memiliki lima buah surat kabar, sedang Medan yang berpenduduk 77.000 orang mempunyai 16 surat kabar, suatu jumlah yang agak banyak selisihnya, bila dibandingkan dengan kota-kota daerah lainnya. Palembang yang berpenduduk 100.000 pada tahun 1955 memiliki dua surat kabar.

Dengan angka-angka perbandingan di muka tampak bahwa satu tempat tampaknya kebanyakan jumlah surat kabarnya, sedangkan tempat lain masih kurang. Rata-rata memperlihatkan suatu kedudukan yang belum kuat, bahkan seringkali amat lemah. Masyarakat pembacanya belum luas, sedangkan di daerah menjadi rebutan pula dari beberapa surat kabar, sehingga dengan sendirinya sukar dapat memberi surat kabar itu suatu kemungkinan hidup yang layak. Dengan sendirinya pula perusahaan surat kabar daerah merupakan *kleuterbedrijven* (perusahaan kecil) yang pada dasarnya hanya dapat memberi hidup pada staf pegawai yang sangat terbatas.

Dilihat dari segi komersialnya, pers daerah memang kurang menguntungkan. Faktor penduduk di suatu kota di mana surat kabar diterbitkan merupakan unsur yang penting. Di kota yang jumlah penduduknya sedikit sudah barang tentu jumlah langganan surat kabar lebih sedikit daripada kota yang penduduknya banyak. Faktor ekonomi dan perdagangan serta taraf kecerdasan penduduk juga mempengaruhi maju-mundurnya surat kabar. Di kota-kota besar yang penduduknya banyak, perdagangan dan perindustrian maju, cukup banyak orang yang membutuhkan surat kabar untuk santapan rohani, sehingga dengan sendirinya oplah surat kabar di situ besar. Begitu pula soal perhubungan dengan daerah-daerah sekitar kota-kota besar tadi, merupakan faktor-faktor yang menentukan perkembangan hidup surat kabar yang terbit di kota tadi.

Kerusakan jalan, kurangnya kendaraan, kesulitan pengangkutan laut dan lain-lain, mengakibatkan surat kabar tidak

berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan persuratkabaran di tahun 50an di Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan daerah-daerah lain yang mengalami kesulitan perhubungan. Di samping faktor perhubungan yang merupakan penghambat, percetakan pun dapat merupakan penghambat pula.

Di kota-kota dan daerah-daerah yang tidak mempunyai percetakan modern, melainkan masih dipergunakan *handzet* dan mesin cetak untuk penerbitan surat kabar, sudah barang tentu hasil produksinya dilihat dari sudut tipografi kalah bagus dibandingkan dengan hasil percetakan modern. Selain itu soal iklan pun merupakan faktor yang menentukan hidup-matinya surat kabar. Iklan yang banyak dan besar akan menjamin kehidupan surat kabar, di samping para langganan.

Di kota-kota besar seperti Medan, Bandung, dan Surabaya dapat hidup lumayan, dibandingkan dengan surat kabar di kota-kota kecil yang serba kurang segala-galanya. Kelambatan kemajuan pers daerah disebabkan kebanggaan akan pers daerahnya sendiri masih kurang pada daerah masing-masing. Hal lain mungkin juga berpangkal pada sebab lain, yaitu karena pers daerah sendiri belum memperlihatkan sifat-sifat yang layak untuk dijadikan kebanggaan bagi daerah yang bersangkutan. Agaknya hal inilah yang menjadikan sebab, mengapa orang daerah dalam soal pers seringkali berkiblat kepada pers ibukota.⁵⁰

Mengenai sifat pers Indonesia, kiranya adalah suatu pers regional; artinya, tidak terdapat pemusatan atau konsentrasi surat kabar pada suatu tempat, misalnya di ibukota, tetapi tersebar pada tempat-tempat surat kabar diterbitkan boleh dikatakan merata. Di tiap provinsi terdapat surat kabar, besar ataupun kecil. Dari jumlah 78 buah harian di seluruh Indonesia (menurut keadaan 1 April 1954, lihat daftar Kementerian Penerangan Bagian Soal-soal Pers & Grafika), 15 harian terbit di Jakarta, selebihnya di daerah-daerah, berarti kurang 20%. Pemakaian istilah pers regional itu baru bisa dibenarkan apa-

⁵⁰"Pidato Sambutan Sekretaris Djenderal kementerian Penerangan Harjono Joedatmodjo pada pembukaan Seminar Pers di Tugu Bogor, tanggal 24 Juli 1955", *Warta dan Masa*, No. 1 s/d 6, 1955/1956, hal. 1-2.

bila telah diperiksa perimbangan antara ibukota dan daerah di dalam jumlah peredaran dan daerah peredaran surat kabar. Di Indonesia dapat dilihat sesuai dengan surat izin pemberian kertas oleh Kementerian Penerangan 1 April 1954, ke-15 harian ibukota mencapai oplah total 188.500 sehari, sedangkan oplah total harian-harian daerah adalah 321.650. Perbandingan ini menunjukkan kelebihan di pihak pers daerah. Mengenai peredarannya, pada umumnya surat kabar yang terbit di ibukota provinsi mempunyai daerah peredaran semata-mata di dalam kota dan lingkungan provinsi yang bersangkutan. Jarang sekali, kecuali pada satu-dua surat kabar daerah, peredarannya melampaui secara luas batas-batas provinsi atau kotanya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pers Indonesia pada waktu itu adalah pers regional.

Pers ibukota pertama-tama harus melayani rakyat yang berdiam di Jakarta dan sekitarnya. Pers ibukota umumnya menghidangkan berita-berita yang bersifat nasional. Selanjutnya karena struktur negara serta iklim politik dan usaha-usaha perdagangan besar sangat sentralistis sifatnya; artinya, segala-galanya diatur dan ditentukan dari pusat, sehingga mau tidak mau perhatian rakyat besar sekali terhadap surat kabar ibukota. Adanya minat pembaca dengan sendirinya dimanfaatkan oleh pers ibukota. Faktor inilah yang menyebabkan surat kabar ibukota masuk ke daerah-daerah. Pemasukan surat kabar ibukota ke daerah-daerah ini dibatasi oleh faktor-faktor geografis serta perhubungan. Daerah-daerah yang letaknya berdekatan dengan ibukota serta mudah dicapai, merupakan pasarannya. Daerah-daerah di seluruh Jawa dan Sumatera Selatan dapat dicapai dalam satu hari dari ibukota. Dari kenyataan tersebut tampaklah betapa surat kabar ibukota mendapat pasaran yang subur, terutama surat kabar yang tinggi mutunya.

Pada umumnya pers ibukota mempunyai tenaga-tenaga wartawan serta peralatan dan percetakan yang terbaik di dalam negeri kita. Pers daerah mempunyai fungsi melayani keperluan rakyat di lingkungan tempat ia diterbitkan. Kadang-kadang terdapat pula isi pemberitaan belum begitu dipahami oleh pers daerah, sehingga kadang-kadang kita memperoleh kesan seolah-

olah hampir tidak terdapat perbedaan antara surat kabar yang terbit di Jakarta dengan yang terbit misalnya di Surabaya. Politik dan kecenderungan pemberitaan nampaknya sama saja dan sudah barang tentu pers daerah dengan demikian ketinggalan dari pers ibukota. Baru kemudian timbul kesadaran, bahwa pers daerah pertama-tama harus mencerminkan keadaan daerah itu sendiri. Dengan demikian maka surat kabar daerah mulai membedakan dirinya dengan tegas dari surat kabar Jakarta.⁵¹

Dalam memberikan kriterium perbedaan pers pusat dan pers daerah, yang ditentukan adalah tempat terbitnya. Pers pusat terbit di ibukota, sedang pers daerah terbit di suatu ibukota provinsi, atau hanya dalam suatu kota besar saja. Sebenarnya hal ini pun bukan suatu perbedaan, baik pers pusat maupun daerah tidak ada perbedaan hakiki. Meskipun kita masih menggunakan perkataan pers pusat dan pers daerah. Untuk menegaskan perbedaannya, orang mengatakan bahwa pers daerah itu bersifat kedaerahan, provinsial, *kleinsteeds*, tidak kosmopolitis, dan sebagainya. Pers daerah timbul mungkin karena adanya kebutuhan dalam masyarakat di daerah. Di sini yang dimaksudkan dengan daerah ialah kota tempat terbitnya pers itu dan wilayah sekitarnya, juga di daerah pedesaan. Dengan demikian, dalam pemberitaannya, pers daerah mau tidak mau harus mempertimbangkan dan memperhatikan keinginan-keinginan pembacanya di dalam wilayah penyebarannya yang meliputi dua macam suasana masyarakat, yaitu kota dan pedesaan.

Dalam komunikasi dengan dunia ilmu, kadang-kadang timbul masalah, karena sikap saling menyalahkan. Pada umumnya karyawan-karyawan pers yang menghadapi masalah ini menyatakan bahwa ilmuwan dianggap mempersulit para karyawan pers, karena mereka sengaja menggunakan bahasa "tinggi-tinggi", serta tidak mau mencoba menjelaskan kegiatan ilmu kepada orang awam tanpa "penuh teori". Sebaliknya jika berbicara dengan ilmuwan, maka petugas-petugas media komunikasi-massa yang dianggap menjadi pangkal kesulitan. Sebagian

⁵¹ Rosihan Anwar, "Adakah persaingan antara Pers Ibukota dengan Pers Daerah?", *Warta dan Masa*, No. 1 s/d 6, 1955/1956, hal 28-34.

ilmuwan berpendapat bahwa wartawan tidak mau berusaha mengerti tentang ilmu serta hanya mau memberikan hal-hal yang sensasional. Meskipun kedua pendapat tersebut sedikit banyaknya ada benarnya, tetapi tidak setajam yang dibayangkan. Sebenarnya masalah seperti ini timbul, karena adanya pertentangan watak yang azasi antara kegiatan-kegiatan dunia peneliti dan dunia mass-media. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada persamaan antara keduanya.

Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh petugas-petugas pers juga dimiliki oleh petugas-petugas ilmu. Keduanya mempunyai tugas pokok, yaitu mencari kebenaran serta melaporkannya. Keduanya harus memiliki sifat-sifat skeptis serta selalu ingin menguji. Perbedaan lain yang tampak dalam cara kerja keduanya. Jika peneliti harus berpegang teguh pada prinsip keuletan, si wartawan harus lincah. Ia mengumpulkan dan melaporkan fakta untuk umum yang terdiri atas berbagai golongan dan profesi serta tidak dapat mengikatkan diri pada metodologi dan kriteria satu bidang tertentu saja. Di samping itu andaikata karyawan media ingin lebih "ilmiah", sifat-sifat media massa tidak memberikan kesempatan untuk mengikuti langkah-langkah si peneliti untuk menyatakan konsep-konsep dan istilah-istilah melalui aplikasi dan rumusan-rumusan. Tentang ciri media-massa yang penting disebut di sini ialah adanya pembatasan ruangan dalam media. Ruangan yang sempit, setelah dikurangi sebagian untuk iklan juga, kadang-kadang harus menampung peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dunia. Seorang ilmuwan peneliti tentu akan merasa bahwa karya yang telah menyita waktu dan tenaganya merupakan hal yang penting, sedangkan bagi penguasa-penguasa media massa (redaktur) karya tersebut mungkin kurang dihargai, misalnya jika dibandingkan dengan masalah-masalah aktual tentang kehidupan sehari-hari.

Sementara itu kadang-kadang istilah-istilah yang telah dibatasi secara ketat oleh ilmuwan mungkin diberikan konotasi yang populer. Hal tersebut mungkin bertentangan dengan makna riil yang ditentukan ilmuwan. Kondisi-kondisi yang membatasi arti dari hasil-hasil penelitian mungkin generalisasi

secara lebih luas, sedangkan aspek yang kurang penting dan kecil dalam karya asli mungkin diterjemahkan ke dalam kata sehari-hari yang tidak tepat beserta sinonim-sinonimnya, serta gaya tulisannya mungkin mengandung unsur *human interest*. Petugas pers mungkin mengemukakan hal-hal yang bagi sebagian peneliti tidak relevan untuk dikemukakan (seperti riwayat hidup, pribadi peneliti, biaya penelitian serta anekdot-anekdot yang terjadi pada waktu penelitian berlangsung).⁵²

Hal lain yang menjadi masalah karena adanya anggapan umum bahwa pers atau mass-media di tanah air banyak andilnya dalam merusak bahasa Indonesia. Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa pers/mass media mempunyai andilnya pula di dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dari kedua anggapan yang saling bertentangan ini dapat dilihat kenyataannya, bahwa media massa mempunyai peranan besar di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Sementara itu di tahun '50an orang masih membedakan bahasa Indonesia baku dengan bahasa pers yang belum baik. Pada saat itu kita masih melihat adanya surat kabar atau majalah yang menggunakan bahasa "Cina", menggunakan logat Melayu Cina.⁵³

Sarana komunikasi lainnya yang vital di negara kita adalah radio. Sejak Proklamasi, penyiaran radio dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan sendirinya corak siaran radio dapat disesuaikan dengan jiwa revolusi pada waktu itu. Pada masa awal kemerdekaan, radio menjadi saluran penerangan yang terpenting. Semua radio umum hampir di seluruh pelosok tanah air selalu dikerumuni oleh rakyat yang ingin mendengar tentang kejadian-kejadian di Indonesia. Corak siaran pada masa itu banyak menggunakan siaran "kata-kata yang berat" mengenai politik dan agitasi untuk membakar semangat rakyat. Usaha lain yang dilakukan ialah mematahkan siaran propaganda dari pihak Belanda yang melakukan agresi terhadap Republik Indonesia.

⁵²D.H. Assegaf, "Mass Media dan Perkembangan Bahasa", *Indonesia Raya*, 7 Desember 1972, hal. VI.

⁵³Alwi Dahlan, "Komunikasi Mass Media dan Dunia Ilmu", *Sinar Harapan*, 5 Januari 1971, hal. V. VIII.

Setelah pengakuan kedaulatan, siaran-siaran radio di Indonesia digunakan untuk kepentingan nasional. Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraannya, tetapi sedikit demi sedikit segala kesulitan dapat diatasi, sehingga penyiaran radio yang dahulu digunakan oleh Belanda dapat digunakan untuk kepentingan negara.⁵⁴

Mengenai pembagian jenis program sesuai dengan hasil Konferensi Siaran Dalam Negeri tahun 1950, ada tiga jenis, yaitu program umum, program luar negeri, dan program tiga. Program umum adalah siaran-siaran yang dilakukan cabang-cabang dalam bahasa Indonesia serta bersifat populer, menarik dan mudah diikuti oleh pendengar umum. Program luar negeri dilakukan oleh pusat jawaban dalam berbagai bahasa asing dan khusus ditujukan ke luar negeri. Dalam program ketiga disiarkan acara-acara yang khusus bersifat kursus-kursus pendidikan rakyat, siaran untuk sekolah-sekolah, dan lain-lain. Acara lainnya khusus ditujukan untuk suatu "golongan pendengar" seperti acara untuk para teknisi, musisi, dan juga kepada beberapa golongan kecil bangsa asing di dalam negeri.

Ke dalam golongan ini dimasukkan siaran yang diselenggarakan dalam bahasa Belanda yang pada saat itu dalam istilah siaran radio biasa disebut program dua. Selanjutnya mengingat sifat dan maksud siarannya, yaitu dengan dihapusnya siaran militer untuk Belanda sejak 1 Oktober 1950, kemudian diadakan siaran untuk Angkatan Perang yang dimasukkan ke dalam jenis program tiga. Untuk memperluas acara-acara program tiga, kemudian ditambah dengan siaran-siaran yang bersifat kursus atau pendidikan dalam berbagai lapangan seperti seni suara, teknik dan lain-lain. Acara ini dimulai bulan Januari 1951.

Dengan bertambahnya jenis acara siaran program tiga, berarti waktu yang disediakan untuk acara "siaran berat" semakin berkurang. Setelah mengadakan perbandingan dengan

⁵⁴ Sumarmadi "Meninjau Corak Siaran Radio", *Radio dan Masyarakat Indonesia*, 1952.

corak siaran luar negeri, kemudian Jawatan Radio memasukkan siaran-siaran yang bersifat pelayanan kepada masyarakat bangsa asing di dalam negeri ke dalam programa tiga.

Selanjutnya dalam pembagian tugas siaran, pemancar/stasiun-stasiun dibagi atas dua jenis, yaitu stasiun nasional ditentukan di Jakarta, sedangkan stasiun-stasiun regional adalah Bandung (untuk Jawa Barat), Yogyakarta (untuk Jawa Tengah), Surabaya (untuk Jawa Timur), Padang, Medan, dan Makasar. Stasiun di Palembang dan Banyumas secara bertahap dijadikan stasiun lokal dengan programa regional. Stasiun-stasiun lainnya terdapat di Semarang, Kotaraja, Pontianak dan Manado. Stasiun-stasiun *relay* (pemancar pembantu) diadakan di Jawa, yaitu di Medan dan Jember. Stasiun nasional bersifat umum dan tidak terikat oleh corak-corak kedaerahan. Dalam siarannya juga diusahakan memasukkan dasar-dasar budaya nasional yang diharapkan dapat membimbing dan mendorong perkembangan budaya.

Stasiun-stasiun regional wajib memelihara jenis-jenis seni daerah yang masih hidup di kalangan rakyat serta memenuhi kebutuhan daerahnya di lapangan pendidikan dan penerangan. Oleh Jawatan Radio juga diperhatikan supaya memelihara tenaga yang membantu siaran secara tetap dengan cara meningkatkan honorarium mereka. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran pokok adalah "bakat seni", sedangkan untuk tenaga-tenaga yang kreatif di kalangan seniman diadakan peraturan-peraturan khusus, baik mengenai jumlah honorarium maupun syarat-syarat bermain dan lain-lain. Kesukaran-kesukaran akan piringan hitam lagu-lagu Indonesia diatasi dengan mengadakan rekaman sendiri, baik lagu-lagu Indonesia baru maupun lagu-lagu daerah. Usaha-usaha untuk merekam lagu-lagu daerah misalnya, dilakukan dengan merekam penyajian orkes-orkes, musik gamelan, dan lain-lain di Yogyakarta dan Surakarta.

Khusus bagi bagian pekabaran, selain menyelenggarakan warta berita radio juga menyelenggarakan uraian-uraian, tinjauan dalam dan luar negeri, ikhtisar pers dan secara insidental menyiarkan warta-berita antar pulau (*interinsuler*) dan inter-

nasional dalam bahasa Indonesia. Tugas pekabaran regional hanya terbatas menyelenggarakan warta-berita regional termasuk berita kota dalam bahasa Indonesia serta menyiarkan ulangan pekabaran yang disiarkan oleh pusat dalam bahasa regionalnya; demikian juga terjemahan tinjauan dalam dan luar negeri yang disiarkan oleh pusat pekabaran.⁵⁵

Selanjutnya mulai tahun 1950 diadakan rencana lima tahun dimana diusahakan penambahan-penambahan studio, penyempurnaan alat pemancar. Perubahan studio-studio dirasakan amat perlu dan dalam waktu singkat di beberapa tempat harus dilakukan secepatnya. Jakarta sebagai studio pusat jawatan harus menggunakan pemancar-pemancar yang berkekuatan 100 kw, sampai paling sedikit 1 mw, untuk keperluan siaran dengan studio lainnya.⁵⁶

Dalam pelaksanaan rencana lima tahun yang disusun pada tahun 1950 itu memerlukan anggaran belanja yang besar. Mengingat keadaan keuangan negara, pembelian-pembelian seperti dicantumkan dalam rencana tersebut perlu dipecah menjadi dua gelombang, yaitu : (a) dari anggaran Pemerintah sendiri dan (b) dari pinjaman Exim Bank.

Karena dalam tahun 1950 pembelian pemancar radio (juga untuk RRI) masih dilakukan oleh Jawatan PTT, maka jalannya usaha pembelian pemancar untuk tahun itu kurang lancar, sehingga saat itu tidak ada pemancar yang dibeli. Juga penyelesaian pembelian pemancar melalui Exim Bank yang rencananya diserahkan kepada PTT tidak mencapai sesuatu hasil.

Baru dalam tahun 1951 berkat perubahan cara pembelian, yaitu setelah semua pembelian pemancar untuk RRI dapat dilakukan oleh Kementerian Penerangan sendiri, dapat dibeli dua pemancar yang kuat. Pada pertengahan tahun 1951, dibeli pemancar Philips dari 50 kw, dan 1 pemancar RCA dari 7,5 kw.

⁵⁵ Reporter Radio, "Konferensi Siaran Dalam Negeri tgl. 10 s/d 13 Desember 1950", *Siaran dan Masyarakat Indonesia*, 1951, hal 21-30.

⁵⁶ *Siaran Kementerian Penerangan*, I, No. 6, 12 September 1956, hal. 8-12.

Mungkin karena kesukaran keuangan, maka dalam tahun 1952 juga tidak dapat dibeli pemancar-pemancar baru. Anggaran belanja untuk keperluan itu baru diotorisasi pada akhir tahun 1952, sehingga pembeliannya baru dapat dilakukan pada permulaan tahun 1953. Hasil pembelian yang pertama telah tiba di Indonesia pada bulan April 1953, yaitu tiga buah pemancar RCA dari 7,5 kw dan lima buah pemancar Gaster dari 1 kw.

Hasil kedua yang meliputi jumlah yang lebih besar tiba di Indonesia pada akhir bulan Oktober 1953, yaitu tiga pemancar dari 25 kw, tujuh pemancar dari 10 kw, tiga pemancar dari lima kw, dan lima pemancar dari 1 kw, semuanya buatan pabrik Gaster, Amerika. Dengan hasil ini 70% dari rencana lima tahun telah terlaksana, sedangkan yang 30% diharapkan dapat dilaksanakan dari rencana pembelian melalui pinjaman Exim Bank atau anggaran belanja pemerintah tahun 1954, yaitu untuk pembelian dua pemancar dari 50 kw, dan lima pemancar dari 1 kw, seharga US\$ 100.000,—

Dalam penyusunan rencana lima tahun itu, kecuali anggaran untuk pemancar, agregat diesel dan lain-lain alat pemancar, juga telah dicantumkan anggaran untuk pembangunan gedung-gedung pemancar yang sangat diperlukan oleh pemancar-pemancar dari kekuatan lima kw ke atas. Pertama, Pemancar-pemancar dari kekuatan lima kw ke atas tidak mungkin ditempatkan di ruangan dekat studio, karena akan mengganggu siaran-siaran di studio. Kedua, pemancar-pemancar besar itu memerlukan gedung-gedung yang khusus yang memenuhi syarat keamanan pemancar-pemancar itu, karena itu perlu dibangun gedung-gedung baru untuk pemancar-pemancar yang besar, yang dapat menjamin keamanan secukupnya kepada pemancar, supaya tidak lekas rusak. Ini mungkin disebabkan karena tidak dilihat kepentingan teknis dari keperluan itu, sehingga dalam tahun 1950 baru dapat dibangun sebuah gedung pemancar di Kebayoran, Jakarta; dalam tahun 1952 untuk pemancar 50 kw yang telah dibeli tahun 1951, sebuah gedung pemancar di Yogyakarta pada akhir tahun 1952, yang pe-

mancarnya 7,5 kw sudah datang pada tahun 1951 dan kemudian diotorisasi pembangunan pemancar di Medan untuk pemancar 7,5 kw, yang telah datang bulan April pada tahun yang sama.

C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

1. Sistem Pendidikan

Murid-murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada tahun 1950an jumlahnya mulai melimpah dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Mereka ini adalah produk pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Eksplosi di bidang pendidikan tinggi ini memerlukan suatu kebijaksanaan baru untuk menampungnya, sehingga terjadi perluasan horizontal maupun vertikal dari perguruan tinggi. Universitas baru didirikan di tiap ibukota provinsi, sebagian karena alasan politik psikologi untuk menyalurkan kebanggaan daerah. Jumlah fakultas ditambah meskipun tenaga pengajarnya tidak ada, sehingga harus dirangkap oleh pejabat-pejabat pemerintah di daerah. Juga perguruan-perguruan tinggi swasta semakin banyak.

Untuk menampung ledakan jumlah murid-murid lulusan pesantren serta untuk memenuhi keinginan golongan Islam didirikan *Institut-institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, sedangkan untuk menampung keinginan Umat Kristen Protestan dan Katolik didirikan *sekolah Tinggi Theologi serta seminari-seminari*. Juga didirikan perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen, katolik, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya.

Sistem penerimaan mahasiswa yang relatif mudah dan pembebasan uang kuliah ikut berpengaruh sebagai penyebab terjadinya peningkatan besar-besaran jumlah mahasiswa. Pertambahan jumlah mahasiswa ini membuat populasi mahasiswa melewati angka-angka seratus ribu orang dengan perguruan tinggi

181 buah pada tahun 1961.⁵⁷ Ini berarti kurang lebih satu perseribu dari jumlah penduduk usia mahasiswa (18–24 tahun) yang tertampung di perguruan tinggi, sedangkan jumlah 18–24 tahun diperkirakan ketika itu berjumlah 10.000.000 orang.⁵⁸

Sejak tahun 1959 di bawah Menteri P dan K, Prof. Dr. prijono disusun suatu rencana pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama. Rencana tersebut terdiri atas tujuh ketentuan meliputi usaha-usaha:

- (1) Penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen P dan K.
- (2) Meningkatkan seni dan olahraga.
- (3) Mengharuskan usaha halaman.
- (4) Mengharuskan penabungan.
- (5) Mewajibkan usaha-usaha koperasi.
- (6) Mengadakan kelas masyarakat.
- (7) Membentuk regu kerja di kalangan SLTP/SLTA dan Universitas.⁵⁹

Sejak tahun 1962 sistem pendidikan untuk SMP dan SMA mengalami perubahan. Menurut rencana yang baru itu mulai 1 Agustus 1962⁶⁰, pembagian A dan B di SMP diadadakan. Suatu hal yang menarik dalam kurikulum SMP baru ini ialah ditam-bahkannya dua mata pelajaran baru, yakni mata pelajaran administrasi dan kesejahteraan keluarga.

Sistem pendidikan di SMA mendapat pula perubahan sejak tahun 1962 Dengan sistem baru itu SMA mempunyai satu jenis kelas 1. Ini dimaksudkan agar setiap pelajar mendapat kesempatan untuk memilih minat (walaupun hanya satu tahun saja) jurusan-jurusan mana yang sesuai dengan bakatnya, karena mulai masuk di kelas II mereka relah dibagi-bagi sesuai dengan jurusan atau penggolongannya, yaitu Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan

⁵⁷ *Perguruan Tinggi di Indonesia*, hal. 35.

⁵⁸ Widjojo Nitiasastro, *population Trends in Indonesia*, 1970. hal. 179.

⁵⁹ Instruksi menteri P & K, No. 1. 17–8–1959. Lihat Supardo, SH. dkk. civics, Djakarta, 1962, hal. 323–3.

⁶⁰ Tahun ajaran ketika itu dimulai 1 Agustus setiap tahun.

Alam. Selain itu kepada guru diberi tugas bimbingan bagi para pelajar di samping tugas sebagai pengajar biasa.

Tentang penyelenggaraan seni dan olahraga ditentukan antara lain dengan kewajiban mempelajari dan menyanyikan enam lagu nasional selain lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan olahraga ditingkatkan, sepakbola dan bola volley merupakan cabang olahraga yang dikembangkan. Untuk menumbuhkan gairah serta meningkatkan mutu sekali-sekali diadakan pertandingan dan bagi pemenang (juara) diberi hadiah dan piala bergilir.

Sekitar tahun 1960an di kalangan pendidikan timbul suatu masalah serius yakni usaha-usaha PKI untuk menguasai organisasi profesi guru⁶¹, *Persatuan Guru Republik Indonesia* (PGRI). Hal itu menimbulkan perpecahan di PGRI. Dengan berbagai alasan beberapa orang anggota pengurus PGRI yang ada mendirikan organisasi tandingan, yang diberi nama Non-Vaksentral.

Perpecahan PGRI itu bertepatan waktunya dengan dilancarkannya sistem pendidikan baru oleh menteri PP dan K. Sistem baru itu ialah Pancasila dan Pancawardhana. Adapun sistem Pancawardhana⁶² atau lima (pokok) perkembangan penjabarannya adalah sebagai berikut:

- (1). Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan.
- (2) Perkembangan inteligensi.
- (3) Perkembangan nasional-artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir bathin.
- (4) Perkembangan keprigelan (kerajinan tangan) dan
- (5) Perkembangan jasmani⁶³

⁶¹ Masalah pancawardhana ini banyak di bicarakan di kalangan masyarakat. Sementara orang beranggapan, bahwa dengan melancarkan sistem Pancawardhana membawa anak didik ke arah pendidikan komunisme. Pendapat ini dihubungkan pula dengan sikap politik Menteri PP & K dan Sekretaris Jenderal PP & K yang cukup dikenal di kalangan masyarakat sebagai simpatisan PKI.

⁶² Supardjo S.H., dkk, *op. cit.*, hal. 481.

⁶³ Yang dimaksud dengan studi terpimpin adalah suatu sistem pendidikan yang di dalam pelaksanaan tugas mahasiswa dan tugas pengajar tidak dilakukan sebebas-bebasnya. Tetapi dengan bimbingan, dan pimpinan dalam bentuk-bentuk yang ditujukan guna menghasilkan ahli-ahli dalam batas waktu tertentu, sesuai dengan rencana pembangunan nasional semesta berencana. Lihat Perguruan Tinggi di Indonesia, *op. Cit.*, hal 23-25.

Di lingkungan perguruan tinggi selama periode Demokrasi Terpimpin itu diintensifkan studi terpimpin dalam rangka pelaksanaan Manipol-Usdek., kemudian diikuti dengan *retooling*. Selain itu dilakukan indoktrinasi Manipol-Usdek serta ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi kepada seluruh civitas akademika.

Negara-negara yang baru merdeka dan negara berkembang pada umumnya, menghadapi kekurangan tenaga-tenaga trampil yang terdidik, sedangkan pembangunan sangat memerlukan tenaga-tenaga ahli. Pada awal Demokrasi Terpimpin, kepada perguruan tinggi diberi tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁶⁴

2. Perkembangan Sastra dan Budaya

Sesuai dengan semboyan PKI, "Politik adalah panglima" seluruh kehidupan masyarakat diusahakan untuk berada di bawah dominasi politiknya. Kampus diperpolitikkan, mahasiswa yang tidak mau ikut dalam rapat umumnya, *appel-appel* besarnya dan demonstrasi-demonstrasi "revolusioner"-nya, dimaki-maki dan dirongrong oleh unsur Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) atau satelit-satelitnya. Wartawan yang ikut BPS dimaki-maki sebagai antek Nekolim atau agen CIA. Para budayawan pada umumnya dan para seniman pada khususnya tidak luput dari raihan tangan-tangan mereka.

Sudah barang tentu Realisme Sosialis sebagai doktrin komunis di bidang seni dan sastra diusahakan untuk menjadi doktrin di Indonesia, tetapi pelaksanaan doktrin tersebut dilakukan secara lebih represif daripada persuasif.

Peristiwa yang paling diingat-ingat oleh masyarakat pada bidang budaya adalah heboh mengenai Manifest kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Manifest kebudayaan yang dikenal dengan singkatan Fejoratif yang dilem-

⁶⁴ UU. No. 22, tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Lihat *Tujuh Bahasa Pokok Indoktrinasi*, hal 298.

parkan oleh PKI kepadanya, yakni "Manikebu. Isi Manifes kebudayaan itu tidaklah baru atau luar biasa. Yang diungkapkan adalah konsepsi Humanisme Universal yang timbul dalam masyarakat liberal, di Eropa Barat, yang menekankan kebebasan individu untuk berkarya secara kreatif.

Manifes itu tidak serta-merta diserang oleh PKI dan satelit-satelitnya. Mereka baru bertindak menyerangnya setelah lebih dari empat bulan manifes beredar. Apakah gerakan yang menyebabkan sekonyong-konyong PKI merasa perlu menyerang Manifes kebudayaan? Sebabnya ialah karena pada sastrawan, baik yang mendukung manifes kebudayaan maupun yang tidak, menyiapkan rencana untuk menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Suatu pengelompokan yang terorganisasi, dinilai PKI sebagai suatu bahaya yang harus secepatnya ditumpas sebelum berkembang menjadi besar, karena itu mereka memutuskan untuk menyerang KKPI.

Sastrawan-sastrawan yang menyiapkan KKPI bukan orang yang buta politik, mereka sudah melakukan pengamanan secukupnya, baik berupa konsepsi maupun berupa dukungan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan demikian PKI tidak menemukan "lubang" untuk menyerang KKPI yang dilanjutkan dengan membentuk Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Serangan yang dilakukan PKI didasarkan alasan bahwa Manifes kebudayaan adalah konsepsi asing yang berasal dari Barat, karena itu PKI kemudian mengadakan kampanye untuk mengindentikkan KKPI dan PKPI dengan Manifes kebudayaan untuk bersama-sama dihancurkan.

Serangan terhadap Manifes kebudayaan terus dilancarkan melalui tulisan yang makin nyaring bunyinya dalam *Harian Rakyat*, *Bintang Timur*, *zaman Baru*. Oleh PKI/Lekra, Manifes kebudayaan disebut sebagai penyelewengan dari Revolusi Indonesia yang berporoskan soko guru tani, buruh prajurit. Konsep hasrat "hati nurani manusia", bagi PKI/Lekra terlalu umum dan tidak revolusioner. PKI dan ormasnya menyokong penuh gagasan Manipol karena dalam ide-ide itu terdapat persesuaian gagasan sikap politik budaya dari perjuangan komunisme. Oleh *Bin-*

tang Timur dilontarkan tuduhan baru bahwa Manifes kebudayaan memisahkan politik kebudayaan, sehingga menjadikan Manikebu pegangan dan pedoman yang berarti menyampingkan Manipol.⁶⁵

Tajuk rencana *Warta Bhakti* menyebut, antara lain:

"Gagasan Manikebu lahir dari siasatnya orang-orang yang partainya sudah dilarang dengan mencoba berfilsafat bahwa kemanusiaan tanpa pandang bulu harus menjadi mahkota hidup kita. Manipol yang tidak bertoleransi terhadap kaum kontra revolusi. Manipol yang tidak memberi ampun kepada imperalisme agaknya dianggap oleh manikebuis sebagai suara yang tidak berperikemanusiaan . . . Manikebuisme, meskipun beredar bermerk "kebudayaan " tetapi hakekatnya adalah suatu paham yang diciptakan secara masak untuk membela liberalisme . . ."⁶⁶

Propaganda PKI yang hebat itu bukan sedikit mempengaruhi massa. Serangan-serangan terhadap pendukung-pendukung Manifes kebudayaan dan KKPI tidak henti-hentinya dalam harian, pidato, tokoh-tokoh PKI/Lekra dan juga dalam tindakan aksi-politik. DN. Aidit sebagai Wakil Ketua MPRS/Menteri Koordinator, antara lain menyebut "Manikebu menentang Nasakom, agar rakyat mengungkapkan kemunafikan mereka".⁶⁷ Istilah Manikebu bukan lagi diartikan hanya bagi penyokong dan pencetus Manifes kebudayaan saja. Manikebu menurut pengertian dan penggunaan PKI/Lekra termasuk penentang-penentang dari segala bidang kebudayaan, ekonomi, politik yang tidak sehaluan dengan cita-cita PKI. Serangan melalui media massa, aksi turun ke jalan berdemonstrasi dilakukan oleh penyokong PKI/Lekra.

Pidato-pidato Presiden Soekarno tentang Manipol-Usdek diolah pimpinan PKI untuk penerapan bagi konsumsi pengetahuan rakyat. Dalam pidato Manipol (17 Agustus 1959), Soekarno mengecam kebudayaan barat yang memperkenalkan tarian 'rock

⁶⁵ *Bintang Timur*, 5 Februari 1964.

⁶⁶ *Warta Bhakti*, 6 Maret 1964.

⁶⁷ *Bintang Timur* 23 Maret 1964.

and roll, "dansa a'la cha-cha", musik a'la "ngak-ngik-ngok gila-gilaan" yang diasosiasikan dengan cita-cita imperialisme Barat. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan perintah larangan terhadap Manifes kebudayaan pada 8 Mei 1964, kira-kira dua bulan setelah KKPI. Pernyataan larangan itu sebagai berikut:

"Sebab-sebab larangan itu ialah, karena Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi garis besar haluan negara dan tidak mungkin didampingi dengan Manifesto lain, apabila Manifesto itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya, pada hal itu demi suksesnya revolusi, maka segala usaha kita juga dalam lapangan kebudayaan, harus kita jalankan di atas rel Revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan-bahan indoktrinasi.⁶⁸

Pernyataan Presiden Soekarno yang mengangap pendukung Manifes kebudayaan ragu-ragu terhadap Revolusi dan bertentangan dengan Manipol adalah tuduhan yang sangat berbahaya. Majalah *sastra* yang menjadi wadah aktivitas-aktivitas Manifes kebudayaan, kehabisan napas.

Pencetusan utama Manifes kebudayaan H.B. Jassin, Wiratmo Sukito, Trisno Sumardjo merasakan bahwa mereka harus membuat suatu pernyataan berkenaan dengan perintah : pelarangan dari Presiden Soekarno untuk menjelaskan posisi Manifes kebudayaan, membersihkan diri mereka dan lain-lain penyokong Manifes kebudayaan dari aksi-aksi massa yang digerakkan PKI; karena itu 11 Mei 1964, ketiga tokoh itu menanggapi larangan Presiden Soekarno dengan pernyataan yang berbunyi, ". . . tidak ada maksud lain selain daripada membangkitkan swadaya di bidang kebudayaan".

Lebih lanjut dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut bahwa sesuai dengan larangan Presiden Soekarno terhadap Manifes kebudayaan yang disebut demi keutuhan dan kelurusan jalan-

⁶⁸ Pernyataan Larangan Presiden ini disiarkan sepenuhnya dalam *Warta Bhakti*, 10 Mei 1964.

nya revolusi dan demi kesempurnaan ketahanan bangsa, "maka kami para pendukung Manifes kebudayaan di Jakarta mengajurkan kepada saudara-saudara agar mematuhi/memenuhi maksud daripada larangan tersebut. Dengan demikian kita tetap setia di bawah pimpinan dan bimbingan Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, justru untuk kepentingan nasional kita sebagai salah satu golongan yang tetap setia pada Revolusi harus menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya."⁶⁹

Pernyataan semacam itu dibuat supaya jangan banyak korban jatuh akibat dukungan kepada Manifes kebudayaan. PKI dan ormas-ormasnya belum puas dengan hanya larangan ini, karena itu DN. Aidit dalam menyambut HUT 44 tahun PKI antara lain menyatakan ". . . rakyat dan mahasiswa-mahasiswa yang revolusioner progresif menghancurkan Manikebu, masih ada pegawai-pegawai instansi pemerintah yang melindungi Manikebu".⁷⁰

Karena merasa sudah cukup kuat, maka pada 27 Agustus sampai 2 September 1964 PKI mengadakan Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Jakarta. KSSR ini dimaksudkan untuk menandingi KKPI yang diadakan pada bulan Maret pada tahun yang sama. Dengan KSSR ini PKI mau membuktikan, bahwa suasana kebudayaan berada di bawah kekuasaan PKI.

Dengan demikian PKI berhasil memukul Manifes Kebudayaan, tetapi PKPI tidak dapat mereka hancurkan. Memang PKP mereka "kepung" dengan ketat sampai tidak dapat bergerak ke luar. Para budayawan Indonesia memperoleh pelajaran yang berharga, bahwa untuk menghadapi komunisme kecuali suatu manifes atau pernyataan prinsip, diperlukan pula senjata organisasi.⁷¹

⁶⁹ Pernyataan tersebut disebarkan kepada seluruh pendukung *Manifes Kebudayaan* dan di beri tanggal 8 Mei 1964.

⁷⁰ DN. Aidit, "Manikebu Bertugas Lutjuti Sendjata Rakjat"

⁷¹ DN. Aidit. "Hajo bersama-sama Bung Karno kita bina kebudayaan yang berkepribadian Nasional". *Zaman Baru*, Desember 1964, hal. 1-3.

3. Perkembangan Media Massa

Surat kabar dan majalah yang tidak bersedia menari dengan irama Demokrasi Terpimpin, harus menyingkir dan tersingkir. Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak (SIT) diperketat. Sejak 1960, semua penerbit surat kabar dan majalah diwajibkan mengajukan permohonan SIT. Pada formulir permohonan SIT itu dicantumkan 19 pasal pernyataan yang mengandung janji penanggungjawab surat kabar atau majalah tersebut. Untuk dapat diberi SIT, ia harus mendukung Manipol-Usdek.

Pedoman resmi untuk penerbitan surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia, dikeluarkan pada 12 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh pejabat Presiden. Pernyataan yang berisi 19 pasal dengan mudah digunakan oleh penguasa untuk menindak surat kabar dan majalah yang tidak disenanginya, sehingga satu demi satu penerbitan yang paling gigih menentang dominasi PKI dicabut SITnya, walaupun telah menandatangani pernyataan itu. Beberapa penerbitan itu adalah harian (*Pedoman, Nusantara, Keng Po, Pos Indonesia, Star Weekly*) dan lain-lain. Surat kabar *Abadi* memilih untuk menghentikan penerbitannya daripada menandatangani persyaratan 19 pasal itu. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa merajalelanya surat kabar PKI seperti *Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti*.⁷²

Dalam *Harian Rakjat* yang merupakan surat kabar resminya, pimpinan PKI memimpin kampanye agitasi dan propaganda untuk menghitamkan dan bahkan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dengan demikian mendekatkan dirinya kepada kedudukan hegemonitis dalam konstelasi politik Indonesia. Di samping *Harian Rakjat*, PKI menerbitkan berkala lainnya seperti *Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakyat Minggu, Zaman Baru* dan surat kabar yang diselenggarakan oleh CDB. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) satu-satunya organisasi profesi wartawan yang ada dan diakui pemerintah, didominasi oleh golongan komunis dan satelit-satelitnya. Akhirnya Depar-

⁷² H. Soebagio I.N., *Sedjarah Pers Indonesia*, Jakarta 1977 hal. 120-5.

temen Penerangan dapat digiring kepada sikap mendukung garis yang diajukan PKI.

Dalam pada itu, PKI dan satelit-satelitnyas sejak dulu telah menyadari pentingnya menguasai dan mengontrol alat-alat media massa. PKI bersedia berbuat apa saja untuk mengamankan pers wartawan komunis.

Seorang tokoh dalam dunia pergerakan pada umumnya dan dalam dunia pers pada khususnya, yakni Sajuti Melik alias Juti, bermaksud menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno yang murni (dalam arti belum di pengaruhi oleh Komunisme) dalam tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar-surat kabar dengan mengambil judul tulisan "Belajar memahami Sukarnoisme". Isi pokok tulisan Sajuti Melik itu ialah "tidak setuju Nasakom", melainkan setuju Nasasos. Maksudnya ialah untuk mengingatkan berbagai pihak akan ajaran-ajaran Bung Karno yang semula. Dengan demikian diharapkan dapat membendung penyimpangan-penyimpangan oleh PKI terhadap ajaran-ajaran itu. Pada mulanya tulisan juti ini dimuat dalam *Suluh Indonesia*, koran PNI, dan dari koran itu dikutip oleh harian-harian dan majalah-majalah lain, tetapi setelah ada protes keras dari PKI, kemudian dihentikan pemuatannya oleh *Suluh Indonesia*. Berdasarkan tulisan-tulisan Sajuti Melik ini, berdirilah Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Pengurus BPS terdiri atas: Adam Malik (ketua), BM. Diah (wakil ketua), Sumantoro (ketua harian), Junus Lubis (wakil ketua harian), Drs. Asnawi Said (sekretaris umum), Sunaryo Prawiraadinoto (bendahara), Sugiarso (biro dalam negeri), Zain Effendi (biro luar negeri), dan Adyatman (penghubung). BPS ini mendapat dukungan luas dalam masyarakat, di lain pihak mendapat tantangan yang hebat dari PKI dan satelit-satelitnya. Melalui surat kabar-surat kabar, rapat-rapat dan demonstrasi, golongan komunis memfitnah dan mencaci maki BPS dengan slogan yang terkenal ketika itu, yakni *To kill Soekarno with Soekarnoisme* Tuduhan lain yang dilemparkan ke alamat BPS ialah agen-agen *central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat atau menjadi antek-antek kaum subversif neo-kolonialis.

Presiden Soekarno mendapat tekanan-tekanan dari golongan komunis untuk menindak BPS. Pada akhirnya Presiden dalam bulan Februari 1965 ”. . . . *melarang semua aktivitas BPS dan mencabut izin terbit koran-koran penyokong BPS*”. Pemerintah kemudian mengadakan pengusutan terhadap gembong-gembong BPS yang pada umumnya terdiri atas wartawan-wartawan termasuk Sajuti Melik. Selain itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan pemecahan secara massal terhadap anggota-anggota PWI yang dianggap terlibat dalam kasus BPS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anak Agung Gde Agung, Renville als keerpent in Nederland-Indonesieche Betaekkingen
- Adam Malik, *Mengabdi Republik Jilid II*, Jakarta, 1978.
- Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, Djakarta, 1962.
- Adams, Cindy, *Sukarno: M Autobiografi*. Astold To Cindy Adams, Indianapolis-Kansas City-New York, Bobbs-Meril Coy Inc, 1965.
- Aidit, D.N., *Marxisme dan Pembinaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1964
- Aidit, N.D., "Manikebu Bertugas Lucuti Sendjata Rakjat", *Bintang Timor*, 31 Mei 1964.
- Aidit, N.D., "Hajo Bersama-sama Bung Karno kita bina kebudayaan yang berkepribadian Nasional", *Zaman Baru*, Desember 1964.
- Aidit, D.N., *Dengan Sastra dan Seni Jang Berkepribadian Nasional Mengabdi Buruh, Tani, Prajurit*, Djakarta: Jajasan pembaruan, 1964.

- Aidit, D.N., *Angkatan Bersenjata dan Penyesuaian Kekuasaan Negara dengan Tugas-tugas Revolusi*, Djakarta: Pembaruan, 1964.
- Aidit, D.N., *Membela Pancasila*, Djakarta: Jajasan pembaruan, 1964
- Aidit, D.N., *Revolusi, Angkatan Bersenjata dan partai Komunis*, Djakarta: Pembaruan, 1964
- Agung, Ide Anak Agung Gde, *Twenty Years Indonesian foreign Policy 1945-1965*, The Hague: Mouton Press, 1973.
- Alfian, Dr., *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat*, Djakarta, 1971.
- Alisyahbana, Takdir S., *Sejarah Bahasa Indonesia*, Djakarta, 1956.
- "Amanat Panglima Besar Soedirman, 7 Juni 1946", *Kumpulan Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman*, Djakarta, 1976.
- Amin, S.M.Mr., *Indonesia di Bawah Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Tintamas, 1967.
- Anne Maria The, *Darah Tersimbah di Djawa Barat*, Djakarta: Pusat Angkatan Bersenjata, 1968.
- Anspach, Ralph, *The Problem of a Plural Economy and its Effects on Indonesia Economy*, Ann Arbor, 1963.
- Anwar Rosihan, "Adakah Perserangan antara pers Ibukota dengan Pers Daerah?", *Warta dan Masa*, No. 1 s/d 6, 1955/1956.
- Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII; Penyelesaian Peristiwa DI/TII*, Djakarta: Pusat Angkatan Bersenjata, 1965.
- Assegaf, D.H., "Mass Mulia dan Perkembangan Bahasa", *Indonesia Raya*, 7 Desember 1972.
- Askandar, Kolonel et.al., *Operasi Lintas Laut Penembusan Blokade Belanda (1946-1949)*, (naskah).
- Bardosono, Major, *Peristiwa Sulawesi Selatan*, Djakarta, 1950

- Ben Van Kam, *Ambon Door de Eewen*, 1977.
- Biro Perancang Nasional, *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, 1956–1969*, Djakarta: Biro Perancang Nasional, 1960.
- Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Medan, 1976.
- Bolond, J., *The Struggle of Ofislam in Modern Indonesia*, The Hague Motinnus Nijhoff, 1975.
- BPS, *Aksi dan Reaksi*, Yayasan Pembaruan, 1964.
- Brackman, Arnold, *Indonesia Communisme, a History*, New York: Frederick A. Proeger.
- Brugmans, Prof. Dr. I.J., et. al., *Nederland–Indie Onder Japanse Bezetting: Gegevens en Documenten Over de Joren 1942–1945*. Franeker, 1969.
- Budiardjo, Miriam S., *Evaluation Toward Parliementary Government in Indonesia: Darties and Parliament*, Georgetown Univ, 1955.
- Cribb, R.B., *Jakarta in The Indonesian Revolution 1945–1950*, Disertasi Universitas of London, 1984.
- Dahlan, Alwi, "Komunikasi Massa Media dan Dunia Ilmu", *Sinar Harapan*, 5 Januari 1971.
- Departemen Luar Negeri, *Duapuluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*.
- Departemen Luar Negeri, *Duapuluh Tahun Departemen Luar Negeri RI*.
- Departemen Luar Negeri, *Duapuluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, Djakarta, 1971.
- Departemen penerangan RI., *Propinsi Djawa Timur*.
- Departemen Penerangan RI., *Propinsi Sumatera Selatan*.
- Departemen Penerangan RI., *Propinsi Kalimantan*.
- Departemen Penerangan RI, *20 Tahun Indonesia Merdeka Djilid I*, Djakarta, 1965.

Departemen Penerangan RI, *Buku Ringkasan Pembangunan Semester*, Djakarta, 1961.

Departemen Penerangan RI., *Propinsi Sulawesi*.

Departemen Pengajaran dan Kebudayaan, Penguasa Perang Pusat. *Pengawasan Pengajaran Asing*.

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1965.

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, Djakarta, 1963.

Djamhari, Saleh As'ad, Drs., *Ichtilisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945—sekarang)*, Djakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1971.

Djamardi, Radik, *Naskah Sejarah Corp Hasanuddin*, 1972.

Projodisurjo, Ahmad Soebandrio, *Kesadaran Nasional: Otobiografi*, Jakarta, 1978.

Djojohadikoesoemo, Soemitro, *Beberapa Soal keoeangan*, Djakarta, 1947.

Doulton, Lieutenert Colonel A.J.F., *The Fighting Cockbeng a history of the 23 rd Iresian Division*.

Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri RI, Djakarta, 1971.

Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945—1970, 1971.

Dingga J.A., "Studie Pendahuluan Perkembangan Musik Indonesia", *Almanak Seni* 1957.

Dyk C. *Rebellion Under the Bournier of Islam*, Leiden, 1981.

Effendi O. Seni Bangunan di Indonesia, *Gema Suasana* No. 2 Februari 1948.

Feith, Herbert, *The Indonesian Election of 1945*, Ithaca: Cornell University Press, 1957.

Feith, Herbert, *The Decline of Constituonal Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1962.

- Gaharu, Sjamaun, *"Perebutan Kekuasaan dari tangan Djepang"*, *Modal Revolusi 45*, Kutaradja, 1960.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Qahar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Groen, PNH, *Narsroutes en Dwalspo rem Het Nederlands Militair-Stategisch Beleid in Indonesia 1945-1950*, S'Gravenhage, 1991.
- Hakim, Lukman, Mr., *"Keadaan dan Keuangan Pada Waktu Sekarang dan Jalan Keluar Mengatasi" Menuju Ekonomi Marhaenis*, Yogyakarta,
- Hanifah, Abu. Prof. dr., *"Pembangunan Negara dan Pendidikan Rakyat"*, *Kompas*, 21 November 1970.
- Hasil Simposium Film Pertama dari Persatuan Pers Film Indonesia (PERPERI), *Arti Film dan Partai Politik*, Jakarta, Desember 1957.
- Harahaf. F. Frans, *"Inmemoriam Cornel Simandjuntak"*, *Sinar Harapan*, 13 September 1971.
- Harahap, Parada, *Saat Bersedjarah*, Djakarta: Gapura, 1951.
- Harsono, Ganis., *Recollection of an Indonesia Diplomat in the Sukarno Era*.
- Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Grafiti, 1992.
- Hatta, Mohammad, *Dasar-dasar politik Luar Negeri RI.*, Jakarta: Tintamas, 1952.
- Hatta, Mohammad, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1978.
- Hatta, Mohammad, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta, 1970.
- Haed BH., *"Pembakuan Bahasa Indonesia"*, *Kompas*, 29 Juni 1972.
- Jassina, HB., *Kesusastaan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei*, Djakarta: Gunung Agung, 1955.
- Jones, Howard Palfrey., *The Possible Dream.*, New York: Harcourt Broce Javanovich Ind., 1971.

Jong, J.J.P. *Diplomatic of Stijd. Het Nederlands Beleid Tege-
nooe de Indonesische Recolutie 1945-1947*, Heppel
Amsterdam, 1988.

Intruksi Menteri P & K, No. 1. 17-8-1989, Lihat Suparto
S.H., dkk, *Civies*, Djakarta, 1962.

Ismail, Usmar, "Sandiwara dan Masyarakat:", *Madjalah Indone-
sia*, th. 1, Djakarta, 1949.

Ismail, Yahya, *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan
Lekra di Indonesia*: Kuala Lumpur, 1972.

Istilah "Fakulteit", "Universiteit" kemudian diubah.

Kahin, George MC. Turna, *The Asian-African Conference*, Itha-
ca dan New York: Cornel University Press, 1969.

Kahin, George M. Turnan. *Nationalism and Revolution in In-
donesia*. Ithaca dan New York: Cornel University Press,
1969

"Kegiatan Cinematografi di Indonesia" *Gema Pemuda Al Irsjad*,
No. 6 Th III, September 1956.

Kementerian Penerangan, Djawatan Radio Republik Indonesia,
Sedjarah Radio di Indonesia, Djakarta, 1955.

Kementerian penerangan, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Djakar-
ta, 1954.

Kementerian penerangan, *Keterangan dan Djawaban pemerintah
atas Program kabinet Wilopo*. Djakarta, 1952.

Kementerian penerangan Republik Indonesia, *Lukisan Revolusi
Rakjat Indonesia*, Jogjakarta, 1949.

Kementerian penerangan RI, *Propinsi Sumatera Selatan*, Djakar-
ta, 1953.

*Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet
Ali Sastroamidjojo II*, Djakarta, 1956.

Kementerian penerangan RI, *Propinsi Djawa Tengah*, 1952.

Kementerian Penerangan *Exim Bank*, 1952.

- Kementerian Penerangan RI, *Kabinet-kabinet RI*, Djakarta, 1957.
- Kentjono Djoko, "Penyempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia", *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai Tjerminan Manusia Indonesia Baru*, Djawaban, 1967.
- Kertapati, Sidik *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Cetakan III, 1964.
- Koesnodiprodjo *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945* (terbitan baru), Jakarta, 1951.
- Kopkamtib *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI)*, Jakarta, 1978.
- Lapian A.B. dan P.J. Droogleven (peny), *Menelusuri Jalur Linggajati*, Jakarta: Grafiti, 1992.
- Leirissa, R.Z., PRRI/PERMESTA: *Strategi Pembangunan Indonesia Tanpa Komunis* Jakarta: Grafiti, 1992.
- Leirissa, R.Z., *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Indonesia, 1975.
- Leirissa, R.Z., *Bukan Disiplin Kadaver Melainkan Disiplin Berjiwa: Operasi-operasi Militer Terhadap Permesta 1958*, Jakarta, 1965.
- Lembaga Bahasa Nasional, *Bahasa dan Kesusasteraan*, Seri Khusus No. 9/1973.
- Lev. Daniel., *The Transition To Guided Democracy Indonesia Politics 1957-1959*, Ithaca, New York: Cornell Univ Press, 1966.
- Laporan Tahunan Bank Indonesia*, 1959-1960.
- Laporan Tahunan Bank Indonesia*, 1970-1971.
- Lembaran Negara* No. 696/1959.
- Lembaran Negara* No. 89/1959.
- Lembaran Negara* No. 1837/1959.

Lembaran Negara No. 1851/1959.

Lembaran Negara No. 102/1965.

Meek John Paul, *Government and Economic Development in Indonesia*, Ann Arbor, 1965.

Makoginta, A.J., Maj. Djen (Ed.), *Sedjarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*, Djakarta: Staf Angkatan bersenjata, 1964

Mook H.J. van, *Indonesie, Nederlanden de Wereld*, Amsterdam, 1949.

Naskah Riwayat Hidup Ir. H. Djuanda Kartawidjaja (Arsip Kabinet Perdana Menteri).

Nasution, A.H., *Kekaryaan ABRI*, Djakarta: Seruling Masa, 1971.

Nasution A.H., *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*, Djakarta: Seruling masa, 1967.

Nasution A.H., *Tjatatatan-tjatatatan Sekitar Politik Militer Indonesia*, 1955.

Nasution, A.H., *Tentara Nasional I*, Djakarta: Seruling Masa, 1968.

Nishihara, Masashi., *The Japanese and Sukarno's Indonesia, Tokyo Jakarta Relation, 1951-1966*, Honolulu: The University Press of Hawaii, 1976.

Nitisastro, Widjojo, *Population trends in Indonesia*, 1970.

Notosoetardjo *Dokumen dokumen Konferensi Medja Bundar*, Djakarta, 1956

Notosusanto Nugroho. *Tentara Peta Pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1979.

Notosusanto Nugroho. *The Japanese Occupation and Indonesia Independence*, Jakarta: Departemen of Defence and Security, Center For Armed Forces History, 1975.

Notosusanto, Nugroho. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1976

- Notosusanto Nugroho, "Mengamankan Pancasila Dasar Negara", *Persepsi*, I, No. I, 1979.
- Notosusanto, Nugroho *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces*, Djakarta: Departemen of Defence and Security Centre For Armed Forces History, 1970.
- Notosusanto. Nugroho *Sedjarah dan Hankam*, Jakarta, 1968.
- Notosutardjo *Dokumen Konferensi Medja Bundar*.
- Nasution A.H., *Tentara Nasional Indonesia II*, Djakarta. 1968.
- Oey Hangkee. *War and Diplomacy in Indonesia 1945-1950*, Townsville, 1981.
- Ong Hok Ham, *Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Ong Hok Ham, *Sapta marga Berkumandang di Sumatera: Operasi-Operasi Penumpasan Pemberontakan "PRRI"*, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1965.
- Padinonagoro R.M.T. Dr., "Seni Suara Indonesia dalam Revolusi", *Siaran dan Masyarakat Indonesia*, 1950.
- Palmier, Leslie, *Indonesia and the Dutch*, London-New York, 1962.
- Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *Wilopo 70 Tahun*, Jakarta, 1979.
- Panitia Penulisan Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang, *Pertempuran Lima Hari di Semarang*, Semarang, 1978.
- Pendit, Nyoman S., *Bali Berdjuaug*, Den Pasar, 1954.
- Persadja, *Proses Peristiwa Sultan Hamid II*, Djakarta, 1955.
- Piekaar, A. *Aceh en de Oorleog Met Japan*, Den Haag-Bandung: W. Van Hoeve, 1949.
- Naskah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan, (Manuskrip).
- Prijadi, Daksa, *Gerakan Operasi Militer II; Penumpasan "APRA" Westerling di Bandung*, Djakarta, 1965.
- Pusat Sedjarah Angkatan Bersenjata, *40 hari Kegagalan G 30 S*, Djakarta, 1965.

- PUSSEMAD, *Mengungkap Sapta Marga*, Djakarta, 1967.
- Purbawakatja, Sugarda Prof., *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Djakarta, 1967.
- Putra Djaja, Soeripto *Kegagalan Pemberontakan Husein Cs.*, Surabaya, 1958.
- Roliby Osmar, *Sedjarah hari Pahlawan*, Djakarta, 1952.
- Ranuwihardjo, A. Dahlan, SH, *Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi*, Jakarta, 1979.
- "Rencana Produksi Tiga Tahun" (Plankasimo), *Buku Penyongsong Konferensi Ekonomi Antar-Indonesia di Yogyakarta*, 2-8 Desember 1949, Semarang, 1949.
- Reporter Radio, "Konferensi Siaran Dalam Negeri Tgl. 10 s/d 13 Desember 1950", *Siaran dan Masyarakat Indonesia*, 1951.
- Rochmani, Santoso, *Bom Waktu Kolonialis Meledak di Makassar*, Djakarta, 1965
- Roeslan Abdulgani, *Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, 1957.
- Roeslan Abdulgani, *Mendajung Dalam Taufan*, Jakarta, 1956.
- Roeslan Abdulgani, *25 tahun Indonesia di PBB*, Djakarta, 1971
- Ronde Tafel Conferentie te Gravenhage en Documenten, s'Gravenhage 1949.
- Rosidi, Ajip, *Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Bahasa Indonesia*, Bandung, 196. Lihat juga tentang Angkatan Terbaru A. Teeuw, *Modern Indonesia Literature*, The Hague, 1967.
- Rosidi Ajip "Sumbangan Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia Kepada Perkembangan Kesusastraan Indonesia (Prasaran Simposium Sastra, Pekan Kesenian Mahasiswa Kedua di Djakarta pada tanggal 14 Agustus 1960), dalam kumpulan tulisan Ajip Rosidi, *Kapankah Kesusastraan Lahir?*, Djakarta, Bhratara, 1964.

- Salim, Makmun, Drs., *Sedjarah Operasi-operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*, Djakarta, 1971.
- Sastra dan Masyarakat Indonesia, 1950.
- Sastroamidjojo, Ali, *Tonggak tonggak di Perjalananku*, Jakarta, 1952.
- Sekretariat Negara RI., *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, 1958.
- Semdam VII/Diponegoro, *Palagan Ambarawa dan Hari Infanteri* Semarang, 1967.
- Sewaka, *Tjorat-tjoret dari Djaman ke Djaman*.
- Simatupang.T.B., "*Duapuluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952*", Sinar Harapan, 16-21.
- Simorangkir, JCT dan Drs. B. Mang Rey Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*.
- Smail, J.R.W., *Bandung in the Early Revolution 1945-1946*, Ithaca, 1964.
- Soebagio. H.I.N., *Sejarah Pers Indonesia*, Jakarta, 1977.
- Soedarsono, Dr., "Pengiriman Beras di India", *Siasat*, Th. I, No. 16, 9 April 1964.
- Soe Hoe Gie, *Kisah Penumpasan "RMS" (Gerakan Operasi Militer III)*, Djakarta, 1965.
- Soedarsono, R.P., "Revolusi Djogja dan Sekitarnya", *Penelitian Sedjarah*, No. 3. Th I.
- Shauvee, Richard, *Nationalist, Soldiers and Separatist: The Ambonese Island From Colonialist to Revolt 1850-1950*, Leiden 1990.
- SSP, Pranata, "Perang Kemerdekaan di Tegal", *Berita Buana* (dimuat secara bersambung) dari tanggal 29 Desember 1976 sampai 22 Januari 1977.
- Subandrio, Drs., *Indonesia on eht Mrch, Vol. II, Departement on Foreign Affairs*, Republic of Indonesia.

- Subangun, Emanuel, "Rapat Seniman-seniman Sastra se Indonesia di TIM tanggal 9 dan 10 Desember 1972", *Kompas*, 9 Desember 1972.
- Subardjo Ahmad, Mr., *Lahirnya Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Kinta, 1972.
- Sudiro, *Pengalaman Saja di sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta, 1974.
- Sudiro, (B.M. Diah Angkatan Baru) *Pengalaman Saya di sekitar Proklamasi 17 Agustus '45*, Jakarta.
- Sukarno, *Menjelamatkan Indonesia*, Djakarta, 1957.
- Sullivan, H. John, "The Press and Politics in Indonesia", *Journal Quarterly*, 44, 1976
- Sumardi, "Meninjau Corak Siaran Radio", *Radio dan Masyarakat Indonesia*, 1952.
- Sumardjo Trisna, "Kedudukan Seni Rupa Kita", *Almanak Seni 1957*.
- Supomo, Prof. Dr., *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Djakarta, 1950.
- Sutter, John O., *Indonesianisasi*, Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- Tailor, Alastair M., *Indonesian Independence and the United Nations*, London: Stevens Sons, 1960.
- Team Aistensi Pangdam II/Bukit Barisan, *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II/Bukit Barisan*, Jilid I, Medan, 1977.
- Team Redaksi Djawatan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, *Sedjarah Singkat Universitas Indonesia*, Djakarta, 1967.
- Team Sejarah Dewan Harian Daerah Angkatan '45 Jawa Timur, "Peristiwa Perobekan Bendera Tiga Warna" *Dalam Menyongsong Pembangunan Museum Perjuangan '45 Jawa Timur*.

- Teeuw A., *Sastra Baru Indonesia*, Bujung Saleh, "Latar Belakang Kemasyarakatan Kesusastraan Indonesia", Bahasa dan Budaya, 2 Mei 1954. Periksa Juga Prof. Dr. A. Teeuw, *Pokok dan Tokoh*, Djilid II, Djakarta, 1958.
- Tirtoprodjo Susanto, Drs. SH., *Sedjarah Revolusi Indonesia*, Djakarta, 1963.
- UNESCO, *World Communication*, (1951).
- UU. No. 22, Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Lihat *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*.
- Vice Admiral The Earl Mounbatten, *Report to the Combined Cheif of Satff by the Supreme Allied Commander Swith East Asia*, 1943–1945.
- Wardhana, Ali, *Monetary Problems Of on Under Depelovment Economy With Special Reference to Indonesia*, Ann Arbor, 1952.
- Wehll, David, *The Bith of Indonesia*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1948.
- Wilopo, SH, *Zamana Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahannya*, Jakarta, 1978
- Wowor, D., *Sulawesi Utara Bergolak*, Jakarta, 1979.
- Yamin, Muhammad, Mr., *Naskah Perjuangan Undang-Undang Dasar 1945*, 1, Djakarta: Jajasan Prapanca, 1959 dan 1971.
- Yamin, Muhammad, Mr., *Pembentukan dan Pembubaran UNI*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Yamin, Muhammad, Mr., *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djakarta–Amsterdam, 1954.
- Yamin, Muhammad Mr., *Sapta Darma*, Medan, 1950.
- Yamin, Muhammad, Mr., *Pembahasan UUD 1945*, Djakarta: Djembatan, 1950.

KORAN

- Abadi*, Djakarta, Agustus 1950.
Antara, Djakarta, Jogjakarta, 1946–1950, 1953–1957, 1965.
Asia Raja, Djakarta, 1945.
Berita Yudha, Djakarta, Juli, 1972.
Berita Indonesia, Djakarta, 1947.
Bintang Timur, Djakarta, Februari dan Maret 1964.
Evening News, Djakarta, 1945.
Harian Rakyat, Djakarta, 1959 dan 1964.
Indonesia Raja, Djakarta 1957 dan 1959.
Independent, Djakarta 1945.
Kedaulatan Rakyat, Jogjakarta, 1945–1948 dan 1957
KENPO, Djakarta, 1945, 1949, 1953.
Merdeka, Djakarta, 1949, 1962, 1972.
Min Pao, 18 November 1947.
Pelita Rakjat, Jogjakarta, 1948, 1949.
Pedoman, Djakarta, 1956, 1957.
Semangat Merdeka, Djakarta, 27 Oktober 1945.
Sinar Harapan Djakarta, 1972.
Soeara Merdeka, Kutaradja (Banda Aceh), 1945.
Suluh Indonesia, Djakarta, 1956 dan 1959.
Tjahaya, Bandung, 1945.
Warta Bakti, Djakarta, 1964.

MAJALAH

- "Gema Suara", *Madjalah Bahasa Indonesia*, 6 Juni 1950.
Bahtera, 7 Tahun I, 15 Juni 1947.
Basis, (Madjalah Kebudayaan), No. 7, Tahun XII, April 1963.
Berita Republik Indonesia, Tahun II, No. 15–16, 1 Juli 1946.
Makmoer, No. 9 Tahun I, 25 April 1946.
Makmoer, No. 7, Tahun I, 10 April 1946.
 Pernyataan ini Disebarkan ke Seluruh Pendukung *Manifes Kebudayaan dan diberi tanggal 8 Mei 1964*.
Mimbar Indonesi, No. 2, Th. I, 22 November 1947.

- Djuanda, Ir., "Ekonomi Nasional", *Mimbar Indonesia*, No. 32, Th. IV, 12 Agustus 1950.
- Nasional*, 27 Juni 1947
- 'Uraian Tentang Kelas Masyarakat", *Pewart*, No. I, 15 juni 1945.
- "Konferensi Perguruan Tinggi", *Pembangunan*, No. 1 Tahun II, 1 April 1947.
- Leirissa, R.Z. "Republik Maluku Selatan", *Prisma*, No. 7 Th. VII, Agustus 1978.
- Siasat*, Th. I, No. 20, 17 Mei 1947.
- Siasat*, No. 15, Th. I, 12 April 1947.
- Tahir, Achmad Brigjen, "Soal Mandala dan Irian Barat", *Karya Wira Djati*, No. 9/1963.
- Tempo*, 16 Agustus 1975.
- "The Resignation of The Natsir Cabinet", *Indonesian Affairs*, Vol. I, No 3 March 1951.
- Thayeb Moh I, Mr, "Blokade Ekonomi", *Mimbar Indonesia*; No 1. Th. Januari 1947.
- Siaran Kementerian Penerangan I*, No. 6, 12 September 1956.
- Siaran Kementerian Penerangan I*, No. 6, 12 September 1958.
- Nasution, A.H., "Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan* November 1972.
- "Pidato Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Harjono Joedatmodjo pada pembukaan Seminar Pers di Tugu, Bogor, tanggal 24 Juli 1955", *Warta dan Masa* No. 1 s/d 6 1955/1956.

WAWANCARA

- Adam Malik, Menteri Luar Negeri, Jakarta.
- Ahmad Soebardjo, Mr, bekas Menteri, Jakarta.
- Arifin Abdurrachman, Prof. Dr. Gurubesar, Jakarta.
- Didi Kartasasmita, Mayor Jenderal (Pur), Jakarta.
- Djamal Ali, Wartawan, Jakarta.
- Djohar Noer, Swasta, Jakarta.
- Kasimo, I.J. Ketua Partai, Jakarta.
- Latief Hendraningrat, Brig. Jend. (Pur), Jakarta.

Mahmud Pengusaha, Jakarta.
Marzuki Yatim, bekas Menteri, Jakarta.
Mohammad Hatta, bekas Wakil Presiden, Jakarta.
Samidjo Mangoenwirono, Kolonel (Pur), Jakarta.
Singgih Drs. Swasta, Jakarta.
Soeharto, Jenderal, Presiden RI, Jakarta.
Soengkono, Mayor Jenderal (Pur), Jakarta.
Soetjipto Joedodihardjo Jenderal (Pur), Jakarta.
Soewardi, M.R.A., pensiunan pegawai negeri, Jakarta.
Subchan Zaini Erfan, bekas wakil Ketua MPRS, Jakarta.
Sudiro, pensiunan Gubernur, Jakarta.
Suhud, S., swasta, Jakarta.

Lampiran 1

Maklumat Wakil Presiden No. X

KOMITE NASIONAL PUSAT
Pemberian kekuasaan legislatief
kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SESUDAH MENDENGAR pemitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar, hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubungan dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

M e m u t u s k a n :

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menyetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingdjaja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.

Lampiran 2**Maklumat Pemerintah***

PARTIJ POLITIK. Andjuran Pemerintah tentang pembentukan partij-partij politik.

Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partij-partij itu hendaknja memperkuat perdjuaan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa :

1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik, karena dengan adanya partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partij-partij itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

Djakarta, 3 Nopember 1945

**WAKIL PRESIDEN
MOHAMMAD HATTA.**

Lampiran 3

PERSETUDJUAN LINGGADJATI

Delegasi-2 Belanda dan Indonesia dalam rapat pada hari ini telah mendapat kata sepakat tentang persetudjuan dibawah ini, hal mana terbukti dari pemaparan naskah jang tersebut dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia masing-2 berlipat tiga. Pemerintah Belanda

dalam hal ini berwakilan Komisi-Djenderal,

dan

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia oleh karena mengandung keinginan jang ichlas hendak menetapkan perhubungan jang baik antara kedua bangsa Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan tjara dan bentuk dengan suka-rela jang merupakan djaminan sebaik-baiknja bagi kemadjuan jang bagus serta dengan masa datang, dan jang membukakan djalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar jang baru menetapkan mupakat seperti berikut dengan ketentuan akan mengandjurkan persetudjuan ini selekas-lekasnja untuk memperoleh kebenaran daripada madjelis perwakilan rakjatnja masing-masing.

Patsal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera.

Adapun daerah-daerah jang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula di dalam atau ke dalam Daerah Republik. Untuk menjelenggarakan jang demikian itu, dengan segera akan dimulai melakukan tindakan jang perlu-perlu, supaja selambatnja pada waktu jang disebutkan dalam pasal 12, termasuknja daerah-daerah jang tersebut itu telah selesai.

Patsal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menjelenggarakan segera berdirinja sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, jang berdasarkan per-serikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Patsal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnja dengan ketentuan, bahwa, djika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusjaw-ratkan dengan lain-lain bagian daerah pun djuga, menjatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan sematjam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Keradjaan Belanda.

Patsal 4

(1) Adapun negara-negara jang kelak merupakan Negara Indoneisa Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur Besar, jaitu dengan tidak mengurangi hak kaum pen-duduk dari pada sesuatu bagian daerah untuk menjatakan kehendaknja, menurut aturan demokratis, supaja kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan tjara lain.

(2) Dengan tidak menjalahi ketentuan didalam pasal tadi dan didalam ajat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu-negeri-nja.

Patsal 5

(1) Undang-Undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, jang akan didirikan daripada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain jang akan termasuk

kelak dalam negara Indonesia Serikat itu, jang wakil-wakil itu ditudjukan dengan djalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ajat jang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang tjara turut-tjampurnja dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia oleh daerah-daerah jang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk jang tidak ada atau tidak tjukup perwakilanja segala itu dengan mengingat tanggung-djawab dari para Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Patsal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharaan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia akan bekerdja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia, jang dengan terbentuknja itu Keradjaan Belanda jang meliputi Negara Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao ditukar sifatnja menjadi persetudjuan itu, jang terdiri pada satu pihak dari pada Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnja daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Jang tersebut diatas ini, tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian berkenaan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnja.

Patsal 7

(1) Untuk membela-pemeliharaan kepentingan-kepentingan jang tersebut didalam pasal diatas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Negara Indo-

nesia Serikat: mungkin djuga oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat negara-negara itu.

(3) Adapun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerdja-bersama dalam hal perhubungan luarnegeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan, serta djuga hal-hal ekonomi kebudajaan.

Patsal 8

Diputjuk Perserikatan Belanda Indonesia itu duduk Radja Belanda.

Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Radja.

Patsal 9

Untuk membela peliharaan kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda dan kepentingan-kepentingan Keradjaan Belanda di Indonesia maka pemerintah masing-masingnya kelak mengangakat Komisaris Luhur.

Patsal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain akan mengandung djuga ketentuan-ketentuan tentang :

- a) pertanggungan hak-hak kedua belah pihak jang satu terhadap jang lain dan djaminan-djaminan kepastian kedua belah pihak penetapi kewadajiban² jang satu kepada jang lain;
- b) hal kewarga-negaraan untuk warga-negara Belanda dan warga-negara Indonesia masing-masing di daerah lainnja.
- c) aturan tjara bagaimana menjelesaikannja apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat ditjapai mupakat;
- d) aturan tjara bagaimana dan dengan sjarat-sjarat apa alat-alat kelengkapan Keradjaan Belanda memberi bantuan

kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang tjukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;

- e) pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, jang dimaksudkan djuga oleh piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Patsal 11

(1) Anggar-anggar itu akan direntjanakan kelak oleh suatu permusjawaratan antara wakil-wakil Keradjaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat jang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar-anggar ini terus berlaku, setelah dibenarkan oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat kedua belah pihak masing-masingja.

Patsal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaja berwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaja setelah terbentuknja Persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah mendjadi Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka jang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, jang lagi berada didalam daerah kekuasaannja de facto. Sebuah Panitia bersama akan dibentuk untuk menjelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Patsal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia sehingga susunannya dan tjara bekerdjanja seboleh-bolehnja sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan bentuk-susunan menurut hukum negara, jang ditekankan itu maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan supaja dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang akan supaja, sementara menantikan berwujudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Keradjaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Patsal 16

Dengan segera setelah persetudjuan ini mendjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan balatentaranja masing-masing.

Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang sampai seberapa dan lambat-tjepatnja melakukan pengurangan itu; demikian djuga tentang kerdja-bersama dalam hal keterangan.

Patsal 17

(1) Untuk kerdja-bersama jang dimaksudkan dalam persetudjuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia hendak diwujudkan sebuah badan jang terdiri daripada delegasi-delegasi jang ditudjukan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing2nja dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetudjuan ini, jang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi jang tersebut itu, maka menjerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, jang diangkat dengan semupakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Patsal penutup

Persetudjuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia.

Kedua-duanja naskah itu sama kekuatannja.

Djakarta, 15 November 1946

Lampiran 4

PERSETUDJUAN RENVILLE

Dewan Keamanan

*Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan
Pemerintah Republik Indonesia
Persetujuan gantjatan-sendjata antara Pemerintah
Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Ditandai-tangani pada pertemuan yang ke-empat
pada tanggal 17 Djanuari 1948*

Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia jang dalam persetudjuan ini disebut para pihak, bersama ini menjetudjui seperti berikut :

1. Bahwa suatu perintah tinggal tetap (stand fast) dan menghentikan tembak-menembak (cease fire) akan dikeluarkan oleh kedua pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditanda tangani persetudjuan ini dan akan berlaku sepenuhnya didalam empatpuluh delapan djam. Perintah itu berlaku untuk pasukan-pasukan kedua pihak disepandjang garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam proklamasi Pemerintah Hindia-Belanda pada 29 Agustus 1947, jang akan dinamakan garis statusquo, dan di daerah-daerah seperti jang dimaksud dalam ajat jang berikut.
2. Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan dibentuk daerah-daerah jang akan dikosongkan oleh tentara (demilirized-zones), pada umumnja sesuai dengan garis statusquo tersebut di atas; daerah-daerah itu pada pokoknja mengenai daerah-daerah diantara garis statusquo, dan disatu pihak garis kedudukan Republik jang terkemuka lebarnya rata-rata daerah-daerah itu kira-kira bersamaan.
3. Bahwa dalam mengadakan daerah-daerah jang dikosongkan tentara itu sekali-kali tidak mengurangi hak-hak tuntutan-

tuntutan atau kedudukan para pihak menurut resolusi-resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus serta 1 November 1947.

4. Bahwa setelah diterima apa yang tersebut di atas oleh kedua pihak, Komisi Tiga Negara bersedia untuk memperlakukan kepada kedua pihak pembantu-pembantu militernya yang akan dipertanggung-jawabkan, terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah salah satu peristiwa memerlukan penyelidikan dari pembesar-pembesar yang lebih tinggi dari satu atau kedua pihak.
5. Bahwa, sebelum ada penyelesaian politik, tanggungjawab atas pemeliharaan hukum serta ketertiban dan keamanan jiwa dan harta benda di dalam daerah-daerah yang akan dikosongkan oleh tentara itu tinggal tetap di tangan pasukan-pasukan polisi itu adalah di bawah perintah sipil). Pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan bersedia untuk memberi nasehat kepada pembesar-pembesar yang bersangkutan dari kedua pihak dan untuk membantu dalam pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap perlu, kalau diminta. Antara lain, mereka harus :
 - a) mengumpulkan pembesar-pembesar polisi yang disediakan oleh tiap-tiap pihak dalam daerahnya yang dikosongkan oleh tentara. Pembesar-pembesar polisi dari satu pihak tidak boleh meronda di dalam atau melalui daerah yang dikosongkan oleh tentara lain pihak kalau tidak disertai oleh seorang pembantu militer Komisi Tiga Negara dan seorang pembesar polisi dari lain pihak.
 - b) memperbaiki perhubungan kerja-sama antara pasukan-pasukan polisi kedua pihak.
6. Bahwa perdagangan dan perhubungan antara semua daerah diperbolehkan sedapat mungkin; larangan-larangan yang dianggap perlu akan disetujui oleh kedua pihak dengan bantuan Komisi Tiga Negara dan wakil-wakilnya kalau perlu.
7. Bahwa persetujuan ini mengandung pula pokok-pokok yang berikut yang pada azasnya telah disetujui oleh kedua pihak.

- a) Melarang sabotage, intimidasi, dan balas-dendam serta perbuatan-perbuatan yang bersifat sedemikian pula terhadap orang-orang, golongan-golongan dan harta-benda, termasuk djuga pengrusak harta-benda apapun djuga dan jang dimiliki siapapun djuga, serta menggunakan segala tenaga jang ada padanja untuk mentjapai maksud itu.
 - b) Mentjegah podato-pidato radio atau propaganda apapun djuga jang bermaksud menghasut atau menjesatkan pikiran tentara dan penduduk.
 - c) Mengadakan pidato-pidato radio serta mengambil lain-lain tindakan untuk memberi penerangan kepada semua tentara dan penduduk tentang keadaan jang genting dan tentang perlunja untuk tunduk kepada apa jang dimaksud dalam sub a) dan b).
 - d) Kesempatan sepenuhnya untuk menjelidiki harus diberikan kepada pembantu-pembantu militer atau sipil jang diperbantukan kepada Komisi Tiga Negara.
 - e) Menghentikan dengan segera penerbitan komunikasi gerakan harian atau lain-lain keterangan tentang tindakan-tindakan militer, ketjuali kalau sebelumnya ada persetujuan jang tertulis dari kedua pihak, selain dari pada pengumuman mingguan daftar orang-orang (mentjatat nama-nama, nomor dan alamat) jang telah terbunuh atau tewas dari luka-luka jang diderita dalam pertempuran.
 - f) Menerima azas untuk melepaskan tawanan-tawanan dari masing-masing pihak dan memulai perundingan-perundingan dengan maksud untuk melaksanakannya setjara tetap dan tjepat, pada azasnja penglepasan ini tidak memandang djumlahnja tawanan-tawanan jang dipegang, oleh salah satu pihak.
8. Bahwa pada penerimaan jang tertulis di atas pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan segera mengadakan penjelidikan untuk menentukan apakah dan dimana teristimewa di Djawa-Barat, pasukan-pasukan tentara Re-

publik masih melandjutkan perlawanan di belakang kedudukan-kedudukan garis terkemuka dari pasukan-pasukan Belanda. Kalau penjelidikan membenarkan adanya pasukan-pasukan sedemikian, maka pasukan-pasukan itu harus diundurkan secepat mungkin dan sebaik-baiknya di dalam 21 hari, sebagai tertjancum dalam pasal jang berikut.

9. Semua pasukan-pasukan dari masing-masing pihak di daerah manapun djuga jang telah disetudjui untuk dikosongkan oleh tentara atau di daerah mana pun di sebelah daerah pihak lain jang dikosongkan oleh tentara, akan pindah dengan aman ke daerahnja sendiri jang dikosongkan oleh tentara dengan membawa semua sendjata dan perlengkapan militer dibawah pengawasan pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara. Kedua belah pihak berusaha memudahkan pemindahan setjara tjepat dan damai dari pasukan-pasukan jang bersangkutan.
10. Persetujuan ini dianggap berlaku, ketjuali djika salah satu pihak memberi-tahukan kepada Komisi Tiga Negara dan kepada pihak lain, bahwa dia berpendapat gentjatan perang ini tidak ditaati oleh lain pihak, dan oleh karenanja persetujuan ini harus dibatalkan.

Atas nama Pemerintah
Kerajaan Belanda

Atas nama Pemerintah
Republik Indonesia

Raden Abdoelkadir Widjoatmodjo

MR. Amir Sjarifuddin

(Ketua Delegasi)

(Ketua Delegasi).

Tanda-tanda -tangan jang di atas dibubuhkan pada tanggal 17 Djanuari 1948, di atas kapal USS *Renville*, dan disaksikan oleh wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan dari Perse-rikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia dan sekretaris

Komisi Tiga Negara, jang tanda-tangannja dibubuhkan di sini sebagai saksi-saksi.

Ketua : Mr. Justice Richard Kirby (Australia)
Wakil-wakil : Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
Mr. Frank Graham (Amerika Serikat).
Sekretaris : Mr. T.G. Narayanan.

Lampiran I
Pendjelasan tentang persetudjuan

1. Mengenai ayat 1 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa kedua pihak harus berusaha dengan segera dan dengan semua alat jang ada padanja untuk melaksanakan semua pokok-pokok persetudjuan gentjatan sendjata; berarti pula bahwa, djika salah satu pihak menemui kesulitan-kesulitan istimewa, dalam melaksanakan sepenuh penuhnja kewadajiban jang diberikan kepadanya oleh persetudjuan gentjatan sendjata dalam beberapa hari jang ditetapkan, sesudah diberitahukan kepada lain pihak, pembatasan waktu empatpuluh delapan (48) djam jang ditetapkan dalam pasal pertama dari usul-usul diperpanjang sampai paling lama duabelas (12) hari.
2. Mengenai ayat 2 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa djika sebagai diharapkan, persetudjuan gentjatan sendjata lambat laun dilaksanakan dan keadaan umum terus menerus mendjadi baik, daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara akan diperbesar lagi. Soal memperbesar daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara, atas permintaan salah satu pihak, akan dipertimbangkan segera oleh pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara, jang bertindak sesuai dengan maksud ayat 5, akan memberi nasehat kepada pembesar-pembesar jang bersangkutan.
3. Mengenai ayat 4 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa pembantu pembantu militer Komisi Tiga Negara, dalam mendjalkan ayat 4 dari persetudjuan gentjatan sendjata akan mendapat segala kesempatan untuk menetapkan apakah sesuatu peristiwa memerlukan pemeriksaan oleh pembesar-pembesar jang lebih tinggi dari salah satu pihak atau kedua pihak, dalam hal mana mereka pada waktu itu djuga dengan sendirinja akan menjampaikan soal itu kepada penjuruhnja, jaitu Komisi Tiga Negara, jang bersedia untuk membantu dalam menjelesaikan perbedaan-perbedaan faham antara kedua pihak, jang mengenai gentjatan perang.

*Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan
Pemerintah Republik Indonesia*

*Prinsip-prinsip yang merupakan dasar yang telah disetujui untuk
melakukan perundingan politik disetujui dalam pertemuan
ke-empat tanggal 17 Januari 1948*

Komisi Tiga Negara telah mendapat keterangan dari delegasi Keradjaan Belanda dan dari delegasi Republik Indonesia, bahwa, karena persetujuan gantungan-sendjata telah ditanda-tangani, Pemerintah mereka menerima prinsip di bawah ini atas dasar mana perundingan-perundingan politik akan dilakukan :

1. Bahwa bantuan Komisi Tiga Negara supaya dilandjutkan dalam pelaksanaan dan penanda-tanganan suatu persetujuan untuk penyelesaian perselisihan politik dipulau Djawa, Sumatra dan Madura, berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Persetujuan Linggadjadi.
2. Diinsjafi, bahwa masing-masing pihak tidak berhak menghalangi-halangi kemerdekaan pernyataan gerakan-gerakan rakyat kearah organisasi politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Persetujuan-Linggadjadi. Diinsjafi juga, bahwa masing-masing pihak akan mendjamin kemerdekaan berkumpul, berbitjara dan mengeluarkan pengumuman setiap waktu, asal saja dalam djaminan ini terkandung arti membenarkan berlakunya kekerasan dan perbuatan pembalasan.
3. Diinsjafi, bahwa putusan-putusan mengenai perubahan dalam pemerintahan daerah hanya dapat didjalankan dengan persetujuan penuh dan merdeka dari penduduk daerah-daerah tersebut dan apabila keamanan dan kebebasan daripada paksaan bagi penduduk sudah terdjamin.
4. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetujuan politik supaya dibuat aturan-aturan untuk berangsur-angsur mengurangi pasukan-pasukan bersendjata dari kedua pihak.

5. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetudjuan gentjatan-sendjata setcepat mungkin aktiviteit ekonomi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan dihidupkan kembali dengan kerdja-sama antara kedua pihak; dalam pada itu diingat dju-ga kepentingan bagian-bagian lainnja jang merupakan Indonesia.
6. Bahwa aturan-aturan diadakan agar terdapat waktu jang la-jak, jaitu tidak kurang dari enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun setelah penanda-tanganan persetudjuan; dalam waktu itu akan berlaku perundingan serta pertimbangan-pertimbangan jang bebas dari paksaan dan merdeka menge-nai soal-soal jang penting. Pada achir waktu itu akan dilaku-kan pemilihan-merdeka supaja rakjat menentukan sendiri tentang perhubungan-politiknja dengan Negara Indonesia-Serikat.
7. Bahwa suatu badan pembuat undang-undang dasar akan di-pilih selaras dengan djalan jang demokratis guna merentjana-kan suatu undang-undang dasar bagi Negara Indonesia Se-rikat.
8. Diinsjafi, bahwa djika sesudah penanda-tanganan persetudju-an sebagai tersebut dalam pasal 1, salah satu pihak minta kepada Serikat Bangsa-Bangsa untuk mengadakan suatu badan guna menindjau keadaan sewaktu-waktu hingga ke-daulatan dipindahkan dari pemerintah Nederland kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak jang lain akan mempertimbangkan permintaan itu dengan saksama.
9. Kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Indonesia.
10. Kerdja-sama antara bangsa-bangsa Nederland dan Indonesia.
11. Suatu negara berdaulat atas dasar federal dengan suatu un-dang-undang dasar jang akan tertjapai dengan djalan demo-kratis.

12. Suatu uni antara Negara Indonesia Serikat dan lain-lain bahagian Keradjaan Nederland dibawah radja Nederland.

Disetudjui untuk pemerintah

Keradjaan Nederland

(tt) *Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo*
(Ketua Delegasi)

Disetudjui untuk pemerintah

Republik Indonesia

(tt) *Mr. Amir Sjarifuddin*
(Ketua Delegasi)

Wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia, dan sekretaris Komisi, jang tanda-tangannja dibubuhkan disini pada tanggal 17 Djanuari 1948 di kapal U.S.S. Renville mendjadi saksi bahwa prinsip-prinsip tersebutt di atas, disetudjui sebagai dasar untuk perundingan-perundingan politik jang akan dilakukan.

Ketua : (tt) Mr. Justice Richard C. Kirby (Australia).

Wakil-wakil: (tt) Mr. Paul van Zeeland (Belgia).

(tt) Mr. T.G. Narayanan.

Dewan Keamanan

Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia

*Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan
Pemerintah Republik Indonesia*

Enam prinsip tambahan untuk

*Perundingan guna mentjapai penjelesaian politik Dikemukakan
oleh Komisi Tiga Negara dalam pertemuan keempat pada
tanggal 17 Djanuari 1948*

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa diantara lain-lain prinsip jang berikut ini merupakan dasar perundingan-perundingan untuk mentjapai penjelesaian politik.

1. Kedaulatan diseluruh Hindia Belanda ada dan tetap ada pada keradjaan Nederland sampai, setelah suatu masa perantaraan jang ditentukan, keradjaan Nederland memindahkan kedaulatannya kepada Negara Indonesia Serikat.
Sebelum berachir masa perantaraan tersebut, Keradjaan Nederland dapat memindahkan hak-hak, kewadajiban-kewadajiban dan pertanggungan-djawab jang lajak kepada suatu pemerintah federal sementara dari daerah-daerah Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu. Negara Indonesia Serikat, apabila ini sudah dibentuk, akan merupakan suatu negara jang berdaulat dan merdeka sebagai partner jang sedjadar dengan keradjaan Nederland, dalam Uni Nederland-Indonesia dengan radja Nederland sebagai kepala. Status Republik Indonesia adalah status suatu negara di dalam Negara Indonesia Serikat.
2. Dalam pemerintah federal sementara, jang diadakan sebelum pengesahan undang-undang-dasar Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu, semua negara akan diberi perwakilan jang lajak.
3. Sebelum pembubaran Komisi Tiga Negara, salah satu pihak dapat minta supaya bantuan Komisi itu diteruskan guna menolong dalam penyelesaian perselisihan antara kedua pihak jang berhubungan dengan persetudjuan politik dan jang mungkin timbul selama masa perantaraan itu. Pihak jang lain tidak akan memadjukan keberatan terhadap permintaan itu, permintaan tersebut akan dikemukakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya mendapat perhatian Dewan itu oleh pemerintah Nederland.
4. Dalam waktu tidak kurang enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun sesudah penanda-tanganan persetudjuan ini akan dilakukan suatu pemungutan suara rakjat untuk menentukan apakah penduduk penduduk dari berbagai daerah di Djawa, Sumatra dan Madura menghendaki supaya daerahnya merupakan bahagian Republik Indonesia atau bahagian negara lain dalam Negara Indonesia Serikat; pemungutan suara rakjat itu akan dilakukan dengan peninjauan Komisi

- Tiga Negara, jaitu kalau satu pihak, selaras dengan procedure jang tertera dalam pasal 3 diatas, minta djasa Komisi dalam kedudukannja sebagai Committee of Good Offices. Kedua pihak dapat djuga bersetudju mengambil djalan jang lain daripada pemungutan suara guna mendapat kepastian tentang kehendak penduduk-penduduk.
5. Sesudah terdapat gambaran (susunan) negara-negara itu dengan djalan selaras dengan procedure sebagai termaktub pada pasal 4 diatas, suatu badan pembuat undang-undang-dasar akan dibentuk dengan djalan demokratis guna merantjang suatu undang-undang-dasar bagi Negara Indonesia Serikat. Perwakilan berbagai negara dalam badan tersebut akan seimbang dengan besarnja djumlah penduduk.
 6. Djika sesuatu negara memutuskan tidak akan mengesahkan undang-undang dasar itu dan berkehendak, selaras dengan prinsip pasal-pasal 3 dan 4 Persetujuan Linggadjadi, untuk merundingkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat dan dengan keradjaan Nederland, maka kedua pihak masing-masing tidak akan mengemukakan keberatannya. *Keterangan Red.:* 6 Prinsip Politik K.T.N. ini ditandatangani pada tanggal 19/1-1948.

"Usul Natal" Komisi Tiga Negara

Dalam pidatonja sesudah penanda-tanganan persetujuan gentjatan senjata dan prinsip-prinsip politik pada tanggal 17 Januari 1948, Ketua Delegasi Republik Indonesia Mr. Amir Sjarifuddin menjatakan keketjewaannya, bahwa "Usul-usul mengenai gentjatan senjata jang dikemukakan oleh Komisi pada waktu-waktu jang lalu jang telah diterima oleh Republik, dianggap tidak dapat diterima oleh pihak Belanda".

Meskipun tidak dikatakannya, bolehlah dianggap, bahwa keketjewaan Mr. Amir terutama didasarkan pada tidak diterimanja "Usul Natal" Komisi Tiga Negara.

Apa isi usul ini sebenarnja tak pernah diumumkan dengan resmi, tetapi telah botjor pula kepada pers, terutama disiarkan oleh "United Press" dan kantor-kantor berita asing serta "Antara".

"Usul Natal" Komisi Tiga Negara, sebagai jang tersiar disana-sini dalam pers, dapat kita simpulkan dalam beberapa pokok jang terpenting: mengenai gentjatan-sendjata: disitu disebut-sebut pula "garis demarkasi tanggal 29 Agustus", tetapi tidak dinamakannja "garis status quo", artinja hanja disebutnja berkenaan dengan keadaan sekarang dan untuk sementara diperlukannja sebagian besar mendjalankan gentjatan-sendjata; demiliterisasi harus dilakukan didaerah sebelah-menjebelah garis tersebut, dan disebut-sebut pula bahwa pasukan-pasukan Belanda harus mundur sampai kedudukan tanggal 20 Djuli, jaitu kedudukan sehari sebelum perang kolonial dimulai, djumlah tentara harus lambat laun dikurangi, pengosongan "pockets" tidak disebut mengenai politik: dasar-dasar Linggadjati dikemukakan, didalamnja termasuk pula pembentukan Negara Indonesia Serikat, pemerintahan sipil harus segera dikembalikan pada kedudukan dan keadaannja sebelum perang kolonial.

Beberapa tjatatan

Berkenaan dengan penolakan "Usul-Natal" Komisi Tiga Negara oleh pihak Belanda tersebut, perlu ditjatat, bahwa kewadjiban pertanggungan djawab dan kemungkinan-kemungkinan bagi Komisi tersebut adalah terbatas pada "good-offices" sadja, karena tidak mempunjai kekuasaan sebagai arbiter. Kewadjibannja hanja terbatas pada menerima usul-usul dari kedua pihak, menjampaikan usul pihak jang satu kepada pihak lainnja djika dipandang perlu, mengemukakan sugesti-sugesti sendiri, menghubungkan kedua pihak dan memberi laporan-laporan, diantaranya pembantu-pembantu militer, jang bisa melakukan penindjauan dan membantu kedua pihak dalam usaha mentjapai penjelesaian.

Kronologi kejadian selama Aksi Militer I Belanda

20 Djuli 1974 djam 24.00 malam permulaan perang-kolonial.

Achir Djuli soal Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan oleh Australia dan India.

1 Agustus dalam sidang ke-173 Dewan Keamanan diputuskan "... minta kepada kedua belah pihak supaya dengan segera menghentikan permusuhan dengan djalan arbitrage atau dengan djalan damai lainnja".

4 Agustus pihak Republik baru menerima putusan tersebut, (via Belanda) dan perintah penghentian tembak-menembak diutjapkan.

7 Agustus usul arbitrage Pilipina ditolak. Djuga usul arbitrage Australia dan Polandia jang diutjapkan kemudian tidak diterima. Rusia dan Polandia atjap kali mengusulkan penarikan tentara Belanda, tetapi ditolak.

25 Agustus usul arbitrage Pilipina ditolak. Djuga usul arbitrage Australia dan Polandia jang diutjapkan kemudian tidak diterima. Rusia dan Polandia atjap kali mengusulkan penarikan tentara Belanda, tetapi ditolak.

25 Agustus resolusi (usul Rusia) membentuk komisi 11 negara jang diterima dengn 7 suara pro, 2 suara kontra dan 2 blanko, diveto oleh Perantjis. Usul Amerika untuk membentuk "Komisi" good offices" diterima dengan 8 suara pro, 3 blanko.

8 Oktober Komisi Tiga Negara untuk pertama kalinya ber-sidang di New York.

27 Oktober Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia.

Lampiran 5

STATEMENT ROEM-ROYEN

I. STATEMEN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

(Diutjapkan oleh Mr. Moh. Roem)

Sebagai Ketua Delegasi Rapublik saja diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menjatakan kesanggupan mereka sendiri (persoonlijk), sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Djanuari 1949 dan petundjuknja tertanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tertjapainja:

1. Pengeluaran perintah kepada pengikut-pengikut Republik jang bersenjata untuk menghentikan perang gerilja;
2. Kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan, dan
3. turut serta pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penjerahan kedaulatan jang sungguh dan lengkap kapada Negara Indonesia Sarekat, dengan tidak bersjarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaja politik demikian diterima oleh Pemerinta Republik Indonesia selekas-lekasnja setelah dipulihkan di Jogjakarta.

II. STATEMENT DELEGASI BELANDA

(diutjapkan oleh Dr. Van Royen)

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menjatakan bahwa, berhubungan dengan kesanggupan jang baru sadja diutjapkan oleh Mr. Roem, ia menjetujui kembalinja Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Delegasi Belanda selandjutnja men-

jetujui pembentukan satu panitya-bersama atau lebih dibawah auspices UNCI dengan maksud:

- a. mengadakan penjelidikan dan persiapan jang perlu sebelum kembalinja Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta.
 - b. mempelajari dan memberi nasehat tentang tindakan-tindakan jang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilja dan kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan.
2. Pemerintah Belanda setudju bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan djabatannja jang sepatutnja dalam satu daerah jang meliputi Karesidenan Jogjakarta dan bahwa ini adalah satu langkah jang dilakukan sesuai dengan maksud petundjuk-petundjuk Dewan Keamanan an tanggal 23 Maret 1949.

Lampiran 6

**KOMUNIKE BERSAMA
KONPERENSI ASIA – AFRIKA
JANG TELAH DIADAKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 18 S/D 24 APRIL 1995.**

Konperensi negara2 Asia-Afrika telah berkumpul atas undangan para perdana menteri Burma, Sailan, India, Indonesia dan Pakistan di Bandung dari tanggal 18 hingga 24 April dan dikundjungi, ketjuali oleh kelima negara penjelenggara ini, djuga oleh negara2.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Afghanistan | 13. Liberia |
| 2. Kambodja | 14. Libia |
| 3. Rep. Rakjat Tiongkok | 15. Nepal |
| 4. Mesir | 16. Pilipina |
| 5. Ethiopia | 17. Saudi Arabia |
| 6. Pantai Emas | 18. Sudan |
| 7. Iran | 19. Suriah |
| 8. Irak | 20. Muang Thai |
| 9. Djepang | 21. Turki |
| 10. Jordania | 22. Republik Demokrasi
Vietnam (Utara) |
| | 23. Negara Vietnam (Sel.) |
| | 24. Yaman |

Konperensi Asia-Afrika telah meninjau soal2 jang mengenai kepentingan bersama negara2 Asia dan Afrika dan telah merundingkan tjara2 bagaimana rakjat negara2 ini dapat bekerdjasa sama dengan lebih erat dilapangan ekonomi, kebudajaan dan politik.

A. KERJA-SAMA EKONOMI.

1. Konperensi Asia-Afrika mengakui mendesaknja keperluan untuk memadjukan perkembangan ekonomi di daerah Asia dan Afrika. Diantara negara2 peserta terdapat keinginan umum untuk bekerdja-sama dalam lapangan ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan nasional masing2.

Usul2 mengenai kerdja-sama dalam lapangan ekonomi diantara negara2 peserta sendiri tidaklah menutup keinginan atau kebutuhan akan kerdja-sama dengan negara2 jang terletak di luar daerah ini, termasuk penanaman modal asing.

Selanjutnja diakui, bahwa bantuan jang diterima oleh beberapa negara peserta konperensi jang tertentu dari luar daerah ini, melalui peraturan2 internasional telah memberi sumbangan jang besar bagi pelaksanaan rentjana pembangunan mereka.

2. Negara2 peserta konperensi menjetudjui untuk saling memberikan bantuan tehnik, sebanjak mungkin jang dapat dilaksanakan dalam bentuk tenaga2 ahli, pelatih2, usaha2 perintis dan perlengkapan2 bagi keperluan demonstrasi; untuk saling tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman, pendirian lembaga2 nasional dan, bila mungkin, lembaga2 regional untuk latihan dan penjelidikan bagi penjebaran pengetahuan dan ketjakapan tehnik, dengan bekerdja-sama dengan badan2 internasional jang ada.

3. Konperensi Asia-Arika mengandjurkan, dibentuknja dengan segera suatu Dana Istimewa PBB untuk Perkembangan Ekonomi; supaja Bank Internasional untuk Pembangunan dan Kemadjuan (International Bank for Reconstruction and Development) menjediakan alokasi dari sebagian terbesar dari kekajaannja untuk negara2 Asia dan Afrika; dibentuknja dengan segera suatu Kerdja-sama Keuangan Internasional jang usahajnja hendaknja meliputi tertjapainja penanaman modal dengan tjara jang adil; dan dorongan bagi diperluasnya usaha-usaha bersama di antara negara-negara Asia-Afrika jang dapat membawa keuntungan bagi kepentingan mereka bersama.

4. Konperensi Asia-Afrika mengakui perlunya diadakan usaha2 untuk menstabilisasikan perdagangan barang2 di daerahnya. Prinsip untuk memperluas lingkungan perdagangan dan perdagangan multilateral telah diterima oleh konperensi. Tetapi diakui pula, bahwa beberapa negara akan terpaksa menjalankan perdagangan bilateral berhubung dengan keadaan ekonominya.

5. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan diambilnya tindakan kolektif dan negara2 peserta untuk mentjapai stabilitasi harga2 internasional dan permintaan barang2 keperluan pertama dengan djalan perdjandjian2 bilateral dan multilateral, dan agar selama dapat didjalankan serta memang diinginkan hendaknya mereka mengambil sikap yang sama mengenai soal2 ini dalam Panitia Penasihat Tetap P.B.B. untuk Perdagangan Barang2 Internasional (United Nations Permanent Advisory Commission and International Commodity Trade) dan lain2 forum internasional.

6. Konperensi Asia-Afrika selandjutnya mengandjurkan supaya : negara2 Asia-Afrika merubah perdagangan eksportnya dengan mengolah bahan2 mentahnya sendiri—selama ekonomis dapat dipertanggungjawabkan—sebelum mengeksportnya; perdagangan intra-regional hendaknya diadakan dan pertukaran delegasi2 dagang dan rombongan2 kaum pengusaha diberi dorongan, pertukaran keterangan2 dan tjontoh2 hendaknya diandjur2kan dengan maksud, supaya perdagangan intra-regional dapat diperluas; fasilitas2 yang biasa bagi perdagangan transito hendaknya diberikan kepada negara2 yang letaknya dilingkungi oleh negara2 lain.

7. Konperensi Asia-Afrika menganggap soal2 perkapalan penting sekali dan menjatakan penjesalannya, bahwa maskapai2 pelajaran se-waktu2 merubah tarif pengangkutanannya yang menjatakan kerap kali merugikan negara2 peserta. Konperensi mengandjurkan, supaya soal ini dipeladjari dan sesudah ini supaya diadakan tindakan bersama untuk memaksa maskapai2 perkapalan yang bersangkutan mengambil sikap yang lebih pantas.

Telah disarankan, supaya dipelajari pengangkutan dengan kereta api bagi perdagangan transito.

8. Konperensi Asia-Afrika menjetujui untuk memberikan dorongan bagi pembentukan bank2 dan perseroan2 pertanggungan (insurance companies) nasional dan regional.

9. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa pertukaran keterangan2 mengenai hal2 jang berhubungan dengan semuanya itu, seperti misalnja jang mengenai transfer keuntungan padjak, mungkin akan dapat membawa kepada suatu perumusan politik bersama.

10. Konperensi Asia-Afrika menegaskan pentingnja arti perkembangan penggunaan tenaga nuclear untuk keperluan2 damai bagi negara2 Asia-Afrika. Konperensi menjambut dengan gembira inisiatif negara2 jang terutama bersangkutan untuk menjediakan keterangan2 mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan2 damai; mendesak segera dibentuknja suatu Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency) dimana negara2 Asia harus mempunyai wakil2 jang tjukup, terutama dalam kekuasaan eksekutip dari pada badan ini, dan mengandjurkan kepada pemerintah negara2 Asia dan Afrika untuk mempergunakan se-baik2-nja kesempatan untuk mendapat latihan dan fasilitas2 lainnja mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan2 damai jang ditawarkan oleh negara2 jang menjokong rentjana sematjam ini.

11. Konperensi Asia-Afrika menjetujui ditundjuknja penjabat2 penghubung di negara2 peserta oleh masing2 pemerintah negara ini untuk pertukaran keterangan2 dan pendapat2 mengenai hal2 jang dapat memberi keuntungan bersama. Konperensi mengandjurkan, supaya negara2 peserta mempergunakan sebaik2-nja kesempatan jang diberikan oleh organisasi2 internasional jang telah ada dan mengandjurkan kepada negara2 jang belum mendjadi anggota organisasi2 sematjam ini, tetapi berhak untuk diterima sebagai anggota, supaya berusaha mendapatkan keanggotaannja.

12. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan dadakannya perundingan² pendahuluan antara negara² peserta dalam forum² internasional dengan maksud sebanjak mungkin menarik keuntungan bagi kepentingan ekonomi bersama mereka. Tetapi ini bukannya dimaksudkan untuk membentuk suatu blok regional.

B. KERDJA-SAMA KEBUDAJAAN.

1. Konperensi Asia-Afrika jakin, bahwa diantara usaha² jang terpenting untuk memadjukan saling mengerti diantara bangsa², jalan usaha memadjukan kerdjasama kebudajaan Asia dan Afrika adalah tempat lahirnja agama² dan kebudajaan² jang besar jang telah memperkaja kebudajaan² dan peradaban² lain dan dalam process itu telah mendjadi makin kaja pula. Dengan begitu maka kebudajaan² Asia dan Afrika mempunyai dasar rohani jang universil. Tetapi negara² Asia dan Afrika telah berputus selama abad jang lalu.

Bangsa² Asia dan Afrika sekarang berkehendak dengan sungguh² untuk membaharui hubungan² kebudajaan mereka jang lama dan memperkembangkan hubungan² baru dalam hubungan dunia modern sekarang ini. Semua negara peserta konperensi menjatakan kehendak mereka untuk bekerdja jang lebih erat dalam lapangan kebudajaan.

2. Konperensi Asia-Afrika memperhatikan kenyataan, bahwa adanya kolonialisme dibanjak bagian dari pada Asia dan Afrika, dalam bentuk apapun djuga, tidak hanja menghalang-halangi kerdjasama kebudajaan, tetapi djuga menindas kebudajaan nasional dari rakjat. Beberapa negara² djadjahannja hak² dasar mereka dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan, jang menghalang²-i perkembangan kepribadian mereka dan djuga mentjegah adanya hubungan kebudajaan dengan bangsa² Asia dan Afrika lainnja. Hal ini terutama njata dalam hal Tunisia, Aldjazair dan Marokko, dimana hak dasar rakjatnja untuk mempelajari bahasa dan kebudajaan mereka sendiri telah ditindas. Diskriminasi sematjam ini telah didjalankan pula

terhadap bangsa2 Afrika dan bangsa2 kulit berwarna dibeberapa bagian benua Afrika. Konperensi merasa, bahwa tindakan2 ini merupakan pelanggaran hak2 dasar manusia, meng-halang2-i berkembangnja kebudayaan didaerah ini dan pula meng-halang2i kerdjasama kebudayaan dalam lapangan internasional jang lebih luas. Konperensi dengan ini mengutuk pelanggaran hak2 dasar manusia dalam lapangan pendidikan dan kebudayaan dibeberapa daerah di Asia dan Afrika dan bentuk2 lain dari penindasan kebudayaan. Konperensi terutama mengutuk racialisme sebagai alat untuk melakukan penindasan dalam lapangan kebudayaan.

3. Dalam pandangannja mengenai pengembangan kerdjasama kebudayaan diantara negara2 Asia dan Afrika sama sekali bukanlah maksud konperensi untuk menetjualikan atau menjaingi golongan bangsa2 dan peradaban serta kebudayaan lain. Sesuai dengan tradisi toleransi dan universalitet negara2 Asia dan Afrika, konperensi berpendapat, bahwa kerdjasama kebudayaan antara mereka haruslah diperkembangkan dalam hubungan kerdjasama sedunia jang lebih luas.

Berdampingan dengan pengembangan kerdjasama kebudayaan antara bangsa2 Asia dan Afrika negara2 Asira-Afrika berkehendak pula mengembangkan hubungan kebudayaan mereka dengan negara2 lain. Hal ini mereka anggap akan dapat memperkaja kebudayaan mereka sendiri dan memberikan sumbangan bagi tertjapainja perdamaian dunia dan saling pengertian.

4. Masih banyak negara2 di Asia dan Afrika jang belum dapat memperkembangkan dirinja dalam lapangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan tehnik. Konperensi mengandjurkan, supaya negara2 di Asia dan Afrika jang dalam hal ini telah lebih beruntung, memberikan fasilitas2 bagi masuknja mahasiswa2 dan orang2 jang hendak mengikuti laithan dari negara2 tersebut di atas tadi kedalam badan2 pendidikan mereka. Fasilitas2 sematjam itu hendaknja diberikan pula kepada penduduk bangsa Asia dan Afrika jang pada dewasa ini di-langgar haknja untuk mendapatkan kesempatan menerima pendidikannja jang lebih tinggi.

5. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa usaha2 memajukan kerdjasama kebudayaan antara negara2 Asia dan Afrika hendaknya ditudjukan kepada :

1. mendapat pengetahuan tentang negara2 satu sama lain.
2. pertukaran kebudayaan dan
3. pertukaran keterangan2.

6. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa dalam tingkatan sekarang ini hasil2 terbaik dalam kerdjasama kebudayaan akan dapat diperoleh dengan mengadakan perdjanjian2 bilateral untuk memenuhi andjuran2 konperensi, dan dengan tindakan masing2 negara sendiri dimana mungkin dan dapat.

c. HAK2 MANUSIA DAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI.

1. Konperensi Asia-Afrika menjatakan sokongannya jang sepenuhnya kepada prinsip2 dasar Hak2 Manusia seperti jang tertjantum dalam piagam P.B.B. dan memperhatikan Pernyataan tentang Hak2 Manusia (Universal Declaration of Human Rights) sebagai dasar umum bagi seluruh rakjat. Konperensi menjatakan sokongan sepenuhnya kepada prinsip untuk menentukan nasib sendiri, seperti termuat dalam piagam P.B.B. dan memperhatikan resolusi P.B.B. mengenai hak2 rakjat dan bangsa2 untuk menentukan nasib sendiri, jang merupakan sjarat pertama untuk dapat menikmati hak2 dasar manusia seluruhnja.

2. Konperensi Asia-Afrika menjesalkan politik dan tindakan mem-beda2kan dan diskriminasi jang merupakan dasar pemerintahan dan hubungan2 diantara manusia2 di-daerah2 luas di Afrika dan lain2 bagian dunia. Tindakan sematjam itu tidak hanja suatu pelanggaran besar terhadap hak2 manusia, tetapi djuga terhadap nilai2 dasar peradaban dan martabat manusia.

Konperensi menjatakan simpatinja jang besar dan sokongan kepada sikap gagah berani dari para korban2 diskriminasi bangsa2, terutama kepada sikap penduduk bangsa Afrika.

India dan Pakistan di Afrika Selatan; Konperensi menghargai mereka semua jang menjokong soal mereka itu; menguatkan kebulatan tekad bangsa2 Asia dan Afrika untuk menghapuskan setiap bekas rasialisme jang mungkin masih ada dalam negerinja, dan berdjandji mempergunakan seluruh pengaruh moralnja untuk mendjaga djangan sampai djatuh korban2 kedjahatan jang sama jang hendak mereka hapuskan dalam perdjoangan mereka.

D. MASALAH BANGSA2 JANG BELUM MERDEKA.

1. Konperensi Asia-Afrika telah membitjarakan masalah bangsa2 jang belum merdeka, kolonialisme dan keburukan2 jang timbul dari pendjadjahan serta pemerasan bangsa2 oleh kekuasaan asing.

Konperensi menjetujui untuk :

- a. menjatakan, bahwa kolonialisme dalam bentuknja jang bagaimanapun djuga adalah suatu kedjahatan jang harus segera diachiri ;
- b. menegaskan, bahwa didjadjahnja serta diperasnja bangsa2 oleh kekuasaan asing merupakan pelanggaran hak2 dasar manusia, bertentangan dengan piagam P.B.B. dan merupakan penghalang bagi tertjapainja perdamaian dan kerdjasama seduania;
- c. menjatakan bantuannja kepada perdjoangan untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan bagi semua bangsa2 tersebut dan,
- d. menjerukan kepada negara2 jang bersangkutan, supaja memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada bangsa2 tadi.

2. Mengingat belum tertjapainja penjelesaian keadaan di Afrika Utara dan masih tetap belum diberikannja hak menentukan nasib sendiri kepada bangsa2 di Afrika Utara, konperensi Marokko dan Tunisia untuk menentukan sendiri dan mendesak

kepada Pemerintah Perantjis untuk menjelesaikan soal ini se-tjepat2nja dengan tidak di-tunda2 lagi.

E. SOAL2 LAIN.

1. Mengingat adanja ketegangan di Timur Tengah jang disebabkan karena keadaan di Palestina dan adanja bahaya bagi perdamaian dunia jang dirupakan oleh ketegangan ini, konperensi Asia-Afrika menjatakan sokongannja kepada hak bangsa2 Arab atas Palestina dan menjerukan dilaksanakannja resolusi PBB mengenai Palestina dan ditjapainya suatu penjelesaian dengan djalan damai dari pada masalah Palestina.

2. Dalam hubungan sikap jang telah dinjatakannja mengenai penghapusan kolonialisme, konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Indonesia dalam persoalan Irian Barat jang didasarkan pada persetudjuan jang telah ditjapai antara Indonesia dan Belanda mengenai soal ini.

Konperensi Asia-Afrika mendesak pemerintah Belanda untuk setjepat mungkin memulai lagi perundingan2, untuk menepati kewajiban2 mereka seperti jang ditentukan dalam persetudjuan tersebut di atas tadi dan menjatakan harappnnya, supaja P.B.B. mau membantu pihak2 jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian perselisihan ini dengan djalan damai.

3. Konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Yaman dalam persoalan Aden dan bagian2 Selatan dari pada Yaman jang dikenal sebagai daerah2 protektorat, serta mendesak pihak2 jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian masalah ini dengan djalan damai.

F. MEMADJUKAN PERDAMAIAN DAN KERDJASAMA DI DUNIA

1. Memperhatikan kenyataan, bahwa masih ada beberapa negara jang belum diterima mendjadi anggota P.B.B., Konperensi Asia-Afrika jang beranggapan, bahwa untuk kerdjasama jang efektif dalam usaha mentjapai perdamaian dunia keanggotaan dari P.B.B. haruslah bersifat universil menjerukan kepada

Dewan Keamanan untuk menjokong diterimanja semua negara2 itu jang, menurut sjarat2 jang ditentukan dalam piagam P.B.B, berhak untuk diterima sebagai anggota. Menurut pendapat konperensi Asia-Afrika, negara2 berikut ini diantara negara2 peserta konperensi, jaitu: Kambodja, Sailan, Djepang, Jordania, Laos, Libia, Nepal, Vietnam jang bersatu, (United Vietnam) berhak pula untuk diterima mendjadi anggota.

Konperensi mempertimbangkan, bahwa perwakilan dari pada negara2 jang terletak dalam daerah Asia-Afrika dalam Dewan Keamanan, berdasarkan perwakilan menurut pembagian jang sesuai dengan letak geografis daerah2, adalah tidak tjukup. Konperensi menjatakan pendapatnja, bahwa mengenai keanggotaan jang tidak tetap dari Dewan Keamanan, negara2 Asia-Afrika, jang menurut persetujuan di London dalam 1946 tidak mendapat hak untuk dipilih, hendaknja diberi kesempatan, untuk memberikan djasa2nja dalam Dewan Keamanan, supaja mereka dapat memberikan sumbangan jang efektif bagi usaha mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia.

2. Konperensi Asia-Afrika, setelah mempelajari keadaan jang berbahaja berhubungan dengan adanya ketegangan internasional dan bahaja dunia, dimana kekuatan penghantjur dari segala matjam sendjata, termasuk sendjata2 nuclear dan thermo-nuclear, tentunja akan dipergunakan, meminta perhatian dari seluruh bangsa2 bagi akibat2 jang dahsjat jang akan terdjadi apabila peperangan sematjam itu petjah.

Konperensi beranggapan, bahwa perlutjutan sendjata dan pelarangan produksi, pertjobaan dan penggunaan sendjata2 nuclear dan thermo-nuclear adalah suatu keharusan untuk menjelamatkan manusia dan peradaban dari kekuatan dan kemungkinan akan kehantjuran seluruhnja. Konperensi merasa, bahwa bangsa2 Asia san Afrika jang berkumpul dalam konperensi ini berkewajiban terhadap kemanusiaan dan peradaban untuk menjatakan sokongan mereka bagi perlutjutan sendjata dan pelarangan negara2 jang terutama bersangkutan serta kepada pendapat umum di dunia untuk diadakannja perlututan sendjata dan pelarangan sematjam itu.

Konperensi berpendapat, bahwa pengawasan internasional yang efektif haruslah diadakan dan dipertahankan untuk menjamin ditepatinja perlutjutan sendjata dan larangan tadi dan bahwa untuk keperluan ini haruslah diambil tindakan2 jang segera dan tegas.

Dengan tudjuan untuk mentjapai dilarangnja sama sekali pembuatan sedjata-sendjata nuclear dan thermo-nuclear, konferensi menjerukan kepada semua negara-negara jang bersangkutan, untuk menghentikan pertjobaan-pertjobaan dengan sendjata-sedjata sematjam itu.

G. PERNJATAAN MENGENAI USAHA MEMADJUKAN PERDAMAIAN DAN KERDJASAMA DI DUNIA.

Konferensi Asia-Afrika memikirkan dengan rasa chawatir soal perdamaian dan kerdjasama sedunia. Konferensi melihat dengan rasa chawatir adanja ketegangan2 internasional dewasa ini dengan antjaman bahaya petjahnja perang dunia dimana dipergunakan sedjata2 atom. Masalah perdamaian mempunjai sangkut-paut jang rapat dengan masalah keamanan internasional.

Dalam hubungan ini semua negara2 di dunia hendaknja bekerja-sama, terutama melalui P.B.B., dalam usaha mendjapai pengurangan persendjataan dan penghapusan sedjata2 nuclear di bawah pengawasan internasional. Dengan djalan ini perdamaian dunia akan dapat ditjapai dan tenaga nuclear akan dapat dipergunakan se-mata2 untuk keperluan damai.

Ini akan dapat memenuhi kebutuhan2 terutama dari Asia dan Afrika, sebab kebutuhan mereka jang mendesak jalan kemajuan sosial dan tingkat hidup jang lebih baik dalam kemerdekaan jang lebih luas.

Kemerdekaan dan perdamaian saling bergantung. Hak untuk menentukan nasib sendiri harus dapat diketjap oleh semua bangsa2 dan kebebasan serta kemerdekaan haruslah diberikan dengan setjepat mungkin, kepada mereka jang belum merdeka. Sesungguhnya, semua bangsa2 haruslah mendapat hanja untuk memilih sendiri dengan bebas sistim politik, ekonomi atau tjara

hidup jang mana jang akan dianutnja, jang sesuai dengan tudju-an2 dan prinsip2 jang termuat dalam piagam P.B.B.

Dengan bebas dari perasaan tjuriga dan takut, dan dengan saling mempertjajai dan menunjukkan goodwill, semua bangsa didunia hendaknya mendjalankan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian sebagai tetangga jang baik, dan mendjalankan kerdjasama dalam suasana persahabatan atas dasar prinsip2 berikut ini:

1. Menghormati hak2 dasar manusia dan tudjuan serta azas2 jang termuat dalam piagam P.B.B.
2. Menghormati kedaulatan dan integritet teritorial semua bangsa2.
3. Mengakui persamaan semua suku2 bangsa dan persamaan semua bangsa2 besar maupun ketjil.
4. Tidak melakukan intervensi atau tjampur tangan dalam soal2 dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap2 bangsa untuk mempertahankan diri sendiri setjara sindirian atau setjara kolektif, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
6. (a) Tidak mempergunakan peraturan2 dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan-chusus dari salah satu dari negara2 besar.
(b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
- 7). Tidak melakukan tindakan2 atau antjaman agresinya ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritet teritorial atau kemerdekaan politik sesuatu negara.
- 8). Menjelaskan segala perselisihan2 internasional dengan djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase atau penjelasan hakim, atau pun lain2 tjara damai lagi menurut pilihan pihak2 jang bersangkutan, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
- 9). Memadjukan kepentingan bersama dan kerdja-sama.
- 10).Menghormati hukum dan kewadajiban2 internasional.

Konperensi Asia-Afrika menjatakan kejakinannya, bahwa kerdja-sama setjara persahabatan jang sesuai dengan prinsip2 ini, akan dapat memberikan sumbangan jang efektif kepada usaha mempertahankan dan memadjukan perdamaian dan keamanan internasional, sedangkan kerdja-sama dalam lapangan ekonomi, sosial dan kebudajaan akan dapat memberikan sumbangan bagi terjapainja kemakmuran bersama.

H. PENUTUP.

Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan supaja kelima negara penjelenggara mempertimbangkan diadakannja pertemuan berikutnja dari pada konperensi ini, dengan meminta pendapat negara peserta lainnja.

Bandung, 24 April 1955.

Lampiran 7

DEKRI KEMBALI KEPADA UUD 1945**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG**

Dengan ini menyatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dari Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubungan dengan pernyataan sebagai terbesar Anggota-Anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipercajakan oleh Rakjat kepadanya.

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara Nussa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa, menempuh satu-satunya djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG.**

Menetapkan pembubaran Konstituante:

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di :Djakarta
pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia,
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

SOEKARNO

Lampiran 8

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. MENGINGAT

- 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.
- 1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang

- 2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintah dan djalannja Revolusi
- 2.2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan

Kepada: LETNAN DJENDRAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/

Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan2 lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung-djawab seperti tersebut diatas.

IV. Selesai

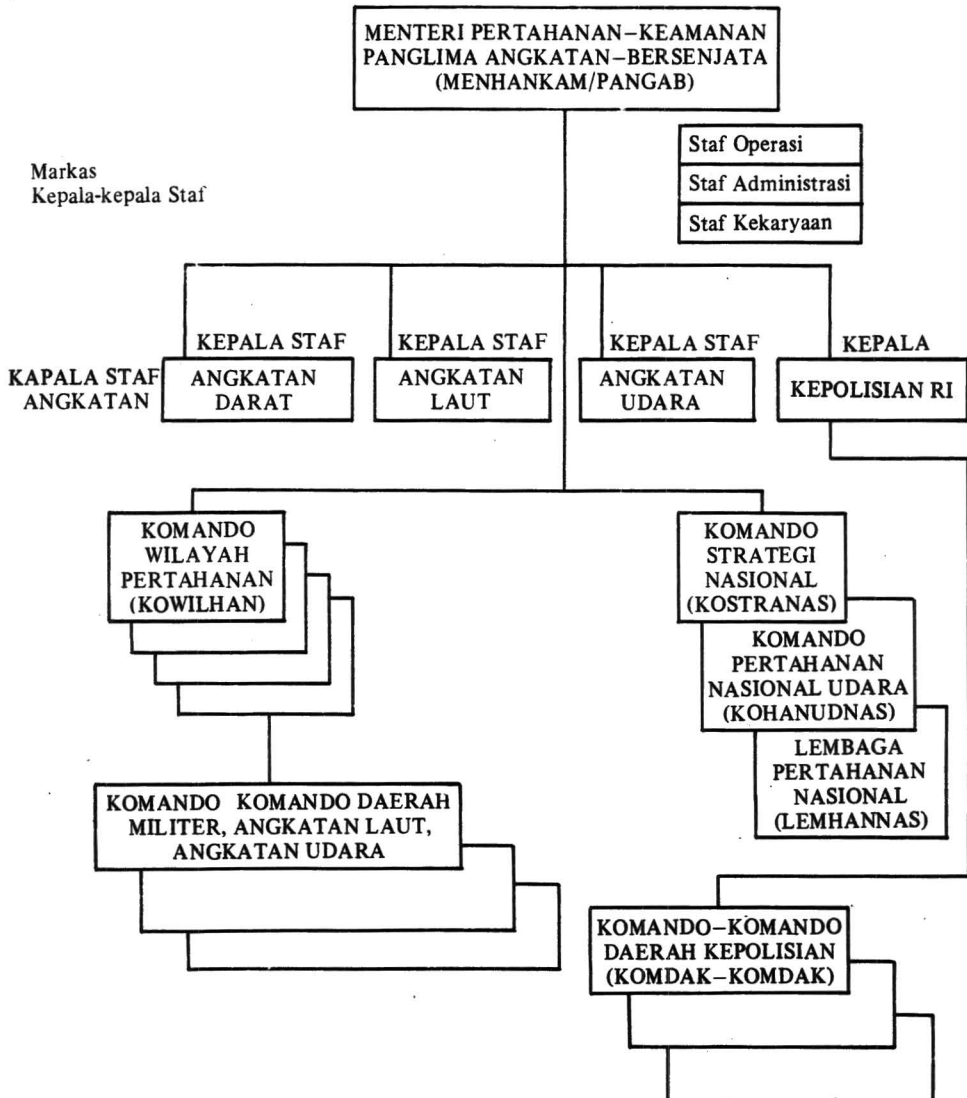
Djakarta, 11 Maret 1966

**PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.**

SUKARNO

Lampiran 9 .

STRUKTUR PERTAHANAN–KEAMANAN NASIONAL (HANKAMNAS)



Lampiran 10

KABINET-KABINET REPUBLIK INDONESIA (1945 - 1966)

I. Masa Perang Kemerdekaan,

1.	Kabinet Presidential	:	2 September	1945 - 14 Nopember	1945.
2.	Kabinet Sjahrir I	:	14 Nopember	1945 - 12 Maret	1946.
3.	Kabinet Sjahrir II	:	12 Maret	1946 - 2 Oktober	1946.
4.	Kabinet Sjahrir III	:	2 Oktober	1946 - 3 Juli	1947.
5.	Kabinet Amir Sjarifuddin I	:	3 Juli	1947 - 11 Nopember	1947.
6.	Kabinet Amir Sjarifuddin II	:	11 Nopember	1947 - 29 Januari	1948.
7.	Kabinet Hatta I	:	29 Januari	1948 - 4 Agustus	1949.
7a.	Kabinet Darurat (Sjafruddin)	:	19 Desember	1948 - 13 Juli	1949.
8.	Kabinet Hatta II	:	4 Agustus	1949 - 20 Desember	1949.

II. Masa Demokrasi Liberal.

9.	Kabinet Hatta	:	20 Desember	1949 - 6 September	1950.
10a.	Kabinet Peralihan (Susanto)	:	20 Desember	1949 - 21 Januari	1950.
10b.	Kabinet Halim (R.I. Jogjakarta)	:	21 Januari	1950 - 6 September	1950.
11.	Kabinet Natsir	:	6 September	1950 - 27 April	1951.
12.	Kabinet Sukiman	:	27 April	1951 - 3 April	1952.
13.	Kabinet Wilopo	:	3 April	1952 - 1 Agustus	1953.
14.	Kabinet Ali Sastroamidjojo I	:	1 Agustus	1953 - 12 Agustus	1955.
15.	Kabinet Burhanuddin Harahap	:	12 Agustus	1955 - 24 Maret	1956.
16.	Kabinet Ali Sastroamidjojo II	:	24 Maret	1956 - 9 April	1957.
17.	Kabinet Djuanda (Kabinet Karya)	:	9 April	1957 - 10 Juli	1959.

III. Masa Demokrasi Terpimpin.

18.	Kabinet Kerja I	:	10 Juli	1959 - 18 Februari	1960.
19.	Kabinet Kerja II	:	18 Februari	1960 - 6 Maret	1962.
20.	Kabinet Kerja III	:	6 Maret	1962 - 13 Nopember	1963.
21.	Kabinet Kerja IV	:	13 Nopember	1963 - 27 Agustus	1964.
22.	Kabinet Dwikora	:	27 Agustus	1964 - 20 Februari	1966.
23.	Kabinet Dwikora yang disempurnakan	:	21 Februari	1966 - 11 Maret	1966.
24.	Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi	:	27 Maret	1966 - 24 Juli	1966.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemerintahan kedaulatan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara laksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelen 8 tahun

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Soekarno
Hatta

Teks autentik Proklamasi Kemerdekaan yang ditandatangani oleh Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks inilah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945. Tahun yang tercantum dalam teks Proklamasi adalah tahun '05, singkatan dari tahun Jepang 2605 atau sama dengan tahun Masehi 1945.



Ir. Soekarno (Bung Karno) didampingi Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) sedang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada hari Jum'at 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi).



Di antara mereka yang hadir dengan khidmat mengikuti jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan, tampak di barisan depan dengan mengambil arah dari kanan ke kiri : Mr. Latuharhary, Soewirjo, Ibu Fatmawati, dr. Samsi, dan Ny. S.K. Trimurti. Di barisan belakang antara lain tampak Mr. A. G. Pringgodigdo dan Mr. Soedjono. .

SOEARA ASIA

PROKLAMASI INDONESIA MERDEKA

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 M. VII

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno - Hatta.

TJAHAJA

REPUBLIK INDONESIA

Oendang-oendang Dasar.

Pembukaan

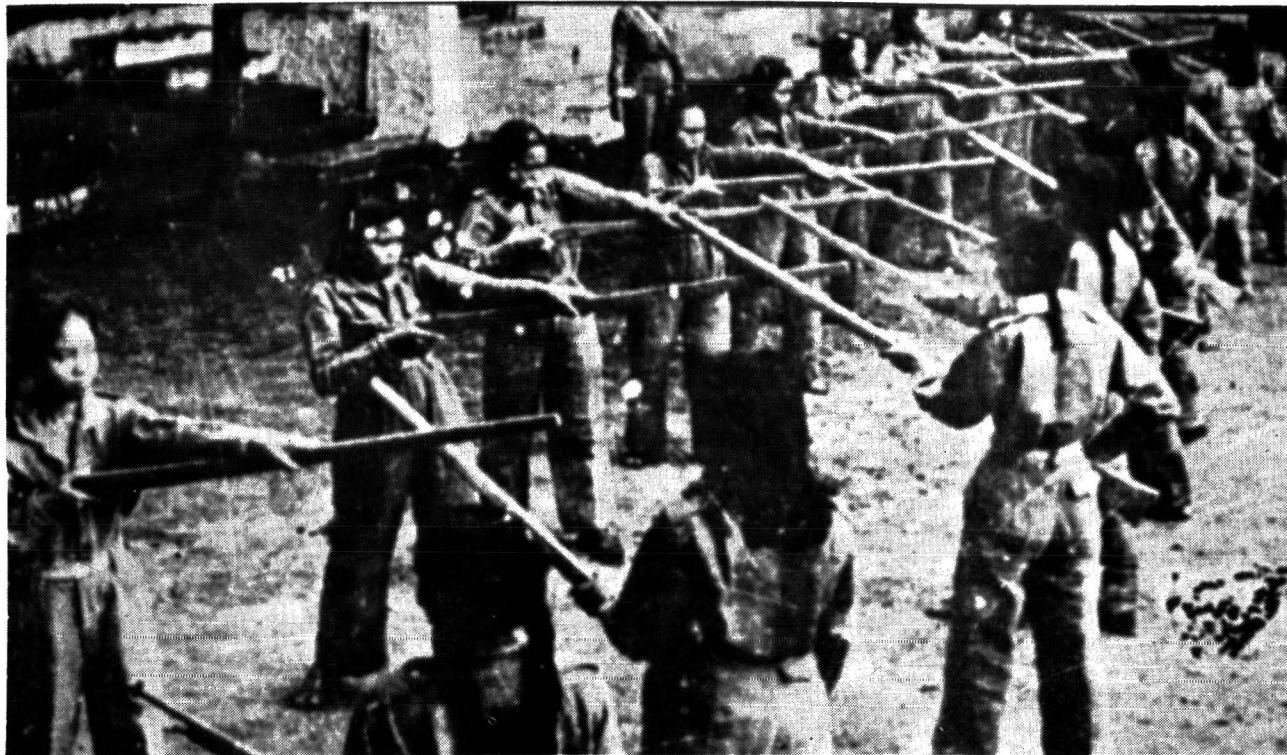
Peranan wartawan pada masa-masa awal kemerdekaan sangat besar artinya. Pada hari yang sama, Proklamasi Kemerdekaan disiarkan ke seluruh dunia oleh para juru warta Indonesia yang bekerja pada Kantor Berita Jepang Domei. Melalui media massa, para wartawan membantu perjuangan dengan membawakan suara rakyat dan Pemerintah Indonesia ke dunia luar; menyampaikan berita-berita perjuangan ke seluruh pelosok tanah air dan mengabadikan detik-detik bersejarah. Tampak pada gambar, bagaimana surat-surat kabar pada waktu itu ikut serta menyebarkan proklamasi kemerdekaan dan UUD. Di antaranya "Soeara Asia" yang terbit di Surabaya, dan "Tjahaja" di Bandung.



Suasana pada pelantikan para anggota KNIP



Dengan bambu runcing di pundak, rakyat Indonesia di Jakarta menyambut kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan



Perjuangan membela kemerdekaan tidak dilakukan oleh kaum pria saja. Bahu-membahu dengan kaum pria, kaum wanita membentuk laskar-laskar dan organisasi perjuangan, seperti Laskar Putri di Solo ini.



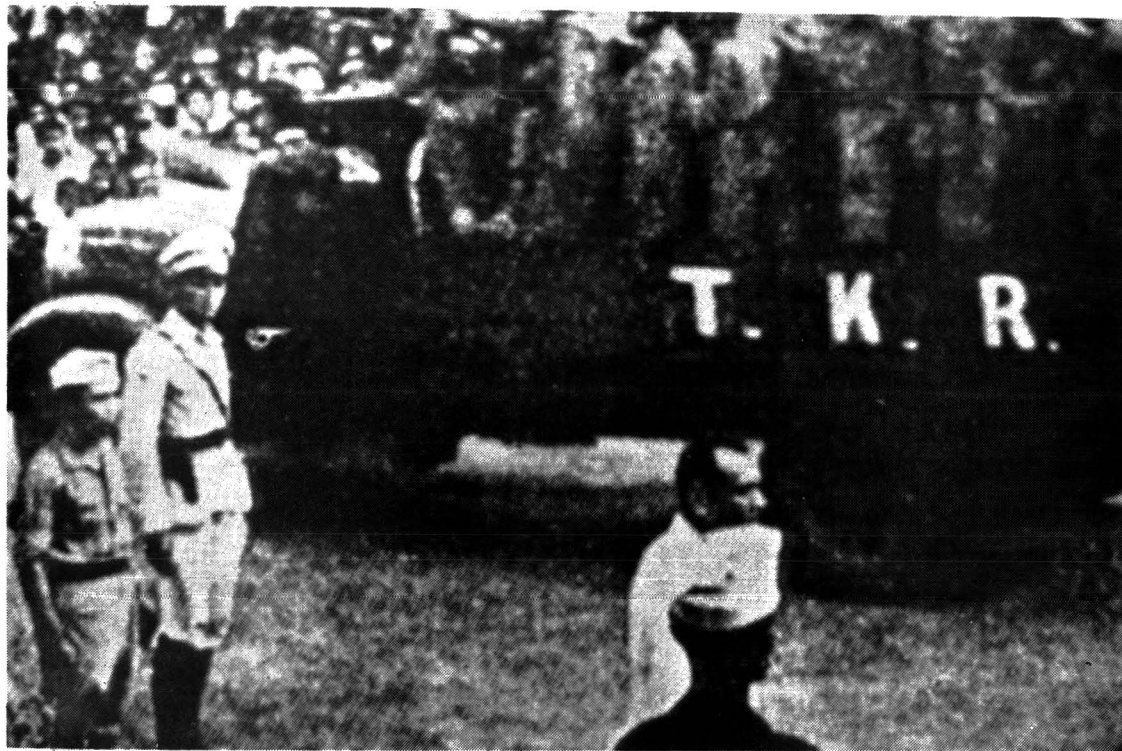
Jenazah para korban pertempuran sewaktu melucuti senjata bala tentara Jepang di Kotabaru, Yogyakarta, pada tahun 1945.



Presiden Soekarno memasuki arena Rapat Raksasa di lapangan Ikada Jakarta, pada 19 September 1945.



"Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Tekad Tetap Merdeka"; demikian bunyi spanduk yang mereka bawa



TKR (Tentara Keamanan Rakyat)



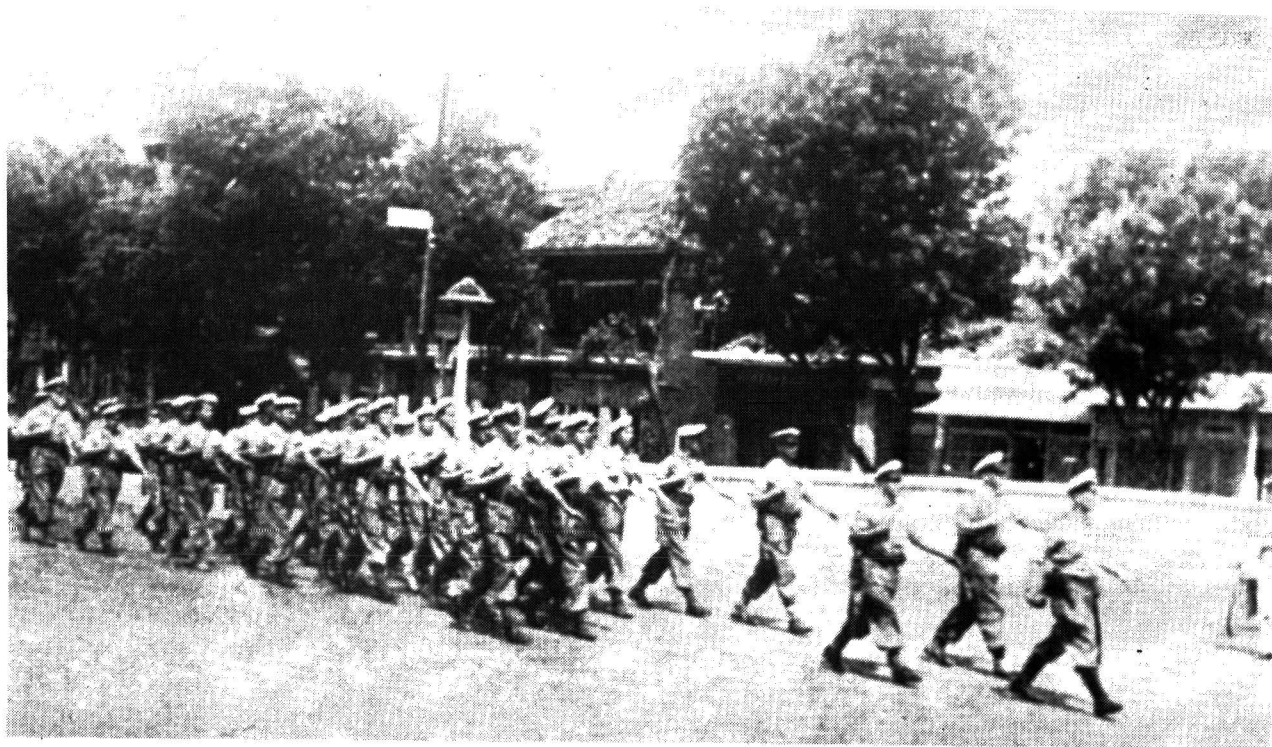
Suasana setelah penghentian tembak-menembak yang disepakati para pemimpin Pemerintah Republik Indonesia dengan tentara Sekutu. Pada gambar tampak Brigadir Jenderal Mallaby dan dr. Soegiri sedang berkeliling kota memberitahukan penghentian tembak-menembak.



Panglima Besar Jenderal Soedirman menyambut upacara peringatan enam bulan Akademi Militer (MA) Yogyakarta di Yogyakarta pada bulan Oktober 1946.



Di seluruh sumatera rakyat bangkit membela dan mempertahankan kemerdekaan. Tampak di sini suatu kesatuan tentara dari Divisi Banteng di Sumatera Tengah.



Marinir Belanda yang mendarat di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945.



Perdana Menteri Sjahrir tampak sedang memeriksa kegiatan pemuatan padi ke kapal Emire Favour di Cirebon yang akan mengangkutnya ke India. Sesuai dengan perjanjian, pengangkutan padi ke India itu dilakukan dengan kapal-kapal yang disediakan oleh Pemerintah India.



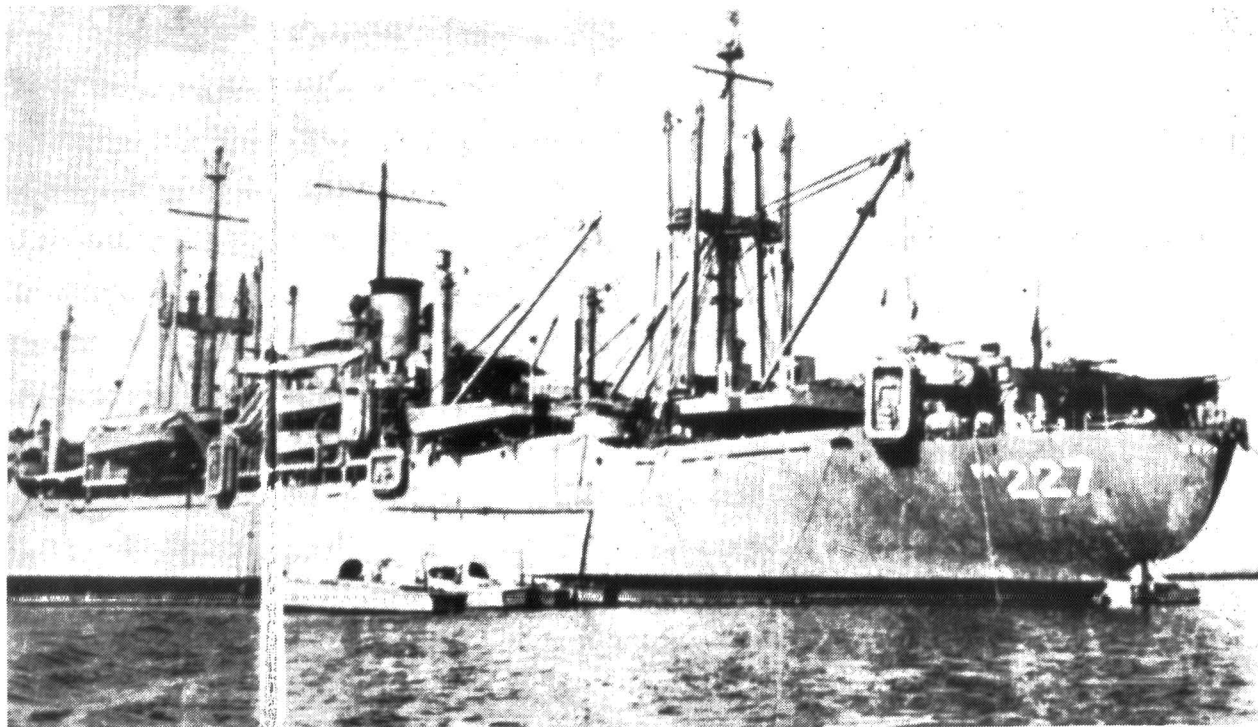
Kesibukan rakyat menukarkan uang Jepang dengan ORI di Kantor Pos Pasar Baru pada 29 Oktober 1946.



Pelantikan Pucuk Pimpinan TNI di Yogyakarta pada 28 Juni 1947. Tampak dalam gambar Jenderal Soedirman sedang dilantik sebagai Panglima Besar TNI.



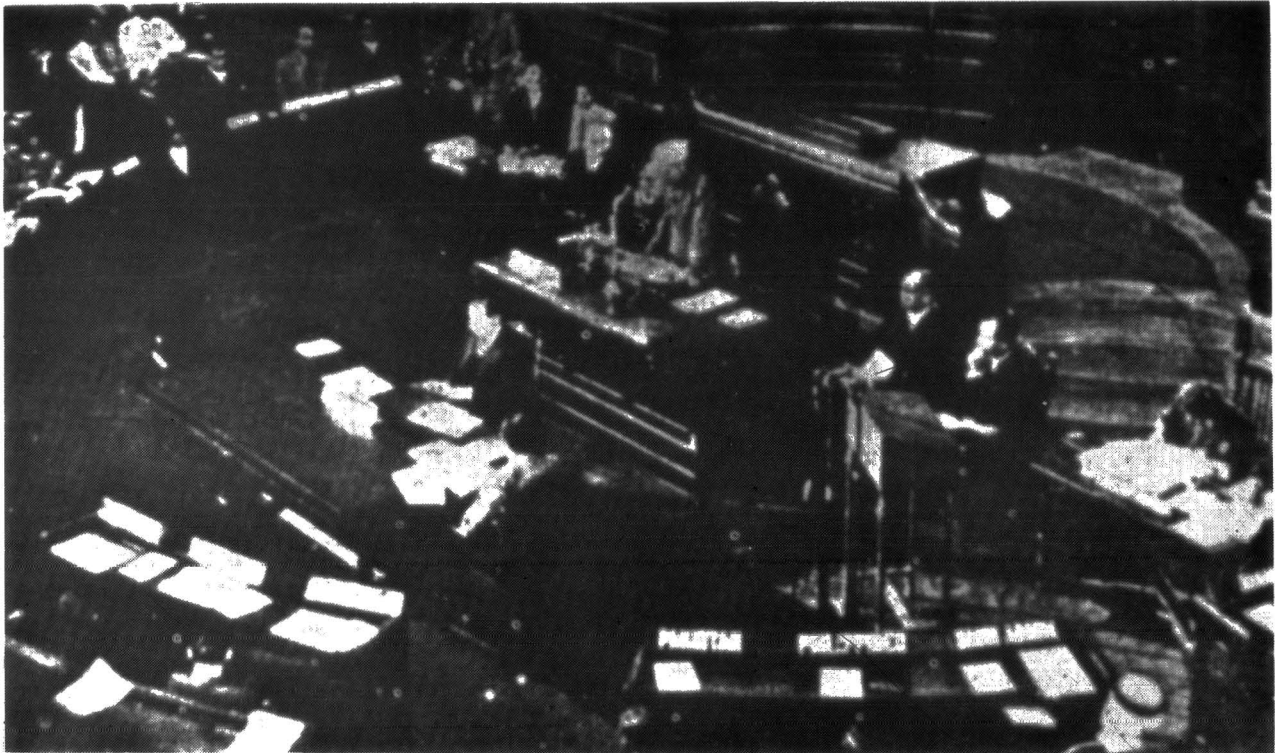
Peninjauan oleh anggota-anggota KTN di daerah Banten



Kapal Perang Angkatan Laut Amerika, USS Renville, yang digunakan sebagai tempat perundingan Indonesia-Belanda yang menghasilkan "Perjanjian Renville"



Setelah Madiun direbut kembali, TNI terus mengadakan pengejaran dan pembersihan di sekitar Madiun dan Gunung Lawu



Suasana Konferensi Asia di New Delhi yang membicarakan masalah Indonesia pada 20 Januari 1949.



Kesatuan TNI yang terdiri atas Brigade 10 Garuda Mataram, Militer Akademi Brigade 16 (KRIS), TP dan TGP yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Wk III, mengadakan perlawanan gerilya di sekitar dan di dalam Kota Yogyakarta antara bulan Desember 1948 hingga Januari 1949. Tampak Letnan Kolonel Soeharto bergambar bersama beberapa anak buahnya..



Saat sebelum tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta menuju Semarang pada 24 Juni 1949



Pimpinan PDRI bergambar bersama sebelum kembali ke Yogyakarta



Operasi penumpasan RMS dilakukan terus dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Tampak dalam gambar ini korban-korban pertempuran pada pihak RMS dan pasukan-pasukan APRIS yang terus maju.



Moh. Natsir tengah disumpah sebagai Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 7 September 1950.



Demonstrasi rakyat menuntut pembubaran Parlemen di halaman Istana pada 17 Oktober 1952.



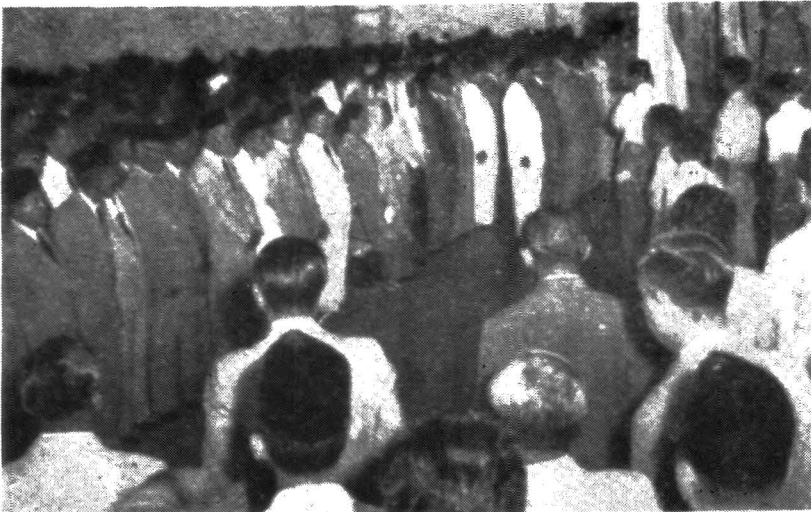
Suasana sidang Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung dari 18 April sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi telah memilih Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo sebagai ketua dan Roeslan Abdulgani sebagai sekretaris jenderal.



Presiden Soekarno sedang memasukkan pilihannya ke kotak suara pada Pemilihan Umum untuk anggota konstituante pada 15 Desember 1945.



Wakil Presiden Mohammad Hatta sedang menunggu giliran untuk memasukkan pilihannya ke kotak suara.



Pelantikan anggota-anggota konstituante di Bandung pada 10 November 1956.



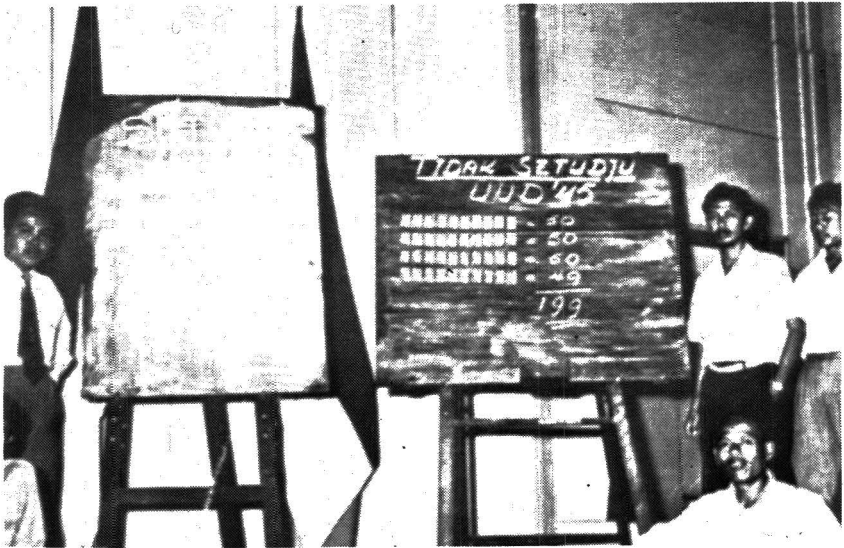
Pelantikan Zainal Abidin Syah, sultan Tidore, sebagai gubernur Irian Barat berkedudukan di Soa Siu, Tidore, pada 23 September 1956.



Suasana pengucapan Pernyataan Bersama dalam musyawarah nasional di Jakarta pada 14 September 1957.



Suasana rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta pada 18 November 1957.



Pemungutan suara pertama untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam sidang Konstituante pada 30 Mei 1959 di Bandung. Sebagian besar menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tetapi tidak mencapai mayoritas dua pertiga dari suara yang masuk



Pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Goong Royong oleh Presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Juni 1960



Upacara pencangkulan Gedung Pola oleh Presiden Soekarno yang menandai dimulainya pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama pada 1 Januari 1961. Gedung bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta tempat Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, telah dirobohkan dan di halaman belakangnya dibangun Gedung Pola tersebut.



Presiden Soekarno sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia dalam KTT non-Blok yang pertama di Beograd. Tampak beliau duduk berdampingan dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India pada bulan September 1961.



Serah terima jabatan Deputy Wilayah (Deyah) Indonesia Timur dari Mayor Jenderal A. Yani kepada Mayor Jenderal Soeharto di lapangan Karebosi, Makassar (Ujungpandang), pada 13 Januari 1962.



Kunjungan singkat Mayor Jenderal Soeharto ke Irian Barat. Setibanya di Lapangan Udara Sentani, Mayor Jenderal Soeharto disambut oleh Panglima Pasukan Keamanan PBB (UNSF) Brigadir Jenderal Said Uddin Khan pada 3 Desember 1962.



Keadaan ekonomi terus merosot. Bahan-bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari serta barang lainnya yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan ekonomi mulai sulit didapat. Harganya pun terus membubung tinggi. Pada gambar ini tampak suasana rakyat di Jakarta yang sedang antri untuk memperoleh kebutuhan pokok.

